

# MIGRASI SPONTAN BATAK TOBA ( MARSERAK )

## Sebab, Motip dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba

Oleh :

**O.H.S. Purba  
Elvis F. Purba**

### Teks Gambar :

1. Pusuk Bukit diyakini sebagai kampung leluhur orang Batak Toba. Dari daerah inilah keturunan Siraja Batak menyebar ke seluruh penjuru.
2. Ketandusan lahan pertanian di sekitar Danau Toba mendorong sebagian orang Batak Toba meninggalkan tanah kelahirannya. Penggundulan hutan di sekitar Danau Toba mengakibatkan keadaan yang kurang kondusif bagi pengembangan pertanian di daerah tersebut. Lahan menjadi tandus dan tidak produktif.
3. Menenun ulos adalah salah satu alternatif untuk menambah penghasilan keluarga. Di daerah-daerah tertentu di Tapanuli Utara, menenun ulos merupakan pekerjaan sampingan, yang dikerjakan pada saat-saat tidak turun ke sawah atau ladang, dan di daerah-daerah yang lain merupakan pekerjaan utama. Generasi muda ini bekerja sebagai penenun ulos untuk membiayai kebutuhannya.
4. Walaupun relatif sangat sempit dan berada di lembah-lembah bukit, lahan tersebut tetap diusahai untuk memenuhi kebutuhan (subsisten) penduduk.
5. Banyak perkampungan di Tapanuli Utara dikelilingi oleh tembok batu atau timbunan tanah dan bambu yang berfungsi sebagai pengaman baik dari serangan musuh maupun terpaan topan/angin. Walaupun ada yang tidak laik huni tetapi masih ditempati oleh orang-orang tua. Perkampungan kurang dipelihara karena yang tinggal adalah para orang tua dan anak-anak yang masih kecil. Banyak juga yang menjadi bera (tarulang) tidak ditempati karena generasi muda tidak ingin tinggal di tanah kelahirannya.
6. Ketandusan lahan pertanian di Pulau Samsir mendorong sebagian orang Batak Toba meninggalkan tanah kelahirannya. Akhirnya banyak lahan yang menjadi bera.

**MIGRASI SPONTAN BATAK TOBA (MARSERAK)  
Sebab, Motip dan Akibat Perpindahan Penduduk  
dari Dataran Tinggi Toba**

Oleh : O.H.S. Purba  
Elvis F. Purba

Perancang Kulit : Elvis F. Purba

Lay Out : Dj. Saragih  
Marthin Simorangkir, SE.

Dicetak oleh : CV. MONORA

Cetakan : I (pertama), Desember 1997

Hak cipta 1997, pada pengarang

Diterbitkan oleh :  
Penerbit MONORA  
Jln. Letjen Jamin Ginting's No. 583  
Telp. (061) 811680-812667 Medan - 20156

Anggota IKAPI Cab. Sumatera Utara

Dilarang keras memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin tertulis dari pengarang.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MIGRASI SPONTAN BATAK TOBA (MARSERAK) Sebab, Motip dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba  
O.H.S. Purba dan Elvis F. Purba, Cet. I, Medan, Monora, 1997  
XV, 180 hal, indeks, 23 cm  
ISBN 979-612-183-2  
I. MIGRASI SPONTAN BATAK TOBA (MARSERAK) Sebab, Motip dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba, I. Judul, II. Purba, Elvis F.

## KATA SAMBUTAN

*Rektor Universitas HKBP Nommensen*

Dengan penuh rasa syukur dan gembira, saya menyambut terbitnya buku dengan judul "Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab, Motip, dan Akibat Perpindahan Penduduk dari Dataran Tinggi Toba" ini. Buku ini adalah satu bagian dari hasil penelitian mengenai perpindahan orang Batak Toba yang merupakan penelitian kerjasama Universitas HKBP Nommensen dengan Universitas Kassel (Jerman) dan didanai oleh Volkswagen Stiftung (REF: II/62). Pada awalnya penelitian lapangan dan penulisan draft pertama dikelola suatu tim tetapi akhirnya oleh dua orang, yaitu Ketua Pelaksana Proyek O.H.S. Purba, MA, MSc. dan Elvis F. Purba, SE dari tim. Walaupun harus menempuh berbagai kendala hampir selama penelitian, ternyata mereka mampu menghasilkan satu produk ilmiah yang layak bagi ilmuan. Untuk itu sudah selayaknya saya sampaikan rasa salut dan pujian saya kepada mereka atas segala jerih payah mereka sehingga hasil penelitian mereka dapat diterbitkan dalam bentuk buku sebagaimana tersaji di tangan pembaca.

Dari judul buku ini jelas bagi kita akan maksud dan ide-ide yang dipaparkan di dalamnya. Sehubungan dengan penyebaran orang Batak Toba yang sudah berlangsung beberapa abad, buku ini berisi gambaran berbagai aspek, terutama sesudah kekristenan di Tapanuli Utara, seperti (a) faktor-faktor dan motip yang menyebabkan perpindahan orang Batak Toba keluar Tapanuli Utara, (b) dampak perpindahan terhadap daerah asal dan tujuan, dan (c) perkiraan jumlah orang Batak Toba yang tinggal di daerah lain. Pada bagian akhir buku ini dikemukakan beberapa butir rekomendasi yang dianggap perlu dalam upaya membangun daerah Tapanuli Utara.

Sebelum diterbitkan menjadi buku, sebagian besar naskah akhir buku ini telah dibahas dalam Seminar Nasional Sehari di Universitas HKBP Nommensen pada tanggal 6 Oktober 1994. Makalah tambahan dalam seminar tersebut seperti dari Alm. Prof. Dr. W. Röhl (Universitas Kassel Jerman), Prof. Dr. Budhisantoso (Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia), Ir. Karnold Pohan (Bappeda Tk. I Sumatera Utara), Drs. T.M.H. Sinaga (Bupati KDH Tk.II Tapanuli Utara), Ir. Bambang Mahmudi A.S (Universitas HKBP Nommensen) dan Ir. Mangonar Lumbantoruan, MS (Universitas HKBP Nommensen) dan beberapa makalah pembandingan seperti dari Prof. Dr. Payung Bangun, MA (IKIP Medan) dan Alm. Dr. Ir. M.B. Sirait, MSc. (USU Medan), turut memperkaya dan menambah wawasan peneliti untuk merampungkan naskah akhir buku ini.

Sebagai hasil penelitian, tentu saja buku ini dapat sebagai rujukan ilmiah bagi para ilmuan, peneliti dan masyarakat umum. Oleh karena itu

saya menghimbau para pembaca untuk dapat menggunakan isi buku ini untuk memperkaya wawasan, menambah informasi ilmiah serta sebagai bahan perbandingan dalam membahas aspek yang berkaitan dalam penelitian suku bangsa lain di negara kita ini.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima-kasih kepada Volkswagen Stiftung, Hannover Jerman yang telah memberi dana penelitian sehingga buku ini dapat wujud. Demikian juga kepada Saudara O.H.S. Purba, MA, MSc dan Elvis F. Purba, SE, keduanya adalah alumni Universitas HKBP Nommensen, yang telah mempersembahkan karyanya demi kemajuan ilmu dan demi nama harum almamaternya serta tetap berbakti bagi Tuhan dan Ibu Pertiwi sesuai motto Universitas ini: "*Pro Deo et Patria*".

Medan, Desember 1997

Rektor,

Firman P.A. Siregar, MASC.

## KATA PENGANTAR

Pdt. Dr. Justin Sihombing, mantan Ephorus HKBP, pernah mengemukakan bahwa orang Batak Toba dapat diibaratkan seperti *jelok*. Jelok adalah sejenis tanaman merambat dan berguna bagi manusia. Biasanya jarak antara pokok dengan buahnya relatif jauh, dengan kata lain buahnya tidak pernah mendekat ke pokok, tetapi cenderung semakin menjauhinya. Apa yang dikemukakan disini tidak lain dari kiasan yang menggambarkan, dalam beberapa hal, tentang pola dan sikap orang Batak Toba yang pindah dari Tapanuli Utara, terutama sejak permulaan abad ini, terhadap kampung halamannya.

Sejak pertemuannya dengan bangsa Barat, terutama dengan missioner Jerman yang bekerja di Tapanuli, orang Batak Toba mengalami kemajuan yang mengagumkan. Pola hidup masyarakat yang sejak semula umumnya berorientasi pada pertanian, kemudian menjadi lebih beraneka, antara pertanian dan jasa-jasa lainnya. Dalam waktu yang relatif singkat, terutama sejak permulaan abad XX, orang Batak Toba menyebar ke berbagai daerah di luar Tapanuli Utara. Ada yang bertani, pekerja kantor dan lain-lain.

Buku ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan dan yang turut mempercepat/mendorong perpindahan orang Batak Toba ke luar Tapanuli Utara. Sebelum diterbitkan menjadi buku dalam bentuknya yang sekarang, terlebih dahulu diseminarkan di Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 6 Oktober 1994. Beberapa makalah tambahan seperti makalah Alm. Prof. Dr. W. Röhl (Universitas Kassel Jerman), Prof. Dr. Budhisantoso (Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia), Ir. Karnold Pohan (Bappeda Tk.I Sumatera Utara), Drs. T.M.H. Sinaga (Bupati KDH Tk.II Tapanuli Utara), Ir. Bambang Mahmudi AS (Universitas HKBP Nommensen), Ir. Mangonar Lumbantoruan, MS (Universitas HKBP Nommensen) dan beberapa makalah perbandingan seperti makalah Prof. Dr. Payung Bangun, MA dan makalah Alm. Dr. Ir. M.B. Sirait, MSc. turut memperkaya dan menambah wawasan dalam merampungkan naskah akhir yang menjadi bagian pertama hasil penelitian.

Dalam buku ini dijelaskan bahwa keputusan memilih pindah, dari pindah sementara atau pindah sirkuler menjadi pindah menetap tidak cukup hanya dilihat dari faktor pendorong dan penarik semata-mata. Nilai-nilai filosofis orang Batak Toba, yakni *hagabeon*, *hamoraon* dan *hasangapon* yang bermuara untuk memperbesar *sahala* turut mewarnai proses perpindahan tersebut.

Kemudian diuraikan juga berbagai dampak dari perpindahan tersebut bagi diri dan keluarga yang pindah, kampung halaman (daerah asal) dan juga terhadap pembangunan regional dan nasional. Selain itu, diupayakan

mengukur volume perpindahan orang Batak Toba dengan mengadakan proyeksi berlandaskan data sensus 1930. Sebagai data pendukung dan pembandingan digunakan data jemaat Kristen seperti HKBP, GKPI, HKI, Katolik, dan Methodist. Pada bagian akhir dikemukakan beberapa butir rekomendasi yang dianggap penting bagi pembangunan daerah Tapanuli Utara.

Selama tahap penulisan draft awal dan laporan hasil penelitian, banyak kendala yang harus dihadapi, yang merupakan kendala tersendiri untuk dapat mempercepat penyelesaian penelitian. Pergantian Pengurus Yayasan dan Pimpinan Universitas HKBP Nommensen turut mempengaruhi pelaksanaan penelitian ini. Demikian juga dengan personil-personil yang menangani proyek penelitian sebagian mengundurkan diri karena berbagai pertimbangan. Dari sekian orang yang namanya tertera sebagai personil penelitian, akhirnya hanya tinggal dua orang. Alangkah tidak mudahnya merampungkan draft-draft awal hasil penelitian ini. Acap kali harus diperiksa kembali data mentah, mengadakan wawancara dengan informan, memeriksa naskah tertulis lainnya, konsultasi dengan ahli dan lain-lain. Tetapi apapun kendalanya, hasil penelitian ternyata terwujud juga sebagaimana adanya buku ini.

Sampai tulisan ini selesai, banyak pihak yang ikut secara langsung, terutama selama tahap penelitian lapangan dan penulisan draft awal hasil penelitian. Mereka yang dimaksud adalah Drs. F.T. Rajagukguk, Drs. Sabam Simbolon, Dra. Yessi Purba, Drs. Ridhon Simangunsong, Ir. Binnen S. Sumbayak, Drs. Posman Wesley Hasibuan, Drs. Charles Naibaho, Drs. Charles Sianturi, Drs. Pinondang Nainggolan, Djongga Manalu, BA., Marudut Manalu, Listen Siregar, dan Parpunguan Gultom. Untuk peran serta mereka, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Perhatian yang sangat mendalam mengenai materi tulisan bersumber dari Alm. Prof. Dr. Werner Röhl, dari Universitas Kassel-Jerman. Sebagai konsultan sesewaktu, beliau telah beberapa kali membaca naskah hasil penelitian selama dalam tahap perbaikan dan penyempurnaan isi. Pada bulan Maret sampai April 1995, waktu terakhir beliau berkunjung ke Medan dan Universitas HKBP Nommensen, beliau menyarankan agar hasil penelitian disajikan dalam dua buku. Mengikuti saran beliau, ternyata menyita waktu kurang lebih dua tahun untuk menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan isi, terutama bagian kedua sehingga penerbitan buku ini menjadi lebih lama. Atas saran, kritik, dan perhatian beliau, kami ucapkan terimakasih.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga kami sampai kepada Volkswagen Stiftung-Hannover, Jerman, atas bantuan dana penelitian dengan REF: II/62. Demikian pula kepada Rektor Universitas HKBP Nommensen yang bersedia memberikan kata sambutan dalam buku ini dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini, juga tidak lupa kami ucapkan terimakasih. Upaya Saudari Elisabeth Purba yang mengetik dan

menyunting naskah beberapa kali karena perbaikan isi, kami ucapkan banyak terimakasih. Ucapan terimakasih, juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian naskah buku ini hingga naik ke percetakan.

Akhir kata, kiranya tulisan ini bukan hanya menambah kepustakaan dalam khazanah ke-Batak-an, tetapi juga memberi manfaat dalam rangka *nation building*.

Medan, Desember 1997

O.H.S. Purba  
Elvis F. Purba

viii	DAFTAR ISI
x	Medan, Desember 1997
xiii	DAFTAR PETA
xv	DAFTAR GAMBAR
1	BAB I : PENDAHULUAN
1	1.1. Latar Belakang Penelitian
4	1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
6	1.3. Sistematika Penelitian
9	BAB II : METODOLOGI PENELITIAN
9	2.1. Lokasi Penelitian
11	2.2. Sampel Penelitian
12	2.3. Pengumpulan Data
14	2.4. Pengolahan dan Analisis Data
15	BAB III : TINJAUAN PENYEBARAN SUKU BANGSA BATAK
15	3.1. Tinjauan Sejarah Batak
16	3.2. Marga dan Sistem Kekerabatan
18	3.3. Hukum Tanah dan Pendidikan Kampung (Huta)
21	3.4. Masyarakat : Persebaran Batak Toba
27	BAB IV : PERPINDAHAN PENDUDUK DARI DATARAN TINGGI TOBA : MOTIF DAN FAKTOR PENYEBAB
29	4.1. Faktor Fisik Geografis, Iklim/Musim dan Kesuburan Tanah
32	4.2. Faktor Sosial dan Demografi
62	4.3. Faktor Pendidikan
72	4.4. Faktor Politik
82	4.5. Faktor Ekonomi

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR PETA	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.3. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II : METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>9</b>
2.1. Lokasi Penelitian	9
2.2. Sampel Penelitian	11
2.3. Pengumpulan Data	12
2.4. Pengolahan dan Analisis Data	14
<b>BAB III : TINJAUAN PENYEBARAN SUKU BANGSA BATAK</b>	<b>15</b>
3.1. Tinjauan Sejarah Batak	15
3.2. Marga dan Sistem Kekerabatan	16
3.3. Hukum Tanah dan Pendirian Kampung ( <i>Huta</i> )	18
3.4. Marsarak : Persebaran Batak Toba	21
<b>BAB IV : PERPINDAHAN PENDUDUK DARI DATARAN TINGGI TOBA : MOTIP DAN FAKTOR PENYEBAB</b>	<b>27</b>
4.1. Faktor Fisik Geografis, Iklim/Musim dan Kesuburan Tanah	29
4.2. Faktor Sosial dan Demografi	52
4.3. Faktor Pendidikan	65
4.4. Faktor Politik	75
4.5. Faktor Ekonomi	82

4.6	Pembukaan Jaringan Jalan	91
<b>BAB V : DAMPAK PERPINDAHAN PENDUDUK</b>		
	BATAK TOBA	95
5.1.	Dampak Terhadap Keluarga Sendiri	96
5.2.	Dampak Terhadap Daerah Asal	102
5.3.	Dampak Terhadap Pembangunan Nasional	120
<b>BAB VI : PERKIRAAN JUMLAH ORANG BATAK TOBA</b>		
	DI LUAR TAPANULI UTARA	125
6.1.	Keadaan Sampai Tahun 1930	125
6.2.	Keadaan Sesudah Tahun 1930	126
6.3.	Beberapa Perbandingan dan Estimasi	128
6.4.	Data Jemaat Kristen Protestan Sebagai Bahan Bandingan	134
<b>BAB VII : RANGKUMAN DAN KESIMPULAN</b>		
6.1.	Rangkuman	137
6.2.	Kesimpulan	143
<b>REKOMENDASI</b>		
DAFTAR PUSTAKA		145
DAFTAR KATA-KATA BAHASA BATAK		163
DAFTAR SINGKATAN		171
INDEKS :	NAMA ORANG	173
	NAMA TEMPAT	175
	POKOK-POKOK	176
		178
		145
		163
		171
		173
		175
		176
		178
		145
		163
		171
		173
		175
		176
		178
		145
		163
		171
		173
		175
		176
		178
		145
		163
		171
		173
		175
		176
		178

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1.	Ketinggian dan Tofografi Kabupaten Tapanuli Utara	31
4.2.	Penggunaan Lahan Berdasarkan Tofografi dan Ketinggian	32
4.3.	Ciri Jenis Tanah dalam Berbagai Regio di Tapanuli Utara	39
4.4.	Data Curah Hujan dari Beberapa Tempat di Tapanuli Utara	46
4.5.	Penggunaan Lahan di Tapanuli Utara, 1969/72 ; 1991	49
4.6.	Penduduk Daerah Tapanuli, 1920	55
4.7.	Orang Batak Toba di Simalungun, Dairi dan Tanah Alas, 1930	56
4.8.	Orang Batak Toba di Keresidenan Tapanuli, Sumatera Timur dan Tanah Alas, 1930	57
4.9.	Kedudukan Responden dalam Keluarga	60
4.10.	Responden Penerima Panjajaan di Tempat Tinggal Semula	60
4.11.	Rumah Tangga Petani Menurut Luas Pengusahaan Lahan di Tapanuli Utara, 1980	62
4.12.	Rumah Tangga Petani Menurut Luas Pemilikan Sawah di Kecamatan Laguboti, Silaen, Pangururan dan Simanindo, 1985	63
4.13.	Rata-rata Luas Lahan yang Diusahai di Kecamatan Simanindo, Doloksanggul, dan Lintongnihuta, 1989	63

4.14.	Jenis-Jenis Sekolah yang Diselenggarakan RMG	67
4.15.	Sekolah Dasar di Sumatera dan Sekolah Swasta Pribumi	68
4.16.	Perbandingan Sekolah Dasar dan Murid Bumiputera di Keresidenan Tapanuli	69
4.17.	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Tapanuli Utara, 1978, 1984 dan 1992	74
4.18.	Alasan Pindah (Faktor Pendorong) dari Daerah Asal, 1989	87
4.19.	Alasan Pindah (Faktor Penarik) dari Daerah Tujuan (Daerah Pertanian), 1989	89
4.20.	Alasan Pindah (Faktor Penarik) ke Kota (Medan), 1989	89
5.1.	Produksi Padi Sawah per Rante di Daerah Asal dan Daerah Tujuan Menurut Responden, 1989	96
5.2.	Keadaan Ekonomi Responden di Tempat Tinggal Sekarang Dibandingkan dengan di Daerah Asal, 1989	97
5.3.	Keadaan Ekonomi Responden Dibandingkan dengan Orang Tua Mereka di Daerah Asal, 1989	98
5.4.	Distribusi Anak Responden yang Tinggal di Luar Tapanuli Utara Menurut Pekerjaannya, 1989	100
5.5.	Distribusi Saudara Istri Responden yang Tinggal di Luar Tapanuli Utara Menurut Pekerjaannya, 1989	100
5.6.	Distribusi Saudara Suami, Istri dan Anak Responden Menurut Tempat Tinggal Sekarang, 1989	103
5.7.	Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan, 1989	110
5.8.	Bekas Perkampungan dan Rumah yang Sudah Kosong di Desa Penelitian Kecamatan Simanindo, 1989	114

5.9.	Jumlah Sekolah HKBP di Beberapa Daerah Sumatera Utara, 1958	122
6.1.	Jumlah, Pertumbuhan dan Pertambahan Penduduk Propinsi Sumatera Utara Menurut Daerah Tingkat II, 1930, 1961, 1971, 1980 dan 1990	129
6.2.	Jumlah, Pertumbuhan dan Pertambahan Penduduk Tapanuli Utara Menurut Kecamatan, 1930, 1961, 1971, 1980 dan 1990	130
6.3.	Estimasi Penduduk Tapanuli Utara dan Jumlah Orang Batak Toba, 1961	131
6.4.	Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Wilayah	132
6.5.	Estimasi Proyeksi Jumlah Orang Batak Toba dan Penduduk Tapanuli Utara, 1971, 1980 dan 1990	133
6.6.	Estimasi Besarnya Jumlah Penduduk yang Pindah dari Tapanuli Utara 1930-1961, 1961-1971, 1971-1980 dan 1980-1990	134
6.7.	Jumlah Orang Batak Toba Anggota Jemaat Kristen di Luar Tapanuli Utara, 1992/1993	136

## DAFTAR PETA

Peta	Halaman
1. Afdeling Bataklanden, 1936	28
2. Tapanuli Utara : Ketinggian dari Permukaan Laut	30
3. Tapanuli Utara : Kemiringan Lahan 0-15% Menurut Kecamatan (%)	33
4. Tapanuli Utara : Kemiringan Lahan 15%-40% Menurut Kecamatan (%)	34
5. Peta Administrasi Kabupaten Tapanuli Utara	35
6. Tapanuli Utara : Kemiringan Lahan > 40% Menurut Kecamatan (%)	36
7. Tapanuli Utara : Ciri Jenis Tanah dalam Berbagai Regio	38
8. Tapanuli Utara : Pola Curah Hujan Sebelum Perang Dunia II	45
9. Afdeling Bataklanden : Peta Hutan Sekitar Tahun 1936	48
10. Tapanuli Utara : Luas Areal Sawah Menurut Kecamatan, 1976 (Sebagai % dari Luas Areal Pertanian Seluruhnya)	50
11. Tapanuli Utara : Pola Penggunaan Tanah, 1986	51
12. Tapanuli Utara : Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata per Tahun Menurut Kecamatan, 1930-1961 (%)	54
13. Tapanuli Utara : Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata per Tahun Menurut Kecamatan, 1961-1971	58

14. Tapanuli Utara : Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata per Tahun Menurut Kecamatan, 1971-1980 (%)	61
15. Tapanuli Utara : Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata per Tahun Menurut Kecamatan, 1980-1990 (%)	64
16. Pemukiman Orang Batak Toba di Kampung Rawang, Asahan, 1950-1955	88
17. Danau Toba dan Sekitarnya, 1937	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Puluhan Hektar Sawah di Kawasan Laguboti dan Silaen Mengalami Kekeringan Akibat Kemarau	37
2. Seruan 120.000 Rakyat Samosir	41
3. Persawahan di Silindung, 1914	42
4. Lembah dan Kaki Bukit menjadi Areal Pertanian di Samosir, 1989	44
5. Rumah Sakit Zending di Tarutung, 1910	53
6. Kompleks Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar	66
7. Rakyat Ramai-ramai Menjaga Traktor di Km 2,5 Tanjung Morawa, 1953	80
8. Sebuah Kampung di Pinggir Danau Toba, 1865	84
9. Contoh Pertanian Lahan Kering di Samosir	106
10. Tanah Gersang di Samosir, 1989	107
11. Bukit Gundul di Sekitar Danau Toba, 1989	108
12. Salah Satu Bekas Perkampungan di Samosir, 1989	113
13. Salah Satu Tugu Keturunan Marga Purba di Daerah Humbang	117
14. Hamparan Persawahan Diantara Bukit di Samosir, 1989	138
15. Panorama Danau Toba Dilihat dari Huta Ginjang, Muara	153
16. Jalan Bakara - Muara Dalam Tahap Pembangunan, 1980	154
17. Gereja di Aek Sarulla, Lembah Pangaloan, 1890	157

dan rajanya dipilih sendiri oleh rakyatnya. Di atas kerajaan-kerajaan kecil-kecil ada Raja Siangmangaraja sebagai pengikat yang merupakan kepala kerohanian dan kedunawian. Selain sebagai tali pengikat, Siangmangaraja merupakan lambang persatuan, dan dipuja sebagai dewa (Siahaan, 1964 : 23). Masyarakat hidup dalam rasa kekeluargaan dan untuk melakukan sesuatu dilaksanakan melalui musyawarah. Rasa kekeluargaan dalam suatu kampung tumbuh dengan erat, solidaritas terpujuk terus dan silsilah dapat dilihara dengan baik.

Dalam kepustakaan tentang suku bangsa dan daerah Batak, William Marsden yang berkunjung ke Sumatera pada tahun 1783, merupakan orang pertama yang menulis perihal Batak dalam bukunya *History of Sumatera* (1811). Buku ini ditulis setelah menjelajahi bagian-bagian pulau Sumatera selama 14 tahun. Cerita mengenai Batak Toba yang dirasakan dalam buku tersebut bersumber dari bahan yang diperolehnya dari orang-orang yang menjadi nara sumber, yang terdiri dari penduduk, pejabat atau pegawai dan staf perusahaan perkapalan dan perdagangan yang berurusan di sekitar Teluk Barus dan Padang.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Salah satu tulisan yang sangat informatif dalam kaitan dengan Tanah Batak walaupun terbatas untuk daerah Tapanuli sekitar Sibolga, Sibundaga dan sebagian Hutaung adalah hasil kunjungan ini ditulis dengan judul "Report of Journey into the Batak Country in the Interior of Sumatra" (Siahaan, 1964 : 23).

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut sejarah, kakek moyang suku bangsa Batak pada mulanya berdiam di sekitar danau Toba. Perkampungan leluhur mereka (Siraja Batak) adalah Sianjur Mula-Mula, di kaki gunung Pusuk Buhit (Hutagalung, 1926; Ypes, 1932; Vergouwen, 1964), tidak berapa jauh dari kota Pangururan sekarang. Dari tempat inilah keturunannya menyebar, mula-mula ke daerah sekitarnya dan lambat laun ke seluruh penjuru Tanah Batak. Joustra (1926 : 5) menyebutkan bahwa **Tanah Batak** (de Bataklanden) tersebut berada di antara 0,5°-3,5° Lintang Utara dan 97,5°-100° Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 50.000 km<sup>2</sup>. Selama beberapa abad lamanya, pergaulan mereka dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas, sehingga baru kemudian hari terdapat keanekaragaman dalam suku bangsa tersebut.

Masuknya pengaruh dunia luar terhadap masyarakat dan adat istiadat suku bangsa Batak antara lain melalui perdagangan. Bandar Barus sebagai pelabuhan ekspor kapur barus dan kemenyan menjadi terkenal di dunia sampai ke Eropah. Melalui Barus inilah kebudayaan asing mulai mempengaruhi kebudayaan Batak (Siahaan, 1964 : 23). Selain dari Barus ada juga yang datang dari sebelah Selatan Tapanuli dan Pantai Timur Sumatera (Siahaan/Pardede, t.t.: 5). Pada waktu itu orang Batak masih menganut agama suku dan sistem pemerintahannya bersifat 'kerajaan' yang demokratis. Setiap kampung (*huta*) merupakan 'kerajaan' kecil yang berdiri sendiri

dan rajanya dipilih sendiri oleh rakyatnya. Di atas kerajaan-kerajaan kecil ada Raja Sisingamangaraja sebagai pengikat yang merupakan kepala kerohanian dan keduniawian. Selain sebagai tali pengikat, Sisingamangaraja merupakan lambang persatuan, dan dipuja sebagai dewa (Siahaan, 1964 : 23). Masyarakat hidup dalam rasa kekeluargaan dan untuk melakukan sesuatu dilaksanakan melalui musyawarah. Rasa kekeluargaan dalam satu kampung tumbuh dengan erat, solidaritas terpupuk terus dan silsilah dapat dipelihara dengan baik.

Dalam kepustakaan tentang suku bangsa dan daerah Batak, William Marsden yang berkunjung ke Sumatera pada tahun 1783, merupakan orang pertama yang menulis perihal Batak dalam bukunya *History of Sumatera* (1811). Buku itu ditulis setelah menjelajahi bagian-bagian pulau Sumatera selama 14 tahun. Cerita mengenai Batak Toba yang dinarasikan dalam buku tersebut bersumber dari bahan yang diperolehnya dari orang-orang yang menjadi nara sumber, yang terdiri dari penduduk, pejabat atau pegawai dan staf perusahaan perkapalan dan perdagangan yang berada di Pantai Barat, terutama di sekitar Teluk Sibolga, Barus dan Padang.

Salah satu tulisan yang sangat informatif dalam kaitan dengan Tanah Batak walaupun terbatas untuk daerah Tapanuli sekitar Sibolga, Silindung dan sebagian Hurlang adalah hasil kunjungan Burton dan Ward (1824). Laporan hasil kunjungan itu ditulis dengan tajuk "Report of Journey into the Batak Country in the Interior of Sumatra, in the Year 1824" dalam *Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, yang terbit di London tahun 1827. Laporan tersebut memuat gambaran, ciri-ciri dan keadaan kehidupan sosial, keramahan dan keterbukaan masyarakat (orang) Batak. Di samping itu perihal adat istiadat, agama dan tata kehidupan serta kepadatan penduduk di daerah tersebut.

Informasi sosial ekonomi dan tata ruang masyarakat Batak dimuat dalam karya seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman, Franz Junghuhn, berjudul *Die Battaländer auf Sumatra* (1842). Dalam buku itu disajikan peta wilayah yang merupakan daerah tempat tinggal orang Batak, seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipirok-Silindung, Pangaribuan, Sipahutar, Sigotom, daerah Bila dan Kualuh (daerah Asahan-Labuhan Batu). Peta yang digambarkan adalah pemetaan daerah sebelum adanya pembagian wilayah menurut tata administrasi pemerintahan kolonial Belanda, yang praktis baru diadakan sesudah sekitar 1900 untuk Tapanuli.

Karya Junghuhn dan laporan-laporan Neubronner van der Tuuk (yang diutus Belanda ke Sumatera Utara pada tahun 1849) memperkaya khazanah mengenai suku bangsa Batak, terutama bagi bangsa Belanda dan Jerman di daratan Eropah. Karya mereka berdua menjadi bahan-bahan yang dengan seksama dipelajari oleh pihak Belanda dan Jerman dalam rangka usaha mereka untuk menyebarkan Injil di Tanah Batak beberapa tahun kemudian

(Sijabat, 1982).

Perjumpaan dengan agama Kristen dan peradaban Barat membawa berbagai kemajuan bagi penduduk daerah Tanah Batak bagian Utara. Kedatangan missioner Jerman ke Tanah Batak menjadi suatu berkat bagi orang Batak umumnya dan Batak Toba khususnya. Dr. I.L. Nommensen yang diutus oleh Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) mempunyai peranan sentral terhadap perkembangan sosial suku bangsa Batak. Nommensen memulai pekerjaannya dari luar daerah Tapanuli Utara, kemudian memilih Rura Silindung sebagai basisnya, pada saat mana Sisingamangaraja XI yang bermarkas di Bakara menjadi raja dan lambang persatuan di Tanah Batak. Dalam perjalanannya dari Bungabondar ke Silindung, Nommensen beristirahat di daerah antara Pansurnapitu dan Lumbanbaringin. Beliau tertegun melihat Rura Silindung yang indah permai itu, daerahnya cukup luas dengan persawahan yang terbentang hingga ke Sipoholon. Di daerah itu juga sudah dilihat banyak kampung. Di masa istirahat tersebut, Nommensen berdoa : *"Mangolu manang mate pe ahu, sandok di tonga-tonga ni bangso on ma ahu maringanan, laho pararathon Hatam dohot harajaonMi ! Amen"* (Sihombing, 1961 : 21). Artinya : Sisa hidupnya akan digunakan untuk memberitahukan kerajaan dan berita keselamatan dari Allah bagi orang Batak.

Bagi suku bangsa Batak Toba, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dan merupakan sumber pencaharian utama. Demikian pula adat-istiadat berhubungan erat dengan tanah dan usaha pertanian tersebut.

Sejak pertengahan abad ke XIX tekanan penduduk terhadap lahan pertanian sudah mulai terasa. Berkat usaha-usaha zending di bidang kesehatan menyebabkan angka kematian menurun dan angka kelahiran naik. Kampung halaman Batak Toba semakin sesak akibat pertambahan penduduknya yang cepat. Awal abad XX para petani Batak Toba yang datang dari Tapanuli sudah dijumpai di daerah Simalungun, Dairi dan daerah-daerah pemukiman potensial lainnya di Sumatera Utara. Hampir bersamaan dengan itu kaum terdidik keluar dari kampung halamannya untuk memperoleh pekerjaan di instansi pemerintahan kolonial, perkebunan Barat, pertambangan, rumah sakit, bank, sekolah dan lain-lain. Tahun demi tahun semakin banyak yang tinggal di luar daerah Tapanuli Utara. Berdasarkan sensus 1930, terdapat 107.995 jiwa tinggal di Barus, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Sibolga, yang tergolong wilayah keresidenan Tapanuli. Pada tahun yang sama sebanyak 74.224 jiwa di Sumatera Timur dan 1.789 jiwa di Tanah Alas (Volkstelling 1930 : 30-31, 35).

Tahun-tahun berikutnya perpindahan itu terus berlangsung. Data sensus 1961, 1971, 1980 dan 1990 menunjukkan bahwa peringkat (rank) kampung halaman Batak Toba, Tapanuli Utara, berdasarkan jumlah penduduknya terus melorot dan laju pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan

terus menerus, jauh di bawah rata-rata Sumatera Utara atau Indonesia. Keadaan ini menggambarkan betapa besarnya arus perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara, sehingga berpengaruh terhadap proses pembangunan di daerah tersebut.

Kepadatan dan kecepatan pertumbuhan penduduk di satu pihak dan potensi sumber-sumber daya yang tersedia di pihak lain, merupakan pusat perhatian dalam strategi pembangunan regional maupun nasional. Perkembangan yang tidak seimbang dan diversifikasi pembangunan antara daerah dapat menyebabkan perpindahan penduduk dan perubahan arahnya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah baik di daerah yang ditinggalkan maupun daerah yang dituju. Daya tarik kota, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, wiraswasta dan penawaran jasa lainnya, sebagai bagian dari proses modernisasi, antara lain merupakan komponen yang dapat memperbesar arus perpindahan itu, baik untuk tujuan sementara, menetap atau mungkin perpindahan sirkuler.

Adalah merupakan kenyataan sejarah, bahwa beberapa dasawarsa terakhir ini suku bangsa Batak Toba telah menyebar luas ke berbagai daerah dan hampir di seluruh Nusantara. Ada yang tetap bertani dan banyak juga yang bekerja di luar pertanian. Mereka tinggal di kota-kota besar, kota kabupaten dan kecamatan serta di pedesaan di berbagai sudut wilayah Republik Indonesia termasuk ke beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

## 1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejak pertengahan abad XX berbagai penelitian mengenai suku bangsa Batak Toba sudah dilakukan sarjana-sarjana Barat. Beberapa karya yang membahas dan ada hubungannya dengan perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara terbatas pada karya C.E. Cunningham dan E.M. Bruner, keduanya berkebangsaan Amerika. Setelah beberapa bulan tinggal di daerah Tapanuli dan Sumatera Timur untuk penelitian lapangan bersama K.J. Pelzer, Cunningham yang pada waktu itu berstatus mahasiswa di Universitas Yale dan menjadi asisten Pelzer mengumpulkan data mengenai Batak Toba dan menyusun karya yang menjadi disertasi dengan tajuk *The Postwar Migration of the Toba Bataks to East Sumatra* (1958). Buku ini merupakan salah satu sumber utama mengenai perpindahan orang Batak Toba sejak pasca kedaulatan dan bahkan sering dikutip oleh penulis lain. Di bawah pengawasan Karl J. Pelzer, Cunningham telah berusaha mendapatkan berbagai data dan informasi mengenai kapan dan berapa banyak orang Batak Toba meninggalkan kampung halamannya. Akan tetapi masih ditemui kelemahan karena kurang memperhatikan lebih jauh tentang daerah penyebaran dan

masa perpindahan mereka.

Disamping karya Cunningham, Bruner yang pernah beberapa lama tinggal di Tapanuli untuk mengumpulkan data lapangan, telah menerbitkan karyanya beberapa kali dalam bentuk artikel. Salah satu diantaranya diterbitkan tahun 1961 dalam majalah *American Anthropologist* (Vol. 63, No. 3 1961 : 508-521) bertajuk "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra". Apa yang disimpulkan dari tulisan ini adalah ketegaran mereka tetap mempertahankan adat istiadatnya walaupun telah pindah dari kampung halamannya. Kemudian disusul artikel lainnya, "Medan : The Role of Kinship in an Indonesian City" yang diterbitkan dalam *Pacific Towns and Cities* di Honolulu/Hawaii dalam tahun 1963. Dari karya ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dorongan bagi kaum terdidik Batak Toba meninggalkan kampungnya adalah untuk menghindari kemiskinan serta untuk meningkatkan kesejahteraannya. Munculnya perkumpulan kekerabatan baru yang tidak dijumpai di kampung halamannya, seperti kumpulan marga, merupakan sesuatu yang baru dan diadaptasikan sesuai dengan situasi kehidupan mereka di kota.

Selain kedua artikel itu masih ada artikel lainnya seperti "Batak Ethnic Association in Three Indonesian Cities" dalam *Southwestern Journal of Anthropology*, (Vol. 28, No.3, 1972 : 207-229). Artikel ini membicarakan perbandingan antara struktur perkumpulan kesukuan masyarakat Batak Toba di tiga kota di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta dan Bandung. Berlainan dengan di Medan dan Jakarta, Bruner menemukan bahwa orang Batak Toba yang tinggal di Bandung menyerap kebudayaan Sunda, sehingga sifatnya lebih harmonis dan sifat ke-Batak-annya lebih 'halus' dibandingkan dengan apa yang dijumpai di Medan dan Jakarta.

Salah satu karya terbaru yang ada hubungannya dengan perpindahan penduduk, walaupun tidak secara langsung menyangkut orang Batak Toba adalah karya Usman Pelly, seorang pakar di bidang antropologi. Pokok pembahasannya adalah masalah adaptasi penduduk Minangkabau dan Batak Mandailing yang pindah ke kota Medan. Dalam karya disertasinya yang bertajuk : *Urban Migration and Adaptation in Indonesia : A Case Study of Minangkabau and Mandailing Batak Migrants in Medan, North Sumatra*, Pelly menyimpulkan bahwa misi budaya (cultural mission) dari satu suku bangsalah yang menentukan dan mengarahkan mereka beradaptasi dengan lingkungan dan merangsang mereka meninggalkan kampung halamannya. Lebih lanjut disebutkan bahwa faktor-faktor budaya secara selektif menentukan apakah seseorang memutuskan pindah atau tidak dari kampung halamannya.

Hasil karya kedua orang yang disebut pertama telah memberikan sumbangan dan memperbanyak kepustakaan tentang suku bangsa Batak Toba. Karya Cunningham mengandung banyak kelemahan dalam pendekatan

metode penelitiannya dan karya Bruner yang bersifat parsial akan dilengkapi dengan terbitnya karya ini. Pembahasan dan uraian kali ini lebih terfokus pada faktor penyebab dan yang memotivasi perpindahan tersebut. Kemudian akan diuraikan juga berbagai dampak dari perpindahan, baik untuk daerah asal maupun daerah tujuan.

Selain menambah khazanah tentang suku bangsa Batak Toba, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan sebagai masukan untuk merumuskan program pembangunan pedesaan dan regional, khususnya bagi daerah Tapanuli Utara. Di samping itu, karya ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam teori migrasi dan perencanaan pembangunan.

### 1.3. Sistematika Penulisan

Mengingat ruang lingkup Dataran Tinggi Toba cukup luas, maka pembahasan dibatasi pada Tapanuli Utara yang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah Dataran Tinggi Toba. Daerah Tapanuli Utara sekarang adalah pusat Negeri Batak (*Tano Batak*) dan merupakan asal-usul suku bangsa Batak. Berhubungan dengan berbagai kemajuan dan perubahan yang terjadi sesudah abad XIX, yaitu masuknya zending Jerman ke Tanah Batak, uraian dan pembahasan difokuskan sejak tahun 1900 sampai sekarang. Salah satu diantaranya adalah yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini, yaitu perpindahan penduduk.

Semula hasil penelitian direncanakan disajikan dalam satu bagian yang utuh namun belakangan dipisah menjadi 2 bagian. Pemisahan itu tidak akan mengurangi arti dan tujuan penelitian karena satu dengan yang lain dianggap dapat 'berdiri sendiri'. Buku pertama lebih terfokus kepada faktor penyebab dan yang memotivasi perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara ke daerah lain dan dampak perpindahan tersebut bagi daerah yang ditinggalkan maupun daerah yang dituju. Buku kedua berisi perspektif sejarah perpindahan orang-orang Batak Toba ke berbagai daerah di wilayah Nusantara, yang penyajiannya dimulai pada masa kolonial Belanda. Walaupun dianggap dapat berdiri sendiri, kedua-duanya dapat saling melengkapi.

Buku pertama dibagi menjadi 7 bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Bab kedua memuat metodologi penelitian. Dalam bab ini dibicarakan antara lain tempat penelitian, pengambilan sampel penelitian dan analisis data. Sedangkan bab ketiga berisi tinjauan sejarah penyebaran orang Batak termasuk didalamnya pengertian 'Marsarak' sebagai konsep perpindahan penduduk dari kampung halaman 'yang asli'.

Bab berikutnya berisi faktor-faktor yang memotivasi dan menyebabkan perpindahan penduduk dari Dataran Tinggi Toba. Faktor pendorong dan faktor penarik merupakan titik perhatian untuk menerangkan sebab perpindahan penduduk dari satu ke lain daerah. Dalam kajian ini titik perhatian utama adalah faktor pendorong dari Tapanuli Utara sedangkan faktor penarik merupakan pelengkapannya. Dalam bab ini akan lebih jelas bahwa faktor 'push' dan 'pull' tidak sepenuhnya dapat menerangkan mengapa orang Batak Toba meninggalkan kampung halamannya. Nilai-nilai filosofis Batak Toba yang terkandung dalam 3H (*Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon*) atau 4H (*Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon, Hasahalaon*) akan melengkapi uraian mengenai faktor-faktor tersebut.

Bab kelima mencakup dampak perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara. Dalam bab ini akan lebih jelas apa dampak perpindahan itu bagi keluarga yang pindah maupun keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana dampaknya terhadap daerah yang ditinggalkan, terutama dilihat dari sumberdaya manusianya, penggunaan lahan, kampung yang ditinggalkan termasuk pada pendirian tugu-tugu dan lain-lain akan lebih jelas dalam bab ini. Selain itu akan diuraikan juga hubungan perpindahan tersebut dengan pembangunan daerah tujuan. Sebagai orang yang ahli mencetak persawahan, petani-petani Batak Toba termasuk pionir-pionir pembuka persawahan di berbagai daerah Sumatera bagian Utara.

Bab keenam berisi perkiraan jumlah orang Batak Toba di luar Tapanuli Utara. Uraian ini akan memberikan gambaran perbandingan jumlah yang tinggal di dalam dan luar Tapanuli Utara. Selanjutnya bab ketujuh merupakan rangkuman dan kesimpulan dari hasil penelitian. Untuk melengkapi seluruh uraian di atas, disajikan beberapa butir rekomendasi yang dianggap penting sebagai sumbangan pokok penelitian ini.

Di samping informasi dari berbagai literatur, tulisan-tulisan ilmiah, berita-berita gratis dan sumber tertulis lainnya yang menjadi sumber data sekunder, untuk memperoleh data primer ditentukan 3 kecamatan sebagai sampel penelitian di daerah asal. Ketiga-tiga kecamatan itu ialah Simanindo (Zamosir), Linaonngihuta dan Doloksanggul (Humbang). Ketiga-tiga daerah ini mempunyai komunitas dengan sebagian besar anggotanya bekerja di sektor pertanian padi sawah atau ladang atau kombinasi kedua-duanya. Walaupun tidak selalu sama tipologinya, namun masing-masing kecamatan di Tapanuli Utara dianggap homogen, karena tidak ada satu kecamatan yang tidak menjadi 'pengirim' orang ke daerah lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut ketiga-tiga kecamatan ini ditetapkan sebagai sampel, sampai tahap tertentu, tetap diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pola perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara.

## BAB 2

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini lebih bersifat penelitian deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala dan kejadian sosial tertentu yang terjadi pada masyarakat Batak Toba, khususnya perihal perpindahan penduduk dari Dataran Tinggi Toba. Dengan kombinasi berbagai disiplin ilmu, gejala dan kejadian dimaksud akan lebih jelas. Untuk menerangkan gerak penduduk dari Tapanuli Utara, faktor 'push' dan 'pull' dianggap kurang memadai, karena bagaimanapun, nilai-nilai tradisi yang sudah mendarah daging masih tetap mengambil tatanan dalam gerak langkah masyarakatnya.

#### 2.1. Lokasi Penelitian

Secara umum lokasi penelitian dibagi atas 2, yaitu daerah asal (*bona pasogit*), yaitu Tapanuli Utara, dan daerah persebaran (*tano parserakan*), yaitu daerah lain di luar Tapanuli Utara. Perbedaan ini dianggap penting karena yang hendak diterangkan adalah mengapa orang-orang Batak Toba meninggalkan *bona pasogit* yang 'asli'. Di samping itu yang ingin dijelaskan lagi adalah ke daerah mana mereka lebih banyak pindah, ke daerah pertanian atau perkotaan. Baik daerah pertanian maupun perkotaan, kedua-duanya menjadi *tano parserakan* bagi suku bangsa tersebut.

Di samping informasi dari berbagai literatur, tulisan-tulisan ilmiah, berita-berita gereja dan sumber tertulis lainnya yang menjadi sumber data sekunder, untuk memperoleh data primer ditentukan 3 kecamatan sebagai sampel penelitian di daerah asal. Ketiga-tiga kecamatan itu ialah Simanindo (Samosir), Lintongnihuta dan Doloksanggul (Humbang). Ketiga-tiga daerah itu mempunyai komunitas dengan sebagian besar anggotanya bekerja di sektor pertanian padi sawah atau ladang atau kombinasi kedua-duanya. Walaupun tidak selalu sama tipologinya, namun masing-masing kecamatan di Tapanuli Utara dianggap homogen, karena tidak ada satu kecamatan yang tidak menjadi 'pengirim' orang ke daerah lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut ketiga-tiga kecamatan itu ditetapkan sebagai sampel, sampai tahap tertentu, tetap diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pola perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara.

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan di lapangan selama kurang lebih tiga bulan, dipilih beberapa desa yang menjadi sampel untuk masing-masing kecamatan. Penetapan desa itu didasarkan pada pertimbangan bahwa desa dimaksud merupakan daerah asal penduduk yang pindah dengan jumlah terbesar sejak empat sampai sembilan dasawarsa yang lalu. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak menjelaskan lebih seksama tentang perpindahan orang Batak Toba sejak awal tahun 1900-an. Berdasarkan kriteria itu ditetapkanlah desa-desa yang menjadi sampel, yaitu 5 desa masing-masing dari Kecamatan Simanindo dan Lintongnihuta dan 12 desa dari Kecamatan Doloksanggul.

Penentuan dan pemilihan daerah penelitian di *tano parserakan* dilakukan secara bertingkat. Pertama-tama ditentukan tingkat kabupaten, lalu tingkat kecamatan dan kemudian tingkat desa atau kelurahan. Untuk daerah pertanian ditetapkan Kabupaten Deli Serdang dan Asahan dan untuk daerah perkotaan ditetapkan Kotamadya Medan. Penetapan itu didasari pertimbangan bahwa arus perpindahan orang-orang Batak Toba dari Tapanuli Utara ke masing-masing Daerah Tingkat II tersebut menjadi lebih cepat sesudah tahun 40-an. Dengan pembedaan atas daerah pertanian dan daerah perkotaan, akan lebih jelas alasan-alasan apa yang menyebabkan mereka pindah ke masing-masing daerah dimaksud dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan di daerah lain di wilayah Indonesia.

Untuk Kotamadya Medan ditetapkan 5 Kecamatan sebagai lokasi pengumpulan data primer. Kecamatan Medan Timur dengan Kelurahan Durian, Tegal Rejo, Sei Kera Hilir, Sidorame Timur, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Pandan Hilir dan Gaharu. Dari Kecamatan Medan Barat ditetapkan Kelurahan Sei Sikambang D, Sei Putih dan Sei Putih Barat, sedangkan dari Kecamatan Medan Baru adalah Kelurahan Babura dan Kelurahan Merdeka. Kemudian dari Kecamatan Medan Kota dipilih Kelurahan Teladan Timur, Teladan Barat, Teladan Sukaramai dan Sidorejo.

Akhirnya dari Kecamatan Medan Denai ditetapkan Kelurahan Tegal Sari II, Bantam Timur dan Kelurahan Bantam. Semua kecamatan dan kelurahan di atas ditetapkan menjadi lokasi penelitian setelah mendapat gambaran tentang banyaknya orang Batak Toba di masing-masing daerah.

Kemudian untuk Kabupaten Deli Serdang, ditetapkan Kecamatan Dolok Masihul, Sei Rampah, Lubuk Pakam dan Tanjung Beringin sebagai sampel lokasi penelitian. Penetapan keempat-empat kecamatan itu didasari pertimbangan besarnya arus perpindahan petani Batak Toba ke daerah ini sekitar tahun 40-an dan 50-an. Dari masing-masing kecamatan dipilih beberapa desa yang dianggap dapat mewakili dan memberikan gambaran tentang gerak penduduk ke sektor pertanian di Kabupaten tersebut. Untuk Kecamatan Dolok Masihul dipilih Desa Pekan Kamis, sedangkan di Kecamatan Sei Rampah ialah Desa Sei Belutu, Bamban dan desa Pon. Selanjutnya dari Kecamatan Lubuk Pakam ditetapkan Desa Pagar Jati, Petapahan dan Pasar Melintang. Kemudian dari Kecamatan Tanjung Beringin dipilih Desa Sidoarjo II, Ramonia dan Desa Serdang.

Akhirnya, dari Kabupaten Asahan ditetapkan Kecamatan Meranti dengan desa-desanya : Rawang Pasar 5, Pasar 6, Pasar 7, Pasar 8, Pasar 9 dan Desa Kampung Bunga. Desa-desa tersebut di atas dimasuki petani-petani Batak Toba tahun 40-an dan mayoritas penduduknya adalah orang Batak Toba dan orang Jawa. Dengan penetapan sampel lokasi penelitian ini, sampai tahap tertentu, tetap diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan petani Batak Toba di Kabupaten Asahan.

## 2.2. Sampel Penelitian

Setelah ditempuh tahap-tahap seperti diuraikan di atas, suatu hal yang sangat penting dalam tahap selanjutnya adalah menentukan sampel penelitian, yaitu orang-orang yang menjadi responden.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor dan motif-motif yang menyebabkan mereka pindah dari Tapanuli Utara, kriteria sample untuk *tano parserakan* adalah sebagai berikut :

- a. Rumah tangga lengkap, ada suami dan isteri. Dan yang menjadi responden adalah suami.
- b. Tingkat umur minimal 40 tahun (sampai dengan tahun 1989, saat mana wawancara diadakan) sehingga informasi yang lebih akurat tentang latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka pindah dari kampung halamannya dapat diperoleh.
- c. Pekerjaan calon responden adalah non-pegawai (negeri atau swasta). Untuk lokasi penelitian di Kabupaten Asahan dan Deli Serdang dipilih

petani yang telah tinggal di masing-masing kabupaten minimal 15 tahun (sampai dengan tahun 1989, saat mana wawancara diadakan). Untuk lokasi penelitian Kotamadya Medan yang menjadi responden adalah yang pekerjaannya di luar pegawai negeri atau pegawai swasta tetapi bukan pengusaha besar (menurut takaran orang Batak). Mereka telah tinggal di daerah ini paling sedikit 15 tahun (sampai dengan tahun 1989, saat survei dilakukan).

Sebelum rumah tangga responden ditetapkan, khususnya untuk Kota-madya Medan ditempuh beberapa tahap. Pertama, petugas lapangan mendata orang Batak Toba yang tinggal di masing-masing kelurahan berdasarkan kartu keluarga. Berdasarkan itu ditetapkan calon responden untuk masing-masing kelurahan dengan pertimbangan sampel yang dipilih dapat mewakili populasi. Untuk daerah Deli Serdang dan Asahan, penetapan calon responden didahului survei langsung kepada petani calon responden setelah mendapat petunjuk dari Camat. Berdasarkan pada kriteria tersebut di atas dan hasil pengamatan (pendahu-luan) di lapangan ditetapkan jumlah sampel (responden) sebanyak 38 keluarga untuk lokasi penelitian Asahan, 39 keluarga untuk Deli Ser-dang dan 125 keluarga untuk Kotamadya Medan.

Kriteria penentuan sampel untuk *bona pasogit* hampir sama dengan kriteria untuk *tano parserakan*. Calon responden adalah rumah tangga penuh dimana ada suami dan isteri, tetapi bukan *marga boru* (menantu) di desanya. Pekerjaan utamanya adalah petani (padi sawah, ladang atau kombinasi kedua-duanya). Suami menjadi responden dengan tingkat umur paling sedi-kit 35 tahun (sampai tahun 1989). Berdasarkan pertimbangan bahwa rumah tangga petani di Tapanuli Utara agak homogen, sampel penelitian yang ditetapkan sebanyak 77 rumah tangga. Dari Kecamatan Lintongnihuta 11 rumah tangga, Doloksanggul 21 rumah tangga dan Simanindo 43 rumah tangga.

### 2.3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder (bersumber dari berbagai kepustakaan dan statistik) dan data primer (survei lapangan).

Untuk memperoleh data primer digunakan metode penelitian survei sebagai metode utama. Responden yang telah ditetapkan diwawancarai dengan berpedoman pada Daftar Pertanyaan atau Kuesioner. Untuk menja-ring lebih banyak informasi dilakukan wawancara tak berstruktur dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama seperti pendeta, guru jemaat atau penatua.

Di samping itu dengan tokoh masyarakat atau 'key informant' lainnya yang ada pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan atau tingkat kabupaten/kotamadya. Hal itu dilakukan untuk membantu memberikan keadaan yang lebih cocok sekaligus bahan bandingan dengan hasil wawancara berstruktur, yang jawaban-jawaban responden agak meragukan.

Dalam wawancara berstruktur, responden dijumpai oleh dua orang tenaga peneliti lapangan, seorang sebagai pewawancara dan seorang lagi sebagai pengisi kuesioner. Untuk menciptakan 'rapport' yang baik, wawancara tidak terpaku pada urutan setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Apabila jawaban atau keterangan yang diberikan responden agak meragukan, pengisi kuesioner dapat menanyakan kembali pertanyaan yang sama tetapi tidak harus tepat sama dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Dengan pengalaman yang dimiliki selama di lapangan, cara atau metode yang mereka tetapkan diharapkan memberi hasil yang maksimal.

Daftar pertanyaan dibagi atas tiga kelompok karena satu dengan yang lain mempunyai sedikit perbedaan. Daftar pertanyaan untuk responden di *bona pasogit* disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut sebagai daerah 'pengirim' penduduk. Selanjutnya dua daftar pertanyaan berikutnya untuk responden di *tano parserakan* dibedakan atas daerah pertanian (lokasi penelitian Kabupaten Deli Serdang dan Asahan) dan daerah perkotaan (lokasi penelitian Kotamadya Medan). Untuk daerah pertanian, daftar pertanyaan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan perpindahan dalam lingkungan dunia pertanian, sedangkan untuk daerah perkotaan meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan perpindahan dalam lingkungan non-pertanian.

Penelitian lapangan dengan kuesioner menggunakan tenaga mahasiswa, pegawai yang sudah berpengalaman di lapangan dan tenaga dosen dari Universitas HKBP Nommensen Medan. Sebelum turun ke lapangan, mereka mendapat latihan khusus sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat dijalankan lebih efisien dan efektif.

Mengingat jumlah pertanyaan dan waktu responden yang kadang-kadang terbatas menyebabkan kuesioner mungkin tidak terisi penuh dalam sekali pertemuan. Kekurangan tersebut dilengkapi dalam kunjungan kedua. Jika sampai kunjungan ketiga belum dapat diisi sepenuhnya, responden sampel dapat diganti dengan yang lain. Atau jika dalam kunjungan pertama, hasilnya agak meragukan, dalam kunjungan kedua dapat diulang lagi atau bahkan diganti dengan yang lain. Semua upaya ini dilakukan guna mendapatkan data dan keterangan yang lebih akurat dan lengkap.

#### 2.4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpul disunting secara manual. Penyuntingan ini dilakukan karena kemungkinan ada data yang kurang jelas atau agak meragukan karena kesalahan dalam pengisian kuesioner atau daftar pertanyaan. Tabulasi data dilakukan atas dasar hipotesis yang diajukan sebelumnya dan ditambah dengan beberapa hubungan lain yang ingin dipelajari untuk menambah pengetahuan tentang obyek yang sedang diteliti.

Dalam menganalisis data dipergunakan analisis statistika deskriptif dan analisis secara kualitatif. Analisis statistika deskriptif digunakan untuk melihat hubungan dua atau lebih variabel yang dinyatakan dengan sebaran frekuensi (skor) baik secara angka-angka mutlak maupun dalam persentase. Dengan mengelompokkan data dalam tabel silang, hubungan di atas menjadi jelas. Selanjutnya fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasi dianalisis secara kualitatif.

Dalam garis besarnya, Verougwen (1964 : 2-16) membagi keturunan Siraja Batak menjadi 2 bagian besar. Yang pertama disebut belahan Lontung yang merupakan himpunan dari Borbor dan sejumlah marga yang lebih kecil, berasal dari keturunan Guru Tatea Bulan. Kemudian belahan Sumba yang kedalamnya termasuk kelompok marga turunan Raja Isumbaon. Dalam bukunya yang terkenal ini, The Social Organization and Customary Law of the Toba Batak of Northern Sumatra yang terbit tahun 1964, Verougwen menyajikan suatu daftar tentang marga dan penggolongannya dalam kaitannya dengan marga yang mendiami suatu daerah serta dikenal dengan sebutan marga yang memertiniah. Verougwen juga mengemukakan bahwa mobilitas orang Batak Toba terjadi sejak munculnya marga-marga dari kedua kelompok tersebut di atas.

## BAB 3

### TINJAUAN PENYEBARAN SUKU BANGSA BATAK

---

#### 3.1. Tinjauan Sejarah Batak

Menurut sejarah, terutama dari par. tetua orang Batak Toba bahwa suku bangsa Batak berasal dari dua orang anak manusia ciptaan *Mulajadi Nabolon* yang dinamakan *Siraja Ihatmanisia* (laki-laki) dan *Siboru Ihatmanisia* (wanita). *Siraja Ihatmanisia* mempunyai tiga orang anak, salah seorang diantaranya bernama *Raja Miokmiok*. Kemudian anak *Raja Miokmiok* adalah *Engbanua* dan *Engbanua* mempunyai seorang anak bernama *Raja Bonangbonang*. *Raja Bonangbonang* mempunyai tiga orang anak bernama *Guru Tantan Debata*, *Si Asi* dan *Si Jau* (tidak diketahui identitasnya). *Guru Tantan Debata* mempunyai seorang anak bernama *Siraja Batak*. *Siraja Batak* mempunyai dua orang anak bernama *Guru Tatea Bulan* dan *Raja Isumbaon* (Hutagalung, 1926 : 27).

Pada generasi berikutnya *Guru Tatea bulan* mempunyai lima orang anak laki-laki bernama *Siraja Biakbiak*, *Tuan Sariburaja*, *Limbongmulana*, *Sagalaraja*, *Malauraja*, dan tiga orang anak perempuan bernama *Siboru Pareme*, *Siboru Anting Sabungan*, dan *Siboru Biding Laut*. *Tuan Sariburaja* melakukan kawin sumbang (incest) dengan adik perempuannya (*ibotonya*) *Siboru Pareme* dan mempunyai tiga orang anak bernama *Siraja Lontung*, *Siraja Borbor* dan *Babiat*. *Raja Isumbaon* mempunyai satu orang anak laki-laki bernama *Tuan Sori Mangaraja*. *Tuan Sori Mangaraja* mempunyai tiga orang anak, yaitu *Tuan Sorba Dijulu*, *Tuan Sorba Dijae* dan *Tuan Sorba Dibanua*.

Dalam garis besarnya, Vergouwen (1964 : 5-16) membagi keturunan Siraja Batak menjadi 2 bagian besar. Yang pertama disebut belahan *Lontung* yang merupakan himpunan dari Borbor dan sejumlah marga yang lebih kecil, berasal dari keturunan Guru Tatea bulan. Kemudian belahan *Sumba* yang kedalamnya termasuk kelompok marga turunan Raja Isumbaon. Dalam bukunya yang terkenal itu, *The Social Organization and Customary Law of the Toba Batak of Northern Sumatra* yang terbit tahun 1964, Vergouwen menyajikan suatu daftar tentang marga dan penggolongannya dalam kaitannya dengan marga yang mendiami suatu daerah serta dikenal dengan sebutan marga yang memerintah. Vergouwen juga mengemukakan bahwa mobilitas orang Batak Toba terjadi sejak munculnya marga-marga dari kedua kelompok tersebut di atas.

Dewasa ini suku bangsa Batak dapat digolongkan kepada 6 puak, yaitu Batak Toba, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Pakpak Dairi dan Batak Karo. Mereka mendiami wilayah yang berbeda tetapi berdekatan di wilayah Sumatera Utara. Tanah Toba terletak di sebelah Selatan danau Toba. Tanah Angkola berada di sebelah Selatan tanah Toba dan paling Selatan terletak tanah Mandailing. Sedangkan tanah Simalungun terletak di sebelah Timur danau Toba, tanah Dairi di sebelah Barat dan tanah Karo di sebelah Utara danau tersebut. Batak Toba mendiami sekitar danau Toba, yaitu daerah Tingkat II Tapanuli Utara, Batak Angkola dan Mandailing di daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Batak Simalungun di Daerah Tingkat II Simalungun, Pakpak Dairi di Daerah Tingkat II Dairi dan Karo di Daerah Tingkat II Karo. Dalam abad ini sebagian dari penduduk daerah itu sudah bertempat tinggal di daerah lain. Perpindahan ini dilatarbelakangi berbagai motif dan sebab.

### 3.2. Marga dan Sistem Kekerabatan

Pada awalnya nama-nama yang dimiliki kakek moyang orang Batak belum merupakan marga. Hubungan sumbang yang terjadi dalam satu alur keturunan telah mengakibatkan pecahnya hubungan saudara, *haha-anggi-iboto*. Pada generasi berikutnya barulah muncul istilah marga. Dengan adanya marga hubungan kekerabatan menjadi lebih jelas dan setidaknya-tidaknya dapat memperkecil kemungkinan perkawinan satu marga. Dalam sejarah Batak, incest tersebut pernah terjadi pada keturunan Guru Tatea Bulan (generasi ketiga dari Siraja Batak), yaitu antara Tuan Sariburaja dengan Siboru Pareme dan antara Siboru Pareme dengan anaknya Siraja Lontung. Kejadian itu disebut "sumbang", yang dampaknya merupakan alasan pembaharuan di kalangan keluarga waktu itu.

Dalam prakteknya, hubungan sosial ditinjau dari fungsi marga pada suku bangsa Batak Toba dikenal tiga pihak yang selalu berkomunikasi. Yang pertama disebut "sedarah, sekaum, sabutuha" atau sering disebut "semarga" atau *dongan sabutuha*. Kedua adalah pihak keluarga atau marga dari istri yang disebut "paman, huluhula", dan ketiga adalah golongan suami dari anak perempuan atau menantu laki-laki yang disebut "*parboruon*". Ketiga-tiga pihak tersebut di atas "dan merupakan keturunan dari seorang kakek bersama dan nyata-nyata merayakan berbagai upacara kekerabatan secara bersama" merupakan pihak (unsur) *Dalihan Na Tolu* (Simatupang, 1986: x). Dengan adanya marga akan memudahkan untuk saling mengenal hubungan dan kedudukan masing-masing pihak. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan yang mengatakan :

*"Jolo tiniptip sanggar laho bahen huruhuruan,  
jolo sinungkun marga asa binoto partuturan"*

yang berarti lebih dahulu ditanya marga untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sebagai "*dongan sabutuha, huluhula* atau *boru*" sehingga dapat diketahui kedudukannya. Inilah yang dinamakan dengan "*martutur*". Hubungan antara semarga adalah hubungan antara abang adik yakni warga yang paling tua (anak paling tua) dan yang paling muda (bungsu). Mereka mendapat hak sesuai dengan aturannya dan ini sering disebut dengan "*manat mardongan tubu*" (waspada terhadap semarga). Pihak paman dan mertua merupakan hubungan yang paling tinggi bagi orang Batak Toba. Penghormatan terhadap mereka dinilai sebagai "*Debata Na Niida*" (Tuhan Yang Nampak), karena berkat dari pihak *hula-hula* dinilai merupakan berkat paling tinggi sehingga dibuat aturan dengan "*somba marhulahula*" (hormat kepada pihak paman dan mertua). Hubungan kepada pihak anak perempuan, yaitu pihak *boru* merupakan pembantu bagi pihak mertua atau paman dalam waktu senang maupun susah sehingga dibuat aturan dengan ungkapan "*elek marboru*" (rasa sayang terhadap pihak menantu).

### 3.3. Hukum Tanah dan Pendirian Kampung (*Huta*)

Dalam masyarakat Batak di daerah asal (*bona pasogit*) hukum atas kepemilikan tanah dan pendirian kampung didasarkan atas marga. Marga sebagai identitas yang cukup mendasar, membentuk norma-norma hubungan dalam tatanan kehidupan. Marga yang pertama datang ke daerah yang belum ada pemiliknya akan menjadi '*raja huta*' di sana dan merekalah kelak disebut sebagai marga tanah. Kepemilikan atas tanah itu disebut "*golat*" dan yang memilikinya disebut "*pargolat*". Dengan demikian hak atas *golat* adalah

marga tertentu yang membuka dan memerintah di suatu wilayah. Tanah seperti ini dengan bebas dapat diberikan kepada anak-anaknya, laki-laki atau perempuan dan dia dapat mewariskannya kepada anak-anaknya jika dia meninggal. Betapapun jauhnya ia pergi dan bermukim di tempat lain, tanah itu tetap menjadi miliknya. Dalam hal ini marganya mengukuhkan haknya. Itu adalah hak penguasaan tanah asli yang dipegang oleh marga, atau kelompok suku yang sekarang berada ditangannya sebagai pribadi (Vergouwen, 1962 : 113). Merekalah yang dapat menukarkan, meminjamkan atau menggadaikan tanahnya dan dapat digunakan sebagai pembayar hutang yang sudah terlalu berat.

Bagi generasi selanjutnya perpecahan dan perpencaran lahan terutama terjadi atas dasar pemberian orangtua. Pemberian sebidang tanah atau lebih dilakukan setelah anak melangsungkan perkawinan (berumah tangga). Keluarga muda berpisah dan berdiri sendiri dari lingkungan keluarga orangtua disebut *manjae*. Pemberian tanah kepada anak laki-laki yang sudah berkeluarga disebut *panjaean* dan kepada anak perempuan disebut *pauseang*. Selain bentuk *panjaean* dan *pauseang* masih ada pemberian tanah oleh marga tanah kepada marga pendatang, yaitu kepada *boru*. Hal ini dapat terjadi apabila marga *boru* tinggal sampai tiga generasi atau lebih di kampung marga tanah (dengan mengawini anak perempuan marga tanah) dan mempunyai jasa pada marga tanah (Tampoebolon, 1934:10). Mereka dapat mendirikan satu atau lebih kampung sendiri di tengah kampung hula-hulanya atau di tanah pembagian dari harta pusaka (*partalian*) yang diberikan kepadanya (Vergouwen, 1964 : 123).

Sebagai salah satu faktor produksi, sebidang tanah dapat memberi hasil kepada pemiliknya walaupun bukan dia yang mengusahainya. Seseorang dapat mengajukan permohonan kepada pemiliknya agar dia dapat mengusahai dengan memberi sebagian hasil kepada pemiliknya, yang disebut "*bola pinang*" (bagi hasil). Biasanya sistem ini berlaku bagi lahan sawah bukan lahan kering, baik antar marga yang berbeda atau marga yang sama atau antar warga kampung yang berdekatan. Apabila peminjam tidak mau mengusahainya lagi maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik dengan cara lisan. Selain bagi hasil ada juga yang dikenal istilah "*dondon*". *Dondon* adalah membeli tanah yang sifatnya jual gantung dan waktunya dapat tidak terbatas, biasanya setahun atau lebih. Selama tanah berada dalam posisi *dondon*, tanah diusahai pemilik uang tetapi hak milik tidak berpindah. Tanah tersebut akan kembali kepada pemiliknya setelah ia mengembalikan pinjaman, berupa padi atau uang yang dinilai dengan harga yang berlaku pada saat pembayaran.

Dalam masyarakat Batak Toba, kampung atau *huta* merupakan sel dari suatu organisme politik yang dibentuk oleh marga dan kelompok suku dalam hubungan kehidupan persekutuan (Vergouwen, 1964 : 115). Dilihat dari

sudut ekologi kebudayaan Batak, huta merupakan manifestasi konsep *harajaon*. Dalam karyanya *Batak Blood and Protestant Soul*, Pedersen (1970 : 34) mengemukakan :

"Jalan lain ke *harajaon* ialah mendirikan sebuah *huta* (kampung) baru dengan merintis suatu daerah yang belum didiami. Mendirikan sebuah *huta* adalah suatu cara yang diakui untuk memperoleh prestise, tujuannya bukanlah terutama untuk mendapatkan kekayaan materiel tetapi lebih banyak untuk mendapatkan kedudukan sosial".

Hampir serupa dengan Pedersen, Vergouwen (1964 : 111) mengatakan bahwa :

"Sekali orang sudah mendirikan kampung, *mamungka huta*, apakah dia sendiri (jarang) atau dengan bekerjasama dengan orang lain, berarti ia telah menciptakan buat diri sendiri dan buat anak lelakinya suatu masyarakat sendiri, dan dengan berbuat demikian dia dan keturunannya lelaki telah memperoleh hak untuk menjadi tuan disana, dan bebas menentukan boleh tidaknya orang tinggal disana. Ini adalah hukum yang berlaku teguh dimanamana, dan yang sepenuhnya menguasai kehidupan kampung".

Dari apa yang dikemukakan di atas, baik Pedersen maupun Vergouwen pada pokoknya mengatakan bahwa pembentukan *huta* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *harajaon*.

Tidak semua orang yang tinggal di suatu kampung sama derajatnya di dalam badan masyarakat kampung tersebut. Hal ini tergantung pada kedudukan mereka, apakah sebagai galur dari pendiri kampung atau orang pendatang, *parripe*, yang membedakannya di dalam berbagai hal dalam kehidupan masyarakat. Hal pengawasan intern dalam urusan kampung dipangku oleh seluruh keturunan lelaki si pendiri, sampai kepada kepala kampung yang disebut *raja huta*. Orang dari marga pemerintah dalam suatu wilayah adalah *pargolat* di dalam kampungnya. Hak memerintah di kampung adalah hak bersama setiap keturunan patrilineal langsung si pendiri kampung, yang dipangku oleh satu orang. Sebaliknya, marga-marga lain yang datang ke sana tidak banyak sangkutan dengan urusan kampung kalau belum lama tinggal di kampung tersebut (Vergouwen, 1964 : 110-113).

Semakin besar jumlah penduduk suatu kampung, akibatnya pada suatu saat tidak memadai lagi untuk dihuni, baik karena kepadatan penduduknya dan juga karena lahan pertanian yang ada tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini mempengaruhi gerak penduduk ke daerah lain untuk mencari perluasan lahan pertanian. Kampung-kampung yang penuh

sesak berangsur-angsur kehilangan penduduknya. Ada kampung yang penduduknya berangsur-angsur surut, sehingga hanya satu atau dua keluarga yang tinggal di dalamnya. Keadaan seperti ini dapat terjadi akibat penyakit, atau banyak yang pindah karena berada di daerah pegunungan dan tidak banyak kemungkinan untuk bersawah.

### 3.4. Marsarak : Persebaran Batak Toba

Membicarakan perpindahan orang Batak Toba dari Tapanuli Utara tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan nilai-nilai filosofis mereka yang masih dipegang teguh hingga dewasa ini. Ada beberapa nilai, sering hanya 3 disebutkan, yaitu *hagabeon*, *hamoraon* dan *hasangapon*, tetapi kadang-kadang ditambah dengan *sahala*. Setiap keluarga mendambakan banyak keturunan dan panjang umur, *gabe*, kekayaan dan sejahtera *mamora*, wibawa sosial, *sangap* dan memiliki kemampuan berkuasa, *sahala harajaon* serta kemampuan untuk dihormati, *sahala hasangapon*.

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat bukan hanya menimbulkan tekanan terhadap lahan pertanian, tetapi juga bagi perkampungan. Keluarga-keluarga muda yang baru berdikari, *manjae*, dapat mendorong pendirian rumah-rumah baru di kampung yang sama bahkan pembukaan kampung baru beserta lahan-lahan pertanian baru. Di kampung yang baru tersebut pendirinya akan mendapat jabatan kepala atau *raja huta*. Bagi seseorang kepala, *sahala harajaon* dan *sahala hasangapon* nampak dari ciri khusus perwatakan atau pada kualitas yang menonjol. *Sahala* ini dapat pudar atau hilang dari seseorang kepala dengan tanda-tanda sebagai berikut :

"Dulu, pertanda lahiriah hilangnya *sahala harajaon* dan *sahala hasangapon* adalah menyusutnya jumlah kekuatan galur kepala (karena rendahnya angka kelahiran atau tingginya angka kematian), penyakit sang kepala, kehancuran melalui judi, panen buruk yang dialami di wilayah, kalah perang dan sebagainya" (Vergouwen, 1964: 131).

Kampung pertama merupakan titik tolak dari *huta-huta* berikutnya. Pembukaan kampung-kampung baru terjadi sebagai akibat perkembangan jumlah penduduk atau warga *huta* sehingga pada suatu saat mereka tidak dapat bertahan lebih lama di *huta* asal tersebut. Suatu kampung baru yang merupakan perluasan kampung induk (*Huta Sabungan*), disebut dengan *Lumban* atau *Sosor*. Dalam jangka panjang pembentukan kampung-kampung baru akan menciptakan perpencaran dan makin sering berakibat jauh dari kampung asal. Mereka menyebar mula-mula ke daerah sekitar kampung-kampung induk dan akhirnya ke daerah yang lebih jauh di luar batas budaya

sendiri. Proses dan kejadian seperti inilah yang disebut dengan *marserak*. Proses ini berlangsung terus sehingga terbentuk wilayah dari kelompok besar marga tertentu, seperti disebutkan sebelumnya. Seorang *raja huta* tidak akan membiarkan anak-anaknya sebagai 'benalu' di kampung karena hal itu akan menurunkan wibawanya. Oleh karena itu mereka akan mendorong anak-anaknya untuk membangun kampung baru. Castles (1972 : 12) menyatakan bahwa wibawa atau kehormatan seseorang *raja huta* akan bertambah jika anak-anaknya mendirikan *huta-huta* baru.

Berlainan dengan *lumban* dan *sosor* yang berdiri sebagai perluasan dari kampung induk, suatu kampung baru dapat terbentuk karena pengaruh perang. Dahulu sering terjadi peperangan antara satu *huta* dengan *huta* yang lain dan antara satu marga dengan marga yang lain. Hal ini mendorong ke arah pertambahan jumlah *huta-huta*. Dalam *huta* seperti itu tidak ditemui apa yang disebut marga tanah, karena beberapa marga menjadi pendirinya. Pertikaian diantara kakak-beradik dapat menyebabkan pembukaan kampung baru (Tampoebolon, 1934 : 13). Dalam hal terakhir ini, Vergouwen (1964 : 121-122) mengemukakan bahwa ada keinginan dari seseorang bapak yang berpengaruh untuk melihat anak-anaknya dalam *harajaon* masing-masing.

Pada dasarnya arti *marserak* ialah menyebar ke seluruh wilayah marga sendiri dan apabila tidak memungkinkan lagi perluasan wilayah berlangsung ke daerah-daerah yang tanahnya belum dimiliki oleh marga lain, daerah-daerah mana kemudian dapat dijadikan areal pertanian dan perkampungan. Dalam perkembangan selanjutnya orang Batak Toba menyebar ke berbagai daerah di luar wilayah budaya sendiri. Perkampungan yang dibuka sendiri (atau dengan anggota keluarga atau teman sekampung) dan tinggal di daerah lain biasanya dianggap sebagai perluasan kampung induk.

Dewasa ini perkataan *marserak* mengandung pengertian yang luas. Selain mengandung arti menyebar (pindah dari kampung halaman keluar wilayah budaya sendiri), *marserak* mengandung arti mobilitas ekonomi dan sosial. Dalam percakapan sehari-hari ditemukan beberapa perkataan yang mengandung maksud seperti yang disebutkan di atas, diantaranya ada yang disebut "*manombang*", "*mangaranto*", "*marjalang*", "*marlompong*", "*mangombo*", "*mangalului jampalan na lomak*" atau "*masiampapaga na lomak*". Istilah-istilah ini pada umumnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pergi ke daerah lain, di luar kabupaten atau propinsi. Perbedaan istilah yang satu dengan yang lain didasarkan pada siapa, kapan dan bagaimana sifat dari masing-masing perpindahan tersebut.

*Manombang* kata dasar *tombang* berarti membuka lahan atau pemukiman baru (Sarumpaet, 1994 : 287). Mereka dapat menjadi pionir di daerah tersebut. Vergouwen (1964 : 110) menyebutkan bahwa *manombang* merupakan penggarapan tanah oleh orang yang pertama kali menggunakan tanah di sana. Dari kedua pengertian di atas jelaslah bahwa *manombang* dapat

mengacu pada pengertian pionir dalam satu-satu daerah. Dalam kenyataannya dan dalam percakapan sehari-hari pada waktu banyak pembukaan lahan-lahan baru, pengertian *manombang* ialah meninggalkan kampung halaman, pergi ke luar wilayah Tapanuli Utara untuk membuka lahan pertanian baru sekaligus mencari sumber tambahan pendapatan di sektor pertanian di daerah lain yang sifatnya masih bukaan baru. *Manombang* bukan hanya dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga tetapi juga oleh kaum muda, yang pada awalnya ingin mengusahai serta memiliki areal pertanian yang lebih luas, dapat membangun dan menghidupi keluarganya kelak jika pindah ke sana. Apabila kemungkinan-kemungkinan di sana lebih baik dibandingkan dengan di desa asalnya, dapat mempercepat perpindahan keluarga ke daerah baru tersebut. *Manombang* biasanya didahului oleh perpindahan sementara tetapi akhirnya dapat menjadi perpindahan permanen, bergantung pada penilaian mereka terhadap daerah bukaan baru tersebut.

Gerak lain disebut dengan "*mangaranto*" dan orangnya disebut *pangaranto*. Umumnya orang-orang yang disebut *pangaranto* pada awalnya adalah kaum laki-laki yang belum berkeluarga. Mereka meninggalkan desanya pergi ke kota-kota di luar Tapanuli Utara untuk memperoleh pekerjaan di luar sektor pertanian. Sebutan tersebut dewasa ini sudah lebih luas, dapat diberikan kepada yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga, yang bekerja di luar sektor pertanian, termasuk pegawai yang alih tugas dari daerah sendiri. Orang-orang yang pada awalnya bertujuan untuk melanjutkan sekolah dan kemudian bekerja di daerah lain disebut juga sebagai *pangaranto*.

Gerak penduduk dalam bentuk lain dengan tujuan tidak menetap dengan motivasi yang kurang jelas, disebut dengan "*marjalang*". Umumnya *marjalang* dilakukan oleh kaum muda laki-laki yang tergolong malas atau tidak mau bekerja di desanya. Mereka meninggalkan desanya karena dia merasa tidak betah tinggal di sana, dan akhirnya timbul niat mencari pengalaman di daerah lain. Mereka tidak tergantung pada ada tidaknya keluarga atau famili di daerah yang akan dituju. Biasanya kepergian mereka tidak dilatarbelakangi harapan yang cerah dan muluk-muluk, tetapi bukan pula karena keputusan yang membara. Dengan semangat pantang menyerah, dalam dirinya timbul semangat untuk berhasil semakin kuat. Hampir bersamaan dengan ini ada juga yang daerah tujuannya adalah kota-kota besar dengan harapan dapat mencari uang lebih cepat. Sebutan untuk itu bukan lagi *marjalang* tetapi lebih tepat dikatakan *marlompong*. *Marlompong* biasanya dilakukan oleh kaum muda yang pada umumnya mempunyai sifat premanisme.

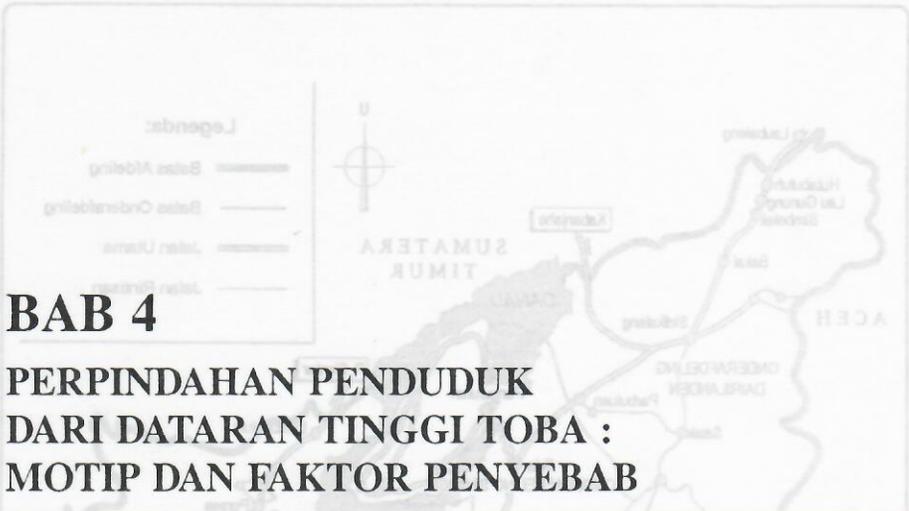
Kemajuan zaman yang berkembang dengan cepat dan kebutuhan hidup yang semakin banyak dan beraneka menyebabkan pola hidup penduduk harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Mereka berusaha untuk

memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itu, yang mungkin sangat sulit dipenuhi jika tetap tinggal dan bekerja di kampungnya. Tidak jarang anggota atau satu keluarga meninggalkan desanya pindah ke daerah lain. Usaha untuk mencari sumber penghidupan yang lebih baik dibanding dengan di daerah sendiri pada umumnya disebut *mangalului jampalan nalomak* atau *masiampapaga nalomak*. Gerak penduduk yang demikian biasanya dilakukan untuk tujuan menetap. Mereka pindah tidak hanya ke sektor pertanian tetapi juga di berbagai aktivitas yang dapat memberikan pendapatan dan meningkatkan status sosialnya. Gerak ini pada umumnya dilakukan oleh kaum muda maupun yang sudah berkeluarga. Mereka yang menyadari bahwa kemungkinan-kemungkinan berhasil di desanya sangat kecil mendorong mereka pindah ke daerah lain sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan yang sudah lama dideritanya.

Sementara itu, adapula yang pindah secara musiman, mungkin dilakukan kaum muda maupun yang sudah berkeluarga, pada musim-musim tertentu. Biasanya perpindahan seperti itu terjadi ke sektor pertanian dengan tujuan untuk mengisi kekosongan waktu sekaligus menambah pendapatan keluarga. Inilah yang disebut dengan *mangombo*. Mereka bekerja sebagai tenaga upahan di sektor pertanian selama musim-musim tidak sibuk di kampung halamannya. Perpindahan itu bersifat sirkuler bergantung pada dapat tidaknya mereka meninggalkan lahannya (tidak bekerja) di kampungnya. Mereka menyumbangkan tenaga dan pada saat kembali membawa hasil ke desanya. Belakangan ini, arahnya sudah semakin meluas, bukan lagi hanya ke sektor pertanian tetapi juga ke sektor industri bahkan jasa-jasa di kota-kota besar, tetapi sifatnya cenderung menjadi perpindahan menetap, sehingga tidak disebut lagi dengan istilah *mangombo*.

Gerak penduduk yang lain disebut dengan *marjajo* dan *marrengge-rengge*. Kedua istilah ini ada dan selalu ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi. *Marjajo* merupakan kegiatan menjual barang dagangan yang dilakukan secara berkeliling ke daerah-daerah tertentu. Pada umumnya dilakukan oleh kaum lelaki apakah dengan memakai alat sepeda atau sepeda motor. Barang-barang yang dijual adalah hasil-hasil industri, seperti kain dan peralatan dapur (bandingkan dengan Cunningham, 1958 : 47). Sebaliknya *marrengge-rengge* merupakan kegiatan yang dilakukan kaum wanita yang memperdagangkan hasil-hasil pertanian dalam jumlah yang relatif kecil ke daerah lain. *Marjajo* berbeda dengan *marrengge-rengge* dilihat dari waktu dan jenis barang yang dijual. Yang disebut pertama biasanya jarang kembali ke kampung asal walaupun anak dan istrinya ditinggalkan di desa. Sebaliknya yang kedua tidak tepat dimasukkan dalam konteks perpindahan penduduk karena mereka meninggalkan desa hanya pada hari-hari tertentu dan sesudahnya kembali lagi ke desa.

Dalam penelitian ini tidak seluruh gerak penduduk yang diterangkan di atas akan dibahas secara terperinci. Akan tetapi yang mendapat perhatian utama adalah gerak penduduk menetap (permanen), sedangkan gerak penduduk yang bersifat temporer merupakan penjelasan-penjelasan yang dapat membantu menerangkan obyek yang diteliti. Dalam beberapa hal, perpindahan menetap didahului oleh perpindahan sirkuler atau perpindahan musiman. Perhitungan laba-rugi merupakan bagian yang tidak terpisahkan manakala perpindahan musiman akhirnya menjadi perpindahan menetap. Perpindahan seperti ini bukan hanya terjadi di sektor pertanian tetapi juga ke daerah perkotaan. Perpindahan yang berkembang dewasa ini ialah perpindahan spontan untuk mencari kerja dan melanjutkan pendidikan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian *marserak*.



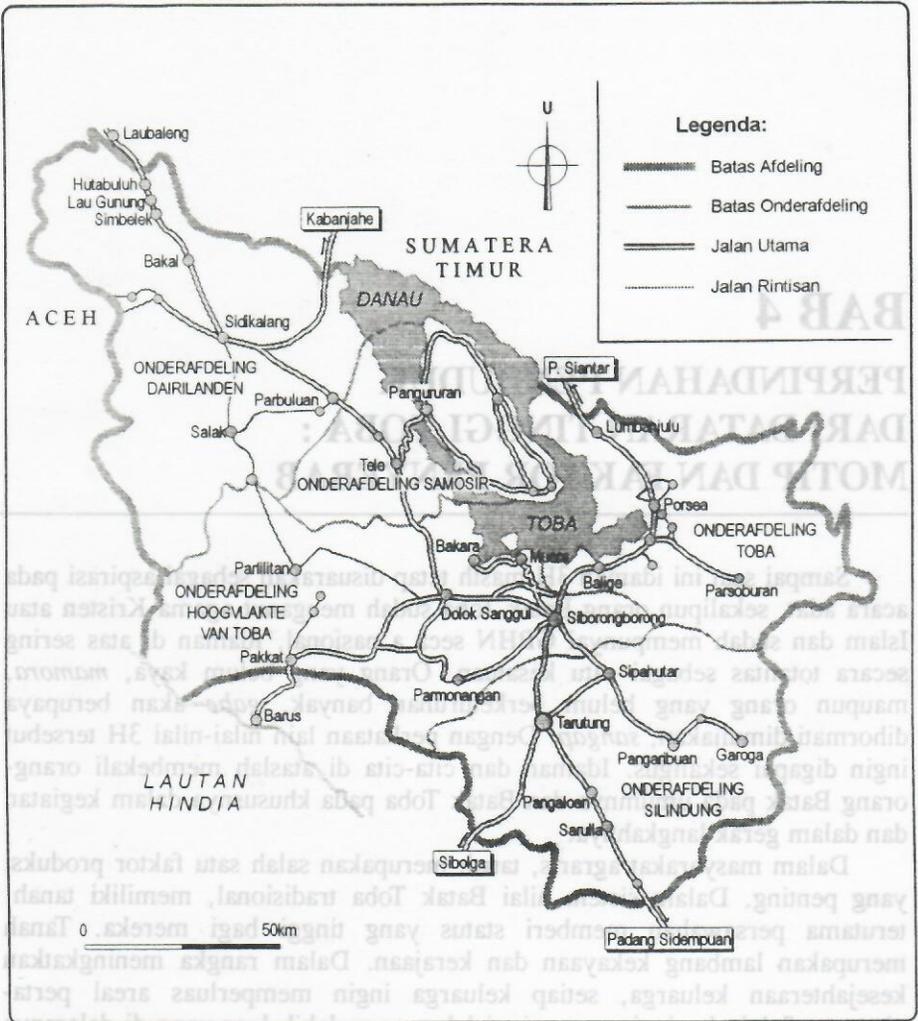
## BAB 4

### PERPINDAHAN PENDUDUK DARI DATARAN TINGGI TOBA : MOTIF DAN FAKTOR PENYEBAB

Sampai saat ini idaman 3H masih tetap disuarakan sebagai aspirasi pada acara adat, sekalipun orang Batak Toba sudah menganut agama Kristen atau Islam dan sudah mempunyai GBHN secara nasional. Idaman di atas sering secara totalitas sebagai satu kesatuan. Orang yang belum kaya, *mamora*, maupun orang yang belum berketurunan banyak, *gabe* akan berupaya dihormati/dimuliakan, *sangap*. Dengan perkataan lain nilai-nilai 3H tersebut ingin digapai sekaligus. Idaman dan cita-cita di ataslah membekali orang-orang Batak pada umumnya dan Batak Toba pada khususnya dalam kegiatan dan dalam gerak langkahnya.

Dalam masyarakat agraris, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Dalam sistem nilai Batak Toba tradisional, memiliki tanah, terutama persawahan memberi status yang tinggi bagi mereka. Tanah merupakan lambang kekayaan dan kerajaan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, setiap keluarga ingin memperluas areal pertaniannya. Selain itu ingin menguasai lahan yang lebih luas yang di dalamnya dapat membangun 'kerajaan' buat diri dan anggota keluarga kelak. Dalam ungkapan *lulu anak, lulu tano*; yang arti harafiahnya suka akan anak (supaya *gabe*), juga suka akan tanah, terkandung maksud tersebut di atas. Ungkapan ini mengandung arti, semakin banyak anak (keturunan) dibutuhkan areal pertanian yang luas untuk menghidupi mereka. Lingkungan kampung dan areal pertanian yang terbatas mendorong petani meninggalkan kampung halamannya.

Peta 1. Afdeling Bataklanden, 1936



Sumber : M.J. Ruychaver (1936 : Lpr. 1)

Untuk merealisasi cita-cita dan idaman di atas, masyarakat agraris sering pindah dari satu desa ke desa lain atau dari satu daerah ke daerah lain secara berkelompok atau perorangan. Perpindahan kelompok biasanya berasal dari satu kelompok kecil marga atau mungkin satu kakek (*sasuhu*) atau satu kampung asal. Kampung baru yang mereka buka menjadi daerah 'kerajaannya' dan tidak jarang memberi nama sama dengan kampung asal

atau marga pembukanya. Misalnya : banjar Toba (bagian yang berasal dari Toba), banjar Siborong-borong untuk mereka yang berasal dari daerah Siborong-borong, huta Bakara (di Kecamatan Percut), untuk mereka yang berasal dari Bakara, atau Lumban Purba (di Aceh Tenggara), kampung yang dibuka oleh marga Purba dan sebagainya. Semangat kelompok (Gemeinschaft) menumbuhkan rasa sepenanggungan dan seperasaan sangat tinggi di antara mereka. Akibat dari sifat kelompok ini sering seakan-akan anggota kelompok tidak terbuka terhadap lingkungan, padahal menurut ungkapan orang Batak, kelompok atau individu harus menyesuaikan diri dengan keadaan di daerah yang ditempati, *sidapot solup do na ro*. Dalam prakteknya sering terjadi konflik kecil bahkan besar karena terdapat kemungkinan sekan-akan memaksakan adat kebiasaannya di daerah yang didatangi. Konflik tersebut juga menjadi salah satu sebab perpindahan kembali dari satu daerah ke daerah lain.

Salah satu dampak negatif dari perpindahan yang berkelompok dalam gaya tradisional ialah bahwa difusi atau asimilasi dengan lingkungan relatif kecil. Sulit terjadi penyesuaian dengan lingkungan baik meniru teknik bercocok tanam atau berkebun. Selain itu tidak tertutup kemungkinan bahwa perpindahan tersebut nyata-nyata memindahkan kebiasaan dari desa asal tanpa ada perubahan/adaptasi dengan lingkungan baru. Itulah sebabnya nampak seakan-akan tidak ada integrasi dengan wawasan yang lebih luas.

Dalam uraian berikut akan disajikan beberapa faktor yang menjadi penyebab dan yang memotivasi orang Batak Toba meninggalkan kampung halamannya (Tapanuli Utara). Faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan satu sama lain dengan intensitas yang berbeda-beda. Urutan faktor-faktor dimaksud, sebagaimana disajikan di bawah ini, bukan menunjukkan urutan (rank) intensitasnya walaupun uraian dalam masing-masing secara parsial mungkin dapat menerangkan mengapa terjadi perpindahan tersebut.

#### 4.1. Faktor Fisik Geografis, Iklim/Musim, Kesuburan lahan

##### *Tofografi*

Secara geografis Kabupaten Tapanuli Utara terletak pada  $1^{\circ}20'1-2^{\circ}41' LU$  dan  $98^{\circ}10'1-99^{\circ}35'1 BT$  dengan luas wilayah seluruhnya 1.060.530 Ha. Sebagian besar daerahnya berupa dataran tinggi, yang dikenal dengan Dataran Tinggi Toba dan berada pada punggung jajaran Bukit Barisan. Dilihat dari ketinggian dari permukaan laut berada antara 300 sampai dengan di atas 1500 meter di atas permukaan laut dan tofografi bergelombang sampai curam dengan kemiringan tanah antara nol sampai dengan di atas 40% (Tabel 4.1). Keadaan permukaan tanah yang banyak bergunung dan berlem-

**Tabel 4.1**  
**Ketinggian dan Topografi Tanah Kabupaten Tapanuli Utara**

A. Ketinggian			B. Topografi			
Ketinggian dpl(m)	Luas (Ha)	%	Tofografi (%)	Luas (Ha)	%	
300 - 500	70.660	7,4	datar : 0 - 2	91.830	9,7	
500 - 1.000	317.200	33,4	landai : 2 - 15	190.952	20,1	
1.000 - 1.500	475.905	50,1	miring : 15 - 40	335.633	35,3	
1.500 ke atas	86.505	9,1	terjal : 40 lebih	331.855	34,9	
Jumlah	950.270	100,0	Jumlah	950.270	100,0	
Danau Toba	110.260		Danau Toba	110.260		

Sumber : Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen Agraria Depdagri, *Kabupaten Tapanuli Utara, Fakta dan Penjelasan*, Publikasi No.162, 1980 : 3

Disamping berbagai hambatan yang timbul untuk pengembangan usaha pertanian, ternyata unsur ketinggian dan kemiringan lahan turut menentukan budidaya tanaman. Dengan menggunakan metode klasifikasi kesesuaian lahan yang direkomendasikan oleh FAO, yang kemudian dimodifikasi oleh PPT Bogor agar sesuai dengan keadaan di Indonesia, jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan keadaan Tapanuli Utara disajikan dalam Tabel 4.2. Selain turut menentukan untuk pemukiman, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa faktor kemiringan lahan merupakan salah satu penentu dalam pembudidayaan tanaman pangan di daerah itu. Lahan dengan kemiringan sampai 15 persen masih cocok untuk menanam tanaman tahunan dan lahan dengan kemiringan sampai 40 persen, walaupun masih dapat digunakan untuk pertanian namun harus dilakukan pembuatan teras. Sebaliknya lahan dengan kemiringan 40 persen dan lebih tidak cocok lagi untuk penggunaan pertanian (Eijkemans, 1988 : 10; Eijkemans dan Rooij, 1990a : 12) karena akan menimbulkan erosi (H. Simbolon, 1986 : 137 dan M. Simbolon, 1986: 91).

Inti dataran tinggi yang dikenal dengan nama **Humbang** mempunyai keadaan lahan yang bersifat agak datar, banyak angin dan jumlah hari hujan besar tetapi daerah tersebut kurang subur (Mijl, 1988: 3-5). Pada masa kolonial Belanda Humbang adalah daerah yang agak mirip dengan padang rumput kering yang ditumbuhi semak belukar dan sepanjang alur air yang dalam dibuka ladang padi basah, *hauma saba* (Vergouwen, 1964 : 4). Selain membuka *hauma saba*, penduduk Humbang memelihara ternak sebagai salah satu cara untuk menambah pendapatan keluarga. Hampir setiap rumah

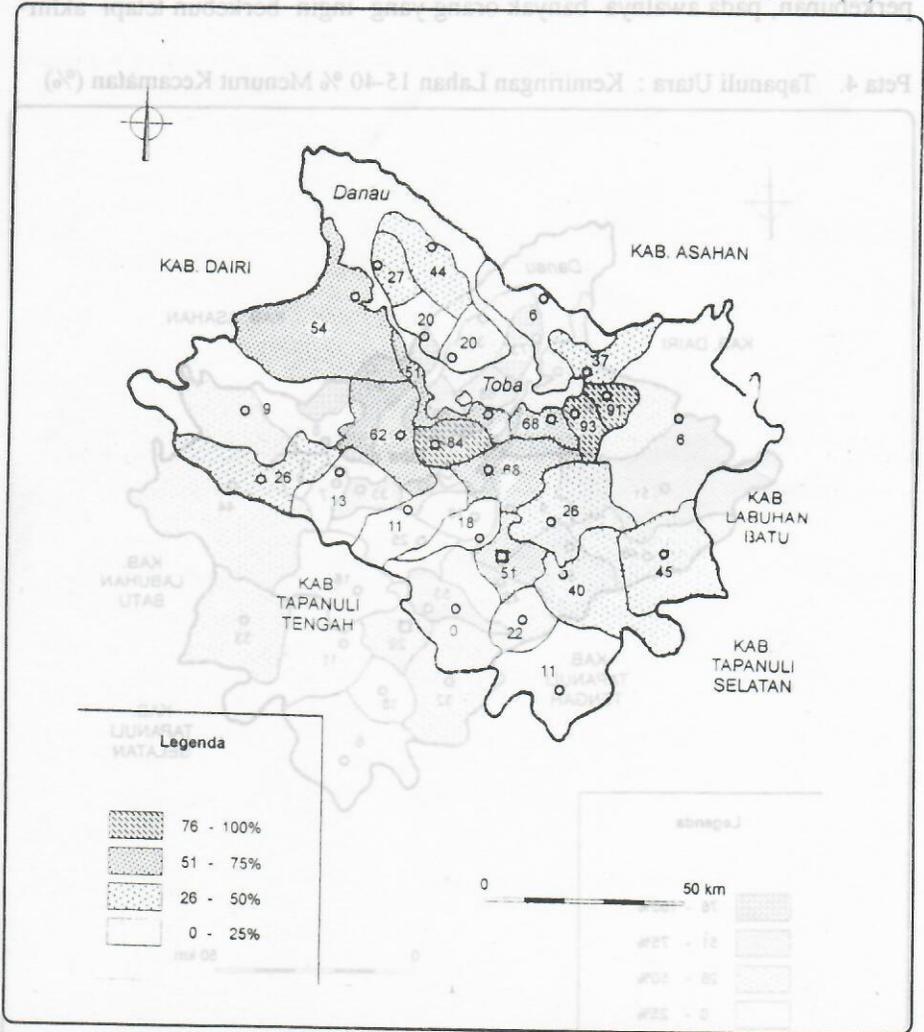
**Tabel 4.2**  
**Penggunaan Lahan Berdasarkan Topografi dan Ketinggian**

Kelas	Topo- grafi	Bentuk Wilayah	Peruntukan lahan		
			0 - 500 m	500 - 1000 m	Diatas 1000 m
I	0 - 8	Datar	- Pemukiman, - Pangan, - Perkebunan, - Peternakan, - Perikanan	- Pemukiman, - Perikanan, - Pangan, - Perkebunan, - Peternakan	- Pemukiman, ternak - Sayur, buah- buahan, bunga - Perkebunan - Hutan Pro- duksi - Penghijauan
II	8 - 15	Berombak	- Pangan - Peternakan - Perkebunan - Penghijauan	- Pangan - Peternakan - Penghijauan - Hutan Pro- duksi	- Perkebunan Terbatas - Sayuran, Bunga - Hutan Pro- duksi - Konservasi Tanah - Reboisasi
III	15 - 25	Berge- lombang	- Pangan Terbatas - Perkebunan - Peternakan - Penghijauan	- Pangan Terbatas - Perkebunan - Penghijauan - Reboisasi - Konservasi Tanah - Hutan Produksi	- Perkebunan Terbatas - Penghijauan - Konservasi Tanah - Hutan Pro- duksi
IV	25 - 40	Curam	- Perkebunan - Hutan Pro- duksi - Penghijauan - Reboisasi	- Konservasi - Konservasi Tanah - Penghijauan - Reboisasi - Reboisasi dan Hutan Produksi	- Perkebunan Terbatas - Penghijauan - Reboisasi - Konservasi Tanah
V	Diatas 40	Terjal	- Reboisasi & Konservasi	- Reboisasi Hutan Lindung	- Hutan lindung

Sumber : *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara 1993/1994* : III.9 (Tabel III.1).

tangga memelihara kuda, kerbau, lembu dan lain-lain. Di kemudian hari jumlahnya semakin kecil dan penyebabnya, menurut mereka, ialah karena pemerintah mengenakan pajak ternak (*Immanuel*, 25.3.1917 : 40). Ternak berkurang dan pendapatan masyarakat pun berkurang.

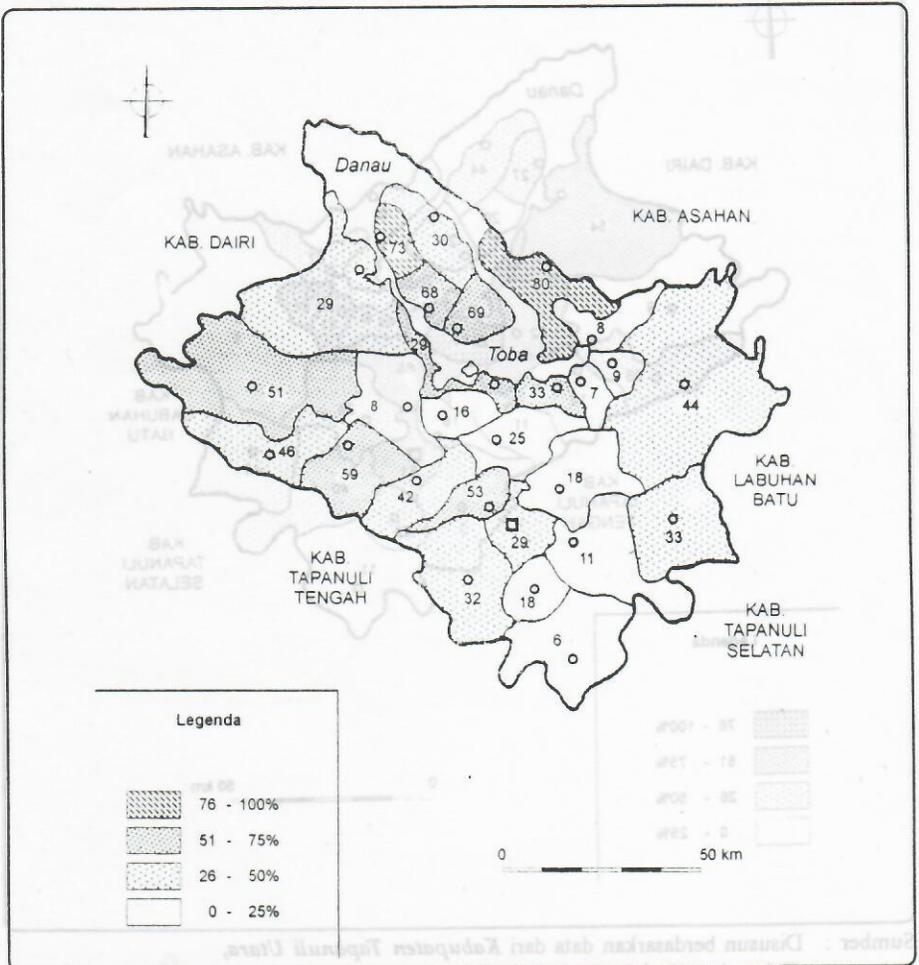
Peta 3. Tapanuli Utara : Kemiringan Lahan 0-15 % Menurut Kecamatan (%)



Sumber : Disusun berdasarkan data dari *Kabupaten Tapanuli Utara, Fakta dan Penjelasan*. Publikasi A, No. 162, 1980.

Walaupun tanah Humbang tergolong tandus, sebagian petani tetap mengusahainya untuk membuat persawahan. Pada masa kolonial misalnya, dengan benih 24 liter penduduk dapat memperoleh hasil antara 1-3 karung ( $\pm$  55-165 kg). Hasil ini dianggap kurang memadai dan petani berusaha menambah penghasilannya, diantaranya dengan mengusahai tegalan dengan menanam tanaman tahunan atau palawija. Karena tertarik dengan tanaman perkebunan, pada awalnya banyak orang yang ingin berkebun tetapi akhir-

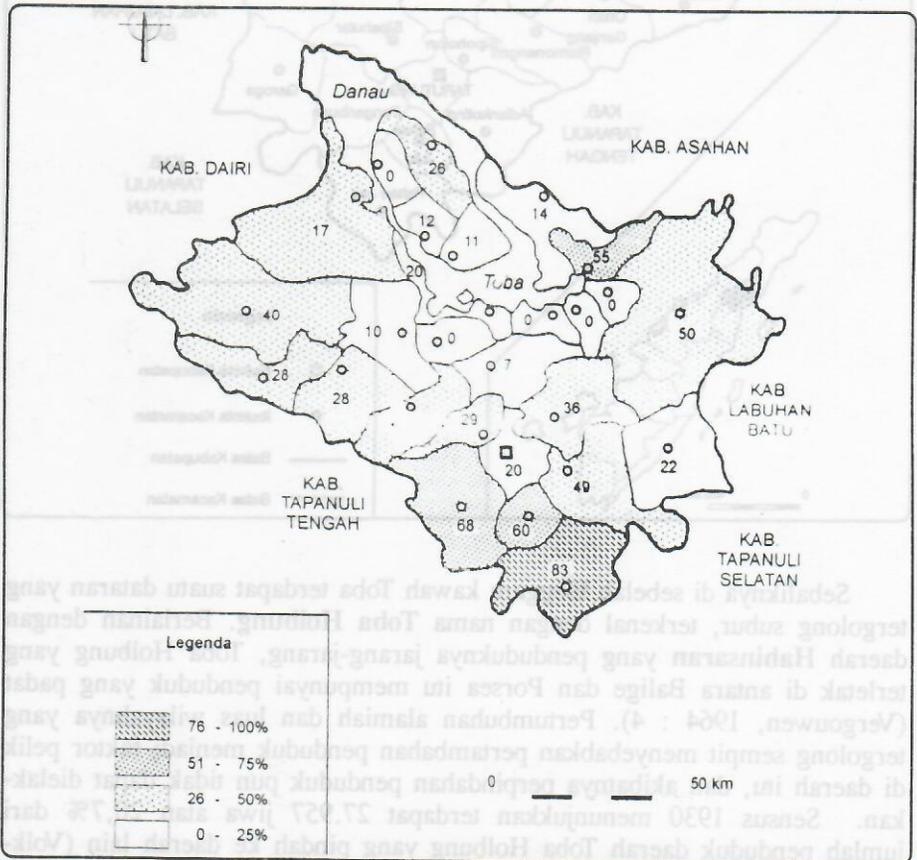
Peta 4. Tapanuli Utara : Kemiringan Lahan 15-40 % Menurut Kecamatan (%)



Sumber : Disusun berdasarkan data dari *Kabupaten Tapanuli Utara, Fakta dan Penjelasan*. Publikasi A, No. 162, 1980.

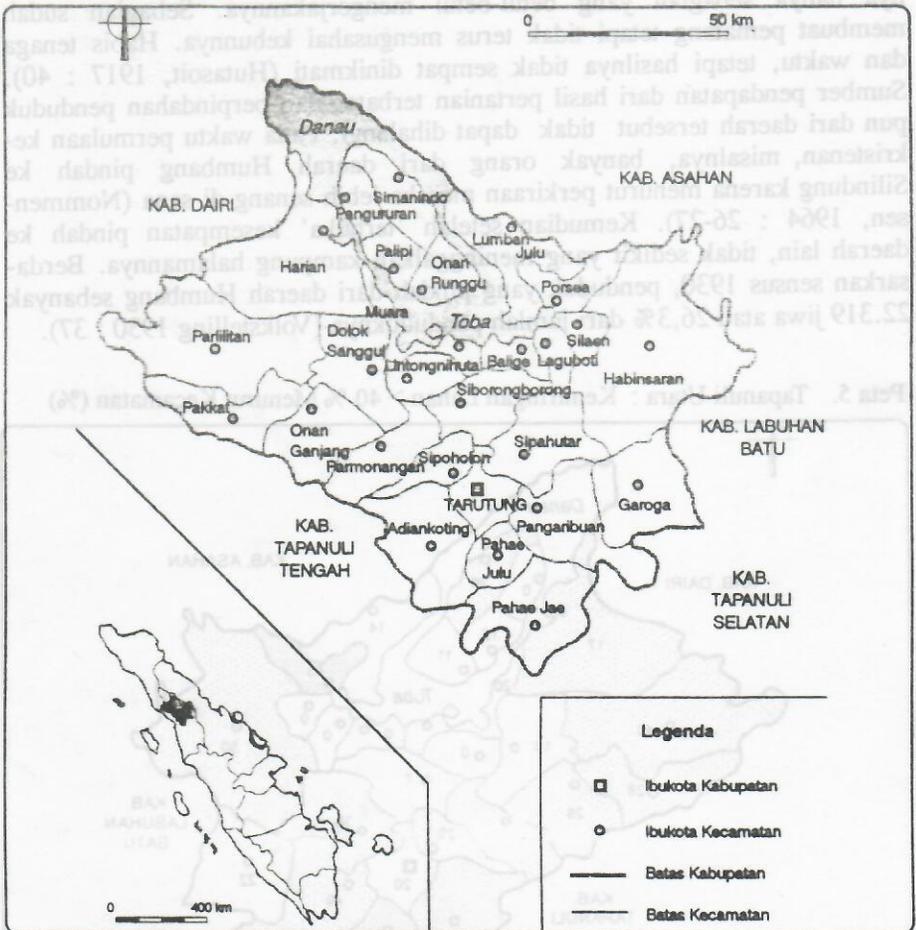
nya hanya sebagian yang betul-betul mengerjakannya. Sebagian sudah membuat pematang tetapi tidak terus mengusahai kebunnya. Habis tenaga dan waktu, tetapi hasilnya tidak sempat dinikmati (Hutasoit, 1917 : 40). Sumber pendapatan dari hasil pertanian terbatas dan perpindahan penduduk pun dari daerah tersebut tidak dapat dihalangi. Pada waktu permulaan kekristenan, misalnya, banyak orang dari daerah Humbang pindah ke Silindung karena menurut perkiraan mereka lebih senang di sana (Nommsen, 1964 : 26-27). Kemudian setelah 'terbuka' kesempatan pindah ke daerah lain, tidak sedikit yang meninggalkan kampung halamannya. Berdasarkan sensus 1930, penduduk yang pindah dari daerah Humbang sebanyak 22.319 jiwa atau 26,3% dari jumlah penduduknya (Volkstelling 1930 : 37).

Peta 5. Tapanuli Utara : Kemiringan Lahan > 40 % Menurut Kecamatan (%)



Sumber : Disusun berdasarkan data dari *Kabupaten Tapanuli Utara, Fakta dan Penjelasan*. Publikasi A, No. 162, 1980.

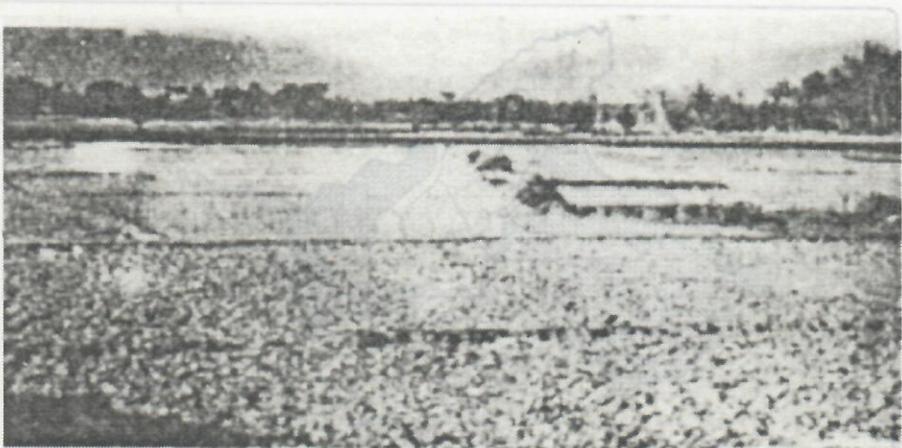
Peta 6. Peta Administrasi Kabupaten Tapanuli Utara



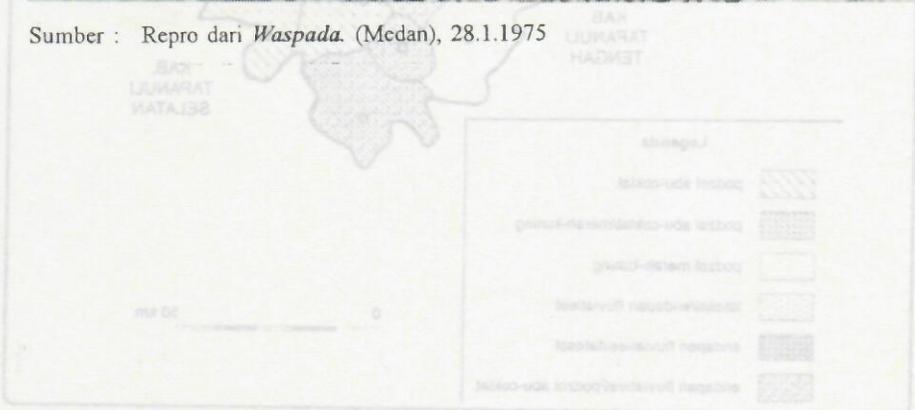
Sebaliknya di sebelah tenggara kawah Toba terdapat suatu dataran yang tergolong subur, terkenal dengan nama **Toba Holbung**. Berlainan dengan daerah **Habinsaran** yang penduduknya jarang-jarang, Toba Holbung yang terletak di antara Balige dan Porsea itu mempunyai penduduk yang padat (Vergouwen, 1964 : 4). Pertumbuhan alamiah dan luas wilayahnya yang tergolong sempit menyebabkan pertambahan penduduk menjadi faktor pelik di daerah itu, dan akibatnya perpindahan penduduk pun tidak dapat dilakukan. Sensus 1930 menunjukkan terdapat 27.957 jiwa atau 20,7% dari jumlah penduduk daerah Toba Holbung yang pindah ke daerah lain (Volkstelling 1930 : 37). Hal yang sama terjadi juga dasawarsa-dasawarsa terakhir ini karena hampir tidak ada lagi lahan pertanian yang belum diusahai.

Dengan posisi letak berada di tengah wilayah propinsi Sumatera Utara dan di punggung jajaran Bukit Barisan, Tapanuli Utara kurang beruntung karena merupakan hulu sungai-sungai yang bermuara ke pantai Timur dan pantai Barat Sumatera Utara serta ke Danau Toba. Secara lambat laun terjadi pengikisan lapisan dan humus tanah sehingga daerah ini relatif kurang subur dibandingkan dengan lahan di kawasan Sumatera Timur (Bupati....., 1985 : 2). Hal itu menyebabkan dampak negatif terhadap pertanian yang pada gilirannya mendorong penduduk, terutama para petani, pindah dan menyebar ke berbagai daerah.

Gambar 1. Puluhan Hektar Sawah di Kawasan Laguboti dan Silaen Mengalami Kekeringan Akibat Musim Kemarau



Sumber : Repro dari *Waspada*. (Medan), 28.1.1975

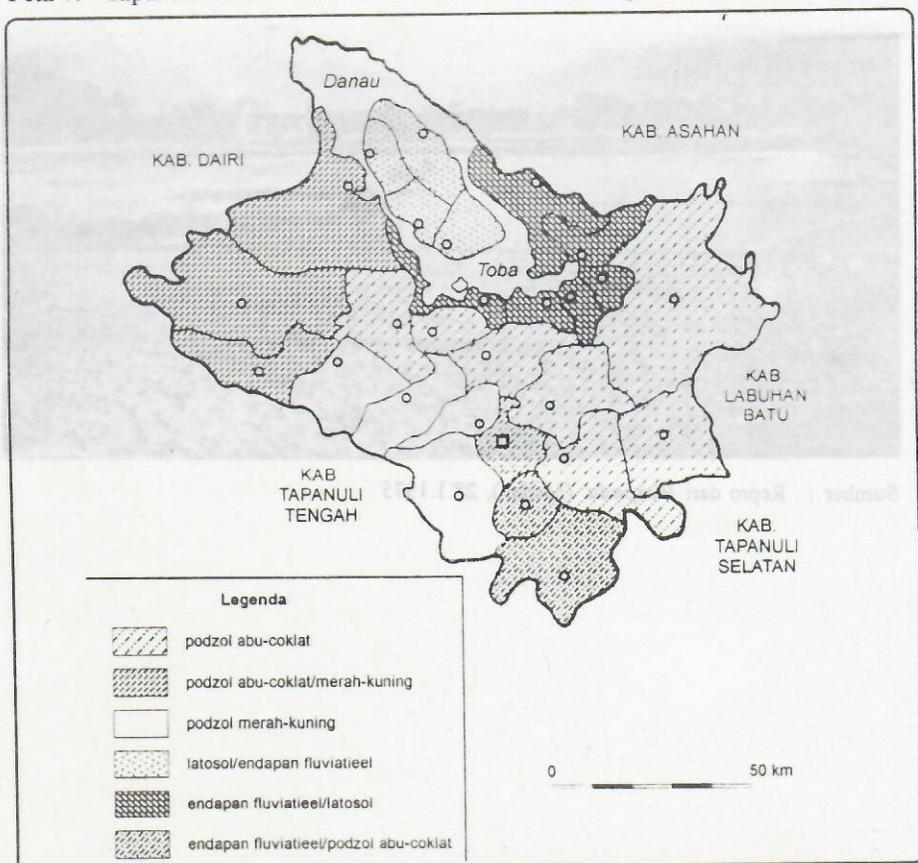


Sumber : Citra Rujukan, Kewilayahan di Daerah-Daerah Baru Dalam Wilayah Toba. Melaik Sarwatu Edisi I Medan : Univ IKIP Nommensen, 1988

### Jenis Tanah

Sebagai hasil erupsi dari gunung Toba pada zaman Pliopleistosen terbentuk Dataran Tinggi Toba yang bersatu dengan Dataran Tinggi Karo menjadi Dataran Tinggi Batak atau "Tumor Batak", istilah yang digunakan geolog Bemmelen. Dilihat dari potensinya untuk pertanian kedua dataran tinggi ini berbeda, tanah di lahan kering Dataran Tinggi Karo adalah andosol yang subur untuk pertanian sedang di Dataran Tinggi Toba bagian terbesar adalah tufa liparit yang potensinya sangat terbatas untuk usaha pertanian (Scholz, 1983 : 74).

Peta 7. Tapanuli Utara : Ciri Jenis Tanah Dalam Berbagai Regio



Sumber : Chris Eijkemans, *Kemiskinan di Daerah-Daerah Inti Dalam Wilayah Toba*. Makalah Sesewaktu Edisi 1. Medan : Univ. HKBP Nommensen, 1988.

Dibandingkan dengan lahan-lahan kering yang terdapat di sepanjang Bukit Barisan yang semuanya relatif baik untuk lahan pertanian, lahan kering Dataran Tinggi Toba sangat terbatas untuk lahan pertanian. Lapisan tanahnya terdiri dari abu gunung api vulkanis tua dan bercampur sedikit bahan vulkanis muda, yang daya menahan air sangat rendah dan sangat peka terhadap erosi (Sihombing, 1986 : 148).

**Tabel 4.3**  
**Ciri Jenis Tanah Dalam Berbagai Regio di Tapanuli Utara**

Regio <sup>*)</sup>	Ciri Jenis Tanah
Samosir	Latosol/endapan fluviatiel
Selatan	Podsol merah-kuning
Timur	Podsol abu-coklat
Sarulla	Endapan Fluviatiel/podsol abu-coklat
Tengah	Podsol abu-coklat
Danau Toba	Endapan fluviatiel/latosol
Barat	Podsol abu-coklat/merah-kuning

\*) Regio Samosir meliputi Kecamatan Onan Runggu, Palipi, Simanindo dan Pangururan. Regio Selatan meliputi kecamatan Onan Ganjang, Parmonangan, Adian Koting dan Sipoholon. Regio Timur meliputi Kecamatan Pangaribuan, Garoga, Sipahutar dan Habinsaran. Regio Sarulla meliputi Kecamatan Tarutung, Pahae Julu dan Pahae Jae. Regio Tengah meliputi Kecamatan Siborongborong, Lintongnihuta dan Doloksanggul. Regio Danau Toba meliputi Kecamatan Muara, Balige, Laguboti, Silaen, Porsea dan Lumbanjulu. Regio Barat meliputi Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Harian.

Sumber : Eijkemans, 1988 : 2.

Gambaran tentang keterbatasan lahan pertanian di daerah Dataran Tinggi Toba mencerminkan keadaan di daerah Tapanuli Utara. Pada umumnya jenis tanahnya terdiri dari tanah podsol, latosol dan endapan fluviatiel dan umumnya terdiri dari bentukan volkanis tua. Tanah podzol pada umumnya miskin hara, bersifat asam (pH tanah rendah), mengandung mineral/bahan organik yang sedikit dan kapasitas menyimpan air dan ion sangat rendah. Tanah jenis ini masih dapat dibedakan atas podzol merah-kuning dan podsol abu-coklat. Podsol merah-kuning ditemukan pada daerah berelevasi agak rendah tetapi berbentuk wilayah berbukit sampai bergunung dan tanah ini sangat peka terhadap erosi. Selanjutnya tanah podsol abu-coklat ditemukan di daerah elevasi tinggi tetapi berbentuk wilayah datar sampai sedikit bergelombang dan umumnya terdapat di atas dataran tinggi.

Berbeda dengan tanah latosol, walaupun umumnya miskin hara dan profil tanahnya homogen tetapi tanahnya lebih potensial dibandingkan dengan tanah podsol bagi pertanian. Bentuk wilayah tanah latosol berbukit-bukit sampai bergunung-gunung. Selanjutnya endapan fluvial mempunyai tekstur lebih halus dan lebih kaya akan mineral-mineral serta memberikan kondisi yang baik untuk hampir tiap jenis tanaman. Untuk seluruh Tapanuli Utara, luas jenis tanah podsol jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis tanah latosol dan endapan fluvial (Eijkemans, 1988 : 3-4). Jenis-jenis tanah ini mendominasi regio Selatan, Timur, Tengah dan Barat wilayah Tapanuli Utara (Tabel 4.3). Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari jenis tanahnya, Tapanuli Utara kurang memberi harapan untuk pengembangan pertanian.

### *I k l i m*

Selain tofografi dan kesuburan lahan yang kurang mendukung pertanian, pengaruh musim turut menentukan berhasil tidaknya panen. Dari cerita-ceritera orang tua bahwa dahulu sering terjadi kegagalan musim panen karena musim kering yang berkepanjangan, seperti di daerah Humbang dan Samosir. Akibat musim seperti ini bukan hanya merusak tanaman tahunan tetapi sekaligus mengakibatkan penderitaan petani karena padi atau tanaman palawija lainnya menjadi layu dan akhirnya mati. Panen gagal, penduduk pun terancam kelaparan. Tanaman keras seperti kemenyan pun kadang kala tidak dapat dipanen. Pendapatan masyarakat dari tanaman ini pun semakin lama semakin rendah karena tanaman semakin tua dan tidak dilakukan peremajaan. Hal tersebut mengakibatkan penderitaan masyarakat di daerah Humbang dan Hurlang bahkan menyebabkan bagian besar penduduknya terpaksa pindah ke daerah lain, seperti ke daerah Tapanuli Selatan. Bencana alam, hujan dan banjir serta lahan pangan yang tidak memadai, umumnya mendorong penduduk pindah. Daerah perpindahannya dapat ditelusuri ke daerah persawahan (dan perladangan) yang lebih baik di luar Tapanuli Utara. Data sensus 1930, misalnya, menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 15.150 orang (sekitar 15,7% dari jumlah penduduk onderafdeling Samosir ketika itu) yang pindah ke daerah lain (Volkstelling 1930 : 37), diantaranya 2.819 orang di Dairi dan 6.859 orang di Simalungun (Volkstelling 1930 : 35,37).

Pulau Samosir yang terletak di tengah-tengah Danau Toba merupakan daerah yang paling kering di daerah Tapanuli Utara dilihat dari curah hujan setiap tahun. Kesulitan air di daerah tersebut sudah sangat terasa jauh sebelum Perang Dunia II. Hal ini misalnya disaksikan oleh kontrolir yang ditempatkan di Pulau Samosir. Middendorp (1913 : 19-22), salah seorang dari

kontrolir tersebut, menyatakan bahwa hasil pertanian seperti beras, jagung dan ubi jalar yang merupakan kebutuhan subsisten yang penting bagi penduduk semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan semakin banyak lahan berpengairan menjadi lahan kering. Akibatnya, sektor pertanian tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan subsisten penduduknya. Beras pun harus didatangkan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk Samosir.

Gambar 2. Seruan 120.000 Rakyat Samosir



Atas : Sebanyak enam kapal penduduk Samosir datang ke Balige ketika Presiden Sukarno berkunjung ke sana, dengan membawa selogan : "Seruan 120.000 rakyat Samosir. Pemerintah !!! Bantu segera kami yang menderita akibat bencana alam musim kemarau".

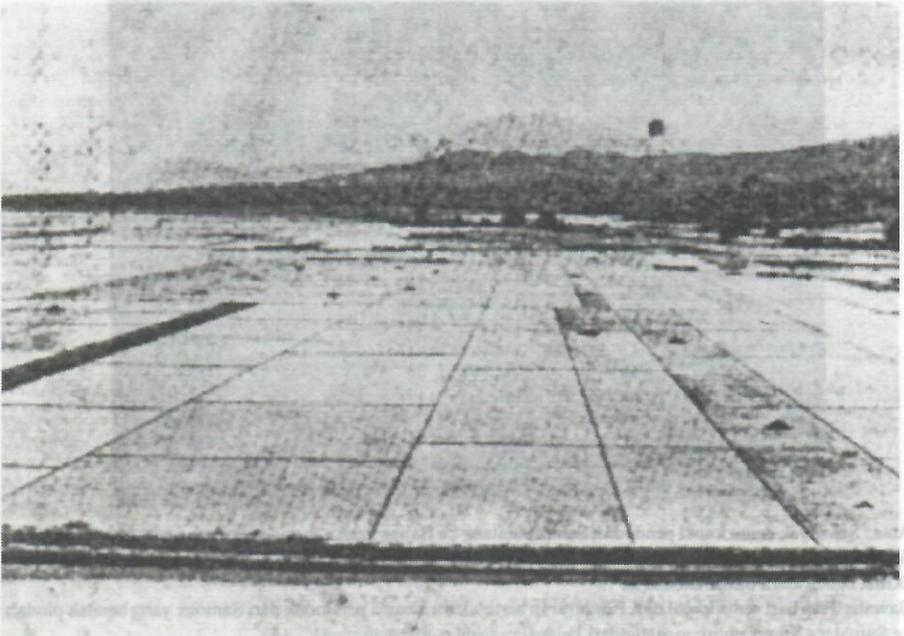
Bawah : Tiap hari senin kapal dari Pangururan bertolak membawa penduduk dari Samosir yang hendak pindah ke Sumatera Timur untuk menghindari kelaparan yang sudah memuncak.

Sumber : Repro dari *Waspada*. (Medan), 27.3.1953

W. Haibach (1927: 21), kontrolir yang menggantikan Middendorp, menyebutkan bahwa tahun 1922, misalnya, Samosir mengimpor beras bernilai 13.000 gulden dari daerah lain.

Kesulitan di bidang pertanian terus berlangsung. Hutan semakin gundul dan sumber air pun semakin berkurang. Kesulitan air semakin terasa sejak Belanda membakar semua hutan di Samosir dalam masa perang kemerdekaan, sehingga sumber air untuk persawahan habis (*Waspada*, 14.1.1964). Banyak persawahan yang berubah menjadi perladangan karena sumber-sumber air dari gunung tidak mampu lagi mengairinya. Tahun 1951, misalnya, Samosir mengalami guncangan hebat, hampir 1 tahun lamanya terjadi musim kemarau yang memaksa masyarakat mengalihkan tanaman padi menjadi kacang dan bawang. Pada waktu itu bahaya kelaparan yang hebat mengancam jiwa penduduk sehingga banyak yang pindah ke luar daerah secara spontan dan meminta untuk dipindahkan. Menurut hasil

Gambar 3. Persawahan di Silindung, 1914



Sumber : Repro dari *Waspada*. (Medan), 31.3.1976.

wawancara dengan para pengetua yang turut mengalami dan didukung hasil liputan wartawan, terjadi ancaman bahaya kelaparan terhadap 120.000 penduduk Samosir akibat musim kering yang berkepanjangan itu. Setiap hari Senin kelihatan beberapa kapal yang bertolak dari Pangururan membawa penduduk yang berani meninggalkan kampung halamannya, terutama kaum laki-laki. Banyak dari antara mereka menuju Sumatera Timur dan diperkirakan yang tinggal di Samosir pada waktu itu kira-kira 30% laki-laki (*Waspada*, 27.3.1953). Situasi kehidupan di Samosir sangat menyedihkan. Kelaparan atau masa kritis terutama selama musim kering adalah tipe Samosir. Akibatnya banyak penduduk dari Samosir bekerja sebagai tenaga kerja musiman. Banyak suami yang meninggalkan istri dan anak-anaknya di desa, pergi ke luar Tapanuli Utara diantaranya untuk berdagang keliling, *marjajo*, tetapi banyak juga yang pindah dengan tujuan mencari lahan pertanian.

Bencana tersebut sangat kritis baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, sehingga Pemda Tapanuli Utara mengusahakan kerjasama dengan Pemda Sumatera Timur untuk mengakomodasi penduduk yang pindah ke daerah-daerah yang masih kosong di daerah Asahan-Labuhan Batu. Delegasi DPRDS Tapanuli Utara yang diwakili oleh S.M. Simanjuntak dan S.B. Pasaribu diutus ke Jakarta, khusus untuk menghubungi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum mengenai penanggulangan akibat kemarau yang berkepanjangan tersebut. Pertemuan tersebut melahirkan gagasan penggunaan pompa air dari Danau Toba untuk mengairi lahan di Pulau Samosir (*Waspada*, 15.4.1953). Pada waktu yang hampir bersamaan, ketika Presiden Sukarno berkunjung ke Balige (Tapanuli Utara) rakyat Samosir datang beramai-ramai dengan enam kapal membawa slogan, antara lain berbunyi: "Seruan 120.000 rakyat Samosir: Pemerintah!!! Bantulah segera kami yang menderita akibat bencana alam musim kemarau" (*Waspada*, 27.3.1953). Sebagai wujud nyatanya, direncanakan membangun 8 pompa air dari Danau Toba, dan tidak lama kemudian telah dibangun satu pompa air berbiaya Rp. 60.000 yang mampu mengairi 80-100 Ha di Lumban Suhi-suhi dan satu lagi di Rianiate dengan daya yang lebih besar (*Waspada*, 14.11.1955).

Kehadiran kedua pompa air tersebut, ternyata hanya mampu mengairi sekitar 6% dari 3.000 ha luas persawahan di Samosir. Oleh sebab itu, ancaman kelaparan masih terus menghantui mereka, walaupun penduduknya tinggal sekitar 70.000 jiwa lagi. Sebagai tindak lanjut keinginan masyarakat Samosir pindah, tahun 1955 sudah direncanakan memindahkan sekitar 250 keluarga ke Sungai Kepayang Labuhan Batu dan sebelumnya juga telah direncanakan memindahkan yang lain ke Sungai Lebah. Akan tetapi sampai beberapa tahun menunggu realisasi tidak ada sehingga sebagian dari mereka secara spontan pindah ke daerah yang dianggap layak dimana mereka dapat

mengusahai lahan pertanian yang lebih luas. Sebagian lagi telah meninggalkan kampungnya, mencari daerah baru untuk menjual barang dagangannya.

Pompa air yang dibangun di Samosir atas instruksi wakil Presiden (tahun 1955) berjumlah 5 buah. Setelah beberapa tahun kelima pompa air tersebut tidak dapat lagi berfungsi seluruhnya sehingga kesulitan air makin besar lagi. Untuk mengatasi hal tersebut mulailah ditanami pinus dan tahun 1964 sudah ada seluas 10.000 ha (*Waspada*, 14.1.1964). Kemudian pada tahun 1969 ketika Dr. A.M. Tambunan menjabat Menteri Sosial RI, Pulau

Gambar 4. Lembah dan Kaki Bukit Menjadi Areal Pertanian di Samosir, 1989

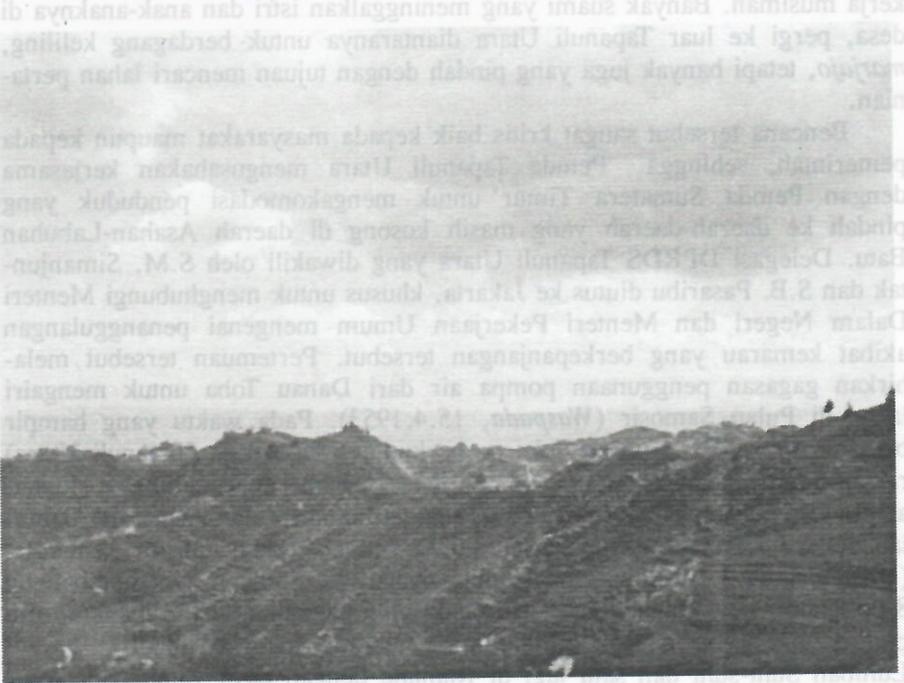
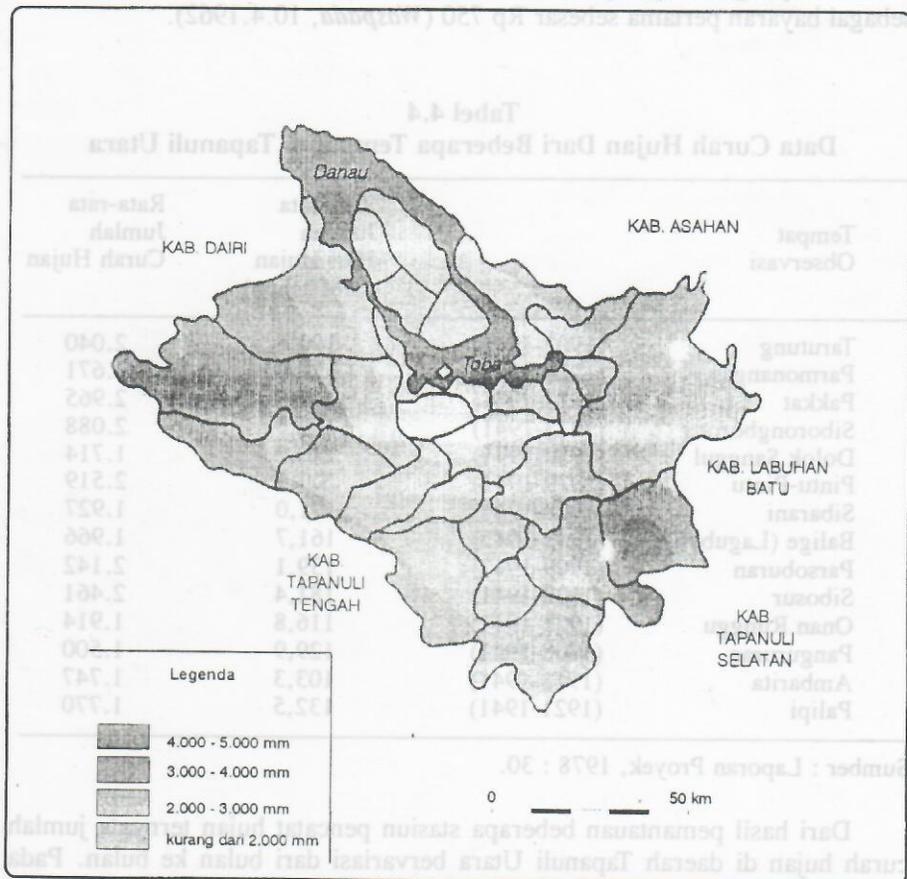


Foto : Elvis F. Purba (1989).

Samosir mendapat sebuah kincir angin, bantuan bersama Departemen Sosial dan Departemen PU Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk memompa air minum sekaligus untuk pengairan sawah yang diperkirakan mampu mengairi 30-100 ha. Namun sayang, kincir itu ditempatkan di Kampung Galungan Dewan Negeri Simarmata, sehingga bantuan tersebut kurang mengenai sasarannya. Masyarakat di sana sudah lebih suka menanam bawang daripada padi karena tanaman bawang dapat menghasilkan lebih cepat.

Peta 8. Tapanuli Utara : Pola Curah Hujan Sebelum Perang Dunia II



Sumber : *Laporan Proyek dan Penelitian Tanah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, 1978.*

Selain mengancam pertanian di Pulau Samosir, kesulitan air menjadi persoalan juga di daerah Silindung. Sebelum kolonial (tahun 1866) di Sipoholon pernah dibuka persawahan dan telah sempat diusahai. Beberapa tahun kemudian mengalami kemacetan karena sesuatu hal. Kemudian ketika pendudukan Jepang lahan tersebut kembali dibuka (tahun 1944), tetapi akhirnya mengalami kemacetan lagi akibat ketiadaan air. Hampir dua dasawarsa lahan itu tidak diusahai dan barulah tahun 1962 dibuka kembali seluas 400 ha dalam rangka 'self supporting' beras dengan syarat tiap penduduk yang ikut mengusahai dikenakan biaya sebesar Rp 4.000/ha dan sebagai bayaran pertama sebesar Rp 750 (*Waspada*, 10.4.1962).

**Tabel 4.4**  
**Data Curah Hujan Dari Beberapa Tempat di Tapanuli Utara**

Tempat Observasi		Rata-rata Jumlah Hari Hujan (MM/tahun)	Rata-rata Jumlah Curah Hujan
Tarutung	(1902-1941)	190,5	2.040
Parmonangan	(1924-1941)	172,3	2.671
Pakkat	(1923-1941)	146,0	2.965
Siborongborong	(1913-1941)	142,4	2.088
Dolok Sanggul	(1919-1941)	140,2	1.714
Pintu-Pintu	(1929-1941)	200,9	2.519
Sibarani	(1928-1941)	171,0	1.927
Balige (Laguboti)	(1941-1945)	161,7	1.966
Parsoburan	(1909-1941)	139,1	2.142
Sibosur	(1920-1941)	181,4	2.461
Onan Runggu	(1921-1941)	116,8	1.914
Pangururan	(1908-1941)	129,9	1.500
Ambarita	(1918-1941)	103,3	1.747
Palipi	(1921-1941)	132,5	1.770

Sumber : Laporan Proyek, 1978 : 30.

Dari hasil pemantauan beberapa stasiun pencatat hujan ternyata jumlah curah hujan di daerah Tapanuli Utara bervariasi dari bulan ke bulan. Pada umumnya curah hujan terkecil jatuh pada bulan Juni-Juli dan terbesar pada bulan Oktober, Nopember dan Desember. Sebelum Perang Dunia II diperoleh gambaran jumlah curah hujan tahunan bervariasi dari 1.500 sampai 3.000 mm/tahun dan hari hujan rata-rata antara 100 sampai 200 hari/tahun. Jumlah curah hujan terendah terdapat di daerah Samosir dan dataran tinggi

sekitar danau Toba (Tabel 4.4). Musim kemarau sering terjadi dalam tenggang waktu yang panjang di daerah Samosir dan sekitar Danau Toba. Hujan yang berasal dari hembusan angin musim barat sekitar bulan Juni hingga September dari Samudra Indonesia, sering habis tercurah di Aceh, Barus, Sibolga di bagian Barat Bukit Barisan dan Sumatera Timur bagian Utara, sedangkan yang tersisa bagi daerah Samosir, Toba dan Humbang hanyalah angin yang tidak lagi membawa hujan. Alhasil, musim kemarau pun sering terjadi untuk waktu yang cukup panjang (Sijabat, 1982 : 152). Gambaran seperti itu tidak jauh berbeda dengan keadaan dewasa ini. Jumlah curah hujan tahunan bervariasi dan khusus daerah Samosir tetap merupakan daerah yang jumlah curah hujannya terkecil.

Menurut klasifikasi iklim oleh Koppen, daerah Tapanuli Utara mempunyai jenis iklim sedang, atau tipe iklim C, pada bulan kering dengan curah hujan kurang dari 60 mm/bulan. Suhu udara pada bulan terdingin berkisar antara 3-18°C (Laporan Proyek, 1978 : 26).

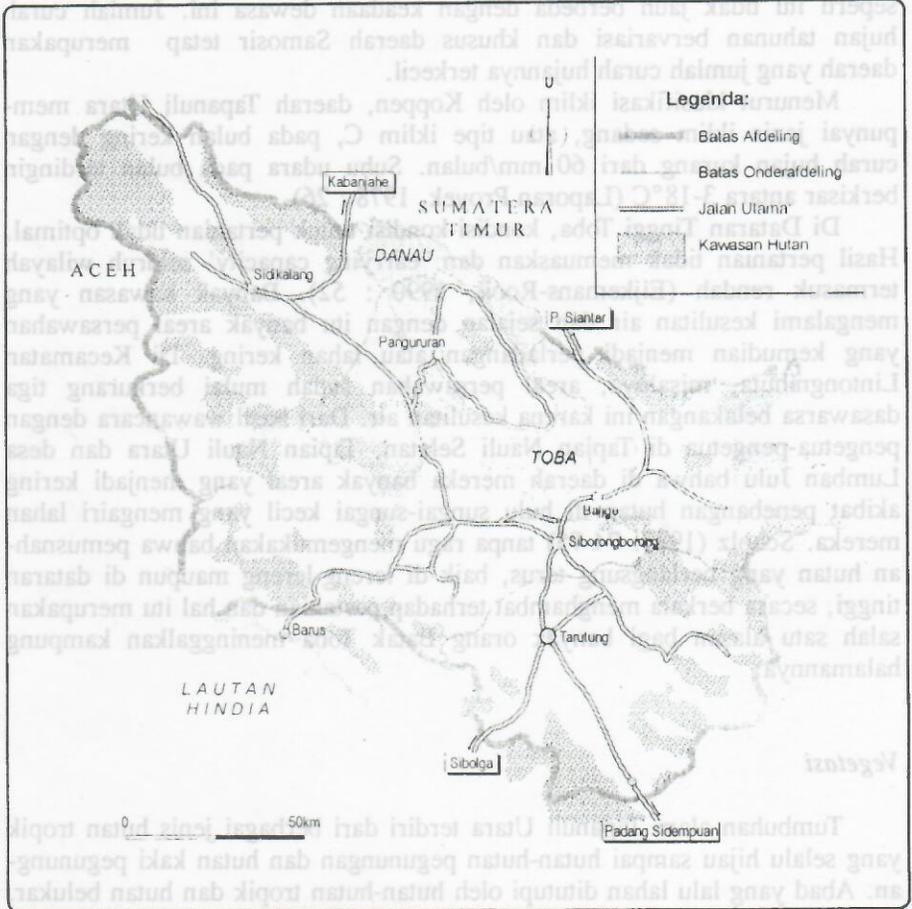
Di Dataran Tinggi Toba, kondisi-kondisi untuk pertanian tidak optimal. Hasil pertanian tidak memuaskan dan 'carrying capacity' seluruh wilayah termasuk rendah (Eijkemans-Rooij, 1990 : 52). Banyak kawasan yang mengalami kesulitan air dan sejalan dengan itu banyak areal persawahan yang kemudian menjadi perladangan atau lahan kering. Di Kecamatan Lintongnihuta, misalnya, areal persawahan sudah mulai berkurang tiga dasawarsa belakangan ini karena kesulitan air. Dari hasil wawancara dengan pengetua-pengetua di Tapian Nauli Selatan, Tapian Nauli Utara dan desa Lumban Julu bahwa di daerah mereka banyak areal yang menjadi kering akibat penebangan hutan di hulu sungai-sungai kecil yang mengairi lahan mereka. Scholz (1983: 74-75) tanpa ragu mengemukakan bahwa pemusnahan hutan yang berlangsung terus, baik di lereng-lereng maupun di dataran tinggi, secara berkala menghambat terhadap pertanian dan hal itu merupakan salah satu alasan bagi banyak orang Batak Toba meninggalkan kampung halamannya.

### Vegetasi

Tumbuhan alam Tapanuli Utara terdiri dari berbagai jenis hutan tropik yang selalu hijau sampai hutan-hutan pegunungan dan hutan kaki pegunungan. Abad yang lalu lahan ditutupi oleh hutan-hutan tropik dan hutan belukar. Di daerah perkampungan orang Batak Toba terdapat bidang-bidang kecil tanah yang ditanami dengan tanaman tahunan, terutama untuk kebutuhan mereka sendiri. Kampung-kampung biasanya dikelilingi oleh bambu berduri (*bulu duri*) atau dengan parik dari onggokan batu-batu besar yang disusun secara rapi sebagai benteng pertahanan terhadap serangan musuh.

Dalam laporan perjalanan Burton dan Ward ke Tanah Batak (1824) diketahui bahwa hasil-hasil hutan yang dianggap bernilai adalah kemenyaan, kapur barus dan gambir, yang dijual ke daerah Barus. Pada daerah-daerah yang datar hutan belukar menjadi rusak akibat ulah penduduk, diantaranya melalui perladangan berpindah maupun tetap. Padi ladang, padi sawah dan ubi merupakan tanaman tahunan sebagai sumber bahan makanan penduduk.

Peta 9. Afdeling Bataklanden : Peta Hutan Sekitar Tahun 1936.



Sumber : J.W.Th. Heringa (1936 : Lpr. 17).

Selama tiga atau empat dasawarsa pertama kehadiran missioner Jerman di Tanah Batak, pembukaan lahan untuk tanaman pangan, terutama persawahan semakin bertambah. Namun cadangan lahan yang cocok buat persawahan semakin habis karena lahan-lahan seperti itu sangat terbatas banyaknya. Pada dekade-dekade berikutnya penebangan hutan di daerah dataran tinggi dan di atas pulau Samosir menambah kesulitan sumber-sumber air. Selain untuk pertanian, di berbagai kampung yang letaknya jauh dari permukaan Danau Toba, air untuk keperluan sehari-hari pun semakin sulit diperoleh dalam jumlah yang memadai. Lahan pertanian kering semakin banyak dan persawahan semakin sedikit. Di dasar lembah sungai-sungai atau dataran sempit di antara bukit dapat ditemukan hamparan persawahan yang luasnya kecil-kecil.

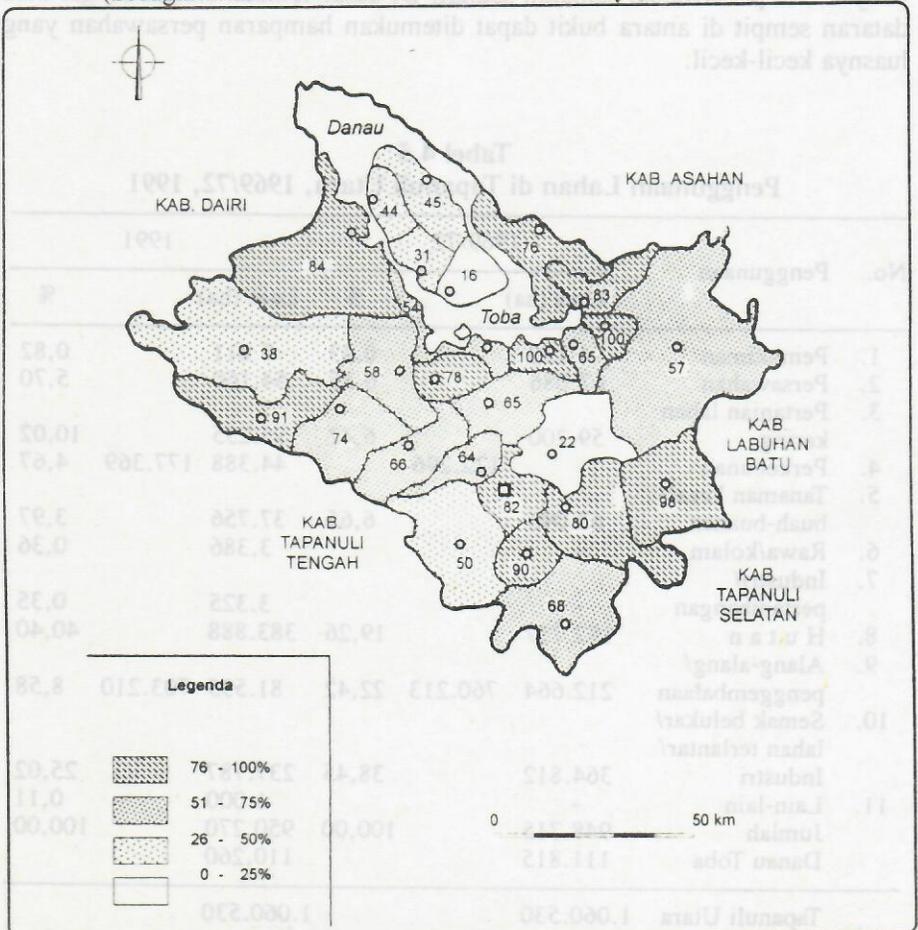
**Tabel 4.5**  
**Penggunaan Lahan di Tapanuli Utara, 1969/72, 1991**

No.	Penggunaan	1969/72		1991	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1.	Pemukiman	4.120	0,43	7.811	0,82
2.	Persawahan	62.086	6,55	54.160	5,70
3.	Pertanian lahan kering	59.200	6,42	95.255	10,02
4.	Perkebunan	-	122,296	44.388	177,369
5.	Tanaman keras/ buah-buahan	63.096	6,65	37.756	3,97
6.	Rawa/kolam	-	-	3.386	0,36
7.	Industri/ pertambangan	-	-	3.325	0,35
8.	H u t a n	182.737	19,26	383.888	40,40
9.	Alang-alang/ pengembalaan	212.664	760,213	22,42	81.535
10.	Semak belukar/ lahan terlantar/ Industri	364.812	38,45	237.787	25,02
11.	Lain-lain	-	-	1.000	0,11
	Jumlah	948.715	100,00	950.270	100,00
	Danau Toba	111.815	-	110.260	-
	Tapanuli Utara	1.060.530	-	1.060.530	-

Sumber : Laporan Proyek, 1978 : 50; *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara 1993/1994* : 18.

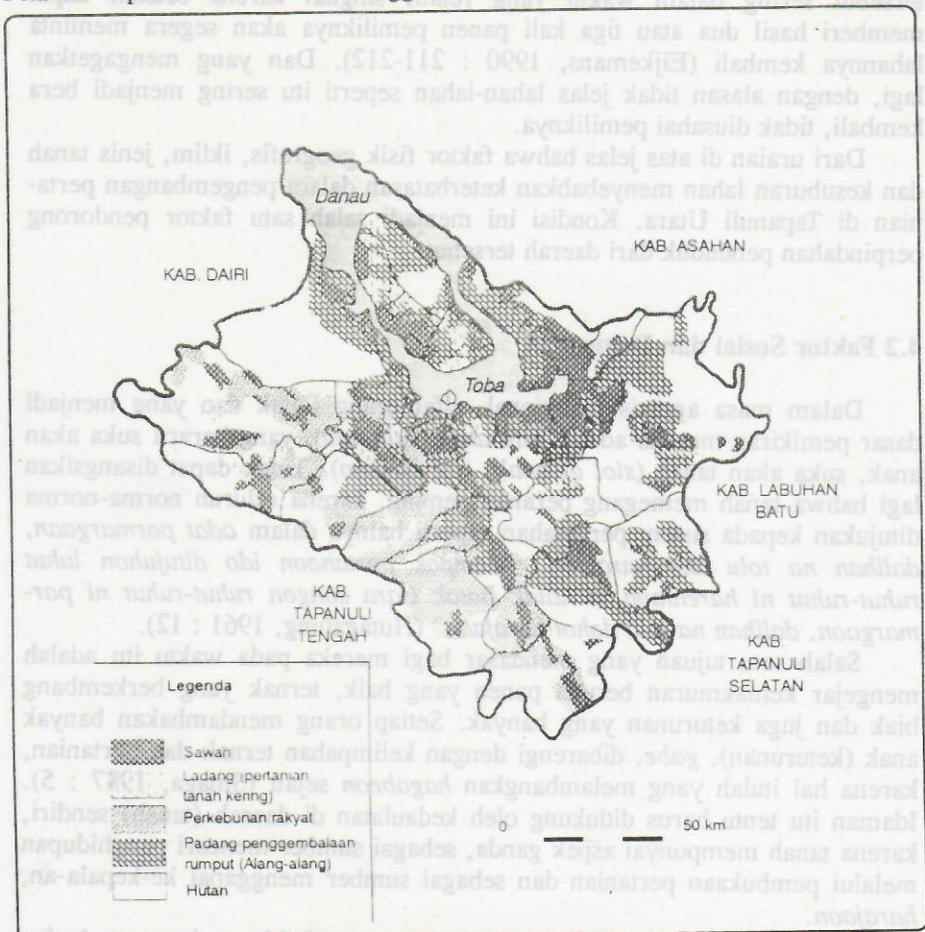
Kurang lebih dua dekade terakhir, penggunaan lahan di Tapanuli Utara tidak banyak mengalami perubahan. Di beberapa tempat penggunaan areal hutan, alang-alang/ penggembalaan dan semak belukar mengalami perubahan, secara keseluruhan dari 760.213 ha tahun 1969/72 menjadi 703.210 ha tahun 1991. Perubahan ini diimbangi dengan perluasan pertanian pada lahan kering, perkebunan dan tanaman keras/buah-buahan dari 122.296 ha menjadi 177.369 ha (Tabel 4.5).

Peta 10. Tapanuli Utara : Luas Areal Sawah Menurut Kecamatan, 1976 (Sebagai % dari Luas Areal Pertanian Seluruhnya)



Sumber : Disusun Berdasarkan Data *Kompilasi Data : Statistik Fasilitas Sosial Desa Tingkat Kecamatan*. 1976.

Peta 11. Tapanuli Utara : Pola Penggunaan Tanah, 1986.



Sumber : Disusun Berdasarkan *Data Pokok Pembangunan Daerah*.  
Publikasi No.431, 1986.

Berkurangnya sumber air serta perluasan daerah pemukiman merupakan faktor yang menyebabkan kurangnya luas persawahan. Sementara itu status tanah adat merupakan salah satu faktor penting dan penentu yang dapat menerangkan mengapa masih banyak dijumpai lahan-lahan terlantar. Lahan tadah hujan itu ada yang dapat diusahai dan banyak juga yang tidak. Dari hasil wawancara dengan penduduk desa bahwa di beberapa tempat sebagian petani-petani mempunyai kemungkinan untuk menggunakan lahan

alang-alang, dalam arti meminjam dari pemiliknya. Akan tetapi pemakaian tersebut sering dalam waktu yang relatif singkat karena setelah dapat memberi hasil dua atau tiga kali panen pemiliknya akan segera meminta lahannya kembali (Eijkemans, 1990 : 211-212). Dan yang mengagetkan lagi, dengan alasan tidak jelas lahan-lahan seperti itu sering menjadi bera kembali, tidak diusahai pemiliknya.

Dari uraian di atas jelas bahwa faktor fisik geografis, iklim, jenis tanah dan kesuburan lahan menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan pertanian di Tapanuli Utara. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong perpindahan penduduk dari daerah tersebut.

#### 4.2 Faktor Sosial dan Demografi

Dalam masa agraris tradisional, sifat orang Batak dan yang menjadi dasar pemikiran mereka adalah *lulu anak*, *lulu tano*, yang berarti suka akan anak, suka akan tanah (*siol di anak*, *siol di tano*). Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tanah memegang peranan penting, karena seluruh norma-norma ditujukan kepada sistem pertanahan seperti halnya dalam *adat parmargaan*, *dalihan na tolu* dan *harajaon*. "*Dompok partanoon ido ditujuhon luhut ruhut-ruhut ni harentaon ni halak Batak isara songon ruhut-ruhut ni parmargaon, dalihan na tolu dohot harajaon*" (Hutagalung, 1961 : 12).

Salah satu tujuan yang mendasar bagi mereka pada waktu itu adalah mengejar kemakmuran berupa panen yang baik, ternak yang berkembang biak dan juga keturunan yang banyak. Setiap orang mendambakan banyak anak (keturunan), *gabe*, dibarengi dengan kelimpahan ternak dan pertanian, karena hal itulah yang melambangkan *hagabeon* sejati (Sinaga, 1987 : 5). Idaman itu tentu harus didukung oleh kedaulatan di daerah (tanah) sendiri, karena tanah mempunyai aspek ganda, sebagai sumber mencari penghidupan melalui pembukaan pertanian dan sebagai sumber menggapai ke-kepala-an, *harajaon*.

Pertambahan penduduk lama kelamaan menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian yang ada. Mula-mula perluasan dilakukan di dalam wilayah perkampungan sendiri yang masih kosong dan kemudian keluar wilayah. Mereka membuat tanda sekitar tanah yang akan dibukanya (dengan mengikat ujung rumput) dan tanah yang digarap itu kemudian menjadi kepunyaannya, *tano golat*, bagi yang membuka dan keturunannya. Hak atas *golat* adalah marga yang membukanya dan marga itulah yang mengukuhkan haknya atas penguasaan tanah tersebut (Vergouwen, 1964 : 113). Dalam masyarakat tradisional, mendirikan kampung-kampung baru diyakini dapat memperbesar *sahala* (Lumbantobing, 1957: 17).

Pada generasi-generasi berikutnya *tano golat* tersebut tidak dapat dibagi-bagi, berupa "*gumul na so tupa bagion, ansimun na so jadi bolaon*", karena itu telah menjadi tanah marga (Hutagalung, 1961 : 13). Hak milik ada pada marga bukan orang perorangan, sehingga tanah-tanah seperti itu sering menjadi bera, *tarulang*, yang dapat disaksikan hingga kini di daerah Tapanuli Utara.

Gambar 5. Rumah Sakit Zending di Tarutung, 1910.

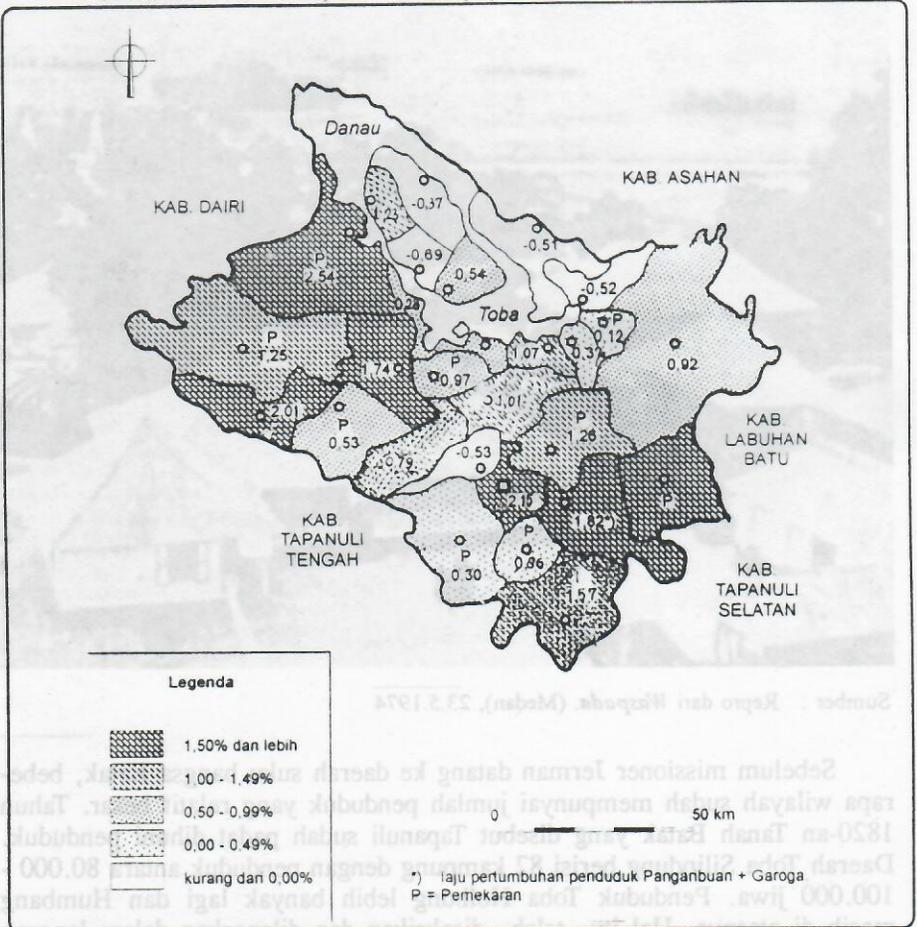


Sumber : Repro dari *Waspada*. (Medan), 23.5.1974

Sebelum missioner Jerman datang ke daerah suku bangsa Batak, beberapa wilayah sudah mempunyai jumlah penduduk yang relatif besar. Tahun 1820-an Tanah Batak yang disebut Tapanuli sudah padat dihuni penduduk. Daerah Toba Silindung berisi 82 kampung dengan penduduk antara 80.000 - 100.000 jiwa. Penduduk Toba Holbung lebih banyak lagi dan Humbang masih di atasnya. Hal itu telah disaksikan dan dilaporkan dalam laporan

perjalanan Burton-Ward ke daerah Silindung (tahun 1824) dalam *Transactions of The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* (Vol. 1.1927: 485-513). Sekitar dua dasawarsa berikutnya, F. Junghuhn (1847 : 218) menemukan gambaran yang hampir sama tentang jumlah penduduk. Junghuhn memberitahukan bahwa tahun 1840 penduduk Silindung sangat padat. Pada waktu itu penduduk Lembah Silindung saja terdapat  $\pm 10.500$  jiwa.

Peta 12. Tapanuli Utara : Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata Pertahun Menurut Kecamatan, 1930-1961 (%)



Sumber : Dihitung dari Data Volkstelling 1930 dan Sensus Penduduk, 1961.

Sewaktu terjadi pengkristenan pertengahan abad XIX, orang Batak Toba muncul sebagai golongan yang maju. Jumlah mereka bertambah besar secara menonjol berkat usaha-usaha zending di bidang kesehatan. Setiap keluarga mempunyai 10 anak atau lebih merupakan hal biasa dalam masyarakat Batak tradisional. Salah satu akibatnya adalah tekanan terhadap lahan pertanian. Kemungkinan pembukaan areal pertanian, terutama persawahan baru di daerah sendiri semakin berkurang dan muncullah petani-petani yang haus lahan yang subur dan luas. Keterbatasan di daerah sendiri menyebabkan mereka keluar dari Tapanuli Utara.

**Tabel 4.6**  
**Penduduk Daerah Tapanuli, 1920**

Onderafdeling	Pribumi	Eropah	Asia	Jumlah
Toba	125.610	69	101	125.780
Silindung	85.446	123	111	85.680
Samosir	83.433	9	-	83.442
Humbang	74.552	25	16	74.593
Barus	38.317	10	381	38.708
Dairi	32.956	11	97	33.064
<b>Afdeling Tanah Batak</b>	<b>440.314</b>	<b>247</b>	<b>706</b>	<b>441.267</b>
Angkola-Sipirok	75.125	174	453	75.752
Mandailing	59.458	19	97	60.074
Padang Lawas	55.839	4	32	55.875
Natal	18.437	2	77	19.016
<b>Afdeling P. Sidempuan</b>	<b>209.859</b>	<b>199</b>	<b>659</b>	<b>210.717</b>
<b>Afdeling Sibolga</b>	<b>27.876</b>	<b>460</b>	<b>2.421</b>	<b>30.757</b>
<b>J u m l a h</b>	<b>678.049</b>	<b>906</b>	<b>3.786</b>	<b>682.742</b>

Sumber : *Immanuel*, 24.4.1921 : 63.

Permulaan abad ini sebagian dari petani itu sudah pindah ke daerah lain setelah terbuka jalan keluar (berita daerah lain dan ada kemungkinan untuk pindah). Secara berkelompok mereka pindah, seperti ke daerah Simalungun ( $\pm$  1903/1904), Dairi (1906/1907), Tanah Alas dan lain-lain. Hampir bersamaan dengan itu kaum terdidik pun meninggalkan kampung halamannya. Ada yang bekerja di instansi pemerintah, rumah sakit, sekolah dan

lain-lain. Walaupun sebagian telah pindah secara permanen, tekanan terhadap lahan pertanian di daerah sendiri tetap tidak terelakkan akibat pertumbuhan penduduknya. Daerah Toba Holbung (onderafdeling Toba), daerah persawahan yang subur itu, tetap mempunyai penduduk yang banyak. Dalam *50 Jahre Batakmission in Sumatra*, yang terbit di Berlin tahun 1911, Warneck (1911 : 152) mengemukakan bahwa penduduk Toba paling banyak di Tapanuli. Gambaran yang sama dapat juga dilihat dari banyaknya penduduk masing-masing onderafdeling tahun 1920 (Tabel 4.6.).

Semua onderafdeling yang ada di Afdeling Bataklanden menjadi daerah asal petani yang bermukim di daerah lain. Daerah Humbang (kepadatan tahun 1930 adalah 68 orang/km<sup>2</sup> ; Volkstelling 1930 : 10), walaupun daerahnya tergolong luas, pertumbuhan penduduknya memperbesar arus perpindahan karena lahannya tidak subur. Demikian juga dari Samosir (kepadatan penduduknya 69,2 orang/km<sup>2</sup> ; Volkstelling 1930 : 10) dengan berbagai keterbatasannya, terutama akibat musim yang tidak menentu bagi pertaniannya, pertumbuhan penduduk menambah arus perpindahan dari daerah itu. Selain dari ketiga daerah tersebut, arus perpindahan penduduk dari Silindung pun tidak dapat dihentikan.

Tabel 4.7

## Orang Batak Toba di Simalungun, Dairi dan Tanah Alas, 1930

Daerah Asal	Simalungun	Dairi	Tanah Alas	Jumlah Imigran
Toba Holbung	15.821	1.655	*	27.957
Humbang	4.396	8.761	*	22.319
Silindung	3.357	-	*	17.702
Samosir	6.859	2.819	-	15.150
<b>J u m l a h</b>	<b>30.433</b>	<b>13.245</b>	<b>1.789</b>	<b>83.128</b>

\*) Daerah asal orang Batak Toba yang tinggal di Tanah Alas.

Sumber : Volkstelling 1930 : 35,37.

Hingga beberapa lama, faktor jarak dan kebiasaan di daerah asal nampaknya turut menentukan pilihan ke daerah mana akan pindah. Penduduk yang pindah dari Toba Holbung dan Silindung lebih banyak menuju daerah Simalungun dibandingkan dengan ke Dairi dan Tanah Alas karena di sana mereka dapat meneruskan pola pertanian sawah dari kampung halamannya. Dari daerah Humbang lebih banyak menuju Dairi karena jaraknya

lebih dekat dan dapat meneruskan pola pertanian ladangnya di daerah itu. Sebaliknya dari Samosir banyak yang pindah ke daerah persawahan di Simalungun. Tahun 1930 jumlah orang Batak Toba dari daerah Toba Holbung, Humbang, Silindung dan Samosir di luar Tapanuli sebanyak 83.128 jiwa, diantaranya 30.433 di Simalungun. Pada tahun yang sama terdapat 13.245 dan 1.789 masing-masing di Dairi dan Tanah Alas, yang berasal dari tiga daerah yang disebut duluan (Tabel 4.7).

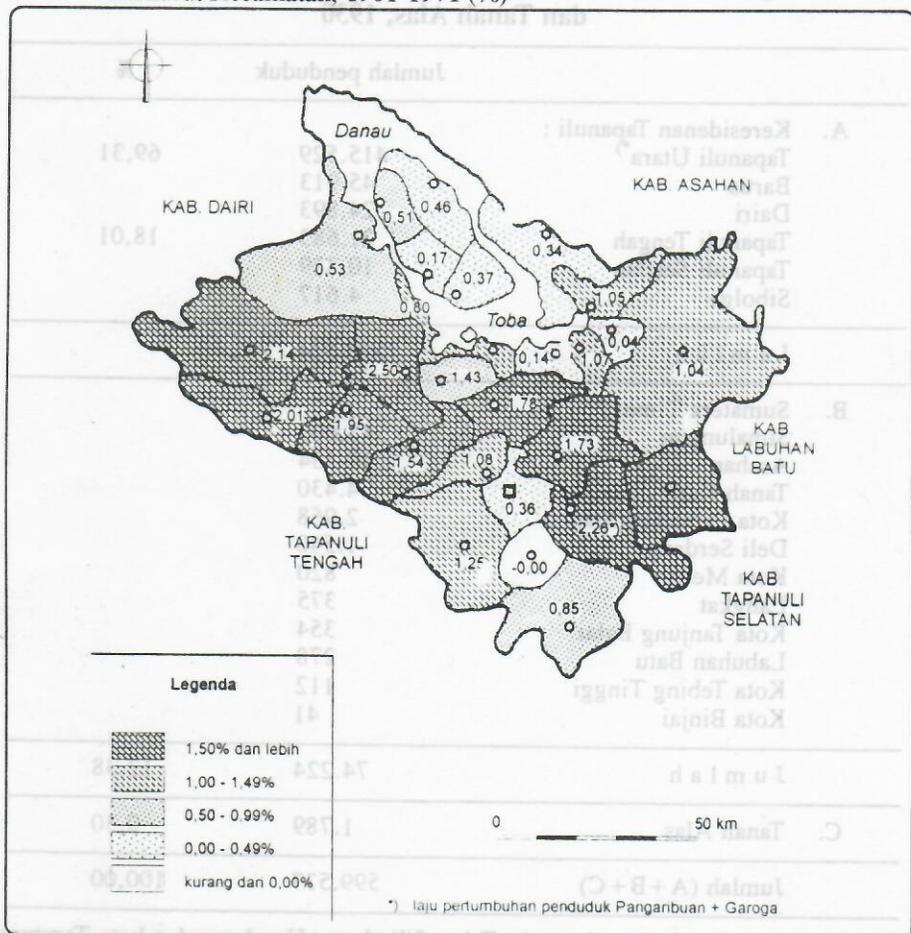
**Tabel 4.8**  
**Orang Batak Toba di Keresidenan Tapanuli, Sumatera Timur dan Tanah Alas, 1930**

	Jumlah penduduk	%
<b>A. Keresidenan Tapanuli :</b>		
Tapanuli Utara	415.529	69,31
Barus	45.913	
Dairi	24.893	
Tapanuli Tengah	21.683	18,01
Tapanuli Selatan	10.889	
Sibolga	4.617	
<b>J u m l a h</b>	<b>523.524</b>	
<b>B. Sumatera Timur :</b>		
Simalungun	45.603	
Asahan	17.334	
Tanah Karo	4.430	
Kota Pematang Siantar	2.968	
Deli Serdang	1.540	
Kota Medan	820	
Langkat	375	
Kota Tanjung Balai	354	
Labuhan Batu	278	
Kota Tebing Tinggi	112	
Kota Binjai	41	
<b>J u m l a h</b>	<b>74.224</b>	<b>12,38</b>
<b>C. Tanah Alas</b>	<b>1.789</b>	<b>0,30</b>
<b>Jumlah (A+B+C)</b>	<b>599.537</b>	<b>100,00</b>

\*) Meliputi onderafdeling Samosir, Toba, Silindung, Humbang dan kota Tarutung (Tidak termasuk Parlilitan yang pada waktu itu masuk onderafdeling Barus).  
Sumber : Volkstelling 1930, IV : 30-31, 35 (diolah)

Menurut sensus 1930 sekitar 30% dari jumlah orang Batak Toba tinggal di luar Tapanuli Utara (Tabel 4.8). Sebagian besar dari mereka adalah para petani yang telah menetap dan tinggal di daerah pertanian, seperti di Simalungun, Barus, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Asahan, Tanah Alas dan daerah lain. Tahun-tahun selanjutnya arus perpindahan itu semakin besar karena kaum tani, kaum terdidik dan orang-orang yang akan melanjutkan pendidikan pada akhirnya kebanyakan tinggal di daerah lain.

Peta 13. Tapanuli Utara : Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata Pertahun Menurut Kecamatan, 1961-1971 (%)



Sumber : Dihitung dari Sensus Penduduk 1961 dan 1971.

Khususnya bagi kaum tani, keterbatasan lahan pertanian akibat faktor fisik geografis/ ekologi dan tanah-tanah adat tidak menutup kemungkinan bagi anak sulung, *sihahaan*, dan anak bungsu, *siampudan*, untuk meninggalkan kampung halamannya. Ketentuan (secara tersirat) bahwa mereka diharapkan tidak jauh dari orang tuanya (tinggal di *huta*), sehubungan dengan hak mereka yang lebih besar dalam sistem pewarisan (Vergouwen, 1964 : 280), tidak dapat dipertahankan lagi. Mereka meninggalkan lahannya yang sempit untuk memperoleh lahan yang lebih luas ke sektor pertanian atau di luar sektor pertanian di daerah lain. Sampai sekarang pun tidak ada ketentuan agar anak sulung dan anak bungsu tinggal di desanya. Dua daerah pertanian, Deli Serdang dan Asahan yang dipilih sebagai sampel penelitian, memberikan gambaran tentang hal itu. Anak sulung dan anak bungsu turut meninggalkan desanya, dan malah jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan anak tengah, *silitonga* (Tabel 4.9). Walaupun mungkin gambaran tersebut tidak berlaku bagi seluruh daerah pertanian di mana orang Batak Toba berada, hal itu dapat menggambarkan ketidakmampuan lahan pertanian di kampung halaman untuk memenuhi kebutuhan. Lahan pertanian yang diusahai seseorang sudah semakin sempit dan mungkin tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan isteri dengan beberapa orang anak.

Jauh sebelum kedatangan Nommensen ke Tanah Batak sudah terjadi perpencaran dan perpecahan lahan pertanian di Tapanuli Utara. Pemberian orang tua terhadap anaknya laki-laki berupa sebidang lahan, yang disebut *panjaean* (dan juga bagi anak perempuan yang disebut *pauseang*) menyebabkan hal itu. Pemberian tersebut bukan sekedar tuntutan adat tetapi sekaligus memberi sumber mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari generasi ke generasi, pemberian tanah seperti itu menyebabkan perpecahan dan perpencaran lahan pertanian yang luasnya semakin sempit dibandingkan dengan yang diterima orang tuanya atau kakeknya. Bagi petani-petani kecil yang miskin, pindah dari Tapanuli Utara adalah untuk mengubah situasi hidup mereka yang menyedihkan di kampung halaman. Tidak ada kemungkinan untuk menikmati situasi hidup yang lebih baik mempercepat mereka pindah ke daerah lain. Sekalipun mereka menerima *panjaean* apabila menurut perhitungannya lahan yang diusahai tidak memadai lagi untuk membutuhi mereka, perpindahan itu mungkin tidak dapat dihindarkan. Gambaran ini terekam juga dari data lapangan, dimana sebagian besar (72,3%) anggota sampel menerimanya (Tabel 4.10). Angka-angka dalam tabel tersebut menggambarkan bawah adanya lahan *panjaean* yang diterima dari orang tuanya tetap tidak dapat menahan mereka keluar dari desanya.

Tabel 4.9  
Kedudukan Responden dalam keluarga\*)

Daerah penelitian	Kedudukan dalam keluarga			Jumlah
	Anak Sulung	Anak Tengah	Anak Bungsu	
Deli Serdang	14 (35,9 %)	17 (43,6 %)	8 (20,5 %)	39 (100 %)
Asahan	17 (44,7 %)	9 (23,7 %)	12 (31,6 %)	38 (100 %)
J u m l a h	31 (40,2 %)	26 (33,8 %)	20 (26,0 %)	77 (100 %)

\*) dilihat dari urutan kelahiran laki-laki dalam satu keluarga.

Sumber : Data lapangan, 1989.

Tabel 4.10  
Responden Penerimaan Panjaean di Tempat Tinggal Semula

Daerah penelitian	Menerima	Tidak menerima	Tidak ada jawaban	Jumlah
Medan	88 (70,4 %)	15 (12,0 %)	22 (17,6 %)	125 (100%)
Deli Serdang	26 (66,7 %)	11 (28,2 %)	2 (5,1 %)	39 (100%)
Asahan	32 (84,2 %)	6 (15,8 %)	-	38 (100%)
J u m l a h	146 (72,3 %)	32 (15,8 %)	24 (11,9 %)	202 (100%)

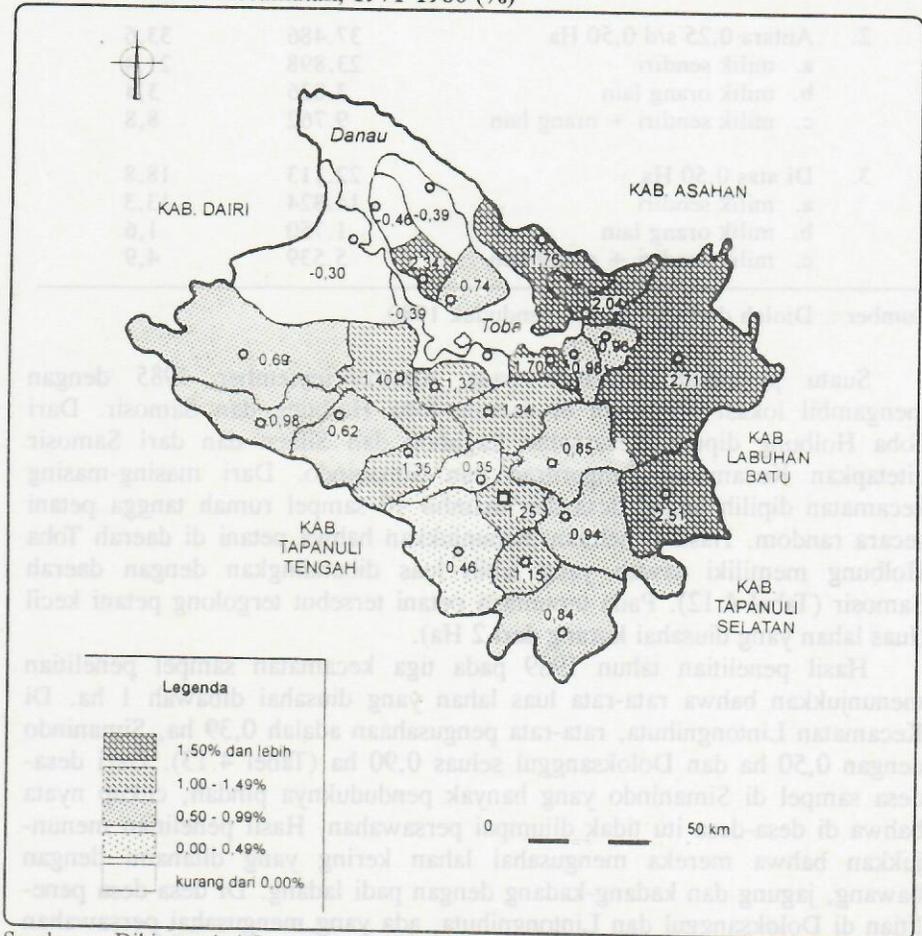
Sumber : Data lapangan, 1989

Bagaimana halnya dengan golongan *parripe* ? G.L. Tichelman, misalnya, menyatakan bahwa banyak dari antara orang Batak Toba yang pindah ke daerah-daerah perkebunan di Sumatera Timur adalah golongan *parripe*. Golongan ini tidak termasuk dalam inti dari suatu marga sehingga apabila mereka sekali saja meninggalkan desanya, tidak terdapat jaminan bahwa jika mereka kembali, akan diterima dengan mudah di desa tersebut. Itu dapat berarti, kata sarjana tersebut, orang-orang itu tidak merasa rugi meninggalkan desa, malah mungkin ikatan-ikatan desa tidak menguntungkan mereka lagi (Castles, 1972 : 93).

Tekanan terhadap lahan pertanian bukan hanya akibat pertambahan penduduk yang tetap tinggi (ingat: satu keluarga mempunyai 5 atau lebih anak), tetapi juga karena lahan adat, *tano golat*, belum dapat dimanfaatkan secara produktif (luasnya 660.628 ha atau 69,52 % dari luas daratan Tapanuli Utara ; Nainggolan, 1994 : 9). Kebanyakan para petani mengusahai

kurang dari 0,50 ha. Data sensus 1980, misalnya, menunjukkan hampir 47% dari jumlah rumah tangga petani mengusahai kurang dari 0,25 ha, 34 % dengan 0,25 - 0,50 ha dan hanya sekitar 19% di atas 0,50 ha. Dari keseluruhan, terdapat 13,2% yang hanya mengusahai tanah orang lain, 21,9% mengusahai milik sendiri dan tanah orang lain serta 64,8 % mengusahai milik sendiri (Tabel 4.11). Hal itu menunjukkan bahwa walaupun sudah banyak yang pindah ke luar daerah (petani dan non petani), sebagian besar petani yang tinggal adalah petani kecil (petani gurem).

Peta 14. Tapanuli Utara : Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata Tahunan Menurut Kecamatan, 1971-1980 (%)



Sumber : Dihitung dari Sensus Penduduk 1971 dan 1980.

**Tabel 4.11**  
**Rumah Tangga Petani Menurut Luas Pengusahaan Tanah**  
**di Tapanuli Utara, 1980**

Luas dan Pengusahaan lahan	Rumah Tangga	
	jumlah	%
1. Kurang dari 0,25 Ha	51.891	46,5
a. milik sendiri	29.801	30,1
b. milik orang lain	9.165	8,2
c. milik sendiri + orang lain	9.116	8,2
2. Antara 0,25 s/d 0,50 Ha	37.486	33,6
a. milik sendiri	23.898	21,4
b. milik orang lain	3.826	3,4
c. milik sendiri + orang lain	9.762	8,8
3. Di atas 0,50 Ha	22.113	18,8
a. milik sendiri	14.824	13,3
b. milik orang lain	1.750	1,6
c. milik sendiri + orang lain	5.539	4,9

Sumber : Diolah dari data sensus penduduk 1980.

Suatu penelitian diadakan pada Agustus-September 1985 dengan mengambil lokasi penelitian di daerah Toba Holbung dan Samosir. Dari Toba Holbung dipilih Kecamatan Laguboti dan Silaen dan dari Samosir ditetapkan Kecamatan Pangururan dan Simanindo. Dari masing-masing kecamatan dipilih empat desa dan diambil 10 sampel rumah tangga petani secara random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di daerah Toba Holbung memiliki sawah yang lebih luas dibandingkan dengan daerah Samosir (Tabel 4.12). Pada umumnya petani tersebut tergolong petani kecil (luas lahan yang diusahai kurang dari 2 Ha).

Hasil penelitian tahun 1989 pada tiga kecamatan sampel penelitian menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang diusahai dibawah 1 ha. Di Kecamatan Lintongnihuta, rata-rata pengusahaan adalah 0,39 ha, Simanindo dengan 0,50 ha dan Doloksanggul seluas 0,90 ha (Tabel 4.13). Dari desa-desa sampel di Simanindo yang banyak penduduknya pindah, cukup nyata bahwa di desa-desa itu tidak dijumpai persawahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka mengusahai lahan kering yang ditanami dengan bawang, jagung dan kadang-kadang dengan padi ladang. Di desa-desa penelitian di Doloksanggul dan Lintongnihuta, ada yang mengusahai persawahan atau perladangan atau kombinasi keduanya.

Tabel 4.12  
Rumah Tangga Petani Menurut Luas Pemilikan Sawah  
di Kecamatan Laguboti, Silaen, Pangururan dan Simanindo, 1985

Luas Pemilikan	Daerah Penelitian			
	Laguboti	Silaen	Pangururan	Simanindo
kurang dr 0,50 Ha	14 (35,0)	14 (35,0)	21 (52,5)	26 (65,0)
0,50 - 0,99 ha	14 (35,0)	15 (37,5)	11 (27,5)	9 (22,5)
1,00 - 1,49 ha	5 (12,5)	3 (7,5)	4 (10,0)	3 (7,5)
1,50 - 2,00 ha	5 (12,5)	5 (12,5)	3 (7,5)	2 (5,0)
di atas 2,00 ha	2 (5,0)	3 (7,5)	1 (2,5)	
Jumlah sampel	40 (100,0)	40 (100,0)	40 (100,0)	40 (100,0)

Angka dalam kurung adalah persentase  
Sumber : Simangunsong, 1986 : 72.

Tabel 4.13  
Rata-rata Luas Lahan yang Diusahai  
di Kecamatan Simanindo, Doloksanggul dan Lintongnihuta, 1989

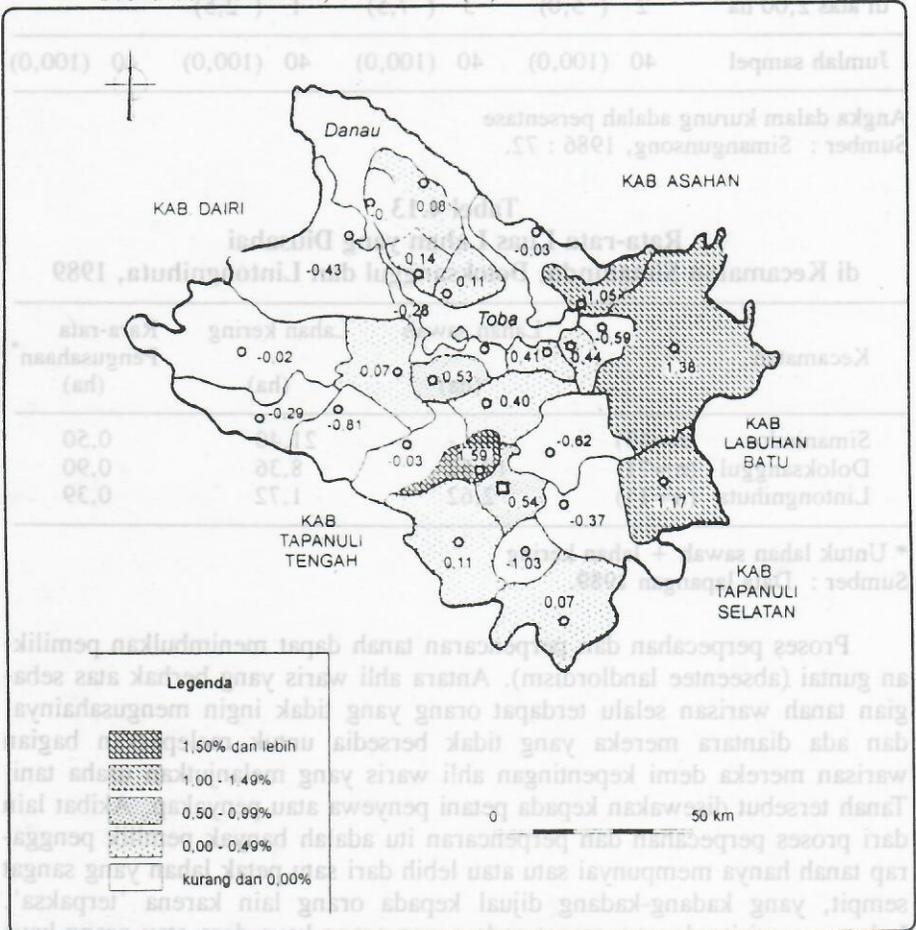
Kecamatan	Lahan sawah (ha)	Lahan kering (ha)	Rara-rata Pengusahaan (ha)
Simanindo (n=43)	-	21,40	0,50
Doloksanggul (n=21)	10,52	8,36	0,90
Lintongnihuta (n=11)	2,62	1,72	0,39

\* Untuk lahan sawah + lahan kering  
Sumber : Data lapangan 1989.

Proses perpecahan dan perpencaran tanah dapat menimbulkan pemilikan gantai (absentee landlordism). Antara ahli waris yang berhak atas sebagian tanah warisan selalu terdapat orang yang tidak ingin mengusahainya, dan ada diantara mereka yang tidak bersedia untuk melepaskan bagian warisan mereka demi kepentingan ahli waris yang melanjutkan usaha tani. Tanah tersebut disewakan kepada petani penyewa atau penyakap. Akibat lain dari proses perpecahan dan perpencaran itu adalah banyak pemilik penggarap tanah hanya mempunyai satu atau lebih dari satu petak lahan yang sangat sempit, yang kadang-kadang dijual kepada orang lain karena 'terpaksa'. Lahan seperti itu dapat terpusat pada orang-orang kaya desa atau orang kaya lain yang tidak bertempat tinggal di desa. Suatu penelitian yang diadakan

tahun 1990 menunjukkan bahwa sekitar 75 % dari luas areal pertanian yang ada di Tapanuli Utara bukan lagi milik petani setempat, tetapi milik orang yang tinggal di luar daerah (Eijkemans dan Rooij, 1990 : 92). Hal itu dapat berarti bahwa hak pemilikan mungkin relatif tetap tetapi yang mengusahai, yang terdiri dari penyewa, relatif bertambah. Dan diperkirakan untuk masa-masa mendatang petani penyewa akan bertambah yaitu keluarga-keluarga muda yang tinggal di desa yang berpendidikan rendah (SD atau SLTP) yang tidak mampu bersaing untuk hidup di daerah lain.

Peta 15. Tapanuli Utara : Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-rata Pertahun Menurut Kecamatan, 1980-1990 (%)



Sumber : Dihitung dari Sensus Penduduk 1980 dan 1990.

### 4.3. Faktor Pendidikan

Sebelum kekristenan masuk ke Tanah Batak, sistem pendidikan yang dijalankan mengutamakan pengetahuan praktis sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan. Mereka memperolehnya dengan meniru/warisan dalam arti luas dari ayah, ibu, kakek/nenek termasuk dari saudara-saudara dekat dan penghuni *huta* lainnya. Sistem pengajaran yang digunakan adalah secara lisan, langsung dan pengalaman lapangan, diantaranya pengetahuan bercocok tanam, berladang, mengenal musim dan sebagainya. Pengetahuan tentang keamanan dan pertahanan diperoleh oleh 'sang murid' dari guru atau *datu* untuk menyerang maupun bertahan dari serangan musuh, menyembuhkan penyakit, meramal dan lain-lain.

Sistem pendidikan asli pribumi yang terfokus pada pengetahuan praktis itu mulai terdesak oleh sistem pendidikan Barat. Pendidikan tersebut membuka cakrawala pemikiran mereka menjadi lebih luas dan perhatian kepada pertanian pun lambat laun berkurang. Jabatan dalam gereja, mulai menjadi idaman walaupun mereka tidak memperoleh gaji. Mereka melihat bahwa jabatan tersebut mengangkat status hidupnya sesuai dengan pandangan masyarakat ketika itu.

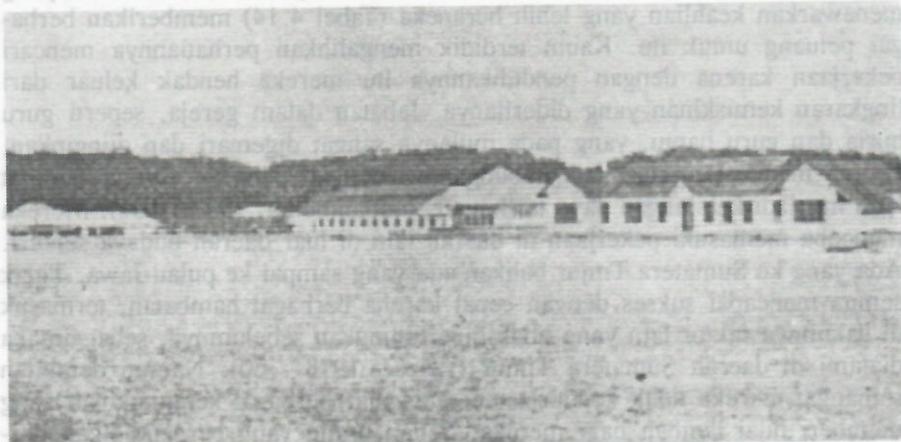
Sejak permulaan abad ini terbuka berbagai kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan gaji dan pangkat yang tinggi di instansi pemerintah, perkebunan dan instansi-instansi lain. Terbukanya sekolah-sekolah yang menawarkan keahlian yang lebih beraneka (Tabel 4.14) memberikan berbagai peluang untuk itu. Kaum terdidik mengalihkan perhatiannya mencari pekerjaan karena dengan pendidikannya itu mereka hendak keluar dari lingkaran kemiskinan yang dideritanya. Jabatan dalam gereja, seperti guru huria dan guru bantu, yang pada mulanya sangat digemari dan diinginkan, karena menurut mereka ada hubungannya dengan wibawa, *sahala*, lambat laun menjadi kehilangan daya tariknya (Lumbantobing, 1957 : 107). Mereka mencoba memasuki pekerjaan di daerah lain di luar daerah budaya sendiri. Ada yang ke Sumatera Timur bahkan ada yang sampai ke pulau Jawa. Tidak semua mencapai sukses dengan cepat karena berbagai hambatan, termasuk di dalamnya faktor lain yang tidak diperhitungkan sebelumnya, sebagaimana dialami di daerah Sumatera Timur (Pelzer, 1978 : 60). Namun demikian semangat mereka tidak kendur untuk mengejar berbagai kemungkinan yang memberi nilai tambah bagi mereka. Setiap orang yang berpendidikan berlomba-lomba menjadi pekerja kantor atau pekerjaan lainnya (diluar bertani) yang memberi gaji bagi dirinya. Mereka memandang bahwa pendidikan menjadi suatu jalur mobilitas sosial untuk mendapatkan pangkat (Castles, 1972 : 70). Para orang tua pun bersedia mengorbankan apa saja yang ada padanya untuk menyekolahkan anak-anaknya (Aritonang, 1988 : 411) di dalam atau di luar Tapanuli, karena menurut pandangan mereka seseorang

dapat menambah *sahala*-nya melalui pendidikan (Lumbantobing, 1957 : 31).

Peranan RMG yang cukup besar dalam pengadaan pendidikan di Tanah Batak, antara lain dapat dilihat dari banyaknya anggota masyarakat Tapanuli yang memperoleh pendidikan. Sekolah-sekolah diupayakan berdiri di mana ada gereja atau di mana tinggal pendeta Jerman. Karena itu masyarakat memandang di mana berdiri gereja dan tinggal pendeta Jerman di sanalah pusat kemajuan. Jumlah sekolah yang didirikan zending di Tapanuli jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah (Tabel 4.15 dan 4.16). Selain untuk kaum lelaki, kaum wanita pun belakangan mendapat kesempatan memasuki pendidikan yang dipelopori oleh Lisette Nieman, Thora van Wedel-Jarlsberg, Elfrieda Herder. Secara lambat laun tetapi pasti Tapanuli menjadi salah satu pusat *hamajuon*<sup>1)</sup>.

Perkembangan pesat perusahaan-perusahaan dagang, khususnya perkebunan di Sumatera Timur, membutuhkan banyak tenaga dan bersedia membayar gaji yang lebih tinggi. Melihat kesempatan itu banyak orang Batak meninggalkan pekerjaannya di kampung dan semangat untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi di luar daerah menguras jumlah pemuda yang tinggal di Tapanuli. Pengaruh pendidikan ke luar daerah bukan hanya menguras tenaga kerja dan modal tetapi juga menyebabkan lahan pertanian menjadi bera (Siregar, 1917 : 7).

Gambar 6. Kompleks Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar



Sumber : Repro dari *Saratus Taon HKBP*. 1961 : 123

<sup>1)</sup> *Hamajuon*, menurut J.R. Hutauruk (1992 : 71) yaitu segala unsur kebudayaan Eropah yang membawa kehormatan (*hasangapon*) dan kemakmuran (*hamoraon*)

Tabel 4.14  
Jenis-Jenis Sekolah yang Diselenggarakan RMG

Nama sekolah	Pertama dibuka	Lama Pendidikan	Bersubsidi/ tidak	Pimpinan	Keterangan
<b>A. Sekolah Dasar</b>					
SD biasa	1861	bervariasi (3-6 thn)	Sejak 1893 sebagian bersubsidi	Mula-mula zendeling kemudian guru pribumi	- masuk pagi dan malam; mulanya merangkap kelas Katekisasi.
SD Puteri	1890	3 tahun	Sejak 1893 sebagian bersubsidi	Schwester	- Sejak 1915 menjadi Volksschool.
Sekolah Anak Raja	1900	5-6 tahun	Bersubsidi	Zendeling	- Sejak 1920-an sebagian ditingkatkan menjadi Meisjesvervolgschool.
Sekolah Latihan Hollands Batakse School (sejak 1914 menj. HIS)	1904 1910	5 tahun 6-7 tahun	Bersubsidi	Zendeling	- Sejak 1907 dst. dihapuskan ; ada yang menjadi Seminari, ada yang menjadi Vervolgschool atau SD biasa.
Vervolgschool	1917	3 tahun	Bersubsidi Belanda Bersubsidi	Guru-guru	- Sejak tahun 1920-an menjadi Vervolgschool. Yang I di Tarutung (1910), yang ke VIII di Sipirok (1938).
<b>B. Pend. Guru &amp; Peng. Guru</b>					
Sekolah Kateket P. Sorat Sikola mardalan-dalan	1868 Jan. 1874	2 tahun 2 tahun	Tidak Bersubsidi Tidak Bersubsidi	Zendeling Zendeling	- 1877 ditutup/dipindahkan ke Pulau Napitu
Seminari Pansur Napitu	1877	mula-mula 2 thn sejak tahun 1881 4 tahun	Tidak Bersubsidi	Zendeling	- 1877 ditutup/dipindahkan ke Pulau Napitu
Seminari Sipoholon	17 Des. 1901	4 tahun	Bersubsidi	Zendeling Zendeling	- 1901 ditutup/dipindahkan ke Sipoholon.
Seminari Narumonda	1907	4 tahun	Bersubsidi	Zendeling	- Sejak 1924 subsidi hanya 2 tahun pertama (Normaalleergang).
Kursus/Sikola Pandita	1884	1 1/2-3 thn	Tidak Bersubsidi	Zendeling	- Ex sekolah Anak Raja; 1919
Kursus Evangelis	1880	Beberapa Bulan	Tidak Bersubsidi	Zendeling	- Lokasi dan guru menyatu dengan Seminari.
Sekolah Penatua	1880-an	Beberapa Bulan	Tidak Bersubsidi	Zendeling	- Insidental; di beberapa tempat.
Sekolah Penolong Jem.	1922	Beberapa Bulan	Tidak Bersubsidi	Zendeling	- Insidental; di beberapa tempat.
Sekolah Bijbelvrouw	1934	2-3 tahun	Tidak Bersubsidi	Zendeling Schwester	- Untuk mengatasi kekurangan pelayan jemaat. - Diawali Frauenbibel kursus 1930.
<b>C. Pend. Menengah/Kejuruan</b>					
Sekolah Industri	1900	2-4 tahun	Bersubsidi	Zend. dan Tekniker Brt.	- Diawali latihan Pertukangan 1874.
Kursus/Sek. Perawat	1905	1-3 tahun	Bersubsidi	Dokter dan Schwester	- Menyatu dengan pelayan medis.
Sekolah Pertanian	1913	2 tahun	Bersubsidi	Ahli Pertanian	- 1915 ditutup tanpa alasan yang jelas.
Meisjeskopschool	1920-an	4-6 tahun	Bersubsidi	Schwester	- Lanjutan Sekolah Puteri (Meisjesschool).
MULO	1927	4 tahun	Bersubsidi	Guru-guru Belanda	- Lanjutan HIS dan Schakelschool.
Schakelschool	1930	2 tahun	Bersubsidi	Guru-guru Belanda	- Lanjutan Vervolgschool.
Normaalleergang	1930	2 tahun	Bersubsidi	Guru-guru Belanda	- Khusus untuk guru sekolah.
Sekolah Tenun & Renda	1913	bervariasi	Bersubsidi	Schwester	- Ada yang menyatu dengan Meisjesskopschool.
Sekolah Menjahit	1927	Beberapa Bulan	Tidak Bersubsidi	Isteri Zendeling	- Insidental.

Sumber : Arionang, 1987 : 427-428.

**Tabel 4.15**  
**Sekolah Dasar di Sumatera**

Daerah	1878	1888	1898	1908
1. Dataran Rendah Padang (Sumatera Barat)	10	14	11	13
2. Dataran Tinggi Padang (Sumatera Barat)	14	18	21	27
3. Tapanuli	14	20	19	20
4. Bengkulu	7	9	9	12
5. Lampung	1	3	3	7
6. Palembang	2	5	5	14
7. J a m b i	-	-	-	2
8. Pantai Timur Sumatera	-	1	1	11
9. A c e h	-	2	1	14
10. R i a u	1	1	3	5
11. B a n g k a	1	2	2	4
<b>J u m l a h</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>129</b>

**Sekolah Swasta Pribumi**

Daerah	1878	1888	1898	1908	1909 (subsidi)
1. Dataran Rendah Padang (Sumatera Barat)	6	3	11	33	40 (11)
2. Dataran Tinggi Padang (Sumatera Barat)	2	-	6	38	62 (52)
3. Tapanuli (Missionary)	9	64	152	390	470 (399)
4. Bengkulu	-	-	1	1	2 (1)
5. Lampung	1	-	-	-	-
6. Palembang	-	1	3	19	36 (33)
7. J a m b i	-	-	-	6	6 (2)
8. Pantai Timur Sumatera	-	-	-	-	29 (26)
9. A c e h	-	-	1	9	10 (3)
10. R i a u	-	-	-	-	-
11. B a n g k a	-	-	-	-	-
<b>J u m l a h</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>174</b>	<b>496</b>	<b>655</b> <b>527</b>

Sumber : Pelly, 1983 : 63-64.

**Tabel 4.16**  
**Perbandingan Sekolah Dasar dan Murid Bumiputera**  
**di Keresidenan Tapanuli**

Tahun	Zending (RMG)		Pemerintah	
	Sekolah	Murid	Sekolah	Murid
1870	10	200	14	634
1880	37	995	?	?
1887	63	1.365	19	1.204
1892	116	4.097	18	1.534
1897	172	6.585	18	2.559
1904	298 a)	14.519	19	2.555
1910	494	27.485	21	3.074
1920	509	24.629	31	?
1928	443	29.927	102	5.132
1936	585	43.184	159	13.635

a) Sejak 1904 data statistik tentang sekolah dan murid Zending (RMG) di atas sudah mencakup yang di luar Keresidenan Tapanuli, tetapi ini sangat kecil, sehingga tidak terlalu mempengaruhi data di atas. Bila diperhatikan jumlah sekolah dan/atau murid zending (RMG) pada tahun 1920-an, terlihat ada penurunan. Itu disebabkan pengurangan subsidi dan pengetatan persyaratan subsidi.

Sumber : Aritonang, 1987 : 30.

Kehadiran sekolah-sekolah yang didirikan oleh zending dan pemerintah Belanda memberikan jalan terbaik bagi mereka untuk mengembangkan dirinya. Mereka mau bersekolah karena hal itu memberikan jalan dan keuntungan bagi dirinya dalam rangka mencapai cita-citanya dan tujuan hidupnya. Animo masyarakat untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya mendorong pemerintah kolonial mendirikan sekolah seperti MULO, HIK. Menurut sensus 1930, dari seluruh keresidenan yang ada di Indonesia, Tapanuli menduduki urutan kedua dalam hal banyaknya penduduk yang sudah melek huruf.

Selain merupakan jawaban terhadap hasrat masyarakat, pengadaan pendidikan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdidik di berbagai instansi dan perusahaan-perusahaan asing. Di Sumatera Timur, misalnya, penambahan guru, pegawai pemerintah, pegawai perkebunan dan bidang-bidang lain lebih banyak diisi oleh orang-orang Batak Toba dibandingkan dengan penduduk setempat. Menyadari hal itu, anak-anak Sumatera Timur dengan dua tokoh utamanya Abdoel Wahab dan Zahari pada April 1938 mendirikan **Persatuan Sumatera Timur (PST)** di Medan (Reid, 1987:

123) sebagai salah satu sarana untuk mengejar ketinggalan mereka dari orang Batak Toba itu.

Jenis-jenis pendidikan ketrampilan/kejuruan berkembang pada tahun-tahun belakangan. Kecenderungan yang baru mengikuti nilai-nilai profesi atau pekerjaan yang serasi dengan pendidikan tersebut. Terdapat kecenderungan bahwa orang Batak Toba yang mendapat pendidikan meninggalkan kegiatan tradisional (bertani) dan menjadi 'pekerja halus' yang pada umumnya memberikan pendapatan yang lebih besar dan status yang lebih tinggi, sebagaimana yang mereka cita-citakan dalam nilai-nilai filosofis mereka. Para orang tua menginginkan menantunya seorang GAIB (pejabat pemerintah untuk orang-orang Bumiputra) atau seorang tamatan HIK (Lumbantobing, 1957 : 108). Dampak pendidikan benar-benar menumbuhkan fanatisme yang luar biasa bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya termasuk ke luar Tapanuli. Kendatipun para orangtua harus menitikkan air mata memberangkatkan anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke luar daerah, terutama kalau ke pulau Jawa, hal itu memberi semangat bagi anak-anaknya. Pengaruh kemajuan sudah mengena kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dr. Verwiebe, mantan Ephorus HKBP, pernah mengemukakan bahwa pemuda-pemuda yang berangkat ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya harus mendapat ijazah dulu untuk mencapai kekayaan sebelum mereka berumah tangga (Pedersen, 1970: 94). Sampai akhir kolonial kelompok-kelompok terdidik Batak Toba sebagai "white collar" telah menyebar ke berbagai daerah, seperti ke pulau Bangka, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Singapura. Dan salah satu produk pendidikan zending yang lebih tersohor bahkan sudah hampir tersebar di seluruh pelosok Nusantara adalah guru (Aritonang, 1988 : 399 - 413).

Sukses dalam mencapai pendidikan tertentu, kemudian keberhasilan untuk memperoleh pekerjaan, baik di berbagai instansi, apalagi mendapat tempat dalam hierarki sistem pemerintahan, agaknya telah merubah dasar dan manipulasi kemampuan untuk berkuasa, *sahala harajaon*, kepada kemampuan untuk dihormati, *sahala hasangapon*.

Kesempatan yang terbatas di wilayah budaya sendiri untuk mendapatkan pekerjaan menyebabkan kaum terdidik yang belajar di daerah lain enggan kembali ke kampung halamannya. Terbukanya pusat-pusat pendidikan baru di daerah lain, terutama sejak tahun 50-an menyebabkan Tapanuli lama kelamaan kehilangan manusia-manusia potensialnya. Demikian juga dengan pemindahan sekolah dari Tapanuli (misalnya Sekolah Menengah Theologia) ke Pematang Siantar termasuk Universitas HKBP Nommensen (yang sebelumnya direncanakan berdiri di Tapanuli Utara), mempercepat proses pengurusan tersebut. *Hamajuon* telah menjadi **guiding principle** (Keuning, 1958 : 14) dan sebagai **golden plough** (Bruner, 1961: 511) di kalangan Batak Toba. *Hamajuon* ini telah menunjang peningkatan keduduk-

an sosial penduduk sekaligus berdampak positif terhadap kekayaan materi dan *hasangapon* (Keuning, 1979 : 222). Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mampu mengatasi masalah kemiskinan bahkan merupakan langkah paling strategis untuk meraih *hamoraon* dan *hasangapon*.

Seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah menyebabkan tidak sedikit pemuda/i kelahiran Tapanuli Utara belajar di daerah lain. Pada awal tahun 50-an, misalnya, Kepala Inspeksi SMP Daerah Sumatera Utara, Melanthon Siregar menyatakan bahwa daya tampung untuk tamatan SMP di Sumatera Utara masih kurang. Oleh karena itu, banyak yang pergi ke pulau Jawa memasuki sekolah swasta. Dorongan pergi belajar ke pulau Jawa pada umumnya lebih besar karena lebih mudah menempuh pelajaran di sana. Disamping itu, di sana sudah lebih banyak fakultas-fakultas yang dengan tidak langsung melahirkan banyak mahasiswa yang telah bersedia memberikan pelajaran dengan sukarela (*Waspada*, 8.8.1953).

Dari Tapanuli sudah sejak dasawarsa yang lalu terjadi pengalaman yang menarik di bidang pendidikan sebagai sumber kemajuan. Demikian besar hasrat orangtua dan anak-anaknya untuk sekolah sehingga jumlah sekolah yang ada tidak mampu lagi menampung pelajar tersebut. Demikian misalnya tahun 1961/62, diberitahukan bahwa sekitar 1.000 orang pelajar lanjutan tidak dapat ditampung di Tapanuli Utara (*Waspada*, 17.7.1961). Daerah ini sangat memerlukan sekolah-sekolah kejuruan seperti pertanian dan peternakan karena sekolah rendah dan SMP yang didirikan orangtua/pemerintah sudah memadai (*Waspada*, 20.7.1961). Dengan pembukaan sekolah kejuruan tersebut, diharapkan dapat menampung minat anak didik yang akan melanjutkan sekolahnya dan menahan arus keluar tenaga-tenaga muda tersebut. Menurut Napitupulu (*Waspada*, 11-12.9.1989) sampai tahun 60-an mutu pendidikan di Tapanuli masih dinilai baik dan hasilnya dijadikan sebagai tolak ukur mutu pendidikan nasional namun demikian perpindahan untuk melanjutkan pendidikan tidak dapat dihindari. Mereka keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan, pada mulanya diharapkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan dengan di daerah asal, tetapi akhirnya sekaligus menjadi pelarian tenaga potensial. Hampir tidak ada yang kembali ke kampung setelah memperoleh pendidikan tinggi. Pada awal tahun 60-an, misalnya, Bruner (1963 : 3) mengemukakan bahwa dari antara mereka ada yang menjadi ahli hukum, dokter, pengacara, insinyur, profesor di universitas dan lain-lain. Hal itu bukan disebabkan pendidikannya yang kian merosot tetapi disebabkan faktor penarik dari daerah lain.

Sewaktu Raja Patuan Natigor Lumbantobing menjabat Residen Tapanuli, sudah direncanakan membuka universitas (awal September 1961) dengan berbagai jurusan. Fakultas Hukum dan Ekonomi akan ditempatkan

di Sibolga, Fakultas Teknik dan Kedokteran di Tarutung dan Fakultas Peternakan, Pertanian dan Keguruan di Padang Sidempuan (*Waspada*, 7.9.1961). Sudah barang tentu pembukaan universitas tersebut bertujuan ganda ; menampung minat kaum terdidik yang akan melanjutkan pendidikannya, memperlambat arus keluar kaum terdidik meninggalkan kampung halamannya, memperlambat arus dana keluar dan dampak positif lainnya bagi pembangunan daerah. Dalam beberapa lama universitas tersebut masih dapat melanjutkan kegiatannya tetapi kemudian menghadapi kendala dana. Fakultas-fakultas tersebut menghadapi berbagai hambatan, terutama menyangkut biaya operasionalnya. Pebruari 1964 Fakultas Kedokteran di Tarutung mengalami keuangan yang parah dan mungkin akan ditutup (*Waspada*, 21.2.1964). Fakultas Ekonomi di Sibolga menghadapi hal yang sama, biaya operasional tidak dapat ditutupi oleh pemasukannya (*Waspada*, 18.6.1964). Semula pendirian universitas tersebut diharapkan akan dapat menahan arus perpindahan kaum muda, tetapi dengan tutupnya fakultas-fakultas tersebut di kemudian hari, Tapanuli kembali kehilangan sarana pendidikan tinggi<sup>2)</sup>. Demikian juga gagasan untuk membentuk cabang Universitas HKBP Nommensen di Tapanuli (awal tahun 70-an) tidak ada realisasinya.

Kebanggaan dan prestasi yang dicapai Tapanuli dalam bidang pendidikan an berangsur-angsur menjadi pudar. Hal itu bukan hanya diakibatkan ketinggalan dalam sarana dan prasarana pendidikan tetapi juga akibat keluarnya manusia-manusia terdidik. Dalam kata pengarahannya, Bupati Tapanuli Utara M.S.M. Sinaga mengharapkan agar mutu pendidikan di daerah Tapanuli Utara dapat ditingkatkan. "Sekarang ini", demikian lanjut Bupati, "keadaan pendidikan jauh menurun, berbeda dengan tahun-tahun limapuluh-an". Hal itu dikemukakan Sinaga pada rapat kerja koordinasi para kepala dinas P dan K Tk. III dan para Kabin Tk. III se Tapanuli Utara tanggal 12 Juni 1971 di Tarutung (*Waspada*, 18.6.1975). Dibarengi dengan mutu pendidikan yang menurun menyebabkan kaum muda yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP, SLTA apalagi untuk perguruan tinggi tidak dapat dihindari. Hal itu merupakan perwujudan dari aspirasi "*anakkon hi (na marsikola) do hamoraon di ahu*".

<sup>2)</sup> Sekitar 45 tahun sebelumnya seorang pemerhati telah mengungkapkan arti penting suatu universitas bagi suatu bangsa. Dengan nada bertanya beliau mengatakan : "Apa bedanya suku bangsa Batak dari bangsa lain jika tidak memiliki universitas." (*ai aha ma bangso Batak martimbangkon angka bangso na asing anggo so adong universitet*) Lihat "Universitet di Tano Batak" dalam *Immanuel* No. 11, 17.3.1918 : 43-45

Dalam diskusi Tata Guna Tanah Berencana dan Pembangunan di Bandung pada tahun 1985, Bupati Tapanuli Utara (ketika itu Drs. Gustav Sinaga) mengemukakan bahwa sekitar 9.000 orang anak didik dari Tapanuli Utara belajar di daerah lain setiap tahunnya (Bupati ....., 1985 : 5). Di samping daya tampung yang kurang memadai, juga disebabkan mutu pendidikan yang lebih rendah (Bupati....., 1984 : 28). Data penelitian lapangan tidak secara nyata menunjukkan hal itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II di atas, sampel berasal dari non pegawai sehingga pendidikan nampaknya tidak menjadi alasan utama yang mendorong mereka pindah dari kampung halamannya. Apa yang disajikan dalam Tabel 4.20 di belakang, alasan pendidikan berada pada urutan ketiga, di bawah alasan ekonomi. Walaupun demikian tidak dapat disangsikan lagi bahwa banyak orang tua dari Tapanuli Utara telah mempersiapkan anak-anaknya sekolah dari tingkat SLTA di berbagai kota di luar daerah yang kelak setelah tamat tidak kembali ke desanya. Hal itu antara lain dapat disaksikan di kota-kota pendidikan, seperti Pematang Siantar, Medan, Jakarta serta kota-kota lainnya. Kehadiran Universitas Sisingamangaraja XII (sejak 1986), yaitu di Kecamatan Siborongborong dan beberapa akademi lainnya tetap tidak dapat menahan arus ke luar kaum muda yang hendak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Niat pemuda-pemuda tetap lebih dominan ke kota-kota besar yang menurut perkiraannya lebih unggul dan memberi berbagai peluang yang lebih besar baginya.

Dalam Tabel 4.17 disajikan jenis sekolah menurut tingkatannya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Sekolah-sekolah kejuruan semakin dikurangi dan sekolah yang bersifat umum semakin besar jumlahnya. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan tersebut sangat jelas pada jenis sekolah lanjutan atas. Hal itu dapat berarti warga masyarakat lebih diarahkan memasuki sekolah umum dibandingkan dengan kejuruan, yang tamatannya sudah barang tentu belum mempunyai keahlian tertentu untuk bekerja apabila kelak tamat dari sekolah tersebut. Keadaan ini akan memaksa anak-anak memperpanjang jenjang pendidikannya, yang bagi orang-orang tertentu lebih suka melanjutkan pelajarannya di luar Tapanuli Utara. Selain memperbesar arus uang untuk pendidikan ke luar daerah, hal itu sekaligus menyebabkan 'manpower' dan 'brain drain' dari Tapanuli Utara.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi orangtua untuk menyetop sekolah anak-anaknya. Kalau dahulu sering orangtua harus menitikkan air mata memberangkatkan anak-anaknya sekolah ke tempat yang jauh, belakangan menjadi terbalik. Mereka merasa sangat sedih apabila anak-anaknya tidak mau sekolah, hal mana dianggap menurunkan wibawa sosial mereka. Sepanjang orangtua mampu (membiayai sekolah), pendidikan anak-anaknya minimum setara SLTA.

Dua dasarwarsa terakhir ini kaum muda yang mendapat pendidikan SLTA sederajat atau bahkan SLTP sederajat sudah merasa malu tinggal di kampung halamannya jika tetap menjadi petani, apalagi petani penyewa. Kalau sebelumnya masih banyak anak muda tinggal di kampung, kini sudah jarang dijumpai. Pendidikan yang mereka tempuh menjadi salah satu faktor penentu untuk meninggalkan kampung halamannya. Mereka meninggalkan desanya dengan suatu tekad dapat berhasil, 'menjadi anak', di daerah lain. Mereka mencari sumber pendapatan yang lebih baik, *masiampapaga na lomak; mangalului jampalan na lomak* di daerah *parserakan*. Pendidikan menyebabkan wibawa sosial meningkat dan sekaligus 'membuka jalan' meninggalkan kampung halamannya. Singkatnya, pendidikan bukan menahan orang tinggal di desanya tetapi mempercepat mereka meninggalkan kampung halamannya.

**Tabel 4.17**  
**Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan**  
**di Tapanuli Utara, 1978, 1984 dan 1992**

Tingkat Pendidikan	1978	1984	1992
Sekolah Dasar (SD)	943	1,143	1,178
Sekolah Menengah Pertama (umum)	93	126	145
Sekolah Menengah Ekonomi Pertama	4	-	-
Sekolah Tehnik Pertama	5	2	2
Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama	8	1	1
Sekolah Menengah Atas (umum)	17	26	59
Sekolah Menengah Ekonomi Atas	11	10	19
Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas	2	1	-
Sekolah Tehnik Menengah	5	5	11
Sekolah Pendidikan Guru	6	6	1
Sekolah Guru Olahraga	-	2	-
Kursus Pendidikan Guru Negeri	-	1	-
Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama	-	1	-
S P K	-	-	3 *)
Sekolah Menengah Teknik Pertanian	-	-	2
Universitas	-	-	1 *)
Lainnya (kursus)	-	-	-

\* Data tahun 1990.

Sumber : Kantor Statistik Tapanuli Utara, *Tapanuli Utara Dalam Angka 1978, 1984, 1992*.

#### 4.4. Faktor Politik

Masuknya kolonial Belanda dan kekristenan ke Tapanuli membawa berbagai perubahan di kalangan masyarakat Batak Toba. Walaupun mereka mempunyai tujuan yang berbeda tetapi kerjasama antara mereka juga ada. Salah satu diantaranya ialah pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah zending dan kemudahan-kemudahan serta dorongan bagi orang Batak Toba meninggalkan kampung halamannya sesuai dengan misi mereka.

Semboyan missioner Jerman 'Tole' (maju) dalam penyebaran agama Kristen tahun 1903 ke Simalungun mempunyai aspek ganda. Selain perluasan daerah kerja, sekaligus membuka kesempatan bahkan mendorong perpindahan orang-orang Batak Toba. Ketika itu pemukiman dan daerah-daerah pertanian potensial masih terhampar luas di Sumatera Utara, seperti Simalungun, Asahan, Dairi, Angkola, Mandailing, daerah pantai utara Natal, Sibolga dan Barus dan juga bagian tenggara Aceh (Tanah Alas, Singkil). Pada tahun 1904, misalnya, dengan didahului missioner Jerman, petani Batak Toba pindah ke wilayah Pematang Bandar Simalungun. Sesuai dengan missinya mereka mendorong agar orang Batak Toba memasuki Simalungun (Simon, 1904 : 108).

Potensi daerah yang cocok untuk areal pertanian menyebabkan missioner memberitahukan kepada orang Batak Toba, diantaranya melalui majalah mingguan Immanuel (Panitia, 1982 : 12 - 13), agar segera pindah ke sana. Mereka pun menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial agar orang Batak Toba dapat masuk lebih lancar dalam rangka membuka lumbung-lumbung padi dan memberi teladan hidup Kristiani di daerah tersebut.

Tekanan terhadap lahan pertanian di daerah sendiri mendorong orang-orang Batak Toba pindah untuk membuka lahan yang lebih luas. Daerah perpindahan mereka bukan hanya ke Simalungun, tetapi juga ke Dairi, Tanah Alas, dan lain-lain. Sekitar tahun 1906/1907 petani dari daerah Humbang, Toba dan Silindung telah memasuki Dairi dan pada bulan April 1908 missioner Brinkschmidt dan Fuchs telah menyaksikan mereka berjualan di Sidikalang (Panitia, 1983 : 19). Di Simalungun, pada tahun itu pemerintah kolonial telah mengikat perjanjian dengan raja Siantar dan Panai sehubungan dengan rencana Belanda untuk mendatangkan petani Batak Toba membuka persawahan di daerah itu (Tideman, 1922 : 186-187). Secara bergelombang-gelombang mereka memasuki daerah-daerah pertanian yang dianggap potensial untuk membuka persawahan. Di satu pihak, perpindahan tersebut dianggap missioner sebagai sarana untuk memberi teladan hidup Kristiani bagi penduduk setempat, sebagaimana yang mereka cita-citakan. Di pihak lain, petani-petani yang pindah tersebut menganggapnya sebagai hal yang wajar. Lahan yang terbentang luas yang hampir tidak memberikan manfaat bagi penduduk, sewajarnya diusahai untuk meningkatkan kesejah-

teraan masyarakat. Inilah yang diimpikan kaum tani tersebut, yang ketika itu seperti 'kehausan' lahan pertanian yang luas dan subur.

Keuletan membentuk lahan persawahan mendorong pemerintah kolonial untuk memindahkan mereka ke daerah-daerah pertanian, yang pada waktu itu krisis pangan di daerah perkebunan Sumatera Timur mulai terjadi. Untuk daerah Simalungun, misalnya, pemerintah kolonial mencoba menarik perhatian penduduk dengan menyodorkan beberapa jabatan 'kepala'. Jabatan tersebut adalah **Kepala Rodi**, **Penghulu** dan **Raja Ihutan** (Raja Ihutan dihapuskan tahun 1921) untuk mempercepat proses perpindahan dari Toba ke Simalungun. Di Tanah Alas dan daerah lain jabatan seperti itu tidak pernah disodorkan tetapi dengan memberi beberapa peluang dan kemudahan lainnya. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah kolonial bukanlah tanpa alasan yang jelas. Mereka mengharapkan bahwa kesediaan petani Batak Toba pindah dari kampung halamannya merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah pangan, sebagaimana tujuan politik tersebut. Pembukaan bekas hutan dan daerah rawa-rawa untuk menghasilkan beras di Sumatera Utara oleh kaum tani atau pemukim pionir Batak Toba merupakan satu cara untuk merealisasi tujuan politik tersebut (Röll, 1994 : 3).

Sampai pecah Perang Dunia II, pemerintah kolonial dan missioner Jerman telah berhasil mewujudkan sebagian dari strategi dan sasaran mereka. Petani-petani Batak Toba, yang kebanyakan dari mereka (sampai sekarang) sangat menguasai seluk-beluk persawahan dan mengembangkan sistem irigasi sederhana (*bondar*) telah 'dimanfaatkan' pemerintah kolonial sebagai tenaga penyuluh untuk memajukan pertanian sawah di daerah Sumatera Timur termasuk di Singkil. Di daerah Aceh seperti di Tanah Alas dan Singkil, pemerintah kolonial memanfaatkan mereka untuk mendukung rencana Belanda di wilayah Aceh. Kampung-kampung penduduk pendatang pun semakin bertambah banyak.

Strategi yang hampir bersamaan dengan itu dilakukan oleh missioner Jerman. Mereka mendukung perpindahan petani-petani Batak Toba di sekitar Sumatera Utara, karena di dalam benaknya, setiap orang yang sudah menganut agama Kristen akan tetap mengamalkan nilai-nilai agamanya. Bahkan Davis (1938 : 4) mengemukakan bahwa setiap kampung orang Batak merupakan 'benteng' bagi animisme. Terlepas dari sasaran kedua lembaga itu, petani-petani Batak Toba telah berjasa membangun daerah-daerah persawahan dan mengatasi kekurangan pangan di daerah Sumatera Timur. Menurut pengakuan penduduk bahwa kehadiran mereka telah menyebabkan swasembada beras di Singkil<sup>3)</sup> pada masa kolonial. Dengan luas lahan

<sup>3)</sup> Wawancara dengan H.M. Ali Har (Medan, 6.9.1994)

persawahan sekitar 1 Ha ditambah kebun di daerah tujuan, mereka membuktikan dirinya sebagai petani-petani yang tangguh. Mereka meninggalkan *bona pasogit* setelah membayar apa yang disebut uang pindah (uang adat) di kampung halamannya Tapanuli Utara. Satu dari kebanyakan fakta yang paling penting adalah bahwa lahan pertanian baru menjadi milik pribadi mereka, berbeda dengan di kampung halamannya Tapanuli Utara. Mereka dapat menyewakan atau menjual tanahnya kepada siapa saja karena mereka juga telah membayar uang adat ketika akan membuka lahan itu.

Ditinjau dari nilai-nilai tradisional Batak Toba, jabatan ke-kepala-an merupakan salah satu aspek dari *hasangapon*. Jabatan seperti kepala rodi, penghulu dan kepala kampung menjadi 'rebutan' dan idaman diantara orang-orang yang pindah itu. Itulah sebabnya kepala-kepala rombongan ingin menjadi kepala kampung atau penghulu di kampung yang baru di buka atau kelompok-kelompok kecil ingin membangun kampungnya sendiri karena dengan demikian dia akan menjadi *raja huta* di sana.

Pada masa pendudukan Jepang pun, perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara tidak dapat dihindari. Perubahan situasi politik dalam negeri mewarnai hal tersebut. Pada awal pendudukan Jepang, misalnya, diperkirakan sebanyak 55.000 orang penduduk Tapanuli dibawa ke Halmahera dan sekitarnya sebagai anggota pasukan perang melawan musuh, membuka lapangan udara dan lain-lain. Sebagian orang Batak Toba yang turut dalam pasukan tersebut ada yang sampai ke Surabaya dan daerah lainnya di Jawa bahkan ada yang sempat membentuk "tentera Sriwidjaya" di Mojokerto. Hal itu terungkap kemudian dalam Konperensi HKBP Jawa dan Madura di Malang tanggal 16-19 Oktober 1946. Selain itu ada juga yang tinggal dan membaur dengan penduduk setempat, diantaranya di pulau Morotai Maluku (Panggabean, 1993 : 271).

Selain ke daerah Indonesia Timur, ada juga yang membuka lapangan terbang dan jalan kereta api di Pakanbaru. Sebagian dari mereka tidak terurus pulang ke kampung halaman dan akhirnya tinggal dan membaur di Riau. Ada juga yang ikut dalam pembukaan jalan dari Sidikalang-Rundeng. (Sihombing, 1961 : 100).

Upaya Jepang untuk memenangkan perang dengan menambah anggota pasukannya seperti Heiho, Gyugun dan badan semi militer lainnya telah menyebabkan orang Batak Toba menyebar lebih luas ke berbagai daerah Indonesia. Pada waktu itu di Pagar Alam (Sumatera Selatan) yaitu tempat latihan anggota Gyugun yang baru direkrut, sudah dijumpai orang Batak Toba, diantaranya, Simanjuntak, Hutabarat dan lain-lain. Tidak semuanya orang Batak Toba yang direkrut langsung dibawa dari Tapanuli tetapi banyak juga dari daerah lain, atau yang orang tuanya pindah dari Tapanuli. Seorang marga Simatupang yang sempat bekerja di Singapura ditugaskan tentera Jepang untuk merekrut pemuda-pemudi Indonesia di daerah Suma-

tera Selatan dan di kemudian hari aktif membentuk laskar rakyat di daerah tersebut untuk mengusir musuh yang hendak menjajah Indonesia kembali.

Selain mobilitas pemuda-pemuda dan orang-orang yang memasuki Heiho, Gyugun dan badan semi militer lainnya, yang pada umumnya terdiri dari tenaga potensial dan kaum terdidik, pada masa pendudukan ini sebagian para petani ada yang memasuki daerah-daerah perkebunan di Sumatera Timur untuk membuka dan menanam tanaman pangan. Sekitar tahun 1943 Jepang mengizinkan penduduk menanam lahan-lahan perkebunan yang telah terlantar, sebagai salah satu upaya untuk membantu Jepang memenuhi keperluan perangnya. Orang Batak Toba dari Simalungun, Dairi, Tapanuli dan daerah lain ikut membuka pertanian di daerah perkebunan itu. Ketika itulah mulai terjadi perombakan tradisi secara besar-besaran karena rakyat dapat menduduki dan mengusahai tanah perkebunan dengan tidak seijin perkebunan sendiri, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Pelipatgandaan bahan makanan lebih penting dari kelapa sawit, teh, karet dan serat nenas (Tobing, 1953:56). Sampai akhir pendudukan tentera Jepang, lahan perkebunan itu, terutama bekas lahan tembakau menjadi 'rebutan', yang kelak menjadi masalah antara rakyat petani dengan pihak perkebunan.

Pada pasca proklamasi, revolusi kemerdekaan turut mempercepat penyebaran orang Batak Toba ke berbagai daerah. Para bekas Heiho, Gyugun dan anggota barisan semi militer lainnya membentuk laskar rakyat. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian menjadi anggota dan pemimpin pasukan setelah di TNI-kan di pos mereka masing-masing. Jabatan-jabatan baru di bidang kemiliteran termasuk kepolisian memberi warna baru bagi mereka ketika itu. Hal itu ada hubungannya dengan perubahan kecenderungan pada keinginan masyarakat Batak Toba. Kalau pada zaman kolonial para orang tua bercita-cita mendapat menantu seorang guru zending (sebelum tahun 1915), GAIB atau seorang tamatan HIK, pada jaman perjuangan kemerdekaan berubah menjadi seorang perwira muda. Jenis pekerjaan yang sedang mendapat penghargaan tertinggi di mata masyarakat pada tiap-tiap zaman mempengaruhi kecenderungan tersebut (Lumbantobing, 1957 : 108).

Penyebaran orang Batak Toba selama perang kemerdekaan bukan hanya di daerah Sumatera bagian Utara tetapi juga di daerah (Sumatera) lainnya termasuk di pulau Jawa. Dari notulen Konperensi HKBP Jawa dan Madura, sebagaimana telah disebutkan di atas, dikemukakan bahwa revolusi kemerdekaan turut mempercepat penyebaran orang Batak Toba di berbagai daerah di pulau Jawa. I.J. Simanjuntak (1964 : 3) mengemukakan :

"Di samping pegawai pemerintah, perjuangan kemerdekaan inilah yang mempercepat penyebaran orang Batak (Toba-pen) dari kampung halaman, *bona pasogit* (Tapanuli-pen) yang bergabung dalam barisan pemuda, laskar rakyat dan juga dalam angkatan bersenjata".

Banyak pemuda dan orang tua Batak Toba yang aktif dalam perang kemerdekaan, bukan hanya di Sumatera, Jawa tetapi juga di kota-kota lainnya di wilayah Nusantara. Jenderal A.H. Nasution, dalam sambutannya sewaktu perayaan 100 tahun kekristenan dengan tegas mengakui hal itu. Dengan mengutip kembali dari R.M. Simatupang dan Samuel Pardede (1986: 78-79), Nasution, dalam tulisannya *Sejarah Perang Rakyat Batak* mengatakan :

"Pemuda-pemuda Batak yang menjadi anggota dari HKBP (umumnya orang Batak Toba-pen) banyak juga menyumbangkan tenaga, pikiran dan raganya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi juga di Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan lain-lain tempat. Pemuda-pemuda Batak turut berjuang, malahan kerap kali menjadi pelopor dari perjuangan itu. Pemuda-pemuda Batak yang telah diajar berbakti pada Tuhan, tidak ketinggalan untuk berbakti kepada tanah air Indonesia".

Di masa Republik Indonesia Serikat (RIS) perpindahan petani di wilayah Sumatera Utara masih ditemui. Untuk meruntuhkan negara boneka Negara Sumatera Timur (NST) buatan kolonial Belanda para penganjur membuat slogan-slogan untuk menduduki tanah-tanah perkebunan dan sekaligus untuk mengurangi kekuatan perkebunan. Anjuran tersebut mendapat sambutan hangat dari rakyat dan datanglah berduyun-duyun orang-orang dari daerah lain, termasuk dari Tapanuli Utara (*Waspada*, 25-29.5.1953).

Pada pasca pengakuan kedaulatan dari kalangan TNI ada yang dipindah tugaskan ke daerah lain untuk menjaga keamanan. Tahun 1950 batalyon Malau dan Batalyon Bejo dipindahkan ke Jawa Barat dan tahun 1951 batalyon Barus ke Jawa Tengah. Di dalam batalyon-batalyon tersebut tidak sedikit orang Batak Toba.

Tahun-tahun pertama pengakuan kedaulatan perpindahan petani dari Tapanuli masih berlangsung, diantaranya ke daerah Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu dan daerah lainnya. 'Benteng penghambat' yang selama ini dirasakan tidak sekuat dulu lagi. Rakyat dan petani yang menduduki dan mengusahai lahan-lahan perkebunan di mana mereka tinggal menyebutnya sebagai hadiah revolusi (Cunningham, 1958 : 78). Informasi dari orang-orang yang duluan pindah dapat memancing bahkan memperbesar arus perpindahan berikutnya. Ada yang membuka hutan menjadi daerah pertanian dan ada yang harus membayar uang pancang atau membeli dari orang-orang yang sudah duluan tiba atau dari orang-orang Jawa bekas buruh kebun. Sepanjang hasil pertaniannya tidak memadai, pindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain merupakan hal yang sering terjadi. Di daerah Deli Serdang dan Asahan, hal itu lebih sering dijumpai.

Setelah Peristiwa Tanjung Morawa (16 Maret 1953)<sup>4)</sup> para petani mendapat kelonggaran menggarap lahan di Sumatera Timur. Mereka dapat menggarap 2 Ha atau lebih dengan syarat harus diusahai, jika tidak akan disita kembali. Hal ini menjadi faktor penarik bagi petani-petani kecil yang tidak memiliki lahan pertanian di kampung halaman. Dari Tapanuli Utara perpindahan untuk mencari tanah subur tetap berlangsung. Tahun 1954, misalnya, yang resmi mendaftar kepada pemangku kepala negeri atau ke kantor Assisten Wedana sebanyak 229 keluarga, tahun 1955 sebanyak 100 keluarga dan awal tahun 1956 telah menjadi 1.524 keluarga (*Waspada*, 21.3.1956).

Gambar 7. Rakyat Ramai-ramai Menjaga Traktor di Km 2,5 Tg. Morawa, 1953



Sumber : Repro dari *Waspada* (Medan) 16.3.1953.

<sup>4)</sup> Lihat. *Harian Waspada* terbitan Maret dan April 1953 dan juga Karl J. Pelzer, *Planters Against Peasant : The Agrarian Struggle in East Sumatra 1947-1958*, khusus Bab IV dan Bab V.

Dasawarsa pertama pengakuan kedaulatan penduduk dari satu daerah pindah terpaksa (mengungsi) ke daerah lain karena beberapa peristiwa yang mengancam keamanan. Pemberontakan Darul Islam di Aceh (mulai September 1953), misalnya, memaksa sebagian orang Batak, terutama non pegawai mengungsi bahkan pindah menetap dari Tanah Alas. Ada yang masuk ke daerah Langkat, Deli Serdang, Medan, Asahan, Labuhan Batu dan lain-lain. Pada umumnya yang tetap bertahan adalah pegawai pemerintah, terutama polisi, militer dan mobil brigade (mobrig) yang masih meninggalkan isteri dan anak-anaknya di Tapanuli atau Sumatera Timur (Marbun, 1990 : 181-183). Kejadian ini mendorong orang-orang yang pindah dari Aceh menyebar ke berbagai daerah di Sumatera Utara.

Peristiwa PRRI (1958-1961) ikut juga memperkeruh suasana bahkan menjadi masalah sosial yang besar di Sumatera Utara. Anwar Dharma, anggota seksi D (Kesehatan, Sosial dan Perburuhan) DPRD Daswati I Sumatera Utara mengemukakan bahwa jumlah pengungsi akibat peristiwa itu bertambah besar. Menurut data yang ada pada Dinas Sosial Sumatera Utara, selama tahun 1958 jumlah pengungsi di Sumatera Utara yang mendaftarkan diri sebanyak 16.284 jiwa diantaranya 6.965 dari Dairi, 4.191 dari Tapanuli Selatan dan 2.815 dari Simalungun serta selebihnya dari Daerah Tingkat II lainnya. Selain itu banyak yang belum terdaftar. Lebih lanjut dikabarkan bahwa dalam triwulan I dan II jumlah pengungsi dari Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan serta beberapa Daerah Tingkat II lainnya menunjukkan kenaikan (*Waspada*, 24.8.1959).

Tahun 70-an dan tahun-tahun selanjutnya peristiwa politik yang menyebabkan orang pindah terutama dari Tapanuli Utara ke daerah lain tidak ada. Situasi keamanan yang semakin stabil menyebabkan penduduk serasa bebas pindah dari satu daerah ke daerah lain. Selain kaum tani, kaum terdidik yang sudah sejak dulu meninggalkan kampung halamannya semakin menyebar ke berbagai daerah demikian juga keturunan mereka. Berbagai peluang lebih terbuka luas bagi mereka di daerah lain dibandingkan dengan di kampung halamannya. Data lapangan menunjukkan bahwa faktor politik tidak nyata merupakan faktor pendorong pindah dari Tapanuli Utara. Faktor ekonomi (sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.18, 4.19 dan 4.20) merupakan faktor utama. Walaupun demikian tidak dapat dibantah bahwa faktor politik turut mempercepat bahkan memperbesar jumlah penduduk yang pindah dari Tapanuli Utara dan menyebabkan pergeseran penduduk antar wilayah.

#### 4.5. Faktor Ekonomi

Selain *hagabeon*, 2H lainnya yang merupakan idaman di dalam hidup orang Batak ialah *hamoraan* dan *hasangapon*. Keterbatasan lahan pertanian dan hukum adat yang melingkupinya, menyebabkan pertambahan penduduk yang pesat menjadi tekanan terhadap lahan pertanian dan sekaligus mengekalkan kemiskinan. Setiap orang tidak ingin hidup dalam kemiskinan. Mereka selalu berupaya untuk meraih kekayaan materi dan ingin dihormati. Ketika Burton dan Ward berkunjung ke Silindung tahun 1824, mereka berdua mendapat tantangan dari seorang raja yang hadir dalam suatu pertemuan. Raja tersebut mengemukakan dengan tegas :

*"Ndang olo hami manadingkon adat naung lelung hu hangoluhon hami. Ndang adong sipaubaoan disi. Ai molo dipatuduhon hamu tu hami dalam tu Hamoraon dohot Hasangapon las do rohanami manjangkon hamu"*. (Sihombing, 1961 : 10-11)

Terjemahan bebas : "Kami tidak akan meninggalkan adat yang telah mendarah daging bagi kami. Tidak ada yang perlu diperbaiki dalam adat itu. Akan tetapi jika kalian menunjukkan jalan kepada kekayaan, Hamoraon dan kemuliaan (wibawa), Hasangapon, dengan senang hati kami menerima kalian". Dari bunyi tantangan itu masyarakat masih menghendaki kekayaan, berarti mereka masih berada dalam kemiskinan. Disamping itu mereka ingin dihormati, dimuliakan, sehingga mereka mencari jalan bagaimana agar dihormati oleh orang lain. Hal itu dapat juga berarti bahwa *hagabeon*, yaitu banyak keturunan telah digapai, walaupun mungkin dalam arti tertentu<sup>5)</sup>.

Pada waktu missioner Jerman datang ke Tanah Batak masih disaksikan bahwa orang Batak berada dalam kemiskinan. Rumah-rumah penduduk sederhana, kesehatan tidak terjamin dan tidak sedikit penduduk yang memakan ubi sebagai makanan utama. Dari surat-surat Nommensen diketahui bahwa keadaan di daerah Toba Holbung pun tidak menggembirakan. Kalau panen gagal mereka akan meminjam dari orang-orang kaya dan harus dikembalikan menjadi dua kali lipat kalau sudah panen. Kalau hasil panen berkurang maka anaknya menjadi budak di rumah orang kaya. Singkatnya situasi sosial sulit sekali (Warneck, 1911: 147-148).

<sup>5)</sup> Salah satu indikator *hagabeon* adalah banyaknya keturunan satu keluarga atau penduduk suatu daerah. Dalam laporan perjalanan Burton dan Ward (1827 : 495-496) disebutkan bahwa penduduk Tapanuli memang sudah padat. Demikian pula tulisan F. Junghuhn (1847 : 218) tentang penduduk Silindung dan tulisan Y. Warneck (1911 : 152) tentang penduduk Toba Holbung.

Sektor pertanian sebagai sumber utama mencari nafkah tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beraneka. Kejadian ini dipersulit lagi akibat pertambahan penduduk, sedangkan luas areal pertanian relatif tetap. *Lulu anak*, *lulu tano* yang sudah mendarah daging dalam kehidupan orang Batak Toba (merupakan jabaran dari kata *hagabeon* termasuk *hamoraon* dan *hasangapon*), juga merupakan perjuangan ekonomi. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa ketidakcukupan atau ketidakmampuan lahan untuk menjamin kelangsungan hidup anggota keluarga mendorong anggota masyarakat kampung mencari perluasan lahan pertanian ke daerah lain. Situasi ekonomi mendorong mereka pindah ke daerah lain agar dapat berdiri sendiri untuk menghidupi keluarganya dan ingin lebih sejahtera dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Sekali mereka meninggalkan kampung halamannya, biasanya mereka tidak kembali lagi ke kampung tersebut apabila 'gagal' di daerah yang baru ditempati. Dengan perkataan lain, lebih baik pindah ke daerah lain lagi daripada harus kembali ke kampung halaman yang asli.

Dorongan untuk meninggalkan kampung halaman karena alasan ekonomi tentu akan lebih kuat apabila pembukaan lahan-lahan baru, terutama persawahan tidak memungkinkan lagi. Dari daerah-daerah persawahan yang tidak padat penduduknya kecenderungan pindah jauh lebih kecil dibandingkan dengan dari daerah-daerah yang sedikit lahan persawahannya. Akan tetapi karena pertambahan penduduk yang cukup besar sehingga perpindahan penduduk dari daerah persawahan yang subur, seperti daerah Toba Holbung dan Silindung pun tidak dapat dihindari. Daerah Samosir dan Humbang yang memiliki luas lahan persawahan yang relatif sempit, juga merupakan asal petani-petani yang menyebar ke berbagai daerah di Sumatera Timur. Sampai akhir abad XIX para petani yang haus lahan pertanian itu nampaknya belum melihat jalan keluarnya dan ke daerah mana akan pindah.<sup>6)</sup>

Sejak semula missioner Jerman terutama Nommensen bukan hanya menaruh perhatian terhadap kehidupan (rohani) Batak Toba, tetapi juga dengan masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat (Davis, 1938 : 9).

<sup>6)</sup> Ternyata dikemudian hari bahwa tekanan ekonomi di kampung halaman Batak Toba digunakan missioner Jerman untuk mendorong keluar orang-orang Kristen dan memberantas animisme. Ini merupakan salah satu kebijaksanaan misi Jerman (lihat J. Merle Davis, *The Batak Church : An Account of the Organization, Policies and Growth of the Christian Community of the Batak of Northern Sumatra*. Calcutta, 1938 : 4).

Mereka memberi penerangan-penerangan teknis dan mengajak masyarakat menanam tanaman yang laku diperdagangkan. Mereka membuka sekolah-sekolah dasar untuk pemuda-pemuda (dan kemudian kepada pemudi), memberi penerangan dan sarana kesehatan dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membangun kehidupan jasmani dan rohani masyarakat. Demikian juga upaya pemerintah kolonial dengan membuka sekolah-sekolah turut membawa perubahan dan hal itu secara lambat laun mengakibatkan pergeseran dari pola hidup masyarakat agraris ke non agraris.

Gambar 8. Sebuah Kampung di Pinggir Danau Toba, 1865.



Sumber : Repro dari *Waspada*. (Medan) 19.2.1976.

Sejak permulaan abad ini pendidikan telah diyakini dapat mengatasi kemiskinan bahkan meningkatkan harkat diri. Keberhasilan mendapat pekerjaan yang terpendang di mata masyarakat ketika itu menyebabkan muncul suatu gerakan dalam masyarakat yang disebut gerakan *hamajuon*. Gerakan ini menyebabkan anak-anak muda berlomba-lomba mengejar pendidikan yang lebih tinggi bahkan bersedia meninggalkan kampung halamannya

menuju daerah lain untuk melanjutkan pendidikannya. Salah satu akibatnya adalah mengalirnya arus uang keluar daerah untuk membiayai pendidikan mereka dan menyebabkan tanahnya terlantar. Dalam hubungan ini M.L. Siregar (1917 : 7) dengan nada bertanya mengemukakan : "Seandainya sebanyak dari biaya pendidikan mereka yang bersekolah ke daerah lain digunakan untuk membangun pertanian, bukankah pendapatan akan meningkat ?"

Memang di satu pihak hal itu menguras pendapatan masyarakat, tetapi di pihak lain pendidikan dipandang sebagai salah satu cara yang strategis untuk memerangi kemiskinan. Walaupun harus meninggalkan kampung halamannya bahkan menyebabkan tanahnya terlantar, semangat untuk mengejar pangkat dan kekayaan di daerah lain setelah memperoleh pendidikan dilatarbelakangi oleh kemiskinan Tanah Batak yang secara fisik geografis tidak memberi harapan. Dalam hubungan ini, jelaslah bahwa faktor pendidikan, seperti diterangkan di atas, tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi untuk menerangkan mengapa terjadi perpindahan itu.

Pada masa kolonial terdapat dua hal pokok yang berkembang di kalangan orang Batak Toba untuk mengatasi kemiskinan yang sudah begitu lama menyelimuti hidup mereka. Pertama, dengan meninggalkan tanah kelahiran untuk mendapatkan lahan yang lebih luas di daerah lain dan kedua, melalui pendidikan untuk mendapat pekerjaan dan pangkat, terutama di luar wilayah budaya sendiri. Meninggalkan kampung halaman untuk mendapatkan lahan yang lebih luas di daerah lain, tidak dapat dilihat sebagai faktor ekonomi semata-mata. Banyak faktor terkait di dalamnya, diantaranya tidak memiliki tanah di kampung, ingin menjadi *raja huta* di kampung yang baru dan lain-lain. Mereka ingin kaya, *mamora*, sejahtera dan lebih dihormati orang lain, *sangap*, di tempat tinggal yang baru. Singkatnya, nilai-nilai tradisional Batak tidak dapat dilepaskan dari hal tersebut. Sementara itu salah satu tujuan berdirinya **Hatopan Kristen Batak (HKB)** tahun 1917 adalah untuk "meringankan kemiskinan orang Batak yang tidak ada tandingannya itu" (Lid ni HKB, 1918: 55).

Walaupun sudah banyak yang pindah selama 4 dekade pertama abad ini (1900-1940) tetapi daerah yang ditinggalkan nampaknya tetap berada dalam kemiskinan. Di masa pendudukan Jepang tidak sedikit yang pindah ke daerah-daerah pertanian di luar Tapanuli Utara guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Demikian pula di masa revolusi kemerdekaan, harga kemenaan yang sangat merosot menimbulkan tekanan ekonomi yang semakin besar. Persawahan dan perladangan yang sempit dengan musim yang tidak menentu tidak mampu untuk menjawab tantangan kebutuhan yang makin beraneka dibarengi dengan lonjakan harga-harga barang kebutuhan. Pada waktu itu banyak daerah di Tapanuli Utara mengalami kesusahan akibat tanahnya yang tidak subur dan juga hujan turun dengan tidak teratur.

Iklim berubah-ubah sehingga hasil pertanian termasuk kemenyaan merosot dan menyebabkan banyak petani pindah ke Tapanuli Selatan, Sumatera Timur dan lain-lain. Hujan yang tidak turun hampir setahun di Samosir memaksa sekitar 50.000 penduduknya keluar antara tahun 1951-1955.

Kesulitan-kesulitan ekonomi terus berlangsung. Sesudah pengakuan kedaulatan penghasilan Tapanuli Utara dari perdagangan kemenyaan terus merosot sekitar Rp. 6,5 juta per tahun (Tobing, 1953 : 105-110). Perhatian pemerintah lebih besar pada karet dan kopra karena harganya sedang naik sedangkan komoditi tersebut hampir tidak dihasilkan di Tapanuli Utara. Dari kesan-kesan perjalanannya, Moh. Said (*Waspada*, 27.2.1952) mengemukakan bahwa produksi kemenyaan dari Tapanuli Utara sekitar 2 ton setahun dengan pendapatan total sekitar 25 juta. Namun saudagar-saudagar Tionghoa mengeruk keuntungan yang lebih besar (sekitar Rp 10 juta) dari perdagangan kemenyaan dengan segala rupa kelicikannya. Petaninya hanya menerima sekitar Rp. 50.000 dalam setahun. Sesudah pengakuan kedaulatan, Tapanuli memandang ke pusat dan mengharapkan adanya perhatian, sedikitnya sekedar dapat mengembalikan keadaan normal hasil perkebunan mereka. Akan tetapi naiknya harga karet dan kopra menyebabkan perhatian pemerintah lebih terfokus pada kedua komoditi tersebut dan kemenyaan tidak dipandang lagi sebagai kepentingan nasional. Oleh karena itu penghasilan masyarakat dari kemenyaan menjadi merosot (Tobing, 1953 : 109). Di kemudian hari diketahui bahwa masyarakat tidak tertarik lagi mengusahai kemenyaan. Dari 5.121 Ha luas kemenyaan produksinya hanya 2.536 ton dan petaninya tidak melakukan peremajaan (*Waspada*, 2.5.1956).

Selain pendapatan dari kemenyaan semakin berkurang, produksi padi pun tidak mencukupi kebutuhan rakyatnya. Dari sekitar 46.000 ha persawahan hanya memproduksi sekitar 125.000 ton sedangkan kebutuhan 168.000 ton (*Waspada*, 23.4.1956) Karena tekanan ekonomi semakin besar dan kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan lebih besar di daerah lain, petani-petani itu pun keluar dari kampungnya. Sementara itu daerah Tapanuli sudah menjadi 'Daerah Tak Peduli' karena janji-janji dari pemimpin-pemimpin untuk memperbaiki nasib mereka tidak terealisasi (*Waspada*, 28.5.1956).

Tahun 60-an penderitaan masyarakat masih terus berlangsung. Beras sebagai bahan konsumsi primer sulit dicari di pasar. Oleh karena itu pemerintah daerah Tapanuli Utara bekerja keras untuk mendatangkan beras ke daerahnya dengan mengadakan hubungan dengan Dati II lainnya di Sumatera Utara. Pada tahun 1962 Bupati Deli Serdang, Abdullah Eteng meminjamkan 80 ton beras kepada pemerintah daerah Tapanuli Utara. Pemberian pinjaman tersebut sangat menolong masyarakat di sana (*Waspada*, 8.7.1963).

Pada Pelita I (1969-1974) terobosan-terobosan di bidang pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi mulai dicoba. Hasil produksi perta-

nian, terutama padi sawah dan padi ladang menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut lebih banyak disebabkan oleh perbaikan dalam teknik pertanian dibandingkan dengan penambahan pemakaian tenaga kerja. Akan tetapi usaha intensifikasi itu tidak sepenuhnya berhasil karena kebanyakan kawasan mengalami kegagalan dalam program intensifikasi padi (Scholz, 1983: 77). Pertambahan penggunaan pupuk buatan dan varietas unggul, walaupun telah meningkatkan produksi padi, namun belum ada petunjuk bahwa hal itu telah mengakibatkan pengurangan yang berarti dari perpindahan penduduk (Bosch, 1990 : 19).

**Tabel 4.18**  
**Alasan Pindah (Faktor Pendorong) dari Daerah Asal, 1989**

Alasan	Daerah Penelitian			Jumlah Skor
	Asahan (n=38)	Deli Serdang (n=39)	Medan (n=125)	
Meningkatkan taraf hidup	37	37	55	129
Mencari pekerjaan di luar sektor pertanian	7	2	49	58
Tidak memiliki sawah	3	10	26	39
Demi pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik	11	7	16	34
Tidak ingin bergantung kepada orangtua	5	5	-	10
Gagal dalam bertani/berusaha	-	-	10	10
Terlalu banyak tanggungjawab sosial	-	-	5	5
Lain-lain <sup>1)</sup>	1	8	7	16

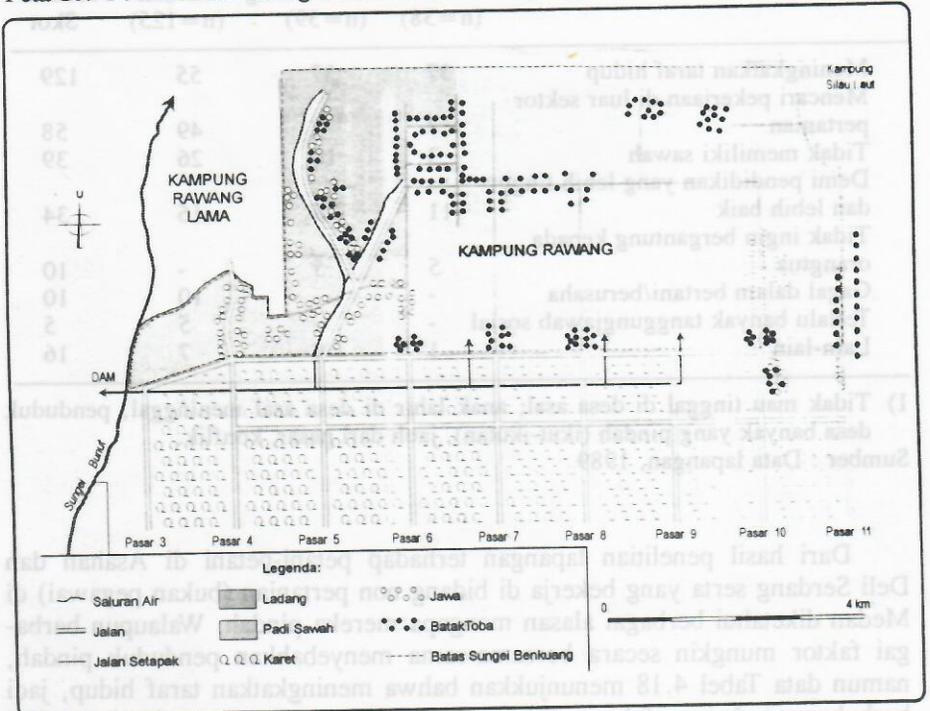
1) Tidak mau tinggal di desa asal, anak lahir di desa asal meninggal, penduduk desa banyak yang pindah (ikut-ikutan), jauh dari pasar, konflik.

Sumber : Data lapangan, 1989

Dari hasil penelitian lapangan terhadap petani-petani di Asahan dan Deli Serdang serta yang bekerja di bidang non pertanian (bukan pegawai) di Medan diketahui berbagai alasan mengapa mereka pindah. Walaupun berbagai faktor mungkin secara bersama-sama menyebabkan penduduk pindah, namun data Tabel 4.18 menunjukkan bahwa meningkatkan taraf hidup, jadi berhubungan dengan faktor ekonomi merupakan alasan yang dominan. Hal ini dapat dipahami karena hingga sekarang faktor ekonomi tidak dapat diabaikan untuk menjelaskan mengapa seseorang atau sekelompok masyarakat pindah dari kampung halamannya dan tinggal 'sementara' atau menetap di

daerah lain. Di satu pihak faktor ekonomi dapat dipandang sebagai syarat perlu dan faktor-faktor lain sebagai syarat cukup untuk menjelaskan keputusan pindah tersebut. Namun demikian keadaan seperti ini tidak berlaku secara umum, sekalipun hanya di kalangan orang Batak Toba. Pada umumnya data di atas diperoleh dari responden yang pindah dari kampung halamannya tahun 50-an dan 60-an sehingga tidak mustahil alasan ekonomi menjadi alasan utama karena keadaan di Tapanuli Utara ketika itu tidak menggem-birakan. Demikian juga dengan alasan mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, (terutama responden di Medan) menggambarkan perubahan lapangan kerja tetapi tetap merupakan bagian dari faktor ekonomi. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang ekonomi, tampaknya intensitas per-pindahan selalu berkaitan dan ditentukan oleh sarana kelangsungan hidup subsisten yang ada dan juga tingkat kebutuhan itu sendiri.

Peta 16. Pemukiman Orang Batak Toba di Kampung Rawang Asahan, 1950-1955



Sumber : C.E. Cunningham, 1958 : 112.

Salah satu faktor menarik dari daerah lain, terutama di sektor pertanian adalah lahan yang lebih luas dan lebih subur di daerah lain, sebagaimana

disajikan dalam Tabel 4.19. Dari lahan yang lebih luas dan lebih subur tersebut, pada gilirannya kemudian diharapkan keadaan ekonomi mereka akan lebih baik dibandingkan dengan di daerah yang ditinggalkan atau dibandingkan dengan keadaan sosial ekonomi orang tuanya. Sebaliknya, yang pindah ke kota bukan karena tertarik lahan pertanian lagi, sebagaimana perpindahan dari desa ke desa, tetapi karena alasan lain. Data lapangan menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang lebih baik dan penghasilan yang lebih baik merupakan alasan utama, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.20. Hal ini juga menunjukkan bahwa alasan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek ekonomi.

**Tabel 4.19**  
**Alasan Pindah (Faktor Penarik) dari Daerah Tujuan**  
**(Daerah Pertanian), 1989**

Alasan pindah	Daerah Penelitian		
	Asahan (n=38)	Deli Serdang (n=39)	Skor
Lahan pertanian yang lebih luas	17	39	56
Daerah yang lebih subur	26	18	44
Dapat diharapkan keadaan ekonomi lebih baik	10	14	24
Ikut kepada famili	6	7	13
Tidak ada pilihan desa lain pada waktu itu	13	-	13
Daerahnya lebih aman	2	-	2
Lain-lain	-	7	7

Sumber : Data lapangan, 1989.

**Tabel 4.20**  
**Alasan Pindah (Faktor Penarik) ke Kota (Medan), 1989**

Alasan pindah	Skor
Kesempatan kerja yang lebih baik	82
Penghasilan yang lebih baik	77
Fasilitas pendidikan yang lebih baik	26
Faktor kebebasan	23
Fasilitas umum dan hiburan yang lebih baik	6
Untuk memiliki tanah	4
Lain-lain	1

Sumber : Data lapangan, 1989.

Dari berbagai sikap hidup mereka dapat disimpulkan bahwa sejak abad yang lalu, alasan nenek moyang yang terkandung dalam ungkapan *lulu anak lulu tano* termasuk dalam faktor ekonomi, agar generasi penerus dapat hidup sesuai dengan cita-cita kehidupan mereka. Bagi generasi muda sekarang makin nampak transformasi nilai-nilai tersebut. Sebagian besar dari mereka, terutama yang telah mengecap pendidikan, ingin keluar dari pola hidup tradisional, dari sektor pertanian ke non pertanian tanpa menghilangkan nilai-nilai dalam falsafah hidup mereka. Orang-orang muda sering didorong agar sanggup berdiri sendiri menghidupi keluarganya di luar sektor pertanian, yang sudah mulai nampak sejak awal abad XX ini. Anak-anak muda yang berpendidikan mulai enggan bekerja di sawah dan ladang. Keadaan inilah sekarang yang terjadi di daerah-daerah yang didiami orang Batak Toba, yang dahulu, nenek moyangnya berkeringat darah membuka hutan untuk membangun *huta* dan areal pertanian untuk mencapai nilai-nilai falsafah hidup mereka, setaraf dengan zamannya. Generasi yang lebih muda bergeser dari sistem yang lama, *lulu anak lulu tano* menjadi "*lulu anak lulu kerja yang lebih baik di masa depan*". Pergeseran ini menandakan bahwa mereka bukan lagi mengutamakan bekerja di sektor pertanian, melainkan di sektor lain yang dapat memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Kalau beberapa dasawarsa yang lalu orang tua bangga dan mengidamkan menantunya seorang sarjana, dewasa ini lebih bangga lagi jika seorang sarjana dan sudah mempunyai pekerjaan.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini, generasi muda tidak berminat lagi tinggal di desa. Mereka lebih menyukai bekerja sebagai buruh harian, misalnya, di kota-kota besar daripada menjadi petani di desanya. Hal ini disebabkan, menurut perhitungan mereka, pendapatan dari buruh harian atau pegawai rendahan di daerah perkotaan lebih memberikan jaminan daripada usaha pertanian di desa. Selain itu, tinggal di desa menjadi petani, menurut pandangan umum, adalah menurunkan derajat orang tuanya. Itulah sebabnya sepuluh tahun terakhir ini hampir tidak dijumpai lagi pemuda-pemudi yang tamatan SLTP tinggal di desanya. Sebelum memperoleh pekerjaan yang menetap di kota, mereka mau bekerja sekalipun di sektor informal. Apabila menurut perhitungan mereka bahwa pekerjaan yang baru dimasuki tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya, maka mereka akan mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Jika tidak, bagi yang belum berkeluarga atau bahkan keluarga muda tidak jarang terjadi perpindahan kembali dari satu daerah ke daerah lain; dari daerah pinggiran ke kota atau dari kota ke daerah pinggiran atau dari daerah pedesaan ke kota demi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Ingin menjadi kaya, *mamora* dan ingin dihormati orang lain, *sangap*, sebagaimana didambakan setiap orang.

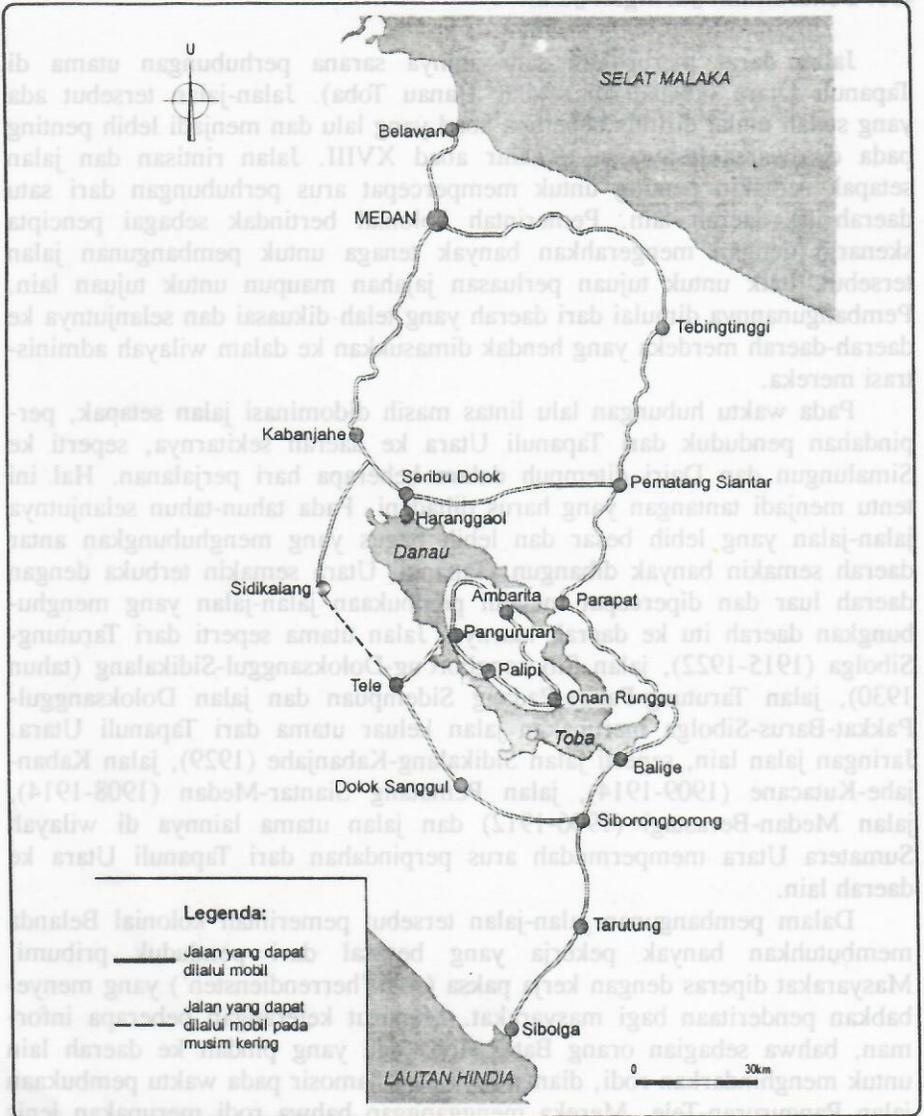
#### 4.6. Pembukaan Jaringan Jalan

Jalan darat merupakan satu-satunya sarana perhubungan utama di Tapanuli Utara (kecuali di sekitar Danau Toba). Jalan-jalan tersebut ada yang sudah mulai dirintis beberapa abad yang lalu dan menjadi lebih penting pada dasawarsa-dasawarsa terakhir abad XVIII. Jalan rintisan dan jalan setapak semakin penting untuk mempercepat arus perhubungan dari satu daerah ke daerah lain. Pemerintah kolonial bertindak sebagai pencipta skenario dengan mengerahkan banyak tenaga untuk pembangunan jalan tersebut, baik untuk tujuan perluasan jajahan maupun untuk tujuan lain. Pembangunannya dimulai dari daerah yang telah dikuasai dan selanjutnya ke daerah-daerah merdeka yang hendak dimasukkan ke dalam wilayah administrasi mereka.

Pada waktu hubungan lalu lintas masih didominasi jalan setapak, perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara ke daerah sekitarnya, seperti ke Simalungun dan Dairi ditempuh dalam beberapa hari perjalanan. Hal ini tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pada tahun-tahun selanjutnya jalan-jalan yang lebih besar dan lebih bagus yang menghubungkan antar daerah semakin banyak dibangun. Tapanuli Utara semakin terbuka dengan daerah luar dan dipercepat melalui pembukaan jalan-jalan yang menghubungkan daerah itu ke daerah luarnya. Jalan utama seperti dari Tarutung-Sibolga (1915-1922), jalan Siborongborong-Doloksanggul-Sidikalang (tahun 1930), jalan Tarutung-Pahae-Padang Sidempuan dan jalan Doloksanggul-Pakkat-Barus-Sibolga merupakan jalan keluar utama dari Tapanuli Utara. Jaringan jalan lain, seperti jalan Sidikalang-Kabanjahe (1929), jalan Kabanjahe-Kutacane (1909-1914), jalan Pematang Siantar-Medan (1908-1914), jalan Medan-Berastagi (1906-1912) dan jalan utama lainnya di wilayah Sumatera Utara mempermudah arus perpindahan dari Tapanuli Utara ke daerah lain.

Dalam pembangunan jalan-jalan tersebut pemerintah kolonial Belanda membutuhkan banyak pekerja yang berasal dari penduduk pribumi. Masyarakat diperas dengan kerja paksa (rodi/'herrendiensten') yang menyebabkan penderitaan bagi masyarakat. Menurut keterangan beberapa informan, bahwa sebagian orang Batak Toba ada yang pindah ke daerah lain untuk menghindari rodi, diantaranya dari Samosir pada waktu pembukaan jalan Pangururan-Tele. Mereka menganggap bahwa rodi merupakan jenis perbudakan sehingga mereka kurang suka pindah atau memasuki daerah di mana akan diadakan pembukaan jalan baru. Hal seperti itu diantaranya terjadi pada waktu akan membuka jalan antara Barus-Sibolga-Lumut-Batangtoru dan Angkola-Mandailing, yang pada waktu itu sudah termasuk wilayah Keresidenan Tapanuli (*Politiek Verslag van Residentie Tappanoeli over het Jaar 1858*)

Peta 17. Danau Toba dan Sekitarnya, 1937.



Sumber : L.J. Oerlemans (1937 : 54).

Setidak-tidaknya sampai permulaan tahun 1920 keberadaan jalan-jalan yang menghubungkan Tapanuli dengan Pantai Timur memberi kemudahan bagi penduduk pindah dari Tapanuli ke daerah Pantai Timur dan sekitarnya (Nyhus, 1978 : 17-18). Dampak lain dari pembukaan jaringan jalan yang semakin lebih kompleks itu ialah masyarakat dan daerah Tapanuli semakin terbuka bagi pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat yang beraneka sifatnya (Schreiner, 1978 : 11). Terbukalah pintu kepada "dunia bebas" bagi penduduk Tapanuli.

Pada masa kolonial Belanda jaringan jalan di daerah Sumatera Utara sudah agak memadai. Pembukaan jalan-jalan dari daerah pedalaman diikuti oleh pembangunan jalan besar, seperti dari perbatasan Aceh melalui kota-kota Pangkalan Berandan, Tanjung Pura, Binjai, Medan, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Kisaran sampai Rantau Prapat. Selain jalan utama tersebut, jalan Berastagi dan Kabanjahe di Dataran Tinggi Karo dan jalan melalui Simalungun ke Danau Toba yang terus ke Selatan ke Tapanuli dan Sibolga, merupakan urat nadi utama jaringan jalan pemerintah (Pelzer, 1978 : 64). Keberadaan jaringan jalan ini mempercepat tersebarnya informasi dari satu daerah ke daerah lain dan hal tersebut dapat mempercepat arus perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Dari Medan ke Belawan dan dari sana menyeberang ke pulau Jawa seperti ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lain-lain, semakin mudah.

Pembangunan jalan di sekitar Danau Toba memberi kemudahan bagi penduduk Batak Toba meninggalkan kampung halamannya menuju daerah-daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Dairi dan lain-lain. Tideman (1932 : 8) mengemukakan bahwa pembukaan jalan dari Siborongborong melalui Doloksanggul-Hariara Pintu ke Sidikalang mempercepat orang-orang Toba dari daerah Silindung pindah ke Dairi. Selain itu perhubungan laut, seperti dari Belawan dan Sibolga turut mempermudah perpindahan orang-orang dari Tapanuli ke daerah lain.

Beberapa dasawarsa terakhir ini fungsi jaringan dan prasarana jalan yang semakin memadai sangat berperan. Tidak sedikit yang meninggalkan Tapanuli Utara dengan menggunakan prasarana darat atau laut. Salah satu contoh yang sangat nyata adalah jaringan jalan Trans Sumatera yang memudahkan hubungan lalu lintas antara Sumatera dan Jawa. Pemudapemudi Batak Toba berangkat ke Jawa, terutama ke Jakarta dengan membawa alamat anggota keluarganya. Selain ke Jawa, daerah lain yang merupakan daerah tujuan diantaranya Kalimantan dan Irian Jaya. Kemudahan tersebut tidak terlepas dari sarana dan prasarana komunikasi yang semakin baik yang menghubungkan berbagai daerah di wilayah Republik Indonesia.

2.1. Dampak Terhadap Keluarga Sendiri

2.1.1. Pendapat yang lebih besar di daerah lain

Perpindahan penduduk dari desa ke desa atau dari daerah pertanian ke daerah pertanian pada umumnya dilakukan oleh para petani. Kesediaan lahan atau karena lahan yang dapat diusahai di kampung halaman semakin sempit, mendorong mereka mencari lahan yang lebih luas dan lebih subur di luar Tapanuli dengan harapan dapat memberikan pendapatan yang lebih besar. Mereka mempunyai 'keahlian' tersendiri untuk mendapatkan lahan pertanian terutama lahan-lahan yang subur dan cocok untuk membangun peresawahan. Kesuburan lahan jelas mempengaruhi tingkat produktivitas sehingga hasil yang diperoleh akan lebih besar. Oleh sebab itu pendapatan petani akan

**BAB 5**

Tabel 5.1  
Produksi Padi Sawah per Rante di Daerah

**DAMPAK PERPINDAHAN PENDUDUK**

— Apabila ditinjau ke belakang, terutama sejak permulaan abad XIX, perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan orang Batak Toba khususnya tidak dimulai setelah adanya perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara. Perubahan-perubahan di *bona pasogit* secara lambat laun telah berlangsung jauh sebelum masuk kekristenan dan juga setelah Belanda menguasai sepenuhnya Tapanuli Utara akhir tahun 1907. Kedatangan misioner Jerman dan kesediaan menerima mereka telah memberi "jalan" bagi penduduk setempat, baik karena terbukanya berbagai alternatif lapangan kerja terlebih-lebih melalui pengadaan pendidikan yang memberikan cakrawala yang lebih luas tentang daerahnya, kehidupan sosial ekonomi dan lain-lain. Pendidikan telah memberikan wawasan yang lebih luas, serta menimbulkan suatu pergumulan bagi diri mereka sehingga berpengaruh terhadap keinginan, pendapat dan cita-cita masyarakat, yang akhirnya mempercepat perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara. Perpindahan yang lebih terorganisasi telah berlangsung sejak awal 1900-an dan masih terus berlangsung hingga sekarang bahkan mungkin sampai waktu yang tidak tertentu di masa mendatang. Mobilitas sosial sudah merupakan suatu unsur dalam kebudayaan masyarakatnya. Oleh karena itu muncul beberapa akibat perpindahan tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, daerah yang ditinggalkan dan daerah baru di mana mereka bertempat tinggal.

Sumber : Data lapangan, 1989.

## 5.1. Dampak Terhadap Keluarga Sendiri

### 5.1.1. Pendapatan yang lebih besar di daerah lain

Perpindahan penduduk dari desa ke desa atau dari daerah pertanian ke daerah pertanian pada umumnya dilakukan oleh para petani. Ketiadaan lahan atau karena lahan yang dapat diusahai di kampung halaman semakin sempit, mendorong mereka mencari lahan yang lebih luas dan lebih subur di luar Tapanuli dengan harapan dapat memberikan pendapatan yang lebih besar. Mereka mempunyai 'keahlian' tersendiri untuk mendapatkan lahan pertanian terutama lahan-lahan yang subur dan cocok untuk membangun persawahan. Kesuburan lahan jelas mempengaruhi tingkat produktivitas sehingga hasil yang diperoleh akan lebih besar. Oleh sebab itu pendapatan petani akan

**Tabel 5.1**  
**Produksi Padi Sawah per Rante di Daerah**  
**Asal dan Daerah Tujuan Menurut Responden, 1989**

Produksi per rante	Daerah penelitian		Jumlah	
	Asahan	Deli Serdang	Mutlak	%
<b>Daerah Asal :</b>				
s/d 10 kaleng	15	7	22	28,6
11 - 13 kaleng	16	18	34	44,2
14 - 16 kaleng	3	6	9	11,7
17 - 19 kaleng	-	3	3	3,9
tidak ada jawaban	4	5	9	11,6
<b>J u m l a h</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>100,0</b>
<b>Daerah Tujuan :</b>				
s/d 10 kaleng	-	-	-	-
11 - 13 kaleng	12	-	12	15,6
14 - 16 kaleng	12	3	15	19,4
17 - 19 kaleng	5	2	7	9,1
20 - 22 Kaleng	7	26	33	42,9
di atas 23 kaleng	2	8	10	13,0
<b>J u m l a h</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>100,0</b>

Catatan : 1 kaleng = 11 kg gabah kering  
1 rante = 0,04 Ha

Sumber : Data lapangan, 1989.

makin besar karena kesuburan lahan, iklim dan irigasi yang memungkinkan panen dua kali atau lebih. Hal seperti ini telah dialami petani yang pindah ke Tanah Alas, Simalungun, Asahan dan juga daerah-daerah lain dimana mereka membuka persawahan. Hasil penelitian di daerah Asahan dan Deli Serdang menunjukkan bahwa produktivitas lahan sawah, baik pada permulaan mereka pindah maupun sekarang lebih besar dibandingkan dengan di daerah asal, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.2**  
Keadaan Ekonomi Responden di Tempat Tinggal Sekarang  
Dibandingkan Dengan di Daerah Asal, 1989

Keadaan	Daerah penelitian		Jumlah	
	Asahan	Deli Serdang	Mutlak	%
Lebih baik	29	34	63	81,8
Sama saja	-	2	2	2,6
Lebih buruk	9	-	9	11,7
Tidak ada jawaban	-	3	3	3,9
<b>J u m l a h</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data lapangan, 1989.

Sesuai dengan keahlian mereka di bidang persawahan, di daerah baru mereka mencari lahan-lahan yang cocok untuk persawahan. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengubah perladangan menjadi persawahan ialah dengan membuka tali air dari sungai yang terdekat. Daerah-daerah seperti itulah pada umumnya ditempati lebih dulu untuk membuka persawahan. Kalaupun mereka harus mengusahai daerah 'marginal', hal itu hanyalah diakibatkan belum ada pilihan yang tepat dalam waktu yang relatif singkat. Pada awal tahun 50-an di beberapa daerah di Asahan ditemui petani-petani Batak Toba dengan cara berkelompok-kelompok membuka persawahan baru, diantaranya di Kisaran, Hessa, Sungai Lama, Serbangan (Marbun, 1990 : 93). Perpindahan mereka ke daerah-daerah baru tersebut berhubung karena daerahnya cocok untuk persawahan, sehingga penghasilan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan jika tinggal di Tapanuli Utara. Pendapatan yang lebih besar tersebut pada gilirannya menyebabkan tingkat kesejahteraan mereka lebih tinggi di daerah baru dibandingkan dengan di daerah asal. Kaum tani yang disurvei di daerah Deli Serdang dan Asahan mengemukakan bahwa pada umumnya mereka mempunyai keadaan ekonomi yang

lebih baik di daerah tempat tinggal sekarang, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.2.

Suatu idaman yang tetap bergema di dalam sanubari mereka adalah agar anak-anaknya tidak menurunkan derajat orang tuanya. Apabila orang tuanya petani, hendaklah anak-anaknya tidak petani lagi. Kalaupun tetap bertani hendaklah lebih kaya dari orang tuanya. Data lapangan menunjukkan bahwa keadaan ekonomi mereka lebih baik jika dibandingkan dengan orang tua mereka yang tinggal di daerah asal (Tabel 5.3). Selain karena produktivitas lahan yang lebih besar dan dapat memungut hasil dua kali dalam setahun, mereka dapat menciptakan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan keluarganya. Dalam banyak hal, mereka lebih kreatif untuk mengatasi kesulitannya di daerah *parserakan* dibandingkan dengan seandainya tinggal di *bona pasogit*.

**Tabel 5.3**  
**Keadaan Ekonomi Responden**  
**Dibandingkan Dengan Orang Tua Mereka di Daerah Asal, 1989**

Keadaan	Daerah penelitian			Jumlah
	Asahan	Deli Serdang	Mutlak	%
Lebih baik	33	35	68	88,8
Sama saja	-	2	2	2,5
Lebih buruk	5	-	5	6,2
Tidak ada jawaban	-	2	2	2,5
<b>J u m l a h</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data lapangan, 1989.

### 5.1.2. Kerja tambahan di luar sektor pertanian

Penciptaan lapangan kerja yang sangat terbatas dan kondisi kehidupan di desa yang memprihatikan menyebabkan sebagian penduduk yang dulunya bertani pindah ke kota atau ke daerah-daerah perkebunan untuk mencari pekerjaan tambahan atau alternatif yang lebih baik. Walaupun tidak semuanya demikian dan dilakukan setiap orang, dorongan utama pindah ke kota adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik sekaligus untuk menghindari kemiskinan. Hal itu sudah jelas nampak dari Tabel 4.20 di

atas. Bagi mereka yang bekerja di sektor informal, upah harian yang mereka terima lebih pasti dan lebih besar dari penghasilan rata-rata harian yang mereka peroleh, dibandingkan dengan seandainya tetap tinggal di desa. Seorang wanita Batak Toba yang berasal dari Parlilitan (Tapanuli Utara) yang kini tinggal di Jakarta, mengemukakan bahwa walaupun dia bekerja di sektor informal (menjual minyak campur) penghasilannya setiap hari lebih terjamin dan pasti. Lebih lanjut dikemukakan bahwa di desanya dia jarang memegang uang, sedangkan di Jakarta selain dapat memegang uang, hasil penjualannya dapat dipastikan setiap harinya<sup>7)</sup>. Demikian pula halnya dengan mereka yang pindah secara musiman dan berdagang keliling, *marjajo*, dari Samosir, ternyata penghasilannya lebih besar dari penghasilan mereka, seandainya jika mereka tinggal di desa (Marbun, 1988: 40; Haenan, 1987). Dengan demikian, meninggalkan kampung halaman adalah untuk meningkatkan penghasilan (dan kompleksitasnya) di daerah lain.

Arus urbanisasi dari Dataran Tinggi Toba 2 dasawarsa terakhir ini merupakan suatu pertanda bahwa masyarakat, terutama orang-orang yang putus sekolah, tidak mau menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri di desanya. Keinginan tinggal di desa dan hidup sebagai petani semakin lama semakin merosot sedangkan kecenderungan mencari kerja di luar sektor pertanian di daerah lain semakin tinggi. Dengan semangat pantang menyerah, *marpuri-puri mago*, terutama setelah terbukanya Trans-Sumatera, mereka berangkat ke kota-kota besar propinsi atau kabupaten di Sumatera dan tidak ketinggalan ke Jakarta serta kota-kota lainnya di Indonesia. Hal itu dapat dilihat, misalnya, dari data perkembangan jemaat HKBP seperti di DKI Jakarta, Riau, Sumatera bagian Selatan, Kalimantan dan lain-lain. Namun demikian, tidak seluruhnya mendapat pekerjaan dengan segera atau mampu membuka lapangan pekerjaan. Mereka harus bersabar untuk sementara waktu sebelum memperoleh pekerjaan yang menetap atau berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain. 'Dalam masa penantian itu' mereka tidak segan-segan bekerja sekalipun di sektor informal. Hasil penelitian di 3 kecamatan daerah asal (Kecamatan Simanindo, Lintongnihuta dan Doloksanggul) menunjukkan bahwa tidak sampai 25% dari anak responden yang tinggal di luar Tapanuli Utara bekerja sebagai petani. Kebanyakan dari mereka bekerja di luar sektor non pertanian, yaitu pedagang/wiraswasta, pegawai negeri, pegawai swasta dan pekerjaan lainnya (Tabel 5.4). Demikian juga saudara istri responden tidak sampai 50% yang bekerja di sektor pertanian (Tabel 5.5). Barangkali kalau ditanyakan kepada keluarga-keluarga muda (sebagai responden), proporsi itu akan jauh menurun karena generasi muda lebih suka bekerja di luar pertanian.

<sup>7)</sup> Wawancara pada September 1988 di Jakarta.

**Tabel 5.4**  
**Distribusi Anak Responden yang Tinggal**  
**di Luar Tapanuli Utara Menurut Pekerjaannya, 1989**

Pekerjaan	Tempat lahir			Jumlah	%
	Simanindo	L.nihuta	D.sanggul		
T a n i	25	5	21	51	20,9
Dagang/Wiraswasta	80	3	13	96	39,3
Pegawai Negeri/ABRI	14	5	7	26	10,7
Pegawai Swasta	14	5	5	24	9,8
Lain-lain	34	2	11	47	19,3
<b>J u m l a h</b>	<b>167</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>244</b>	<b>100,0</b>

Catatan : Lain-lain mencakup anak sekolah dan yang belum sekolah.

Sumber : Data lapangan, 1989.

**Tabel 5.5**  
**Distribusi Saudara Istri Responden yang Tinggal**  
**di Luar Tapanuli Utara Menurut Pekerjaannya, 1989**

Pekerjaan	Tempat lahir			Jumlah	%
	Simanindo	L.nihuta	D.sanggul		
T a n i	55	14	15	84	45,9
Buruh	2	-	1	3	1,6
Dagang/Wiraswasta	56	2	3	61	33,4
Pegawai Negeri	1	6	8	15	8,2
ABRI	1	6	1	8	4,4
Pegawai Swasta	5	-	2	7	3,8
Lain-lain	4	-	1	5	2,7
<b>J u m l a h</b>	<b>124</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>183</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data lapangan, 1989.

Wanita-wanita yang mempunyai tingkat pendidikan menengah, yang tidak dapat lagi melanjutkan sekolahnya karena kendala dana, tidak sabar lagi tinggal di desanya. Mereka memasuki kota besar, seperti Medan, Jakarta dan lain-lain. Banyak dari antara mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan, seperti di pabrik sepatu, sandal dan lain-lain, bahkan ada yang

bekerja di hotel dan pasar swalayan. Sepanjang mereka menganggap atau belum berhasil mendapat pekerjaan di instansi pemerintahan maka mereka tidak akan (jarang) meninggalkan pekerjaannya terdahulu. Merupakan hal yang diidamkan setiap orang, suatu pekerjaan yang memberikan prospek yang lebih cerah, akan menjadi prioritas utama. Itulah sebabnya ada yang memilih bekerja di perusahaan, pasar swalayan atau di pabrik, walaupun dengan gaji yang relatif kecil. Di Medan misalnya, hal itu bertambah secara berarti sejak tahun 80-an. Sebagian dari mereka menerima upah yang relatif kecil, barangkali hanya cukup untuk biaya hidup tanpa dapat menabung, namun mereka bangga tinggal di kota dan tidak bekerja sebagai petani di desa. Pekerja di sektor informal seperti di Medan dan Jakarta serta kota-kota besar lainnya, mengemukakan bahwa penghasilan yang mereka terima sudah lebih pasti dibandingkan dengan jika bertani di desa. Selain penghasilan yang kurang menentu, ada anggapan bahwa bekerja di sawah mengurangi status sosial. Dengan demikian adalah wajar jika perpindahan dari desa akan terus mengalir ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor modern yang memberikan upah yang lebih tinggi walaupun sukar atau mungkin tidak dapat dimasuki dalam waktu yang relatif singkat. Belakangan ini muncul ke permukaan pandangan yang mengatakan bahwa "tidak penting apa pekerjaannya, yang penting dapat menjadi 'orang', sebab jika bertahan di desa tidak ada perkembangan". Lebih lanjut disebutkan bahwa "ukuran berhasil bukan tergantung dari jenis pekerjaan, yang penting tiap pulang kampung dapat menyumbang atau mampu mengirim uang pada waktu-waktu tertentu kepada keluarganya di desa." Demikian sebagian pandangan orang-orang tua di desa-desa Tapanuli Utara.

Dari pulau Samosir tidak sedikit yang menjadi pedagang keliling, *parjajo*, dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya di desa. Suami berdagang keliling di luar daerah sedangkan istri mengumpulkan modal tambahan dari hasil pertaniannya. Apabila menurut perhitungan mereka bahwa modal mereka sudah cukup maka diputuskan pindah dari desa ke daerah yang menurut suami cocok bagi mereka untuk meningkatkan outputnya. Hasil wawancara dengan beberapa orang penduduk desa di Samosir mengemukakan bahwa beberapa orang yang *marjajo* dari desanya ada yang sampai puluhan tahun tidak pernah kembali ke desa tetapi uang kiriman hasil pekerjaannya selalu datang. Sejak dahulu masyarakat di Samosir telah tahu cara hidup sebagai pedagang dengan berjualan berkeliling menjajakan barang dagangannya. Mereka ditempa lingkungan yang tidak memungkinkan dapat hidup memadai dari hasil pertaniannya.

Sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu tujuan utama meninggalkan kampung halaman adalah mencari nafkah untuk menambah penghasilan rumah tangga. Mereka yang cukup berhasil, sekali atau dua kali setahun kembali ke desa untuk mengunjungi keluarganya. Ada juga yang pulang ke

desa menziarahi pusara orang tua atau leluhur mereka, sebagai ikatan spiritual antara mereka dengan kampung halamannya. Biasanya, mereka dijumpai di kedai berbincang-bincang dengan penduduk setempat, dan secara tidak langsung, di tempat-tempat inilah dipamerkan hasil yang mereka peroleh dan pengalaman-pengalaman mereka selama di luar daerah. Hal itu dapat menjadi 'rayuan' bagi penduduk setempat dan orang tua rela memberangkatkan anak-anaknya dari desanya agar dapat memperoleh hasil yang demikian pula. Sebagian dari pemuda-pemuda yang bekerja pada sektor informal di Jakarta adalah 'korban rayuan' seperti itu. Apa yang ada dalam benaknya sewaktu di kampung halaman sebelum berangkat kadang berbeda dengan apa yang dialaminya di daerah lain.

## 5.2. Dampak Terhadap Daerah Asal

Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain bukan hanya mempengaruhi komposisi penduduk, tetapi juga aspek-aspek lain, baik di daerah yang akan ditinggalkan maupun daerah tujuan. Sudah jelas bahwa perpindahan penduduk merupakan suatu mekanisme yang memindahkan modal manusiawi, dan sering dengan modal fisik (hak milik) pribadinya, baik sebagian ataupun seluruhnya. Mekanisme ini dapat terjadi dengan pola dan arah yang berbeda, sehingga dapat menciptakan suatu pola yang timpang secara sosial dan dapat menciptakan suatu pola yang secara spatial tidak merata. Dengan demikian dapat menciptakan dampak positif maupun negatif.

### 5.2.1 Berkurangnya persediaan tenaga kerja

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan juga fakta sejarah bahwa petani dan kaum terdidik yang pindah jika dilihat dari struktur umur adalah golongan usia produktif. Sebagaimana ditemui peneliti-peneliti lain, memang perpindahan penduduk merupakan suatu seleksi. Orang-orang yang produktif dan potensiallah yang pada umumnya lebih siap menghadapi tantangan di daerah yang akan dimasuki. Walaupun tidak semuanya memperhitungkan resiko dan kegagalan di daerah lain, tidak berarti mereka tidak ada yang sukses. Gagal atau sukses merupakan situasi yang mewarnai pengalaman mereka dalam hidupnya di daerah lain.

Falsafah hidup yang memotivasi orang Batak Toba pindah dari kampung halamannya, dari kelompok petani atau golongan terdidik, menimbulkan kecenderungan bahwa penduduk yang tinggal di daerah asal adalah orang yang sudah tua atau masih muda menunggu siap untuk pindah (lihat

juga Rodenburg, 1989: 9). Orang-orang yang pindah dalam konteks *lulu anak lulu tano* dan *masiampapaga na lomak*, jelas adalah orang-orang yang mampu bekerja dan produktif bahkan mampu mempertahankan diri dan bersaing dengan orang lain. Dalam hal ini, walaupun perpindahan itu merupakan upaya mencapai cita-citanya, tetapi hal itu jelas mempengaruhi persediaan tenaga kerja di daerah yang ditinggalkan. Data lapangan tahun 1989 menunjukkan bahwa 50% dari saudara responden dan anak-anak mereka kini tinggal di luar Tapanuli Utara. Pada umumnya mereka tinggal di wilayah Sumatera Utara dan selebihnya di daerah lain di wilayah Indonesia (Tabel 5.6). Proporsi itu tentu akan berubah melihat kecenderungan penduduk yang meninggalkan Tapanuli Utara.

**Tabel 5.6**  
**Distribusi Saudara Suami, Istri dan Anak Responden**  
**Menurut Tempat Tinggal Sekarang, 1989**

Tempat tinggal sekarang	Tempat lahir			Jumlah	%
	Simanindo	L.nihuta	D.sanggul		
Tapanuli Utara	302	107	222	631 *)	50,0
Luar Tapanuli Utara :					
Sumatera Utara	299	56	99	454	36,0
Luar Sumatera Utara	127	21	29	177	14,0
<b>J u m l a h</b>	<b>728</b>	<b>184</b>	<b>350</b>	<b>1.262</b>	<b>100,0</b>

\*) termasuk 169 orang anak sekolah yang belum bekerja yang masih tinggal di Tapanuli Utara.

Sumber : Data lapangan, 1989.

Memang tidak ditanyakan secara langsung kepada responden yang disurvei di daerah asal, apakah mereka tergolong marga tanah atau penduduk pendatang, *paisolat*, di kampung halamannya, namun dari keterangan sepintas lalu menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di dalam satu desa sudah merupakan campuran. Sangat jarang suatu desa hanya dihuni penduduk yang benar-benar keturunan marga tanah, karena selalu ada yang tergolong sebagai pendatang, walaupun mungkin satu, dua atau tiga keluarga. Bahkan ada juga desa yang jumlah *paisolat* hampir menyamai atau mungkin melebihi keturunan marga tanah. Gambaran ini tidak dapat dipisahkan dari adanya pergeseran atau perpindahan penduduk antar desa terutama akibat perkawinan atau pengaruh faktor lain sehingga marga pendatang tinggal di kampung yang bersangkutan.

Suatu desa yang penduduknya kebanyakan pendatang tidak berarti desa tersebut mempunyai jumlah penduduk keluar tertinggi. Pada pasca pengakuan kedaulatan, misalnya, petani-petani yang pindah dari Tapanuli Utara terdiri dari dua bagian besar yaitu marga tanah dan *paisolat* dari tempat tinggal terakhir masing-masing. Mereka meninggalkan tanah hak miliknya dan sesuai dengan tuntutan adat, benda tidak bergerak itu tidak dapat dipindahkan hak pemilikannya. Dia boleh pindah tetapi hak pemilikan tetap ada padanya.

Selain kehilangan kaum tani yang tangguh, sejak beberapa dasawarsa lalu, kaum terdidik sudah lebih banyak tinggal di daerah lain. Kini muncul kecenderungan bahwa yang tinggal di desa-desa Tapanuli Utara adalah orang-orang yang hanya mampu mengandalkan otot, sedangkan yang pindah ke daerah lain justru mereka yang lebih berkualitas. Sejumlah warga masyarakat menuding kritisnya lahan serta terbatasnya kemungkinan berusaha di Tapanuli Utara sebagai penyebab tingginya arus urbanisasi keluar dewasa ini. Ketergantungan dari hasil pertanian semata-mata dapat menyulitkan penduduk setempat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak muda yang hanya tamatan SLTP kadangkala tergiur oleh cerita keberhasilan teman sekampung di kota-kota besar sehingga menyebabkan mereka ingin pula mendapat hal yang sama. Akibatnya, dikuatirkan dasawarsa mendatang akan makin banyak desa-desa yang hampir kosong, yang hanya ditempati orang-orang yang sudah tua dan anak-anak. Lebih jauh lagi, akan menyebabkan potensi alam yang ada tidak digunakan lebih optimal. Para orang tua pun sudah semakin menyadari bagaimana pola hidup seorang petani yang hanya mengusahai sebidang atau beberapa bidang lahan yang sempit. Tertarik akan keberhasilan anak-anak teman sekampung di daerah lain, menyebabkan mereka mendorong anak-anaknya secara tidak langsung meninggalkan desanya.

### 5.2.2. Dana keluar untuk pembayaran sewa lahan

Beberapa penelitian yang bersifat mikro telah membuktikan bahwa proses pemiskinan desa termasuk arus dana keluar untuk membayar sewa lahan. Sebagian petani di Tapanuli Utara tergantung pada lahan orang lain, yang dikelola dengan cara bagi hasil, *bola pinang* (bola pinang). Di desa Hutnamora, Kecamatan Balige (penelitian pertengahan tahun 1989), misalnya, menunjukkan bahwa dua pertiga dari jumlah petani sawah mengusahai milik sendiri dan milik orang lain. Milik sendiri hanya 0,26 Ha sedangkan pengusahaan adalah 0,39 Ha. Ini menunjukkan bahwa ada ketergantungan kepada sawah milik orang lain, yang kebanyakan pemilikinya tinggal di Medan dan Jakarta. Diperkirakan sekitar 17 % dari total produksi lokal

hasil panen mengalir ke luar desa untuk membayar sewa lahan setiap tahunnya. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa arus dana seperti itu merupakan faktor penting yang mempercepat pemiskinan desa Hutanamora (Tampubolon dan Mijl, 1991: 293-309).

Penelitian lain, seperti di desa Simatupang, Kecamatan Muara (penelitian tahun 1988/1989) menunjukkan sekitar 12% dari lahan yang diusahai (sawah dan ladang) adalah milik orang lain, bekas warga desa yang telah pindah. Setiap kali panen, penyewa harus membayar  $\frac{2}{5}$  dari total produksi kepada pemilik tanah (Rodenburg, 1989 : 3). Dari gambaran dua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa selain dana untuk menyekolahkan anak (dan mungkin pembayaran bunga pinjaman), arus dana keluar berupa sewa lahan yang dibayarkan kepada pemiliknya yang telah pindah merupakan faktor penting yang mendorong proses pemiskinan di berbagai desa Tapanuli Utara. Seandainya tidak ada sewa-menyewa, artinya lahan yang diusahai adalah milik orang yang tinggal di desa, maka arus dana tidak akan keluar. Petani penyewa membayar sewa lahan yang diusahainya kepada orang yang tinggal di desanya atau desa tetangga, sehingga dampak multipliernya menjadi lain. Apabila arus uang keluar seperti itu diimbangi dengan arus uang masuk, mungkin tidak perlu dipermasalahkan proses pemiskinan desa karena pembayaran sewa lahan tersebut.

Di daerah-daerah persawahan Tapanuli Utara tidak terdapat peningkatan yang berarti dalam hal luas pertanian. Hal itu disebabkan pendirian bangunan, pelebaran jalan, termasuk tempat pembangunan tugu dan lain-lain, di atas lahan-lahan yang subur yang cocok untuk persawahan. Namun demikian, seseorang petani dengan cara berkompetisi dapat menambah luas sawah yang diusahainya dengan cara menyewa lahan sawah yang ditinggalkan atau menyewa lahan persawahan orang-orang kaya desa. Itulah sebabnya kadang kala sewa yang mereka bayarkan relatif lebih tinggi, karena penduduk seperti berlomba-lomba menyewa, sehingga permintaan yang tinggi menyebabkan sewa lahan meningkat. Sewa yang dibayar berkisar antara 30%-50% dari hasil panen padi yang diperoleh dalam setahun. Di desa Bakara (Kecamatan Muara) misalnya, petani penyewa lahan sawah mengusahai lahannya dengan cara rotasi tanaman, padi diganti dengan bawang, karena bawang dapat dipanen tiga kali dalam setahun sedangkan padi hanya sekali. Jika padi unggul sekali, masa berikutnya dengan dua kali bawang. Rotasi seperti ini sudah dimulai beberapa dasawarsa yang lalu (akhir tahun 70-an) karena padi lokal yang pada tahun-tahun sebelumnya dapat dipanen dua kali dalam setahun menjadi tidak mungkin. Pada umumnya, hasil dari panen bawang diharapkan melebihi hasil panen padi karena dengan cara seperti itulah sewa lahan yang relatif tinggi itu tidak berapa besar pengaruhnya bagi penyewa.

### 5.2.3. Penggunaan lahan kering

Pada umumnya lahan kering tidak disewakan bahkan pemiliknya pun tidak menuntut sewa apabila diusahai oleh famili atau orang lain. Lahan kering tersebut, biasanya dipinjamkan kepada saudara atau tetangga. Namun dalam pengusahaan, peminjam tidak diperkenankan menanam tanaman keras untuk menghindari timbulnya masalah di kemudian hari. Namun sering pula lahan-lahan kering menjadi bera, *tarulang*. Salah satu penyebabnya ialah karena lahan tersebut tidak diusahai lagi, mungkin karena tidak memberi hasil seperti yang diharapkan peminjam, atau karena sesuatu hal, lahan tersebut diminta kembali oleh pemiliknya tanpa diusahai selanjutnya (Eijkemans, 1990 : 211-212). Selain itu, kebanyakan lahan-lahan kering sudah milik orang-orang yang tinggal di luar daerah, yang sering tidak mengizinkan orang lain atau bahkan keluarga dekat pun untuk mengusahai. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan timbulnya pergeseran hak milik secara sepihak di kemudian hari karena lahan tersebut umumnya belum disertifikatkan. Itulah sebabnya di beberapa daerah banyak lahan kering dibiarkan jadi belukar, yang pemiliknya tinggal di luar Tapanuli Utara.

Gambar 9. Contoh Pertanian Lahan Kering di Samosir, 1989.



Foto : Elvis F. Purba (1989).

Dari wawancara dengan camat Kecamatan Lumban Julu dan Porsea (1990) diketahui bahwa di masing-masing kecamatan itu sekitar 75 % dari lahan kosong adalah milik orang-orang yang tinggal di luar Tapanuli Utara. Bosch (1990 : 28-29) yang mengadakan penelitian di Kecamatan Muara sampai pada kesimpulan bahwa sebagian lahan-lahan yang terlantar di desa Simatupang Kecamatan Muara adalah akibat langsung dari perpindahan penduduknya.

Salah satu tanaman keras yang dapat ditanam di lahan kering adalah cengkeh. Pada akhir tahun 70-an pemerintah daerah mendorong penanaman cengkeh sebagai tanaman baru untuk lahan-lahan kosong, sebagai tanaman penghijauan ke tanah kritis dan dapat sebagai tanaman pekarangan. Namun hal ini kurang mendapat sambutan dari petani-petani penyewa, terutama yang tidak mempunyai tegalan atau lahan kering karena mereka tidak dapat menanaminya pada lahan yang dipinjam itu. Sangat jarang terjadi, mungkin tidak pernah, tanah orang lain (dipinjam atau disewa) ditanami dengan tanaman tahunan. Walaupun tanaman yang diperkenalkan itu memberi gambaran yang cerah dari segi produksi, penggunaan tanah merupakan permasalahan yang pelik dan tidak mudah diatasi.

Gambar 10. Tanah Gersang di Samosir, 1989.



Foto : Drs. Sabam Simbolon (1989).

Gambar 11. Bukit Gundul di Sekitar Danau Toba, 1989.



Foto : Drs. Sabam Simbolon (1989).

Dewasa ini terdapat sekitar 160.000 Ha lahan terbenakalai dan kritis di Tapanuli Utara. Lahan ini merupakan potensi besar, dan terdapat kesan bahwa "umumnya lahan itu terlantar karena tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, yang umumnya berada di kota-kota besar di Indonesia", demikian penjelasan seorang warga desa Sarulla Kecamatan Pahae Jae tiga tahun yang lalu. Mengingat nilai tanah, walaupun ada investor yang ingin menanamkan modalnya, pembebasan tanah menjadi lebih sulit bahkan dapat menyita waktu bertahun-tahun. Waktu pengurusan menjadi lama karena sulit menghubungi pemilik tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggalkan desanya. Walaupun mungkin, jika satu atau dua orang yang tidak setuju, hal itu dapat berakibat fatal terhadap penggunaan lahan.

Hampir sama nasibnya, tanah-tanah adat yang tersebar luas itu pun tidak boleh digarap oleh siapa pun sebelum dibagikan atau disertifikasikan. Memang sertifikasi lahan menjadi milik individu dapat melemahkan sendi-sendi *huta* sebagai satu 'corporate community' (Bangun, 1994 : 6) akan tetapi apakah tanah milik marga tidak dapat dijadikan sebagai harta yang

produktif bagi pemilik-pemilikinya ? Inilah permasalahan yang sulit hingga saat ini, sebab begitu mulai digarap, keluarga-keluarga lain termasuk yang di *parsearikan*, akan memprotes dengan dalih adat. Bahkan janda miskin pun tidak diijinkan mengerjakannya. Ironisnya orang-orang yang sudah pindah pun tidak ikut mencari jalan keluarnya, mereka seolah-olah tidak ingin mengubah wajah desa dan kampung halamannya. Hal ini merupakan kendala bagi transformasi masyarakat. Siapa yang punya nyali untuk memulainya adalah mereka dan orang-orang yang tinggal di desa.

#### 5.2.4. *Pelarian tenaga kerja terdidik, trampil dan potensial*

Seperti uraian di atas jelaslah bahwa perpindahan orang-orang yang berpendidikan lebih menonjol setelah tahun 50-an. Ambisi mencari pendidikan kemana-mana merupakan refleksi falsafah mereka bahwa "pendidikan sumber hikmah adalah kekayaan yang tertinggi, yang tidak dapat dicuri, diambil dari manusia yang terdidik itu". Ilmu dan pengalaman yang telah mereka peroleh setelah lulus dari pendidikannya tidak 'disalurkan' di Tapanuli Utara. Mereka tidak kembali ke kampung, karena tidak tersedia pekerjaan yang layak bagi mereka tetapi sebaliknya, mencari pekerjaan di kota-kota besar di mana mereka melanjutkan pendidikan sebelumnya atau ke kota besar lainnya. Disamping kesempatan kerja yang lebih banyak, juga dapat memberikan pengembalian modal pendidikan yang telah mereka korbankan selama itu. Mereka dapat memperoleh atau menciptakan pekerjaan yang lebih layak yang dapat memberikan penghasilan yang lebih memadai dan meraih cita-citanya. Kemiskinan di kampung halamannya merupakan faktor penting yang menjadi pendorong mereka meninggalkan desa menuju daerah-daerah yang memiliki lebih banyak kesempatan dan memberi harapan.

Hampir tidak ada orang Batak Toba kembali ke kampungnya setelah memperoleh pendidikan tinggi. Ini merupakan kenyataan yang sulit dibantah. Memang ada yang tinggal di daerah Tapanuli Utara, dan menjadi pegawai di sana, tetapi hal itu melalui jalur penempatan. Walaupun tidak terdapat statistik yang dapat mengungkapkan berapa jumlahnya yang bekerja di luar Tapanuli Utara, namun tidak dapat disangkal bahwa sudah sangat banyak orang Batak Toba kelahiran Tapanuli Utara yang bekerja pada berbagai lapangan pekerjaan di berbagai daerah di Indonesia. Mereka dapat dikenal lebih mudah berdasarkan marganya, terlebih-lebih di kota-kota besar. Persaingan yang lebih ketat untuk kesempatan yang lebih besar di kota-kota tidak menjadi halangan bagi kaum terdidik beralih ke kota. Manusia-manusia yang berkualitas menghadapi persaingan untuk memperoleh pekerjaan baik di kota-kota besar maupun kota-kota kabupaten. Manusia

yang berkualitas cenderung meninggalkan Tapanuli Utara untuk membangun dan memperbesar harga dirinya walaupun sudah besar investasi dikorbankan untuknya.

Sampai sekarang Tapanuli Utara hanyalah pusat HKBP, bukan lagi pusat pendidikan (seperti pada masa sebelum Perang Dunia II), dan bukan pula pusat perdagangan atau pusat politik. Sudah sejak beberapa dasawarsa yang lalu terdapat kecenderungan bahwa yang tinggal di Tapanuli Utara adalah orang tua, anak-anak (yang belum disekolahkan), selama masih memungkinkan, yang tidak berapa lama lagi, akan pindah juga ke daerah lain, sebagaimana masih berlangsung hingga dewasa ini.

**Tabel 5.7**  
**Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan, 1989**

Pendidikan	Kecamatan			Jumlah	
	Simanindo	L.nihuta	D.sanggul	Multak	%
Buta huruf	5	-	-	5	6,7
SD sederajat	32	10	20	62	82,6
SLTP sederajat	3	1	1	5	6,7
SLTA sederajat	3	-	-	3	4,0
Perguruan tinggi	-	-	-	-	-
<b>J u m l a h</b>	43 (100,0)	11 (100,0)	21 (100,0)	75	100,0

Sumber : Data lapangan, 1989.

Berbagai pemberitaan media massa, demikian juga dengan penjelasan pemerintah setempat, bahwa gencarnya pemberitaan Tapanuli Utara sebagai salah satu cermin peta kemiskinan di Sumatera Utara adalah karena daerah tersebut 'kehilangan' orang-orang bermutu. Banyak dari orang tua yang tinggal (terutama para petani) dengan pendidikan yang lebih rendah. Daerah yang disurvei di Kecamatan Simanindo, Lintongnihuta dan Doloksanggul menunjukkan bahwa pada umumnya responden hanya berpendidikan SD sederajat (Tabel 5.7). Data ini memberi gambaran rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan ini merupakan salah satu penyebab masyarakat tetap terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Walaupun pendidikan tidak menjadi satu-satunya barometer dalam keberhasilan, namun sumberdaya manusia yang kurang terdidik sering lebih sulit diarahkan dibandingkan

dengan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi. Dalam bidang pertanian, misalnya, pemilihan, cara-cara penanaman dan perawatannya lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman petaninya. Dari pengamatan selama survei di lapangan dan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa walaupun ada penyuluhan dari instansi tertentu atau dari keluarganya, mereka sering mengandalkan pengalamannya sendiri. Mereka tidak suka 'diajari' tetapi mereka lebih cepat meniru apabila ada satu percontohan atau usaha temannya yang berhasil menurut pengamatan mereka. Hal inilah mungkin salah satu penyebabnya mengapa beberapa jenis tanaman yang kurang cocok dengan potensi lahan tetap ditanami. Penelitian yang dilakukan oleh Tim Regional Planning Universitas HKBP Nommensen tahun 1990 menunjukkan sekitar 75% wilayah Tapanuli Utara ditanami dengan tanaman yang tidak cocok dengan potensi wilayahnya (Eijkemans, 1990 : 211).

Sampai sekarang belum ditemui keseimbangan antara penduduk yang keluar dengan penduduk yang masuk. Orang-orang yang masuk ke Tapanuli Utara pada umumnya adalah orang-orang yang untuk sementara tinggal karena bertugas di instansi pemerintah. Mereka sudah mempunyai tempat tinggal menetap di kota-kota besar Sumatera Utara. Demikian pula penduduk setempat, sebagian sudah mempersiapkan anak-anaknya tinggal di luar daerah dengan membeli rumah dan tanah, misalnya di kota Medan, Pematang Siantar dan kota-kota pendidikan lainnya. Hal itu nampaknya wajar oleh karena upaya pencegahan apalagi penghentian perpindahan merupakan upaya yang sia-sia. Namun demikian sampai sekarang orang-orang yang sudah pensiun pun sangat jarang (bahkan mungkin tidak ada) yang kembali ke kampung halamannya untuk menghabiskan sisa masa hidupnya, sebagai imbalan orang-orang yang keluar.

#### 5.2.5. Ketinggalan di bidang industri

Selain di bidang pendidikan, Tapanuli Utara juga ketinggalan di bidang industri. Pada akhir masa kolonial, Tapanuli Utara sudah memiliki pertekstilan yang tergolong maju. Tahun 1933 di Balige telah berdiri kilang tenun Saroha yang didirikan oleh Baginda Pemimpin Siahaan dengan nama Sekolah Pertenenan dan Pertekstilan Pertama. Kilang tenun Saroha merupakan pelopor pertekstilan di Sumatera Utara yang pada tahun 1938 sudah berjalan dengan 123 buah alat tenun (*Waspada*, 4.1.1963). Perusahaan itu terus mengembangkan usahanya dan pada awal tahun 50-an Balige merupakan pusat pertenenan. Dari 770 unit alat tenun yang terbuat dari kayu yang ada di Sumatera Utara, lebih 50% terdapat di Balige. Dari 15 unit alat tenun mesin, 13 diantaranya berada di Balige dan dua lagi di Pematang Siantar (*Waspada*, 12.4.1952).

Sementara Tapanuli Utara melorot di bidang pertekstilan, putra-putra Batak Toba di Medan semakin mengembangkan sayapnya, diantaranya Sima Concern dan Knitting Factory T.D.Pardede. Pardede yang dianggap sebagai salah seorang yang berhasil, tampil sebagai tokoh nasional pada periode Demokrasi Terpimpin dan ketika PNI menjadi partai yang memerintah pada tahun 1953. Setelah mendirikan pabrik tekstil Knitting Factory T.D. Pardede, dua tahun berikutnya didirikan pabrik tenun Hisar Sakti, yang memproduksi kaos baju dan usahanya berkembang pesat sejak tahun 60-an. Sementara itu di Jakarta PT Piola, milik J.K. Panggabean, pada tahun 60-an mempunyai kedudukan yang kuat dan berpengaruh sekali dalam bidang bisnis, sosial dan ekonomi di negara kita ini.

Walaupun Tapanuli Utara ketinggalan di bidang pertekstilan bukan merupakan akibat langsung dari perpindahan penduduknya, namun tidak sulit membayangkan Tapanuli Utara akan maju di bidang itu jika orang-orang yang berhasil itu menanamkan investasinya di sana. Dewasa ini memang masih ada pertekstilan yang menghasilkan kain sarung dan selimut, tetapi jumlahnya tidak besar. Para ibu-ibu yang akan melahirkan, terutama dari kalangan orang-orang Batak Toba yang ada di kota-kota seperti Medan dan Jakarta tetap mencari dan menggunakan sarung keluaran Tapanuli Utara (dari Balige) yang dikenal dengan sebutan sarung Balige. Pembeli yang berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan kain di Medan, misalnya, dengan menyebut Balige saja, penjualnya sudah mengerti bahwa yang dicari adalah kain tenunan Balige atau produk Tapanuli Utara. Pengusaha dari kalangan Batak Toba mungkin menyadari bahwa untuk meraih sukses yang besar harus berusaha di luar wilayah budaya sendiri dan berjuang keras di daerah lain. Dalam kegiatan usahanya, pada umumnya tidak dapat memisahkan urusan bisnis dengan urusan keluarga. Banyak yang sulit mempraktekkan bisnis di dalam bisnis dan sulit memisahkan hubungan kekerabatan dengan bisnis, sehingga dalam berbagai hal sulit berkembang.

### 5.2.6. Dusun menjadi kosong

Pembukaan lahan pertanian baru nampaknya tidak jauh berbeda dengan pola pembukaan kampung-kampung baru yang dilakukan di daerah lain. Pola perpindahan yang didahului oleh beberapa orang sering diikuti dengan perpindahan secara berkelompok-kelompok dari desa yang sama atau marga yang sama. Sifat berkelompok (biasanya dalam jumlah yang relatif kecil) dari marga yang sama atau dari desa yang sama, sudah merupakan hal yang biasa. Itulah sebabnya sering nama desa asal menjadi nama desa atau dusun yang dibangun di daerah tujuan. Di kota-kota seperti Medan dan Pematang Siantar ditemui nama-nama lorong atau jalan yang sama dengan nama

wilayah atau desa di Tapanuli Utara.

Perpindahan berbentuk musiman, *mardua huta*, sering menjadi menetap. Pada tahun 40-an dari daerah Sijamapolang misalnya, banyak yang pindah secara spontan, *bungkas*, karena berbagai penyebab. Tujuan mereka adalah daerah Sumatera Timur, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pada pasca pengakuan kedaulatan, Cunningham (1958: 78) dalam penelitiannya memberikan suatu contoh kampung, *huta*, yang menjadi 'Ghost huta' yaitu Sibaringbing di Meat Kecamatan Balige, karena banyak penduduknya pindah menetap ke daerah Sumatera Timur. Kampung-kampung pun mulai sunyi dan beberapa diantaranya hampir kehilangan penduduk karena perpindahan kaum tani dan kaum terdidik yang terus berlangsung.

Gambar 12. Salah Satu Bekas Perkampungan di Samosir.

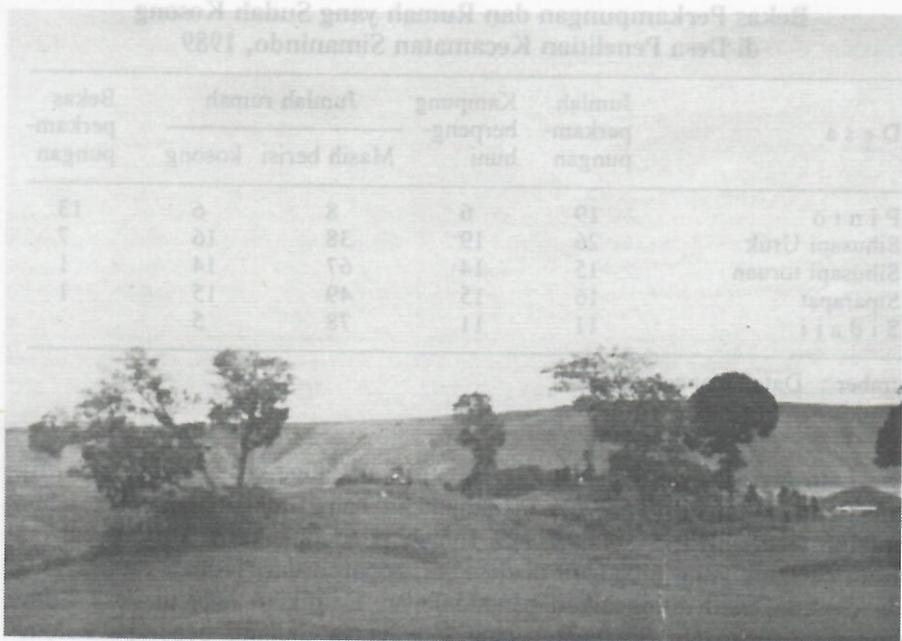


Foto : Drs. Sabam Simbolon (1989).

Berbeda dengan perpindahan pejabat-pejabat dan juga 'orang-orang besar' lainnya, perpindahan petani lebih nyata dari mereka karena perkampungan yang ditinggalkan sering menjadi kosong, *lobu*, tidak dihuni orang. Di beberapa daerah atau desa terdapat dusun, *huta*, yang menjadi *tarulang* ditinggalkan oleh penduduknya. Di Kecamatan Simanindo, misalnya, terdapat beberapa dusun yang sudah kosong karena banyak penduduknya pindah. Sesuai dengan pengamatan dan hasil wawancara dengan penduduk setempat (1989), di desa Sihusapi Uruk 7 dari 26 dusun yang kosong. Di desa Pinto terdapat 13 dari 19 yang sudah kosong dan di masing-masing dusun beberapa rumah sudah kosong pula (Tabel 5.8).

**Tabel 5.8**  
**Bekas Perkampungan dan Rumah yang Sudah Kosong**  
**di Desa Penelitian Kecamatan Simanindo, 1989**

D e s a	Jumlah perkampungan	Kampung berpenghuni	Jumlah rumah		Bekas perkampungan
			Masih berisi	kosong	
P i n t o	19	6	8	6	13
Sihusapi Uruk	26	19	38	16	7
Sihusapi toruan	15	14	67	14	1
Siparapat	16	15	49	15	1
S i d a j i	11	11	78	5	-

Sumber : Data lapangan, 1989.

Lain lagi di desa Hutanamora Kecamatan Balige, hasil penelitian Mijl dan Tampubolon (1991: 296), menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah ditemui 30 dari 129 rumah penduduk yang kosong bahkan dusun pertama yang dibangun di desa itu, separoh dari jumlah rumah yang ada di sana telah ditinggalkan penduduknya. Demikian juga di desa Lumbannatio, kecamatan Sipahutar, yang kini hanya didiami beberapa kelompok. Hal serupa juga terjadi di Desa Huta Gurgur yang hanya dihuni 30 keluarga. Akibat derasnya arus urbanisasi, keadaan ini menjurus pada pengosongan kampung. Idealnya anak sulung atau anak bungsu menjadi penghuni kampung tetapi dalam prakteknya tidak ada ketegasan tentang hal itu. Baik anak sulung, anak tengah dan anak bungsu seperti berlomba-lomba membangun dirinya di daerah lain. Kalau dilihat data sensus penduduk 1930, 1961, 1971, 1980 dan 1990 tidaklah berlebihan jika tahun 2000 nanti dusun-dusun yang hampir kosong akan menjadi kosong, *lobu*, jika tidak ada

tindakan preventif yang dapat menahan satu atau dua orang generasi muda dari tiap keluarga tinggal di desa tersebut.

Proses pemiskinan yang terus berlangsung menyebabkan warga masyarakat tidak mengalami perkembangan mutu kehidupan dan tingkat kesejahteraan. Masyarakat yang dahulu banting tulang agar dapat membiayai anak-anaknya sekolah di kota, kini tidak mujarab lagi. Para orang tua tidak merasa takut lagi untuk memberangkatkan anak-anaknya walaupun mungkin hanya tamat SLTP atau SLTA. Bahkan saat ini banyak orang tua di pedesaan yang rela menyerahkan anaknya menjadi pembantu rumah tangga di tempat keluarganya, asalkan anak itu disekolahkan. Kalau dahulu orang tua (yang mampu) menitikkan air mata ketika memberangkatkan anak-anaknya sekolah ke tempat yang jauh, kini mereka menangis jika anaknya tidak mau sekolah. Mereka ingin anak-anaknya menyandang gelar sarjana dan para orang tua mengaitkan nilai yang besar kepada pendidikan anaknya. Karena pendidikan, maka kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi dari sekedar petani dan untuk bertempat tinggal di kota lain menjadi lebih besar. Generasi muda tidak tertarik lagi bekerja di ladang atau di sawah dan menjadi petani disamakan dengan ketinggalan dalam kemajuan dan dinilai negatif. Pandangan ini juga berakibat bahwa penduduk desa tidak banyak mengambil inisiatif untuk memperbaiki atau memperkuat sistem dalam pertanian. Dengan demikian, hal ini telah memperkuat perasaan hidup di pedesaan yang ketinggalan dan mendorong perpindahan ke kota. Akibat selanjutnya ialah mempercepat dusun-dusun menjadi kosong. Disamping itu, orang-orang yang pindah pun tidak banyak menumbuhkan inisiatif dan ide-ide baru untuk memperbaiki atau memperbaharui sistem pertanian orang tuanya atau masyarakat desanya. Sepanjang hal itu terjadi, memungkinkan semakin banyak lahan yang tidak produktif.

Tidak dapat dibantah lagi bahwa dari dahulu hingga sekarang sebagian dari orang-orang yang 'sukses' secara langsung ikut mempercepat arus perpindahan dari Tapanuli Utara diantaranya, dengan membawa sebagian sanak familinya dari desa. Mereka memberi jalan untuk memperoleh pekerjaan dan yang lain memberi informasi bahwa keadaan di daerah yang baru itu lebih baik daripada di desa, dan akhirnya dapat merangsang yang lain ikut pindah. Hal itu bukan hanya merupakan dorongan untuk meninggalkan desa tetapi juga telah mempengaruhi generasi berikutnya tidak betah tinggal di desanya. Suatu kecenderungan bahwa apabila ada satu orang atau lebih dari anggota keluarga telah bekerja di daerah lain, *parserakan*, anggota lain akan ikut menyusulnya. Semakin lama semakin banyak kampung yang kehilangan penduduknya. Oleh sebab itu, diperkirakan dalam waktu singkat banyak desa di Tapanuli Utara akan menjadi desa yang sepi dan mungkin hanya akan diramaikan oleh kuburan atau tugu-tugu yang megah.

### 5.2.7. Lahan kosong menjadi sumber konflik

Menurut adat Batak Toba, anak sulung, *sihahaan*, berperan sebagai pengganti bapak dan anak bungsu, *siampudan*, yang mengurus orang tua di umur senja (Vergouwen, 1964 : 280). Dengan demikian, mereka mempunyai tanggungjawab yang lebih besar sekaligus dalam hal warisan dibandingkan dengan anak tengah. Dalam kenyataannya, hal itu berlaku di zaman dulu ketika anak-anaknya tinggal di desa dan dalam lingkungan daerah yang relatif sempit. Berbagai aspek dari ketentuan itu menjadi pudar karena mereka pun telah ikut meninggalkan desanya sehingga tidak benar-benar lagi bertanggungjawab atas fungsi dan kedudukan yang seharusnya. Lahan-lahan kering yang telah menjadi bera dan menjadi tempat penggembalaan dalam beberapa lama, yang berasal dari kakek moyangnya sering menjadi sumber konflik di kemudian hari.

Lahan-lahan kosong yang bagai tidak bertuan dua atau tiga generasi, yang berupa milik marga atau milik satu kakek, *saompu*, dapat menjadi sumber konflik karena hak milik tersebut belum mempunyai akte. Orang-orang yang telah pindah mengetahui itu sebagai miliknya hanya dari cerita atau pemberitahuan orangtuanya tanpa suatu bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Di desa-desa yang kebanyakan penduduknya adalah marga pendatang, *paisolat*, dibandingkan dengan turunan marga tanah, dapat memanfaatkan keadaan itu. Pelepasan tanah untuk proyek pembangunan sering menjadi lebih mudah karena hanya dengan menerima *pago-pago*, yaitu sebagai penghormatan untuk mempersaksikan tanda batas-batas yang ditancapkan di tanah, hak milik menjadi hilang. Acara pelaksanaan sedemikian agaknya memenuhi hukum adat, tetapi *pago-pago* telah mengakibatkan hak milik marga tanah hilang. Tanah 'hilang' masalah pun timbul. Hal ini merupakan sisi lain yang kurang mendukung pembangunan di Tapanuli. Keadaan seperti itu telah banyak terjadi di berbagai daerah, diantaranya Siria-ria Doloksangul, Silando dekat Silangit dan Hutaginjang Muara.

### 5.2.8. Pendirian tugu-tugu, identitas asal usul dan penghormatan kepada nenek moyang

Hubungan antara *tano parserakan* dengan *bona pasogit* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Selain berpartisipasi dalam pembangunan tugu, mereka mengunjungi kampung halamannya sekali, dua kali atau beberapa kali dalam setahun. Selain mengunjungi keluarga (jarang), alasan penting lainnya kembali ke desa, adalah untuk berpartisipasi dalam upacara-upacara adat, seperti perkawinan, kematian dan selamatan yang dilakukan oleh

keluarga atau teman di desa. Dampak pengaruhnya tidak secara sama dirasakan oleh warga masyarakat desa. Biasanya pengaruh itu lebih besar bagi keluarga-keluarga yang mempunyai satu atau lebih anggotanya di *tano parserakan*. Hubungan dengan membangun ikatan-ikatan antara *tano parserakan* dan *bona pasogit* selama mereka mengirimkan uang, barang-barang, ide-ide, sikap dan inovasi yang diwujudkan dalam kunjungan langsung atau tidak langsung ke *bona pasogit*.

Gambar 13. Salah Satu Tugu Keturunan Marga Purba di Daerah Humbang.



Foto : Elvis F. Purba (1989).

Dari sekian banyak hubungan itu yang menggambarkan ikatan spiritual dengan *bona pasogit* tanah leluhurnya adalah pembangunan tugu. Memang harus diakui bahwa tugu merupakan suatu bentuk kebanggaan bagi marga-marga atau kelompok marga yang membangunnya, karena dapat menaikkan prestise kelompok-kelompok marga atau keturunan satu kakek, *saompu*, yang membangun tugu tersebut. Biasanya pembangunan tugu satu *ompu* atau kelompok marga diprakarsai oleh beberapa orang yang berhasil, sedangkan yang tinggal di desa pada umumnya adalah pendukung, *panolopi*. Biaya terbesar pembangunan tugu pun bersumber dari mereka sedangkan yang tinggal di *bona pasogit*, biasanya hanya memberikan sumbangan tenaga atau kadang-kadang ditambah dengan sedikit sumbangan uang.

Dilihat dari segi ekonomi, pembangunan tugu menghasilkan manfaat atau nilai sosial ekonomis yang sangat kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang cukup besar untuk pembangunannya. Kedua belah pihak mengorbankan waktu, tenaga dan dana yang merupakan biaya peluang (*opportunity cost*) untuk kegiatan lain yang lebih berguna. Mereka dapat mengadakan pesta dalam 3 hari atau mungkin sampai 7 hari untuk peresmianya dan menyebabkan warga desa terganggu atau enggan mengerjakan sawah/ladanganya selama pesta. Akan tetapi, dilihat dari segi kehormatan, menghormati nenek moyang dan tanah marga (*golar*) adalah bernilai tinggi. Pada tahap ini jelas nampak bahwa demi harga diri, faktor *hamoraon* dan rasionalitas sering dikorbankan. Mereka membangun 'tugu-tugu mati' secara besar-besaran dan mungkin menyaingi tugu yang lain dan dianggap tahan sampai beberapa lama. Dalam hal ini Bruner (1987 : 148-1949) menggambarkan sebagai berikut: "The urban Batak return to Tapanuli to associate themselves with a massive tugu of great durability, as if to fixed the past, to show that Batak adat really doesn't change."

Dilihat dari pembangunan tugu di kampung halaman dan perkembangan gereja di kota-kota, pada umumnya yang membangun tugu adalah orang-orang yang tinggal di kota sedangkan yang membangun gereja di kota adalah orang-orang yang pindah dari desa. Walaupun kedua-duanya mengandung makna tertentu dilihat dari aspek tertentu bagi kehidupan dan kultur mereka, Bruner (1987 : 141) melihat kejadian-kejadian itu sebagai suatu ironi di kalangan orang Batak Toba.

Selain untuk pembangunan tugu secara besar-besaran menurut takaran mereka, orang-orang yang berhasil acap kali menghantarkan mayat orang tua mereka, yang masa uzurnya tinggal bersamanya, ke *bona pasogit*. Ungkapan *ndang marimbar tano hamateon*, bagi keluarga mampu bukan berarti di mana meninggal (di luar Tapanuli Utara) di situlah dikuburkan. Namun selalu diupayakan agar mayat orang tua mereka, kelak dikuburkan di *bona pasogit*. Bagi keluarga yang mampu biasanya sudah mempersiapkan tempat berupa tugu atau yang menyerupainya di kampung untuk berjaga-

jaga. Itulah barangkali sebabnya mengapa orang-orang tua di desa-desa Tapanuli Utara, mengemukakan bahwa sumbangan terbesar mereka ke *bona pasogit* hanya menghantarkan mayat ke desanya. Hal senada diungkapkan oleh kepala desa Jangga Dolok, kecamatan Lumban Julu, D. Manurung, dalam suatu wawancara (tahun 1991) dengan mengemukakan bahwa "mereka (orang-orang Batak Toba yang berhasil) hanya menghantarkan mayat ke Tapanuli Utara". Jika demikian halnya maka tidak ayal lagi bahwa pengorbanan terbesar mereka bagi *bona pasogitnya* adalah membangun tugu-tugu mati dan dampak negatif lainnya ialah kemiskinan kultural yang bersifat konsumtif.

#### 5.2.9. Arus dana pendidikan ke luar daerah

Dalam jangka pendek, biaya pendidikan anak yang dikeluarkan pada masa sekarang ini belum begitu terasa jika hanya satu atau dua orang yang disekolahkan di tingkat SLTA di desanya, karena setiap harinya, sehabis sekolah mereka dapat membantu orang tuanya bekerja di ladang atau sawah. Sebaliknya, jika anak tersebut disekolahkan di kota, untuk tingkat SLTP pun, biaya yang dikeluarkan cukup terasa. Kalau diperhitungkan secara kasar, biaya per bulan untuk tiap orang di tingkat SLTP atau SLTA rata-rata Rp 75.000 - 100.000, maka biaya per tahun dapat mencapai kurang lebih satu juta rupiah. Lain lagi di tingkat perguruan tinggi, biaya per tahun sudah pasti di atas nilai tersebut. Dengan demikian, dalam jangka panjang, biaya pendidikan kumulatif yang keluar cukup besar, sehingga hal itu sangat melemahkan investasi fisik secara umum dan sekaligus investasi rakyat di Tapanuli Utara.

Sejak Tapanuli ketinggalan di bidang sarana dan prasarana pendidikan, kaum muda yang akan melanjutkan pendidikannya semakin menyebar ke berbagai daerah. Perhatian orang-orang yang berhasil terhadap kampung halamannya di bidang pendidikan sangat kurang. Mereka seperti 'terlupa' pada desanya yang telah kehilangan orang-orang tangguh itu. Hanya segelintir orang yang mulai memperhatikan pendidikan di sana. Sepanjang tidak ada perguruan tinggi yang bermutu dan mempunyai spesifikasi di Tapanuli Utara, arus dana keluar untuk membiayai pendidikan sulit dihempang. Kalaupun ada SMA-SMA unggul (seperti SMAN 3 Balige), belum ada petunjuk bahwa tamatannya akan tinggal dan bekerja di Tapanuli Utara. Sulit menyatakan berapa banyak dari antara orang yang telah mendapat pendidikan di Tapanuli Utara menganggap dirinya sebagai orang yang 'berhutang' pada daerah leluhurnya. Salah seorang diantara mereka adalah Jenderal T.B. Simatupang, yang mengemukakan secara pribadi bahwa beliau orang yang berhutang pada *bona pasogit*.

### 5.3. Dampak Terhadap Pembangunan Nasional

#### 5.3.1. Pembukaan persawahan/lumbung padi

Sebelum Perang Dunia II, para petani yang pindah dari Tapanuli Utara sudah membuktikan dirinya sebagai 'ahli' untuk mencetak persawahan di daerah-daerah bukaan baru, terutama di Simalungun, Dairi, Tanah Alas, Asahan dan Labuhan Batu. Daerah rawa-rawa dan tanah tadah hujan dapat dijadikan areal persawahan. Semasa kolonial, mereka diharapkan mampu mengatasi kekurangan pangan di daerah perkebunan Sumatera Timur termasuk di Aceh. Inilah salah satu alasan mengapa pemerintah kolonial mendorong, mengatur bahkan memberi kemudahan bagi mereka sebagai upaya Belanda mengatasi kekurangan beras di daerah perkebunan. Petani-petani itu telah memberikan suatu sumbangan positif bagi pengadaan kebutuhan pangan, bukan hanya untuk diri dan keluarga mereka, tetapi juga untuk kebutuhan masyarakat dalam lingkungan regional. Mereka telah membuktikan dirinya sebagai petani-petani yang unggul sehingga di mana mereka membuka persawahan, di sana ditemui lumbung padi.

Pada masa pendudukan Jepang pembukaan daerah pertanian terjadi di daerah Deli Serdang dan daerah Sumatera Timur lainnya. Setelah tahun 50-an semakin banyak yang menuju Sumatera Timur yang dianggap subur. Ada yang menetap di daerah *panombongan* dan ada pula yang melakukan sistem *mardua huta*, tetapi akhirnya banyak juga yang menjadi menetap. Selain membuka pertanian di lokasi-lokasi perkebunan yang sempat kosong, mereka juga mencari perluasan areal. Mereka membuka usahatani di daerah Lubuk Pakam, Serdang, Percut-Sei Tuan (bekas tanah rawa), Galang, Batang Kuis, Beringin dan di berbagai wilayah Asahan dan Labuhan Batu. Jumlah mereka meningkat dengan cepat karena 'benteng penghambat' sudah tidak dijumpai lagi. Pada pasca kedaulatan ini ada pula ke daerah Rao-Panti di Sumatera Barat untuk membuka persawahan.

Tahun 60-an terlebih tahun 70-an perpindahan dari desa ke desa masih tetap ada tetapi sudah sangat berkurang. Tidak seluruhnya berasal (tempat tinggal terakhirnya) dari Tapanuli Utara, ada yang pindah lagi dari Simalungun, Dairi, Tanah Alas (Aceh Tenggara) atau daerah lainnya. Memang sampai tahun 80-an masih ada kelompok-kelompok kecil yang pindah ke daerah Riau dan sekitarnya, terutama dari Asahan dan Labuhan Batu, tetapi mereka merupakan 'kelas dua' dari pionir-pionir pendahulu mereka yang datang langsung dari Tapanuli. Masa 'kejayaan' untuk membuka dan membangun tanah persawahan berangsur-angsur surut sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki tingkat kesejahteraan warganya, terutama sejak Pelita I (1969/1970) sampai sekarang.

### 5.3.2. Berdirinya sekolah-sekolah dan lembaga lainnya mendorong perpindahan penduduk

Pendidikan adalah motor utama penggerak penyebaran agama Kristen dan pembangunan di Dataran Tinggi Toba. Perubahan sosial dimulai dengan berdirinya sekolah di setiap kampung yang telah mempunyai 30 orang murid atau 50 kepala keluarga Kristen, dan hal itu menjadi tuntutan dari *raja huta* kepada zending. Raja huta dan penatua menjadi pengurus dari sekolah. Pada mulanya untuk membiayai persekolahan bergantung pada dana zending dan swadaya tetapi kemudian mendapat subsidi dari pemerintah. Sekolah yang menerima subsidi bertambah dengan cepat. Selain sekolah swasta dan sekolah bersubsidi, pemerintah mendirikan sekolah tetapi dengan jumlah terbatas, sehingga sekolah swasta jauh lebih banyak dari sekolah pemerintah sebagaimana telah disajikan dalam Tabel 4.15 dan Tabel 4.16.

Selain sekolah umum, berdiri juga sekolah raja, sekolah berbahasa Belanda HIS (Holands Indische School), sekolah MULO, sekolah pertukangan, pendidikan kesehatan, sekolah khusus pertanian, kejuruan wanita dan lain-lain. Semua sekolah dan lembaga keterampilan ini mendorong dinamika masyarakat untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan di dalam atau luar daerah. Ada juga yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di daerah lain. Dengan singkat, pendidikan mendorong perpindahan ke daerah lain dan di sanalah mereka mengabdikan dirinya bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kurang lebih setengah abad, kehadiran mereka di daerah lain mendorong pembukaan sekolah-sekolah zending, yang ditujukan bukan hanya kepada keluarga dan anak-anak orang Batak Toba tetapi juga bagi seluruh warga desa. Tahun 1907, misalnya, sudah dibuka persekolahan di Siantar Sawah Simalungun (Panitia, 1983: 20) dan di Sidikalang tahun 1909 (Panitia, 1983 : 20). Tahun-tahun berikutnya jumlahnya terus berkembang dan setiap daerah yang dimasuki orang Batak Toba mendorong zending untuk mempercepat pendirian persekolahan.

Setelah Perang Dunia II, usaha yang dilakukan zending untuk membangun persekolahan dilanjutkan oleh HKBP. Tahun 1958 di beberapa daerah Sumatera bagian Utara telah berdiri SR dan SMP HKBP. Di daerah Deli Serdang, misalnya, telah berdiri SR dan SMP sedangkan di Simalungun, Aceh Tengah, Aceh Selatan dan Asahan hanya SR, sebagian berbantuan dan sebagian partikulir (Tabel 5.9). Kehadiran sekolah-sekolah tersebut terutama di daerah yang padat dihuni orang Batak Toba di daerah mana fasilitas sekolah pemerintah kurang memadai. Pengadaan pendidikan itu merupakan sumbangan positif di daerah persebaran mereka.

Kalau diperhatikan lebih seksama pendirian sekolah HKBP di daerah persebaran, lokasinya adalah di sekitar gereja, sebagaimana dijumpai di

daerah Tapanuli Utara. Orang-orang yang pindah dari Tapanuli membangun gereja dan sekolah, mulai sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang turut membantu program pemerintah melalui pengadaan prasarana pendidikan untuk mewujudkan pemerataan dalam bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Prof.Dr. Fuad Hasan dalam pertemuan ramah tamah dengan HKBP, pada 24 April 1986 di Aula STT-HKBP Pematang Siantar, mengemukakan bahwa pendidikan yang dijalankan oleh swasta adalah mitra pemerintah (Tobing, 1986 : 330). Dengan jiwa nasionalnya orang-orang Batak yang berhasil tidak ketinggalan membantu program pemerintah ini. Kalau HKBP mendirikannya di daerah perkotaan dan pedesaan, orang-orang yang sukses tersebut cenderung di kota-kota besar, seperti di Pematang Siantar, Medan, Jakarta dan lain-lain.

**Tabel 5.9**  
**Jumlah Sekolah HKBP di Beberapa Daerah Sumatera Utara, 1958**

Kabupaten	Jenis sekolah	Berbantuan	Partikular	Jumlah
Deli Serdang	SR	10	7	17
	SMP	1	-	1
Simalungun	SR	11	17	28
Aceh Tenggara (Tanah Alas)	SR	8	9	17
Aceh Selatan (Singkil)	SR	-	8	8
Asahan	SR	-	3	3

Sumber : *Almanak HKBP 1958* : 169-173.

### 5.3.3. Identitas dan semangat nasionalisme

Dari uraian-uraian di atas jelaslah bahwa warga masyarakat selalu merasa terdorong untuk meraih *hamoraon* dan *hasangapon*. Pendidikan modern yang diperkenalkan para missioner dan pemerintah kolonial bagaimanapun telah menambah dan memperluas wawasan mereka dengan memasukkan pembaharuan ke dalam kebudayaan dan masyarakat Batak (Schreiner, 1978 : 11). Sepanjang unsur-unsur pembaharuan itu memberikan 'keuntungan' bagi mereka, dengan senang hati mereka menerimanya. Dalam karyanya : *The Political Life of a Sumatran Residency : Tapanuli 1915-1940*, L. Castles (1972 : 90) dengan tepat mengemukakan bahwa pada umumnya jawaban orang Batak Toba terhadap dunia baru (pembaharuan-pen) ialah bergabung dengannya, bukan menentangnya. Hal itu terbukti dari penerimaan pengaruh Barat bersama dengan agama Kristen karena memman-

dang unsur Barat itu sebagai *hamajuon*.

Sebagai suku bangsa yang menjunjung tinggi harga diri serta tidak mau kalah terhadap yang lain, menyebabkan unsur kemajuan yang berasal dari Barat itu tidak seluruhnya diserap begitu saja. Dalam mewujudkan *hamajuon* masyarakat, pemerasan ekonomi dan penindasan politis oleh bangsa luar harus dihentikan. Berdirinya Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1910, misalnya, harus dilihat dari sudut pandang itu. Adanya kepincangan penghargaan terhadap guru antara pegawai bumiputera dengan pegawai Belanda merupakan latar belakang terbentuknya PGHB, yang juga mendapat dukungan dari van Deventer, seorang anggota Parlemen Belanda (Harahap, 1960 : 66). Tuntutan mereka berhasil dan sejak itu rasa harga diri dan martabat kebangsaan setiap suku bangsa semakin berkembang dan bertumbuh subur termasuk di kalangan orang Batak Toba.

Dari sekian banyak warga Batak Toba yang menentang kolonial Belanda, salah seorang diantaranya adalah M.H. Manullang. Setelah melanjutkan pendidikannya di Singapura (1907-1909) lalu mendirikan beberapa sekolah di Jawa Barat, Manullang kembali ke Tapanuli dan menjadi pelopor untuk mendirikan suatu perkumpulan yang terkenal dengan **Hatopan Kristen Batak (HKB)**. Serikat ini didirikan pada tanggal 28 September 1917 dengan tiga tujuan : pertama, memperkuat agama Kristen; kedua, kasih persaudaraan, tolong menolong dalam segala pekerjaan baik, khusus dalam lingkungan anggota perkumpulan dan ketiga, mengusahakan perdamaian dan pembangunan sosial suku bangsa Batak (Manullang, 1917 : 179). Dari nama perserikatan itu jelaslah bahwa anggota-anggotanya adalah orang-orang Kristen Batak. Keterbelakangan suku bangsa Batak dalam bidang pengembangan pengetahuan, bidang pertanian, pertukangan dan dagang harus disingkirkan dengan berdirinya HKB. Memang dalam waktu yang relatif singkat hal itu tidak mungkin dilakukan. HKB belum bertujuan untuk mengangkat derajat orang Batak menjadi sama dengan orang Eropa. Organisasi ini sedapat mungkin berusaha sedikit meringankan kemiskinan orang Batak yang tidak ada bandingannya itu, kebodohan dan kekacauan kekristenan mereka" (Lid ni HKB, 1918 : 55).

Walaupun banyak orang memandang bahwa HKB merupakan unsur lingkungan agama Kristen, pada hakekatnya HKB adalah sebagai suatu perkumpulan politis dari orang-orang Kristen Batak. Mereka, terutama Manullang mendukung gerakan rakyat yang melawan sistem kontrak tanah di Tapanuli (Lumbantobing, 1918 : 161-162). Dengan dihapuskannya kontrak tanah di Tapanuli Utara, perjuangan penduduk untuk 'tanah air' berakhir, demikian juga dengan popularitas politis Manullang (Hutauruk, 1992 : 106-107).

Ungkapan terhadap kemandirian dan penampakan identitas dalam organisasi gereja nampak jelas pada upaya orang-orang Batak Toba yang

sudah tinggal di daerah lain. Sekitar tahun 1926/27, misalnya, berlangsung pemisahan sejumlah besar orang Kristen Batak dari pimpinan RMG, sebagaimana terjadi di Pematang Siantar dan Medan. Mereka memisahkan diri bukan karena perasaan tertindas atau cita-cita untuk membebaskan diri dari kekuasaan kolonial, tetapi karena alasan-alasan kesukuan dan kegerejaan (Liddle, 1970 : 43-45). Perkembangan jemaat-jemaat Kristen oleh orang-orang Batak Toba yang sudah meninggalkan Tapanuli dilatarbelakangi oleh kesadaran kesukuan itu. Tahun 1927/28 sudah terbentuk empat gereja mandiri, yaitu **Hoeria Christen Batak (H.Ch.B)** di Pematang Siantar, gereja **Mission Batak (MB)** dan **Peongoean 123** atau **Hoeria Christen Batak Parjolo** (kemudian namanya diubah menjadi "Hoeria Christen Batak Medan : H.Ch.B. Medan) di Medan serta **Punguan Kristen Batak (PKB)** di Jakarta. Walaupun tidak dapat disimpulkan bahwa pendirian keempat jemaat itu merupakan hasil aksi bersama menentang pimpinan Gereja Batak, namun peristiwa itu haruslah dipandang sebagai bagian dari upaya menghapuskan penjajahan di bidang rohani. Disamping itu, sebagaimana tuntutan pendukung HKB untuk mengambil alih semua pimpinan dari tangan orang asing, peristiwa itu merupakan kebangkitan kesadaran politik terhadap jabatan Gereja Batak. Tahun 1930 Gereja Batak memperoleh kemerdekaan dan menjadi satu lembaga yang berdiri secara yuridis dan tahun 1940 berdiri dalam arti sebenarnya.

Dalam lingkungannya sehari-hari orang Batak senantiasa menampakkan identitas kesukuan, namun dalam pergerakan kemerdekaan identitas kesukuan itu melebur dalam pergerakan kebangsaan yang bersifat nasional. Orang Batak Toba yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, misalnya, mereka bergabung dalam organisasi politik, yaitu **Yong Batak** yang kemudian melebur dalam satu wadah yang bersifat nasional dalam wadah pemuda/i Indonesia. Pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, identitas kesukuan ditinggalkan manakala muncul gerakan yang bersifat nasional. Sumpah pemuda yang telah dicetuskan di masa perjuangan merebut kemerdekaan (28 Oktober 1928) menjadi tonggak sejarah bagi seluruh suku-suku bangsa Indonesia agar menganut pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang sama.

Baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru dapat disaksikan bahwa tidak sedikit orang Batak Toba berhasil dalam karir terutama yang duduk sebagai tokoh-tokoh di instansi pemerintah. Akan tetapi nampaknya mereka mengalami keraguan dalam konsep *inang pengasuh*. Dalam kedudukannya itu sulit mencari orang Batak Toba yang kedaerahan. Jati dirinya sebagai orang Batak tidak menonjol (atau mungkin dikorbankan?) manakala mereka duduk sebagai tokoh dalam singgasana elite politik. Tokoh-tokoh Batak yang "dipola" oleh situasi politik menjadi 'kehilangan' jati dirinya dalam bungkusan semangat nasionalisme.

## BAB 6

# PERKIRAAN JUMLAH ORANG BATAK TOBA DI LUAR TAPANULI UTARA

---

### 1. Keadaan sampai tahun 1930

Pada umumnya orang Batak masih mengakui daerah asal leluhurnya adalah **Negeri Toba** (Tapanuli Utara yang sekarang). Suku bangsa Batak, yang dibedakan atas Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak Dairi, Batak Angkola dan Mandiling sudah tersebar ke berbagai daerah di luar Tanah Batak. Sentuhan dan pengaruh dari luar turut mendorong gerak perpindahan mereka dari *bona pasogit* ke daerah lain. Khusus bagi orang Batak Toba gerakan menyebar menjadi lebih pesat barulah sesudah tahun 1900-an.

Sebagaimana diterangkan di muka, terdapat berbagai faktor yang mendorong dan mempercepat perpindahan mereka ke daerah lain. Salah satu diantaranya adalah faktor demografi, dimana jumlah penduduk yang bertambah secara menonjol tidak dibarengi dengan penambahan sarana dan prasarana sumber hidup dari sektor pertanian dan sektor ekonomi yang ada. Oleh karena itu banyak yang pindah secara bergelombang ke berbagai daerah di wilayah Keresidenan Tapanuli, Sumatera Timur dan daerah lainnya.

Secara umum, penduduk yang pindah itu dapat digolongkan berdasarkan pekerjaannya menjadi dua bagian besar, yaitu yang bekerja sebagai petani dan di luar bertani. Golongan yang pertama terutama menuju daerah-daerah pertanian yang subur karena mereka akan melanjutkan pola dan

teknologi pertanian yang dibawa dari kampung halamannya. Golongan yang kedua dapat dibedakan atas pencari kerja bergerak ke daerah perkebunan, pertambangan dan perkotaan dan yang akan melanjutkan sekolahnya menuju kota atau daerah di mana sekolah-sekolah yang akan dimasuki berada. Dalam paroh pertama abad ini kedua golongan yang disebut belakangan jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan golongan pertama.

Antara tahun 1900-1930 lebih dari 180.000 sudah tinggal di luar Tapanuli Utara. Mereka bekerja pada berbagai bidang sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Di daerah pesisir atau daerah pertanian, mereka menanam padi termasuk ubi, kopi dan lain-lain. Di daerah perkebunan ada yang menjadi krani, juru mesin dan lain-lain. Di kota-kota ada yang menjadi pegawai pemerintah, pegawai bank, bekerja di rumah sakit, krani toko dan sebagainya. Mereka tidak dengan mudah memperoleh pekerjaan karena ada faktor lain yang turut menentukan, sebagaimana dialami di daerah Langkat, Deli dan Serdang. Itulah salah satu sebabnya orang Batak Toba yang tinggal di daerah tersebut tidak besar jumlahnya pada tahun 1930. M. Naim (1976 : 35) mengemukakan bahwa 85% dari jumlah orang Batak Toba yang tinggal di Sumatera Timur adalah kelahiran Tapanuli. Ini berarti kebanyakan orang Batak Toba yang bertempat tinggal di daerah itu berasal dari daerah Tapanuli (umumnya Tapanuli Utara).

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.8 di atas, dari sekitar 600.000 orang Batak Toba yang tinggal di daerah Sumatera Utara, (Keresidenan Tapanuli, Sumatera Timur dan Aceh), lebih dari 107.000 berdiam di luar Tapanuli Utara di wilayah Keresidenan Tapanuli. Mereka tinggal di Barus, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Sibolga. Sekitar 74.000 tinggal di Sumatera Timur, kebanyakan berdiam di Simalungun dan Asahan dan selebihnya tinggal di daerah Tanah Karo, Deli dan Serdang, Medan, Langkat, Labuhan Batu dan lain-lain. Di wilayah Aceh, kebanyakan tinggal di Tanah Alas. Selain di daerah Sumatera Utara ada juga yang menjadi pegawai di daerah lain di pulau Sumatera dan di pulau Jawa seperti di Jakarta, tetapi jumlahnya tidak besar. Sifat dinamis yang dimiliki membawa mereka ke berbagai daerah di wilayah Nusantara dan berjuang di sana untuk mengejar kemajuan dan dalam banyak hal ingin meraih nilai-nilai *hamoraon* dan *hasangapon* yang didambakan setiap orang Batak.

## 2. Keadaan Sesudah Tahun 1930

Selama kurang lebih 3 dasawarsa (1930-1961) banyak hal yang menyebabkan dan mempercepat perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara. Pada masa pendudukan Jepang misalnya, selain pindah secara spontan, banyak pemuda dan orang dewasa yang dilatih menjadi pembantu tentara Jepang dan

disebarkan ke berbagai daerah di luar tanah kelahirannya. Demikian pula pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949) banyak yang berjuang dan meninggalkan kampung halamannya. Mereka membentuk laskar rakyat, menjadi polisi, tentera dan lain-lain. Sesudah pengakuan kedaulatan, para pejuang itu tidak seluruhnya kembali ke kampung halamannya. Banyak dari antara mereka yang menjadi penduduk daerah lain, memulai hidup baru, bekerja dan mengisi kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, sensus penduduk pertama baru diadakan tahun 1961. Sensus itu tidak lagi mencantumkan jumlah penduduk suatu daerah berdasarkan suku bangsanya, seperti yang diadakan pada masa kolonial (1930), sehingga ditemui beberapa kendala untuk menelaah perpindahan penduduk berdasarkan suku bangsanya. Walaupun demikian gambaran besarnya arus perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara dapat dilihat dari jumlah dan laju pertumbuhan penduduk antar sensus atau dengan membandingkannya terhadap jumlah dan laju pertumbuhan menurut Daerah Tingkat II.

Kalau diperhatikan lebih seksama Tabel 6.1 jelaslah penurunan laju pertumbuhan penduduk Tapanuli Utara sebagai akibat arus perpindahan penduduk yang cukup besar. Periode 1961-1971, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara dan Indonesia, masing-masing 2,91% dan 2,10% sedangkan di Tapanuli Utara hanya 1,06% setiap tahunnya. Kemudian periode 1971-1980 menurun lagi menjadi 1,03%, jauh di bawah Indonesia (2,32%) dan Sumatera Utara (2,62%). Dalam periode 1980-1990 menurun drastis menjadi 0,19% sedangkan Indonesia 2,05% dan Sumatera Utara 2,06%. Penurunan yang sangat tajam tersebut erat kaitannya dengan banyaknya pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan dan melanjutkan sekolah ke luar Tapanuli Utara. Angka-angka tersebut di atas bukan lagi sekedar memberi indikasi tentang besarnya arus perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara. Setiap penduduk yang masih tinggal di sana dapat menjadi saksi betapa arus perpindahan tersebut tidak dapat dihempang.

Gambaran yang lebih jelas lagi dapat ditinjau dari jumlah penduduk per kecamatan di Tapanuli Utara sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.2. Dalam periode 1930-1961 rata-rata laju pertumbuhan penduduk 0,75% sedangkan Sumatera Utara 2,19% per tahun. Dalam periode itu Kecamatan Sipoholon, Porsea, Lumbanjulu, Palipi dan Simanindo mengalami penurunan jumlah penduduk. Dalam periode itu kawasan Samosir pernah dilanda musim kemarau yang panjang yang menyebabkan sebagian penduduknya meninggalkan Samosir pindah ke luar Tapanuli Utara. Secara keseluruhan terdapat sebanyak 115.359 jiwa yang bertambah, tetapi jumlah itu hanyalah sekitar 4,76% dari pertambahan penduduk Sumatera Utara dalam periode yang sama. Dalam periode 1961-1971 hampir semua kecamatan menunjukkan pertambahan penduduk. Jumlah keseluruhan yang bertambah 63.982 jiwa

atau 3,86% dari penambahan penduduk Sumatera Utara. Periode 1971-1980 terdapat tiga kecamatan yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk, yaitu Kecamatan Harian, Pangururan dan Simanindo sedangkan Muara adalah akibat pengalihan 3 desanya ke dalam Kecamatan Palipi (tahun 1977). Jumlah penduduk yang bertambah dalam periode itu sebanyak 59.877 jiwa atau 3,44% dari penambahan penduduk Sumatera Utara. Dibandingkan dengan periode sebelumnya (1961-1971) jelas angka ini lebih kecil. Dari 27 Kecamatan di Tapanuli Utara, 15 diantaranya menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di bawah 1% per tahun.

Keadaan yang lebih menyolok lagi terjadi dalam periode 1980-1990. Terdapat 12 kecamatan yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang negatif, 11 kecamatan dengan di bawah 1% per tahun. Secara keseluruhan penduduk Tapanuli Utara yang bertambah dalam periode itu sebanyak 13.365 jiwa atau hanya 0,07% dari penambahan penduduk Sumatera Utara. Dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya terdapat kecenderungan penurunan, baik dilihat dari laju pertumbuhan maupun pertambahan penduduknya. Mengingat kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan alat-alat kedokteran terhadap kenaikan angka kelahiran, penurunan angka kematian dan kenaikan angka harapan hidup, jelaslah bahwa perkembangan jumlah penduduk Tapanuli Utara sangat dipengaruhi oleh perpindahan penduduk.

### 3. Beberapa Perbandingan dan Estimasi

Dalam uraian berikut akan dilakukan estimasi atau taksiran jumlah orang Batak Toba di dalam maupun di luar Tapanuli Utara dengan dasar perhitungan data sensus 1930. Salah satu cara yang dapat membantu ialah metode proyeksi yang dilakukan untuk tahun 1961, 1971, 1980 dan 1990. Hasil perhitungan akan dibandingkan dengan data hasil sensus penduduk pada waktu yang bersesuaian. Untuk maksud tersebut perlu dipertimbangkan besarnya laju pertumbuhan ( $r$ ) beberapa akan dilakukan proyeksi.

Ada 2 nilai  $r$  yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini, yaitu rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia atau Sumatera Utara. Pada tahun 1930 penduduk Indonesia 60.727.233 jiwa dan Sumatera Utara 2.541.236 jiwa. Kemudian tahun 1961 menjadi 97.085.348 untuk Indonesia dan 4.967.734 untuk Sumatera Utara. Dari angka-angka tersebut di atas diperoleh laju pertumbuhan penduduk Indonesia 1,53% dan Sumatera Utara 2,19% per tahun periode 1930-1961. Dengan menggunakan  $r=1,53$  penduduk Tapanuli Utara tahun 1961 adalah 712.164 jiwa dan dengan  $r=2,19$  menjadi 873.849 jiwa. Sejalan dengan itu, dengan  $r=1,53$  jumlah orang Batak Toba menjadi 960.515 atau 1.178.584 dengan  $r=2,19$  pada tahun yang sama (Tabel 6.3).

**Tabel 6.1**  
**Jumlah, Pertumbuhan dan Pertambahan Penduduk Propinsi Sumatera Utara**  
**Menurut Daerah Tingkat II, 1930, 1961, 1971, 1980 dan 1990**

No. Daerah Tingkat II	1930 <sup>1)</sup>		1961		1971		1980		1990		Laju Pertumbuhan (%) <sup>2)</sup>				P e r t a m b a h a n				
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	1930-1961	1961-1971	1971-1980	1980-1990	1930-1961	1961-1971	1971-1980	1980-1990	1961-1990
1. Nias	199.818	7,9	314.892	6,3	370.825	5,6	468.375	5,6	589.184	5,7	1,75	1,65	2,63	2,32	115.074	55.996	97.500	120.809	274.355
2. Tapanuli Selatan	278.922	11,0	495.060	10,0	628.394	9,5	757.159	9,1	954.334	9,3	1,87	2,41	2,09	2,34	216.138	133.334	128.765	197.173	459.272
3. Tapanuli Tengah	55.847	2,2	100.795	2,0	135.875	2,1	167.161	2,0	214.467	2,1	1,92	3,03	2,33	2,52	44.948	35.080	31.304	47.306	113.672
4. Tapanuli Utara	443.194	17,4	560.384	11,3	622.535	9,4	682.437	9,2	695.777	6,8	0,75	1,06	1,03	0,19	117.190	62.151	59.902	13.340	135.393
5. Labuhan Batu	135.769	5,3	255.997	5,2	360.153	5,4	547.171	6,5	733.521	7,2	2,07	3,47	4,76	2,97	120.228	104.156	187.018	186.350	477.524
6. Asahan	200.246	7,9	409.006	8,2	593.584	8,9	775.656	9,3	884.594	8,6	2,33	3,79	3,02	1,32	208.760	184.578	182.072	108.438	475.588
7. Simalungun	269.819	10,6	496.238	10,0	662.257	10,0	759.024	9,1	805.365	7,9	1,98	2,93	1,53	0,59	226.419	166.019	96.767	46.341	309.127
8. Dairi	54.037	2,1	138.278	2,8	184.829	2,8	241.785	2,9	276.980	2,7	3,08	2,94	3,03	1,37	84.241	46.551	56.956	35.195	138.702
9. Karo	86.462	3,4	147.673	2,9	182.156	2,8	219.204	2,6	257.981	2,5	1,74	2,12	2,08	1,64	61.211	34.483	37.048	38.777	110.308
10. Deli Serdang	476.611	18,8	971.621	19,6	1.430.965	21,6	1.241.190	14,8	1.602.749	15,6	2,32	3,95	-1,57	2,59	495.010	459.344	-189.775	361.559	631.128
11. Langkat	246.161	9,7	341.615	6,9	519.459	7,8	702.059	8,4	812.229	7,9	1,06	4,28	3,40	1,47	95.454	177.844	182.600	110.170	470.614
12. Sibolga	10.765	0,4	38.655	0,8	42.223	0,6	59.897	0,7	71.895	0,7	4,21	0,89	3,96	1,84	27.890	3.568	17.674	11.998	33.240
13. Tanjung Balai	-	-	29.152	0,6	33.604	0,5	41.894	0,5	108.202	1,1	-	1,43	2,48	9,95	-	4.452	8.290	66.308	79.050
14. Pematang Siantar	15.482	0,6	114.870	2,3	129.232	2,0	150.376	1,8	219.328	2,1	6,68	1,19	1,70	3,85	99.380	14.362	21.144	68.952	104.458
15. Tebing Tinggi	-	-	26.228	0,5	30.314	0,5	92.087	1,1	116.767	1,1	-	1,46	13,14	2,40	-	4.086	61.773	24.680	90.539
16. Medan	59.392	2,3	479.098	9,7	635.562	9,6	1.378.955	16,5	1.730.752	16,9	6,97	2,87	8,99	2,30	419.706	156.464	743.393	351.797	1.252.654
17. Binjai	8.711	0,3	45.235	0,9	59.882	0,9	76.464	0,9	181.904	1,8	5,46	2,84	2,75	9,05	36.524	14.647	16.582	105.440	136.669
Sumatera Utara	2.541.236 (4,18)	100	4.964.734 (5,11)	100	6.621.831 (5,55)	100	8.360.894 (5,67)	100	10.256.027 (5,72)	100	2,19	2,92	2,62	2,06	2.423.498	1.657.097 (7,49)	1.739.063 (6,15)	1.895.133 (5,95)	5.291.293 (6,43) <sup>3)</sup>
Indonesia	60.727.233		97.085.348		119.208.229		147.490.298		179.321.641		2,10	2,32	2,05	36.358.115	22.122.881	28.282.069	31.831.343	82.236.293	

<sup>1)</sup> Volkstelling 1930 : 124-131 (diolah).

<sup>2)</sup> Dihitung dengan rumus :  $P_t = P_0 e^{rt}$

<sup>3)</sup> Angka dalam kurung adalah persentase dari penduduk Indonesia dalam periode yang sama

Sumber : 1. Kantor Statistik Propinsi Sumatera Utara, *Penduduk Sumatera Utara Hasil Sensus Pencacahan Lengkap Sensus Penduduk 1990*, Medan, 1991.

2. Secha Alatas, *Migran Wanita di DKI Jakarta dan Peranannya Dalam Ketenagakerjaan*, (Studi Hasil Sensus Penduduk), Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, Tabel 1.

3. Aris Ananta dan Evi Nurvidya Arifin. "Sensus Penduduk 1990: Bukan Kejutian". *Warta Demografi*. No.12. Tahun XX. 30 Desember 1990, Tabel 3.3.

Tabel 6.2  
Jumlah, Pertumbuhan, dan Pertambahan Penduduk Tapantu Uluara Menurut Kecamatan, 1930, 1961, 1971, 1980 dan 1990

No. Kecamatan <sup>1)</sup>	Laju Pertumbuhan (%) <sup>2)</sup>										Pertambahan				
	1930 <sup>2)</sup>		1961		1971		1980		1990		1930-1961	1961-1971	1971-1980	1980-1990	
	1930 <sup>2)</sup>	1961	1961	1971	1971	1980	1980	1990	1930-1961	1961-1971	1971-1980	1980-1990	1930-1961	1961-1971	1971-1980
1. Pakkat	10 903	19 504	23 793	25 979	25 223	1 89	2 01	0 98	-0 29	8 601	4 289	2 186	- 756	14 320	5 719
2. Pannanjanng	10 536	12 404	15 044	15 901	14 659	0 53	1 95	0 62	-0 81	1 527	2 640	857	-1 242	4 123	2 255
3. Permonangan	12 821	14 015	16 334	18 422	18 361	0 79	1 54	1 35	-0 03	1 194	2 319	2 088	- 61	5 340	4 346
4. Adian hoting	10 532	11 547	13 074	13 625	13 777	0 30	1 25	0 40	0 11	1 015	1 527	551	152	3 245	2 230
5. Siboholon	15 992	13 565	15 101	15 579	18 249	-0 53	1 08	0 35	1 59	19 127	1 465	4 870	2 527	27 989	8 862
6. Tarutung	20 447	39 574	41 039	45 909	48 436	2 15	0 36	1 25	0 54	3 050	- 3	1 422	- 2 422	3 047	- 3
7. Harau	10 058	13 108	13 105	14 527	13 105	0 86	-0 00	1 15	-1 02	3 311	1 820	1 766	165	7 062	3 757
8. Pihae Jae	17 328	20 639	22 459	24 225	24 390	1 57	0 85	0 84	0 07	11 829	3 739	2 090	-942	9 238	-2 591
9. Pangaribuan	15 806	27 635	33 896	25 986	25 044	1 82	-1 44	0 94	-0 37	8 718	-	2 670	1 642	-	-
10. Geroگا			10 665	13 335	14 977			2 51	1 17						
11. Sipahutar	12 094	17 812	21 142	22 832	21 457	1 26	1 73	0 85	0 62	1 527	3 330	1 690	-1 375	9 363	3 645
12. Siborongborong	23 306	31 873	38 009	42 842	44 594	1 01	1 78	1 34	0 40	8 011	6 136	4 833	1 752	21 288	12 721
13. Lintong Nihuta	17 066	22 985	26 489	29 801	31 418	0 97	1 43	1 32	0 53	5 919	3 504	3 312	1 617	14 352	8 433
14. Doloksanggul	18 354	31 317	40 069	45 403	45 738	1 74	2 50	1 40	0 07	12 963	8 752	5 334	355	27 384	14 421
15. Paoliltan	13 463	19 809	24 491	26 052	26 010	1 25	2 14	0 69	-0 02	6 346	4 682	1 561	- 42	12 547	6 201
16. Harian	9 312	20 260	21 367	20 788	19 905	2 54	0 53	-0 30	-0 43	10 948	1 107	-579	-883	10 593	-355
17. Muara	18 730	20 456	22 148	21 386	20 804	0 28	0 80	-0 39	-0 28	1 726	1 692	-762	-582	2 074	348
18. Balge	21 806	30 336	30 764	35 810	37 317	1 07	1 04	1 70	0 41	8 530	428	5 046	1 507	15 511	6 981
19. Laguboti	12 750	14 287	15 897	17 358	18 147	0 37	1 07	0 98	0 44	1 537	1 610	1 461	789	5 397	3 860
20. Habinsaran	15 872	21 085	23 374	29 342	34 118	0 92	1 04	1 21	1 38	5 213	2 289	6 368	4 376	18 246	13 033
21. Silen	17 198	17 870	17 936	19 544	18 790	0 12	0 04	0 96	-0 39	-3 779	66	1 608	-754	1 592	920
22. Porsea	25 106	21 327	23 671	28 382	31 500	-0 52	1 05	0 24	1 05	3 894	2 344	1 118	3 118	6 394	10 173
23. Lumban Julu	26 725	22 831	23 625	27 630	27 543	-0 51	0 34	1 76	-0 03	3 846	936	4 005	-87	828	4 712
24. Onan Rungegu	21 284	25 130	26 066	27 845	28 141	0 54	0 37	0 74	0 11	-4 271	297	4 166	3 12	4 775	510
25. Palpi	21 982	17 711	18 014	22 180	22 492	-0 69	0 17	2 34	0 14	10 117	1 661	-1 359	-862	937	108
26. Pangururan	21 934	32 051	33 712	32 353	31 871	1 23	0 51	-0 46	-0 15	10 117	1 661	-1 359	-862	937	108
27. Simanindo	21 789	19 426	20 251	19 543	19 709	-0 37	0 46	-0 30	0 08	-2 363	825	-708	166	2 080	283
Jumlah (Tapu)	443 194	558 553	622 535	682 412	695 777	0 75	1 09	1 03	0 19	115 359	63 982	59 877	13 365	252 583	137 224
Persen	(17,44)	(11,25)	(9,40)	(8,18)	(6,78)					(4,76)	(3,86)	(3,44)	(0,07)	(3,27)	(2,59)

1) Pada waktu itu belum dinamai kecamatan tetapi Onderdistrikt yang terdiri dari beberapa negeri. Jumlah Onderdistrikt ketika itu tidak persis sama dengan jumlah kecamatan sekarang. Beberapa onderdistrikt dibagi menjadi dua kecamatan atau beberapa negeri dari satu onderdistrikt digabung dengan negeri dari onderdistrikt yang lain menjadi satu kecamatan.  
 2) Jumlah ini dikompilasi dari data sensus penduduk 1930 dan disesuaikan dengan nama negeri dari masing masing onderdistrikt berdasarkan nama desa dan kecamatan pada sensus penduduk 1961 dan 1971.  
 3) Ditunggal dengan rumus:  $P_t = P_0 e^{rt}$   
 \*) Tahun 1961 Kecamatan Garoga belum dibentuk, masih termasuk wilayah Kecamatan Pangaribuan.  
 Angka dalam kurung adalah persentase dari penduduk Sumatera Uluara pada waktu dan periode yang sama.  
 Sumber : Volktaelling 1930 : 124-126 (tabel); Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980 dan 1990.

**Tabel 6.3**  
**Estimasi Penduduk Tapanuli Utara dan Jumlah Batak Toba, 1961**

$P_0$ (1930)	T. (%)	$P_t$ (1961) <sup>1)</sup>
Tapanuli Utara	1,53	712.164
443.194 <sup>2)</sup>	2,19	873.849
		(558.553) <sup>5)</sup>
Batak Toba		
427.912 <sup>3)</sup>	1,53	647.607
	2,19	843.717
599.537 <sup>4)</sup>	1,53	963.389
	2,19	1.182.112

Catatan :

- 1) Dihitung dengan menggunakan rumus  $P_t = P_0 e^{rt}$ .
- 2) Jumlah penduduk Tapanuli Utara menurut data sensus penduduk 1930.
- 3) Jumlah orang Batak Toba yang tinggal di Tapanuli Utara.
- 4) Jumlah orang Batak Toba yang tinggal di Keresidenan Tapanuli, Sumatera Timur dan Tanah Alas.
- 5) Jumlah penduduk Tapanuli Utara hasil sensus penduduk 1961. Berdasarkan proporsi orang Batak Toba yang tinggal di Tapanuli Utara tahun 1930 (96,55%), diperkirakan jumlah orang Batak Toba di Tapanuli Utara tahun 1961 (dari hasil sensus) sebanyak 539.293 jiwa.

Sumber : Volkstelling 1930 : 30-31; 35, 124-126 (diolah)

Dari hasil perhitungan di atas muncul pertanyaan, taksiran mana lebih mendekati kenyataan? Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tapanuli Utara hasil sensus 1961, dengan cepat dapat dikemukakan taksiran yang lebih mendekati ialah hasil proyeksi dengan laju pertumbuhan di bawah 1,53%. Jika demikian halnya, dalam periode 1930-1961 jumlah penduduk yang pindah dari Tapanuli Utara barulah sekitar 152.000 (712.164 - 560.384). Angka ini jauh lebih kecil dari jumlah yang diperkirakan oleh, misalnya, C.E. Cunningham (1958: vii) yang memperkirakan sekitar 250.000 orang Batak Toba meninggalkan kampung halamannya tahun 1950-1956. Perkiraan itu masih didasarkan atas data jemaat HKBP, belum termasuk anggota jemaat lainnya. Dengan pertimbangan ini dan didasarkan pada alasan bahwa pada umumnya orang Batak Toba menyebar di daerah Sumatera Utara, alternatif lain adalah perhitungan dengan  $r = 2,19\%$ .

Dengan menggunakan  $r = 2,19\%$  diperkirakan penduduk Tapanuli Utara (seharusnya) tahun 1961 sebanyak 873.849 jiwa. Ini berarti selama 31 tahun jumlah penduduknya naik 97,2%. Dibandingkan dengan persentase kenaikan jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 95,5% dalam periode yang sama, tentu perhitungan dengan  $r=2,19\%$  lebih layak diterima dari

hasil perhitungan dengan  $r = 1,53\%$ . Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa orang Batak Toba di luar Tapanuli Utara tahun 1961 lebih dari 620.000 jiwa. Mengikuti perhitungan ini, terdapat sekitar 304.000 orang Batak Toba yang pindah dari Tapanuli Utara dalam periode 1930-1961. Walaupun merupakan perkiraan belaka, angka-angka ini menunjukkan bahwa sampai awal tahun 60-an jumlah orang Batak Toba yang tinggal di luar jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di Tapanuli Utara. Bagaimana pula dengan tahun-tahun selanjutnya? Walaupun tidak ada sumber data yang lebih akurat, yang pasti jumlah orang Batak Toba yang tinggal di *tano parsanakan* semakin jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di Tapanuli Utara.

Dalam rangka itu perlu ditelaah lebih dahulu berapa nilai  $r$  yang digunakan untuk perhitungan pada periode-periode selanjutnya. Untuk periode 1961-1971 nilai  $r$  yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk pulau Sumatera karena pada umumnya orang Batak Toba tinggal di daerah itu. Memang sudah ada yang tinggal di pulau Jawa, Kalimantan dan pulau-pulau lainnya, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tinggal di Sumatera. Periode 1971-1980 daerah penyebaran utama adalah pulau Sumatera dan pulau Jawa. Selain Jakarta, kota besar dan kota pendidikan serta kota lainnya di Jawa merupakan daerah persebaran mereka. Dengan pertimbangan ini, nilai  $r$  yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk Sumatera dan Jawa. Selanjutnya untuk periode 1980-1990 digunakan laju pertumbuhan penduduk Indonesia karena orang Batak Toba sudah menyebar ke berbagai daerah di wilayah Republik Indonesia. Nilai-nilai  $r$  yang digunakan disajikan dalam Tabel 6.4 dan estimasi proyeksi jumlah orang Batak Toba dan penduduk Tapanuli Utara tahun 1971, 1980 dan 1990 disajikan dalam Tabel 6.5.

**Tabel 6.4.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Wilayah ( % )**

Wilayah	Periode		
	1961-1971	1971-1980	1980-1990
Sumatera Utara	2,92	2,62	2,06
Sumatera	2,86	3,32	2,66
Sumatera dan Jawa	2,09	2,34	1,90
Indonesia	2,10	2,32 <sup>*)</sup>	2,05

Catatan : \*) tidak termasuk Timor Timur.

Sumber : Dihitung kembali berdasarkan data Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980 dan 1990 dengan rumus perhitungan :  $P_t = P_0 e^{rt}$ .

Dalam Tabel 6.5, jika laju pertumbuhan penduduk Batak Toba mengikuti apa yang dikemukakan di atas, maka tahun 1990 jumlah orang Batak Toba lebih dari 2,3 juta jiwa atau sekitar 1,3% dari jumlah penduduk Indonesia. Demikian pula jumlah penduduk Tapanuli Utara akan berjumlah 1.762.533 jiwa pada tahun yang sama jika tidak terjadi perpindahan penduduk dari sana. Namun seperti yang sudah dijelaskan di atas, perpindahan tersebut tidak dapat dihindarkan bahkan sudah merupakan bagian dari hidup penduduknya, sehingga jumlah penduduk yang tinggal di sana tahun 1990 adalah 695.777 jiwa. Pertanyaan lebih lanjut adalah berapa orang yang pindah setiap tahun ?

**Tabel 6.5**  
**Estimasi Proyeksi Jumlah Orang Batak Toba dan Penduduk**  
**Tapanuli Utara, 1971, 1980 dan 1990**

$P_0$ (1930)	r	Estimasi Proyeksi <sup>1)</sup>			
		1961	1971	1980	1990
Batak Toba :					
599.537	2,19	1.182.112			
	2,86		1.573.500		
	2,34			1.942.357	
	2,05				2.384.292
Tapanuli Utara :					
443.194	2,19	873.849			
		(558.553) <sup>2)</sup>			
	2,86		1.163.174		
			(662.535) <sup>2)</sup>		
	2,34			1.435.843	
				(682.412) <sup>2)</sup>	
	2,05				1.762.533
					(695.777) <sup>2)</sup>

Catatan : 1) Tahun dasar untuk 1971 adalah 1961, untuk 1980 adalah 1971 dan untuk 1990 adalah 1980. Rumus perhitungan untuk proyeksi adalah  $P_t = P_0 e^{rt}$

2) Angka-angka dalam kurung adalah jumlah penduduk Tapanuli Utara berdasarkan data sensus penduduk pada tahun-tahun yang bersangkutan.

Sumber : Volkstelling 1930 : 30-31; 35; 124-126; Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980 dan 1990.

Dengan menggunakan nilai  $r$  di atas dapatlah diperkirakan berapa orang yang pindah setiap tahunnya dari Tapanuli Utara. Hasil perhitungan disajikan dalam Tabel 6.6. Dalam periode 1930-1961 diperkirakan sebanyak 315.296 orang penduduk Tapanuli Utara pindah ke daerah lain. Apabila perhitungan ini benar, terdapat sekitar 10.000 orang keluar setiap tahunnya dalam periode tersebut. Kemudian periode 1961-1971 rata-rata 9.000 jiwa, periode 1971-1980 naik menjadi 15.000 dan periode 1980-1990 menjadi sekitar 14.000 keluar setiap tahunnya. Dari angka-angka di atas ada kecenderungan semakin besar jumlah penduduk yang meninggalkan Tapanuli Utara. Mereka meninggalkan kampung halamannya tidak hanya demi kepanantasan saja, tetapi benar-benar berjuang memeras otak dan keringat untuk mewujudkan cita-cita dan idaman yang sudah berurat berakar sejak kakek moyangnya dahulu.

**Tabel 6.6**  
**Estimasi Besarnya Jumlah Penduduk yang Pindah dari**  
**Tapanuli Utara, 1930-1961, 1961-1971, 1971-1980, dan 1980-1990**

Tahun	$r$	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Keluar
		Proyeksi *)	Data sensus	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1930		-	443.194	
1961	2,19	873.849	558.553	315.296
1971	2,86	743.486	662.535	80.951
1980	2,34	817.845	682.412	135.443
1990	2,05	837.678	695.777	141.901

Catatan : \*) Untuk tahun 1961 data sensus 1930 sebagai tahun dasar dan untuk tahun 1971 digunakan data sensus 1961 sebagai tahun dasar, demikian seterusnya, yang dihitung dengan rumus :  $P_t = P_0 e^{rt}$ .

Sumber : Volkstelling 1930 : 124-126; Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980 dan 1990.

#### 4. Data Jemaat Kristen Protestan Sebagai Bahan Bandingan

Sampai saat ini belum dapat dipastikan berapa besar jumlah orang Batak Toba di luar Tapanuli Utara. Suatu perkiraan, apalagi proyeksi yang diuraikan di atas hanyalah memberikan gambaran (perkiraan mungkin terlalu rendah dan terlalu tinggi) tentang kecenderungan perpindahan suku bangsa

tersebut. Suatu hal yang pasti adalah bahwa sampai tahun-tahun belakangan ini perpindahan penduduk masih terjadi. Data sensus penduduk seperti sensus penduduk 1971, 1980 dan 1990 memang dapat memberikan gambaran tentang data migrasi semasa hidup atau jumlah penduduk yang pindah selama periode sensus, namun datanya terlalu agregat karena mengacu dan disajikan berdasarkan propinsi. Data itu tidak dapat dipedomani untuk memperkirakan jumlah penduduk yang pindah dari Tapanuli Utara mengingat propinsi Sumatera Utara dihuni puluhan suku bangsa.

Dalam perkembangannya, gereja-gereja Kristen Batak mulai berkembang dari Tapanuli Utara dan menyebar ke berbagai penjuru Indonesia seiring dengan perpindahan orang-orang Batak dari kampung halamannya. HKBP, GKPI, HKI, Katolik, Methodist, Pentakosta dan beberapa organisasi gereja lainnya merupakan organisasi keagamaan yang dimasuki orang Batak Toba. Pada umumnya mereka masih dominan pada HKBP karena latar belakang sejarahnya dimulai dari Tapanuli Utara. Dua organisasi gereja yang tergolong besar, yaitu HKI dan GKPI merupakan 'pecahan' dari HKBP. Pernah ada pameo bahwa apabila ada dua orang Kristen Batak di suatu tempat maka mereka bercatur. Apabila telah ada tiga orang, maka mereka mendirikan "zangkoor". Apabila telah ada empat orang, maka mereka akan mendirikan gereja. Dan apabila telah ada lima orang, maka gereja pecah menjadi dua gereja. Terlepas dari unsur-unsur subjektivitas terhadap pameo sedemikian, banyak realitas yang menunjukkan bahwa pesatnya penambahan gereja Kristen Batak seiring dengan penyebaran mereka ke berbagai daerah. Sebagai bahan bandingan terhadap hasil proyeksi di atas, data-data jemaat Kristen Protestan dapat digunakan bahkan sebagai petunjuk daerah persebaran orang Batak Toba di luar Tapanuli Utara, sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.7.

INDONESIA	
Jawa Barat	> 1.483.934
Jawa Tengah	> 1.417.212
Jawa Timur	> 1.417.212
Bali dan Lombok	± 923
Kalimantan	± 11.222
Sulawesi	± 2.200
Irian Jaya	> 2.000

Sumber: Almanak HKBP 1994 : 382-379; Timunan Tahunan (Statistik) Keseluruhan  
 Agung Medan, Kerdaman 31-12-1992 ; & Almanak GKPI 1993 : 429-404 ;  
 Almanak HKI 1993 : 313-321; Statistik Gereja Methodist Indonesia Tahun  
 1992

**Tabel 6.7**  
**Jumlah Orang Batak Toba Anggota Jemaat Kristen**  
**di Luar Tapanuli Utara, 1992/1993**

Daerah		Jumlah	%
Simalungun dan Pematang Siantar	>	249.258	
D a i r i	>	164.384	
Asahan dan Tanjung Balai	±	58.432	
Labuhan Batu	±	76.870	
Tanah Karo	>	19.966	
Deli Serdang dan Tebing Tinggi	±	105.275	
M e d a n	>	238.799	
Langkat dan Binjai	>	34.018	
Tapanuli Tengah dan Sibolga	>	96.407	
Tapanuli Selatan	>	41.049	
N i a s	±	1.546	
<b>Sumatera Utara</b>	>	<b>1,087.004</b>	<b>&gt; 74,3</b>
Aceh dengan Tanah Alas	±	39.806	
R i a u	>	55.242	
Sumatera Barat	>	7.393	
Mentawai		?	
J a m b i	>	13.200	
Bengkulu	±	2.819	
Sumatera Selatan dengan Pulau Bangka	>	14.253	
L a m p u n g	±	12.364	
<b>Pulau Sumatera luar Sumatera Utara</b>	>	<b>145.077</b>	<b>&gt; 9,9</b>
Jakarta	>	164.830	
Jawa Barat	>	36.427	
Jawa Tengah	>	4.390	
Jawa Timur	>	9.288	
<b>Pulau Jawa</b>	>	<b>214.875</b>	<b>&gt; 14,7</b>
Bali dan Lombok	±	953	0,0
Kalimantan	±	11.525	0,8
Sulawesi	±	2.500	0,2
Irian Jaya	>	2.000	0,1
<b>INDONESIA</b>	>	<b>1,463.934</b>	

Sumber : *Almanak HKBP 1994* : 362-379; Tinjauan Tahunan (Statistik) Keuskupan Agung Medan, Keadaan 31-12-1992 : 6; *Almanak GKPI 1993*: 459-504; *Almanak HKI 1993* : 313-351; Statistik Gereja Methodist Indonesia Tahun 1993.

Sejak awal abad XIX suku bangsa Batak Toba muncul sebagai golongan yang maju. Sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, masyarakat melihat jalan keluar untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kualitas bangsa diri. Para petani tidak tinggal berdiam diri di daerah pertanian yang sempit dengan berbagai kendala, tetapi pindah untuk melakukan pola pertanian dengan teknologi pertanian yang dibawa dari kampung halaman ke daerah lain. Ada juga yang pindah ke daerah lain untuk mencari cita-citanya. kaum terdidik menyetar ke berbagai daerah untuk mengaji, lowong-an kerja, diantaranya ke perkebunan, rumah sakit, pertambangan, bank-pemerintah, instansi pemerintahan dan lain-lain. kaum pendidik dan tenaga kerja sedang memasuki daerah-daerah baru di mana orang-orang Batak Toba menyetar serta ke daerah pertanian kerja Rheinische Missiongesellschaft (RMG).

## BAB 7

### RANGKUMAN DAN KESIMPULAN

#### 7.1. Ringkuman

Tapanuli Utara semakin terbuka bagi dunia luar sejak paroh kedua tahun 1800-an, terutama setelah missioner Jerman memulai kegiatannya di sana. Memang pada penggal pertama, dua orang missionaris Baptis berkebangsaan Inggris bernama Nathanael Ward dan Richard Burton telah sampai di Silindung (tahun 1824) dan melakukan tatap muka dengan *raja-raja huta* di sana. Apa yang ditemui adalah keengganan orang Batak menerima mereka tanpa menunjukkan jalan mencapai kekayaan, *hamoraon*, dan kemuliaan, *hasangapon*. Dalam kurun waktu paroh pertama abad itu yang terjadi adalah penolakan terhadap 'pembaharuan' yang dibawa oleh bangsa Barat.

Pembaharuan yang besar terjadi pada penggal kedua, terutama sesudah Nommensen dan kawan-kawannya berhasil mengkristenkan penduduk. Gereja mulai berdiri dan kemudian diikuti sekolah dan kesehatan masyarakat pun mulai mendapat perhatian. Salah satu dampak positif di bidang kesehatan ialah penambahan penduduk yang cepat tetapi menimbulkan masalah di bidang pertanian, karena semakin sulit memperluas lahan pertanian terutama persawahan di daerah suku sendiri. Dampak positif pendirian gereja dan sekolah berupa kemajuan dan penambahan wawasan masyarakat tentang dunia luar, kehidupan pribadi dan keadaan sosial ekonomi mereka serta hasrat dan keinginan untuk mencapai cita-cita, idaman dan pengembangan ide-ide guna mewujudkannya.

Sejak awal abad XIX suku bangsa Batak Toba muncul sebagai golongan yang maju. Sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, masyarakat melihat jalan keluar untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kualitas harga diri. Para petani tidak tinggal berdiam diri di daerah pertanian yang sempit dengan berbagai kendala, tetapi pindah untuk melanjutkan pola pertanian dengan teknologi pertanian yang dibawa dari kampung halamannya ke daerah lain. Ada juga yang beralih pekerjaan sesuai dengan cita-citanya. Kaum terdidik menyebar ke berbagai daerah untuk mengisi lowongan kerja, diantaranya ke perkebunan, rumah sakit, pertambangan, bank pemerintah, instansi pemerintah dan lain-lain. Kaum pendidik dan tenaga-tenaga zending memasuki daerah-daerah baru di mana orang-orang Batak Toba menyebar serta ke daerah perluasan kerja Rheinische Missiongesellschaft (RMG).

Gambar 14. Hamparan Persawahan Diantara Bukit di Samosir, 1989.

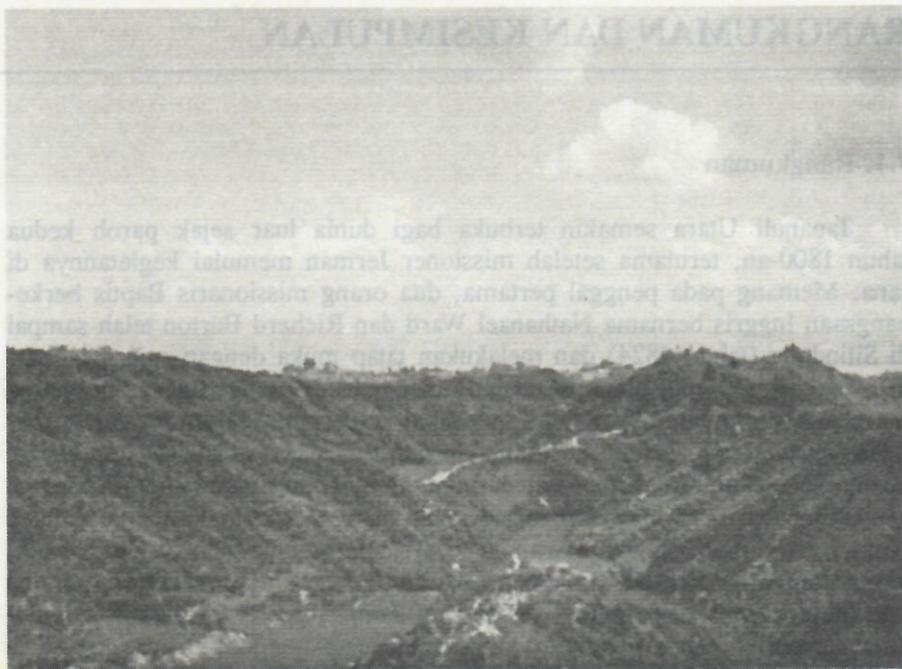


Foto : Elvis F. Purba (1989).

Dalam kurun waktu satu abad orang Batak Toba menyebar ke berbagai penjuru tanah air. Ada yang bertani dan banyak yang kemudian bekerja di luar pertanian. Ada yang tinggal di kota-kota besar, kota kabupaten atau di pedesaan dengan keadaan mutu kehidupan yang beraneka. Diidentifikasi terdapat 6 faktor, yaitu faktor fisik geografis termasuk kesuburan tanah dan iklim, faktor sosial demografi, faktor pendidikan, faktor politik, faktor ekonomi dan pembukaan jaringan perhubungan yang turut mempengaruhi perpindahan tersebut. Penyebab perpindahan tersebut, satu dengan yang lain mungkin secara bersamaan, dua, tiga atau lebih faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses perpindahan itu. Dalam berbagai hal faktor dimaksud dibungkus oleh cita-cita, idaman yang lahir dari nilai-nilai filosofis mereka, yang tergabung dalam 3H atau 4H yang memotivasi mereka mencari yang terbaik dalam hidupnya.

*Faktor Fisik Lingkungan.* Berdasarkan faktor fisik geografisnya Tapanuli Utara dihadapkan pada berbagai kendala untuk mengembangkan usaha pertanian. Hal itu menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan pertanian yang menyebabkan sebagian penduduk petani pindah adalah :

- (i) Keadaan tofografi umumnya bergelombang, berbukit sampai bergunung sehingga menyulitkan dan membutuhkan biaya yang besar bagi pendaan dan pengembangan prasarana pengairan, perluasan lahan pertanian dan perhubungan.
- (ii) Iklim dengan distribusi curah hujan dan suhu udara yang kurang kondusif bagi sebagian besar daerah Tapanuli Utara untuk jenis dan pola tanaman masyarakat.
- (iii) Umumnya jenis tanah yang ada mempunyai tingkat kesuburan yang relatif rendah dan peka terhadap erosi.
- (iv) Penggundulan hutan di sekitar dataran tinggi menyebabkan kesulitan air di berbagai daerah sehingga tidak sedikit lahan persawahan berubah menjadi perladangan.

*Faktor Sosial Demografi.* Bagi sebagian besar penduduk yang hidup dari sektor pertanian, hal-hal yang menyebabkan penduduk pindah dilihat dari faktor sosial demografi adalah :

- (i) Tekanan terhadap lahan pertanian semakin besar karena jumlah penduduk pada awalnya bertambah dengan pesat sesuai dengan idaman setiap keluarga yang mendambakan banyak keturunan, *gabe*.
- (ii) Idaman menjadi pemilik tanah yang luas (dan subur) untuk menghidupi anggota keluarga dan keturunan kelak serta untuk menggapai ke-kepalaan, sebagaimana yang terkandung dalam ungkapan *lulu anak lulu tano*.

- (iii) Keluarga muda yang sudah berdikari, *manjae*, secara tidak langsung didorong untuk membangun kampung-kampung baru bahkan tidak ada ketentuan yang mengharuskan anak sulung, *sihahaan*, dan anak bungsu, *siampudan*, tinggal di kampung halaman.
- (iv) Pemberian sebidang tanah kepada anak yang telah berkeluarga dalam bentuk *panjaean* atau *pauseang* menyebabkan perpecahan dan perpecahan lahan pertanian. Selain masalah tanah adat yang tidak diusahai sepenuhnya karena sudah merupakan *Gumul na so tupa bagion*, *ansimun na so jadi bolaon*, pemberian tersebut menyebabkan semakin banyak rumah tangga petani yang memiliki dan mengusahai lahan yang sempit.
- (v) Sifat dasar orang Batak Toba yang rindu berkawan, *sihol mardongan*, memperbesar arus perpindahan dari suatu kampung mengikuti teman sekampung yang pindah duluan ke daerah lain.

*Faktor Pendidikan.* Kehadiran para missioner Jerman dan pemerintah kolonial menyebabkan berbagai perubahan di kalangan orang Batak Toba.

- (i) Pendidikan Barat menyebabkan minat sebagian masyarakat untuk mengerjakan tanah pertanian berkurang. Sebagian besar dari generasi muda lebih suka menjadi pegawai karena penghasilan yang lebih terjamin dan pasti serta memberikan status sosial yang lebih tinggi.
- (ii) Terbukanya berbagai kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh gaji dan pangkat bagi tenaga terdidik di berbagai instansi, memperbesar arus perpindahan dari luar Tapanuli Utara.
- (iii) Pendidikan telah diyakini masyarakat sebagai salah satu sarana untuk mengatasi kemiskinan bahkan dipandang sebagai penambah *sahala* seseorang sehingga menyebabkan orang tua bersedia mengorbankan apa saja untuk pendidikan anaknya termasuk ke luar Tapanuli Utara.
- (iv) Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Tapanuli Utara menyebabkan arus pendidikan terus berlangsung dan akhirnya menjadi pelarian tenaga potensial terdidik karena kesempatan yang terbatas di wilayah sendiri untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja.

*Faktor Politik.* Sejak kolonial Belanda banyak orang Batak Toba pindah dari Tapanuli Utara.

- (i) Pemerintah kolonial turut memprakarsai dan mempercepat perpindahan sebagian petani-petani Batak Toba untuk membuka persawahan dalam rangka mengatasi kekurangan beras bagi buruh kebun, terutama di daerah Sumatera bagian Utara.
- (ii) Missioner Protestan Jerman mendorong dan mendukung perpindahan sebagian petani-petani dalam rangka perluasan pengaruh dan untuk

- memberi contoh teladan tentang cara hidup Kristiani di daerah lain.
- (iii) Militer Jepang merekrut sebagai putra-putra Batak Toba dari Tapanuli dan disebar ke berbagai daerah di luar Tapanuli Utara sebagai Heiho, Gyugun dan anggota badan semi militer lainnya. Disamping itu kemungkinan menggarap lahan perkebunan mempercepat sebagian petani-petani Batak Toba memasuki Sumatera Timur.
  - (iv) Dalam revolusi kemerdekaan putra-putra Batak Toba, petani dan non petani menyebar ke berbagai daerah untuk membentuk dan memasuki basis-basis perjuangan mengusir penjajah.
  - (v) 'Kebebasan' bergerak dan pindah dari satu daerah ke daerah lain sebagai buah dari kemerdekaan menyebabkan perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara sulit dihempang. Para petani pindah ke daerah pertanian yang lebih layak, tenaga-tenaga terdidik memasuki berbagai daerah untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia atau menciptakan lapangan kerja bagi yang lain.
  - (vi) Alam kemerdekaan memberi jaminan bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah tumpah darah seluruh suku-suku bangsa di Indonesia.

*Faktor Ekonomi.* Dilihat dari aspek ekonomi, hal-hal yang menyebabkan penduduk pindah dari Tapanuli Utara adalah :

- (i) Sektor pertanian tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin besar.
- (ii) Pembukaan lahan-lahan pertanian baru terutama persawahan tidak memungkinkan lagi di daerah suku sendiri, sementara sumber penghasilan lain sangat terbatas.
- (iii) Setiap keluarga mengidamkan kemakmuran, *hamoraon*, untuk mengangkat status dan mutu kehidupan mereka yang mungkin tidak diperoleh dari sektor pertanian di Tapanuli Utara.
- (iv) Karena letaknya yang jauh dari pusat perdagangan dan aksesibilitas ke dalam dan luar daerah sulit, pemasaran merupakan salah satu kendala yang dihadapi masyarakat Tapanuli Utara.
- (v) Kesempatan berusaha di luar sektor pertanian lebih besar dan memungkinkan di daerah lain.

*Terbukanya jaringan perhubungan.* Pembukaan jalan-jalan yang menghubungkan daerah Tapanuli Utara dengan daerah luarnya turut mempermudah dan mempercepat arus perpindahan. Selain sarana dan prasarana darat, sarana laut turut mempengaruhi besarnya volume perpindahan tersebut.

Perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara yang terus berlangsung hingga sekarang mempunyai dampak yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (i) terhadap yang pindah, (ii) terhadap daerah yang ditinggalkan dan (iii)

daerah yang dituju. Dampaknya terhadap diri yang pindah adalah :

- (i) Bagi kaum tani terbuka kemungkinan yang lebih besar memiliki lahan pertanian yang lebih luas dan subur di daerah lain.
- (ii) Mereka dapat mengerjakan tanahnya sesuai dengan apa yang diinginkan termasuk menyewakan atau menjualnya kepada siapa saja, berbeda dengan di Tapanuli Utara.
- (iii) Terbuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tambahan di luar sektor pertanian.
- (iv) Masa depan anak-anak lebih cerah di daerah tujuan.
- (v) Bagi kaum terdidik terbuka kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja.
- (vi) Keberhasilan dan informasi anggota keluarga yang pindah dapat menjadi 'rayuan' bagi yang lain untuk meninggalkan kampung halamannya.

Dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan pedesaan dan daerah dampak perpindahan penduduk Batak Toba terhadap daerah asal Tapanuli Utara adalah :

- (i) Dapat mengurangi tekanan terhadap lahan pertanian, namun sampai saat ini kebanyakan kaum tani yang tinggal tergolong petani lahan sempit (mengerjakan kurang dari 0,5 Ha).
- (ii) Penduduk berkurang terutama dari golongan yang lebih muda, lebih berkualitas dan lebih dinamis, sehingga besar kecenderungan penduduk yang tinggal tergolong kurang produktif dan terdiri dari golongan usia muda dan tua.
- (iii) Penghargaan terhadap tanah marga tetap dipertahankan tetapi tidak memberi manfaat ekonomis bagi penduduk yang tinggal karena lahan seperti itu biasanya tidak diusahai.
- (iv) Lahan-lahan kering kepunyaan 'tuan-tuan tanah' pada umumnya tidak diusahai anggota keluarga yang tinggal di *bona pasogit*.
- (v) Adanya kecenderungan pergantian penduduk antara marga tanah dengan keturunan marga pendatang, *paisolat*, sehingga tanah milik marga atau kelompok marga yang telah ditinggalkan satu atau dua generasi menjadi sumber konflik.
- (vi) Ikatan dengan kampung halaman dan penghormatan terhadap leluhur didominasi dengan pendirian tugu-tugu 'mewah' yang tidak memberi manfaat ekonomi bagi keluarga dan daerah yang ditinggalkan.
- (vii) Terdapat kecendungan pengosongan kampung, *huta*, sehingga dapat menyebabkan batas antar *huta* yang semula tegas menjadi kurang pasti. Hal ini dapat menimbulkan konflik di kemudian hari antara keturunan pemilik kampung.
- (viii) Sangat jarang orang-orang yang berhasil dan telah pensiun pulang kampung (menetap) sehingga kurang mendorong usaha-usaha pem-

bangunan pedesaan untuk mempercepat proses penerimaan ide-ide baru.

Manfaat yang dapat disumbangkan oleh para penduduk yang pindah dari Tapanuli Utara dalam kerangka pembangunan nasional adalah :

- (i) Pada awalnya perpindahan petani dari desa ke desa umumnya menjadi pelopor pembuka persawahan dan pemukiman, terutama di daerah Sumatera bagian Utara.
- (ii) Kaum terdidik mengisi berbagai lowongan kerja pada berbagai instansi yang tersedia tanpa membedakan suku bangsa atau daerah sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.
- (iii) Kaum pendidik menyebarkan kemana-mana untuk meningkatkan pengetahuan warga masyarakat melalui pengajaran dan pembukaan persekolahan.
- (iv) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat nasionalisme lebih tinggi dari fanatisme kedaerahan.

Sifat orang Batak Toba yang dinamis untuk mencapai sukses yang diidamkan menyebabkan arus perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara tidak pernah berhenti. Jumlah yang tinggal di *tano parsieran* semakin besar, melebihi yang tinggal di *bona pasogit*. Paling lambat tahun 1961, jumlah orang Batak Toba yang tinggal di daerah lain lebih banyak dibandingkan dengan yang tinggal di Tapanuli Utara.

## 7.2. Kesimpulan

Dari sejarahnya, kelihatannya upaya pencegahan apalagi penghentian perpindahan penduduk dari Tapanuli Utara ke daerah lain merupakan upaya yang akan sia-sia. Perpindahan itu sudah merupakan tradisi karena bukan proses yang baru terjadi lagi. Berbagai kendala di daerah sendiri dalam beradaptasi dengan lingkungan merupakan penghambat dalam meningkatkan mutu kehidupan sesuai dengan zamannya. Dalam sistem nilai tradisional (adat) Batak Toba, selain mendambakan banyak keturunan, *gabe*, setiap keluarga ingin sejahtera dan kaya, *mamora*, serta memiliki wibawa sosial, *sangap*. Tidak setiap orang atau keluarga mampu meraih dua nilai terakhir sesuai dengan zamannya di daerah sendiri karena tidak setiap keluarga, misalnya, memiliki tanah yang luas, mempunyai harta benda yang banyak, menjadi pendiri kampung dan sebagainya.

Salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi ialah meninggalkan kampung halaman dengan harapan akan mendapat sukses di daerah lain. Kendatipun pada awalnya keterbatasan sektor perta-

nian dan kesulitan ekonomi sebagai faktor pendorong, namun perpindahan tersebut tidak dapat dianalisis hanya dengan melihat faktor pendorong dan faktor penarik semata-mata. Sukses yang ingin dicapai ditentukan oleh hal yang lebih kompleks dari faktor-faktor pendorong dan penarik dalam paradigma 'push and pull factors'. Nilai-nilai tradisional dalam 3H atau 4H, walaupun dengan intensitas yang berbeda tetap hidup sesuai dengan zamannya. Pilihan terhadap pekerjaan, daerah tempat tinggal, hubungan dengan orang lain, perkumpulan yang diikuti dan sebagainya ditentukan oleh cita-cita, idaman dan ide-ide yang selalu diperjuangkan dalam hidupnya, yakni untuk memperbesar *sahala*. Sahala mencakup kewibawaan, kekayaan harta benda dan turunan, kecerdasan, pengetahuan yang luas dan sebagainya.

### 7.3. Kesimpulan

Dari sejarahnya, kelibatan upaya penciptaan sebagai penghormatan perpindahan penduduk dari Jepanuli Utara ke daerah lain merupakan upaya yang akan sia-sia. Perpindahan ini sudah merupakan tradisi karena bukan proses yang baru terjadi lagi. Berbagai kendala di daerah sendiri dalam beradaptasi dengan lingkungan merupakan penghambat dalam meningkatkan mutu kehidupan sesuai dengan zamannya. Dalam sistem nilai tradisional (adat) Batak Toba, selain mendapatkan banyak kenangan, adat, sopan, keluarga ingin sejahtera dan kaya, namun, serta memiliki wawasan sosial, karyak. Tidak setiap orang atau keluarga mampu meraih dan nilai terakhir sesuai dengan zamannya di daerah sendiri karena tidak setiap keluarga, misalnya, memiliki tanah yang luas, mempunyai harta benda yang banyak, menjadi peduli kampung dan sebagainya.

Salah satu cara yang diupayakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi ialah meningkatkan kemampuan bawahan dengan harapan akan mendapat sukses di daerah lain. Keterbukaan pada awalnya keterampilan sektor pert-

## REKOMENDASI

---

Manusia mempunyai kedudukan ganda dalam pembangunan. Dia dapat menjadi pelaku dan pengelola yang mengembangkan tenaga dan keahliannya terhadap upaya-upaya masyarakat dalam pembangunan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan yang dikelola dan diprakarsai manusia, pada dasarnya tidak terlepas dari usaha-usaha memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya.

Pembangunan wilayah Tapanuli Utara, daerah asal usul orang Batak Toba, tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional. Potensi yang terkandung di dalamnya, seperti potensi alam, apalagi potensi manusia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Sistem budaya, sistem sosial dan sistem kepribadian menjadi lebih penting lagi karena dengan memahami sistem-sistem tersebut akan memberikan jalan keluar untuk memahami lebih lanjut potensi manusia dan potensi daerahnya. Potensi tersebut sebagian dimanfaatkan di wilayah sendiri dan sebagian lagi terus mengalir, terutama potensi manusianya, dari *bona pasogit*. Upaya memahami potensi manusia sebagai faktor produksi (dalam kajian ekonomi) dapat dilakukan dengan memahami manusia sebagai sumberdaya yang mempunyai potensi sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Dari dahulu hingga sekarang potensi yang nampak di Tapanuli Utara kurang dapat dibanggakan, namun barulah pada dekade yang lalu muncul sebutan bahwa Tapanuli merupakan peta kemiskinan di Sumatera Utara, yang dilansir dan disiarkan harian Sinar Harapan, tanggal 16 Nopember 1982. Kemunculannya segera pula disambut dengan beberapa reaksi dan tanggapan. Dari kalangan masyarakat maupun pejabat timbul reaksi dan tanggapan serta berbagai pertemuan telah dilakukan untuk mendiskusikan

masalah tersebut. Kalangan perguruan tinggi dan tokoh-tokoh pemuka masyarakat yang tinggal di daerah *parserakan* 'terhenyak' dengan pengungkapan kondisi sosial ekonomi yang menyedihkan itu. Di Universitas HKBP Nommensen, kampus Medan, berlangsung seminar nasional pada tanggal 10-11 Januari 1985 untuk memberikan responsnya. HKBP dalam menyambut Jubileum 125 tahun pada tahun 1986 ingin mewujudkan program-program kantong-kantong pembaharuan, juga untuk menjawab tantangan peta kemiskinan tersebut. Demikian pula **Operasi Khusus Terpadu (Opsusdu) Maduma** yang berjalan beberapa tahun di beberapa Dati II Sumatera Utara, juga untuk menanggulangi kemiskinan dimaksud. Opsusdu Maduma yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian tanggal 20-21 Oktober 1986 ditujukan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias, Tapanuli Utara dan Dairi dengan berbagai terobosan. Opsusdu Maduma bukan saja meliputi pembangunan fisik tetapi juga mental, dengan sasaran utama untuk meningkatkan penghasilan rata-rata penduduk dari Rp. 300.000 menjadi Rp.600.000.

Bagi orang-orang yang 'setia' tinggal di Tapanuli Utara, sebutan peta kemiskinan tergolong baru tetapi keadaan miskin adalah 'barang lama' yang sudah sejak dulu mewarnai kehidupan golongan besar penduduknya. Akar permasalahan yang sebenarnya terletak pada manusianya, yaitu potensi yang tinggal di sana ditambah dengan faktor alam setempat dan aksesibilitas (keterjangkauan) daerahnya. Di berbagai daerah orang-orang tua yang menjaga desa sementara orang-orang muda potensial sudah jarang ditemukan. Kenyataan seperti ini bukan hanya mengakibatkan sulit mencari tenaga-tenaga potensial di desa-desa, tetapi lebih dari itu. Kantong-kantong kemiskinan berkembang dimana-mana, yang tampak dari sosok desa dan penghuninya. Kantong-kantong kemiskinan timbul seiring dengan adanya arus yang terus mengalir keluar. Arus tersebut didominasi oleh arus manusia dan arus uang sehingga kemiskinan Tapanuli Utara tampak sebagai kemiskinan material dan kemiskinan manusiawi. Untuk menanggulangi masalah tersebut agar jangan berlarut-larut maka diperlukan pendekatan yang operasional sebagai landasan berpijak. Dengan pendekatan itu diharapkan arus yang seyogianya mengalir dapat diperlambat lajunya dan dapat dimanfaatkan di daerah sendiri selama jangka waktu tertentu untuk membangun masyarakat dan daerahnya.

Tentu sangat banyak pendapat yang mungkin muncul dilihat dari sudut pandang tertentu. Namun demikian, tidak sebanyak pendapat yang dipaparkan itu dapat operasional di lapangan, karena banyak faktor seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain turut mempengaruhinya. Karena perbedaan intensitas faktor-faktor tersebut sehingga antara satu dengan yang lain mempunyai inti yang berbeda mengenai kepentingan yang timbul dari realita yang dihadapi. Kondisi-kondisi keterbelakangan dan masalah-masalah yang dihadapi memerlukan adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat

pemerintah dalam rangka mengefektifkan 'top down' dan 'bottom up planing'. Akibat-akibat nyata dapat memberikan pelajaran dan dorongan bagi dilakukannya suatu orientasi dan pemikiran kembali mengenai kemiskinan Tapanuli Utara untuk memulai pembangunan pada era Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II ini.

### **1. Membangun Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas untuk Memperlambat Arus Keluar Sumberdaya Manusia**

Sampai pertengahan abad XX, Tapanuli merupakan salah satu pusat pendidikan di pulau Sumatera. Sesudah itu secara berangsur-angsur di berbagai daerah muncul pusat-pusat pendidikan baru dan Sumatera Barat yang sudah duluan mengenal pendidikan formal semakin berkembang, terutama dengan adanya beberapa perguruan tinggi. Demikian pula di pulau Jawa, sarana dan prasarana pendidikannya semakin tidak tertandingi Tapanuli. Dambaan masyarakat dan pemerintah terhadap perguruan tinggi di Tapanuli Utara akhirnya harus ditunggu dalam waktu yang relatif lama karena perguruan tinggi yang seyogianya berdiri di sana, yaitu Universitas HKBP Nommensen, pindah ke Pematang Siantar dan Medan.

Sepanjang sejarah yang menandai perjalanan hidupnya, masyarakat Batak Toba memiliki dinamika tersendiri yang unik. Memahami proses kehidupan di Tapanuli Utara dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari proses sejarah Batak yang panjang dan unik itu. Salah satu diantaranya ialah perpindahan penduduk yang terus berlangsung hingga dewasa ini. Dari upaya mencari lahan pertanian, mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan sekaligus meninggalkan daerah asal-usulnya, mewarnai hal tersebut. Mereka meninggalkan kampung halamannya bukan hanya demi kepastian saja tetapi benar-benar memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk meningkatkan harga dirinya. Perpindahan ke sektor pertanian berlangsung kurang lebih separuh dari awal abad ini, sedangkan mencari pekerjaan dan yang melanjutkan pendidikan sekaligus meninggalkan kampung halaman dominan setengah abad terakhir ini.

Perpindahan kaum tani terjadi karena lahan pertanian di daerah asal sudah semakin sempit dan tidak memadai lagi dibandingkan dengan pertambahan penduduk yang memperoleh penghasilan dari pertanian. Pembukaan persawahan baru tidak mungkin lagi karena lahan-lahan basah sudah digunakan secara maksimal. Akibatnya banyak yang meninggalkan kampung halamannya menjadi perintis pembuka lahan-lahan pertanian di daerah Simalungun, Dairi dan daerah lain di Sumatera Timur termasuk Aceh Tenggara. Kecintaan orang Batak terhadap tanah mempercepat daerah-daerah rintisan baru dihuni para pendatang baru dan mempercepat peramban-

han hutan-hutan primer, daerah rawa-rawa dan lain-lain menjadi areal pertanian. Selain membuka hutan-hutan primer, daerah rawa-rawa, adapula yang memperoleh lahan dengan cara membeli dari orang yang lebih dahulu tinggal di daerah bukaan baru. Perpindahan kaum tani yang langsung dari Tapanuli Utara kadang kala bahkan sering terjadi seiring dengan perpindahan kembali orang-orang yang telah duluan meninggalkan kampung asalnya.

Perpindahan seperti itu, dari satu segi dapat dipandang sebagai mekanisme penyeimbang karena memberi kesempatan kepada orang-orang yang ditinggalkan untuk mengusahai lahan yang lebih luas dan memperlambat pembukaan *huta-huta* yang baru, yang dapat mempercepat penyempitan lahan pertanian. Dipandang dari segi ini perpindahan petani tidak merugikan daerah asalnya, tetapi dari segi lain mungkin mengurangi persediaan tenaga kerja. Namun demikian, gotongroyong yang sifatnya emansipatoris dapat dan mampu mengatasi kekurangan persediaan tenaga kerja yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, bagi masyarakat Tapanuli Utara, perpindahan petani yang terjadi kurang lebih sepanjang paroh pertama abad ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan material yang terjadi di sana.

Sebaliknya pencari kerja dari kaum terdidik yang pada umumnya terdiri dari tenaga-tenaga muda, bukan hanya mengurangi persediaan tenaga kerja tetapi juga mengikis persediaan tenaga 'superior' dari desa-desa. Beberapa jabatan di dalam kegerejaan yang semula menjadi idaman, sejak terbuka perkebunan dan sekolah kejuruan yang memberi daya tarik yang lebih baik, menyebabkan kaum terdidik keluar dari desanya mencari pekerjaan yang lebih menarik di luar Tapanuli Utara. Kurang lebih 50 tahun sejak permulaan abad ini, banyak dari antara mereka mendapat pendidikan di Tapanuli sebagai dasar untuk mencari kerja dan menduduki jabatan. Guru-guru sekolah, tenaga-tenaga kesehatan, krani, pegawai pemerintah dan lain-lain di wilayah Sumatera Utara banyak diisi putra-putra yang mendapat pendidikan di Tapanuli. Dari segi pandangan mereka hal itu merupakan suatu keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus status diri. Hal ini telah menjadi titik tolak bagi masyarakat dengan memandang pendidikan sebagai sarana penunjang peningkatan status sosial dalam bentuk *hamoraon* dan *hasangapon*. Bagi generasi yang lebih muda hal itu lebih berkembang lagi sehingga mereka tidak membatasi diri untuk memasuki pendidikan yang ada di daerahnya. Mutu dan sarana pendidikan yang lebih baik, jika tidak dijumpai di Tapanuli, menyebabkan perpindahan ke kota-kota demi pendidikan anak. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang mampu yang jumlahnya relatif kecil. Bagi orang banyak, keterbatasan dan besarnya dana yang akan dikeluarkan telah menutup kesempatan bagi orang yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya, apalagi jika di luar Tapanuli Utara. Bagaimanapun sebelum kemerdekaan, pendidikan itulah yang membuka mata dan menyadarkan orang Batak bahwa mereka masih dikuasai orang

asing. Sesudah kemerdekaan, apalagi setelah pengakuan kedaulatan, pendidikan termasuk faktor utama dinamika sosial.

Sebelum kemerdekaan, sekolah-sekolah yang ada di Tapanuli, yang menjadi salah satu pusat pendidikan di Sumatera didirikan oleh zending RMG dan pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat pribumi sampai tahap-tahap tertentu sesuai dengan latar belakang keluarga dan kemampuan si murid. Suasana kemerdekaan memberi peluang bagi masyarakat banyak untuk memperoleh pendidikan yang lebih memadai. Selama dasawarsa pertama sesudah kemerdekaan, sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah pun bermunculan di beberapa ibukota kecamatan, mulai dari SLTP sampai SLTA sehingga membuka kesempatan bagi mereka mendapat pendidikan di tingkat lanjutan. Stratifikasi sosial pun mulai terbuka, diantaranya anak yang sudah berpendidikan dari masyarakat umum juga menjadi favorit untuk dijadikan menantu bekas kaum feodal, kaum pedagang dan kaum ambtenar, yang sebelumnya jarang terjadi. Integrasi sosial semakin meningkat dengan lahirnya kesempatan memperoleh pendidikan dan mobilitas sosial pun semakin efektif. Orang-orang terdidik pada umumnya pergi meninggalkan kampung halamannya dan membangun 'kerajaan-kerajaan pribadi' di daerah lain. Kampung halaman yang ditinggalkan menunjukkan perkembangan merisaukan seiring dengan keluarnya para inovator, entrepreneur dan konseptor ke luar daerah.

Pindah, apakah dilakukan kaum tani atau terdidik seperti diterangkan di atas, merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh penduduk dari daerah Tapanuli Utara untuk membebaskan diri dari cekaman kemiskinan. Sebaliknya cengkeraman kemiskinan masih belum melonggar bagi penduduk yang tinggal walaupun sudah banyak yang pindah, bahkan keadaan miskin semakin jelas kelihatan karena pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di satu pihak ada yang pindah karena pendidikan dan di pihak lain, meninggalkan kampung halaman merupakan salah satu tujuan dari pendidikan.

Sejak paroh kedua abad ini, kekayaan atau penghasilan daerah Tapanuli Utara dalam jumlah yang besar setiap tahunnya mengalir keluar dan terpakai di daerah-daerah lain. Pengeluaran tersebut terjadi dalam bentuk investasi, yaitu membelanjai anak-anak mereka di lembaga-lembaga pendidikan di luar daerah. Keprihatinan tentang pelarian tenaga potensial dan modal ke daerah lain sudah muncul di masa pemerintahan kolonial. M.L. Siregar dalam salah satu tulisannya di majalah mingguan *Immanuel* (8.1.1917 : 7) dengan judul "*Suda angka doli-doli*" menuliskan "*Aut sura nanggo satonga ongkos ni angka halak na marsingkola tu tano na dao i dipangke pauli tanonta on, nda nunga lam tu adongna mual ni hangoluan?*". Ini berarti bahwa investasi pendidikan yang mengalir ke luar daerah, pada satu sisi mempunyai dampak positif bagi pribadi dan keluarga yang bersekolah tetapi pada sisi lain berdampak negatif terhadap sumber nafkah mereka dari lahan pertanian.

Investasi untuk menyekolahkan anak terus mengalir dari sana bahkan semakin besar jumlahnya ketika anak-anak Tapanuli harus memasuki perguruan tinggi di daerah lain, terutama sejak tahun 50-an. Ratusan bahkan ribuan orang harus belajar di luar Tapanuli, bukan hanya pada tingkat perguruan tinggi tetapi juga untuk sekolah menengah. Paling tidak sejak tahun 70-an, selain karena daya tampung yang masih kurang, mutu pendidikan juga menjadi salah satu indikatornya. Dalam suatu diskusi yang berlangsung di Jakarta tahun 1984, Gustaf Sinaga, Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara ketika itu, menaksir sekitar 9.000 orang pelajar setiap tahun keluar dari daerahnya untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya 3 milyar rupiah (Bupati ...., 1984 : 82). Jumlah dana keluar tersebut cenderung semakin besar karena biaya pendidikan, biaya pemondokan, harga buku dan lain-lain mengalami kenaikan seiring dengan laju inflasi.

Walaupun belakangan ini sudah ada Universitas Sisingamangaraja XII (Unita) di Siborongborong dan Akademi Agama Kristen di Tarutung, jumlah pelajar yang melanjutkan pendidikannya ke daerah lain tetap tinggi. Terdapat kecenderungan bahwa keluarga yang lebih mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke luar Tapanuli, baik untuk SLTP maupun SLTA. Suatu ilustrasi mengenai besarnya dana pendidikan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya ditunjukkan tabel di bawah. Dengan memperhitungkan biaya sekolah, buku-buku, pakaian, makanan dan lain-lain, untuk SLTP 70.000 rupiah, SLTA 80.000 rupiah dan untuk perguruan tinggi 100.000 rupiah per bulan, besarnya dana pendidikan yang keluar dari Tapanuli Utara lebih dari enam milyar rupiah per tahun. Dengan taksiran yang lebih tinggi, investasi pendidikan yang keluar sekitar sembilan milyar rupiah.

### Besarnya Dana Pendidikan yang Keluar Dari Tapanuli Utara, 1993

Jenjang Pendidikan	Yang melanjutkan pendidikan (org)	Biaya perororang dalam setahun (Rp)		Jumlah (Rp)	
		taksiran rendah	taksiran tinggi	taksiran rendah	taksiran tinggi
SLTP	2.000	840.000	1.200.000	1.680.000.000	2.400.000.000
SLTA	3.000	960.000	1.320.000	2.880.000.000	3.960.000.000
Perguruan Tinggi	1.500	1.200.000	1.800.000	1.800.000.000	2.700.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>6.500</b>			<b>6.360.000.000</b>	<b>9.060.000.000</b>

Sumber : Perkiraan sendiri

Investasi sedemikian akan sangat menolong apabila dana tersebut tidak dinikmati oleh daerah luar, daerah-daerah mana sudah tergolong maju, seperti Pematang Siantar, Medan, Jakarta, Bandung, Padang dan lain-lain. Daerah tersebut merupakan daerah yang setiap tahunnya siap menerima 'masukan' dari daerah lain, karena di daerah-daerah tersebut dijumpai lembaga pendidikan yang memadai ditinjau dari jumlah dan mutunya.

Melihat potensi utama Tapanuli Utara dalam jangka panjang adalah sumberdaya manusia didampingi oleh sumberdaya alam yang relatif tidak sekaya daerah lain, maka strategi pembangunan Tapanuli Utara harus berporos pada peningkatan mutu sumberdaya manusia secara bertahap, terprogram agar dapat mengejar ketinggalan dari daerah lain. Pembinaan di bidang sumberdaya manusia melalui, terutama pendidikan, tidak mengalami kesulitan karena sudah kerinduan orang Batak dari nenek moyang untuk mengejar pengetahuan dan menyekolahkan anak dengan mengorbankan harta benda sebagaimana telah berjalan sebelum Perang Dunia II, terlebih-lebih setelah tahun 50-an. Melihat keadaan yang terus berlangsung hingga dewasa ini wajar jika investasi pendidikan yang seyogianya lari dan digunakan di daerah lain dapat dimanfaatkan di daerah sendiri. Dalam era permulaan PJP II ini sudah saatnya untuk menyatukan misi dan visi antara pemerintah, gereja dan masyarakat untuk memikirkan dampak negatif dari pelarian potensi, dana dan tenaga kerja tersebut. Selain membekali pengetahuan dan keahlian kepada masing-masing individu untuk dapat bekerja sebagai kekuatan yang akan mengubah perekonomian masyarakat, pendidikan formal juga dapat memegang peranan untuk menanamkan tata nilai, cita-cita, tingkah laku dan aspirasi yang langsung atau tidak langsung yang berkaitan dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan bangsa umumnya.

Untuk menjadikan Tapanuli Utara sebagai basis pendidikan kembali, tidak hanya cukup dengan mendirikan perguruan tinggi yang berkualitas menggantikan universitas HKBP Nommensen yang sudah hijrah ke Pematang Siantar dan Medan. Pemerintah daerah, Gereja dan masyarakat dengan satu tekad mesti bersatu padu untuk membanggunya. Ini tidak lain berupa revitalisasi kerinduan orang Batak, Pemerintah daerah dan pimpinan HKBP pada tahun 1950-1953. Untuk merevitalisasi pendidikan dalam PJP II ini, yang mendesak antara lain di bidang perguruan tinggi, sekolah kejuruan dan SLTA umum.

Perguruan tinggi modern merupakan usaha untuk merevitalisasi pendidikan dalam program PJP II. Pada tahun pertama mungkin berbentuk akademi atau politeknik, tetapi dalam proses jangka panjang menjadi universitas yang unggul. Mendirikan "Universitas Tapanuli Utara" harus berporos kepada yayasan yang didukung oleh pemerintah daerah, HKBP, tokoh masyarakat dari seluruh kecamatan di Tapanuli Utara dan juga dukungan dari *parserakan*. Lokasi MULO Nommensen dan bekas HIS Nommensen

dahulu dan Sipoholon merupakan lokasi alternatif untuk tempat pendiriannya. Alternatif yang lain ialah mendirikan politeknik atau akademi tertentu di wilayah-wilayah tertentu yang didasarkan pada apa yang akan dibutuhkan sesuai potensi wilayah tersebut.

Untuk mendukung politeknik, akademi atau universitas tersebut, di tingkat yang lebih bawah, yaitu SLTA umum dan SLTA kejuruan perlu mendapat perhatian. Pendidikan di sekolah kejuruan perlu ditingkatkan mutunya antara lain melalui praktek guna menambah pengalaman dan pengenalan mereka bahkan di SLTA umum pun perlu dipopulerkan laboratorium dan tanaman percobaan. Untuk memantapkannya, perlu dibarengi dengan asrama sekolah sehingga dapat diharapkan keteladanan dan disiplin yang tinggi. Dengan demikian selama mereka masih dalam asuhan lembaga-lembaga pendidikan tersebut, pendapatan daerah didayagunakan di dalam daerah disamping dapat menyumbangkan gagasan, tenaga dan jasa-jasa bagi pengembangan dan pembangunan daerah. Sumberdaya manusia menentukan karakter dan laju dari pembangunan sosial dan ekonomi di sana. Merekalah yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Kehadiran lembaga pendidikan yang bermutu di daerah sendiri dapat menahan laju perpindahan itu sekaligus menahan dana pendidikan di daerah sendiri.

## 2. Meningkatkan Potensi Sumberdaya Alam

Danau Toba sebagai jantung Tanah Batak bukan hanya berfungsi memberi hawa segar, air minum, atau pemandangan, tetapi juga memiliki potensi sebagai pembangkit generator listrik. Sebagai penyegar pemandangan, sebagian kawasan di sekitar Danau Toba telah berkembang menjadi obyek wisata. Prapat di pinggiran Danau Toba, Tomok, Tuktuk Siadong dan Hutabolon di pulau Samosir merupakan tempat-tempat populer yang dikunjungi oleh turis-turis dari dalam maupun luar negeri.

Sebenarnya banyak daerah di sekitar Danau Toba yang layak dikembangkan sebagai objek wisata yang memperlama turis-turis tinggal di Tapanuli Utara khususnya dan Sumatera Utara umumnya. Banyak tempat bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai daerah turis, yang belum dikenal orang luar, yang hanya diketahui dari buku-buku sejarah atau tulisan orang. Bakara misalnya, pusat pemerintahan Raja Sisingamangaraja I hingga XII. Pengetahuan orang luar pada daerah ini mulai berkembang sejak invasi Padri ke Tanah Batak (1825-1829) dan kunjungan van der Tuuk ke Bakara pada tahun 1853. Hingga sekarang hanya segelintir orang luar yang pernah berkunjung ke sana. Kemudian Hutaginjang Muara, dari sana dapat dilihat

bagaimana Danau Toba yang indah itu terpampang di hadapan setiap pengunjung yang datang ke sana. Dan masih banyak lagi daerah yang dapat memberi kesegaran pemandangan dan daerah-daerah bersejarah lainnya yang dapat ditata sebagai obyek wisata yang dapat memberikan devisa kepada kas pemerintah dan kepada masyarakat. Bagaimana mengoptimalkan pengembangan obyek-obyek wisata yang belum disentuh oleh wisatawan merupakan salah satu hal yang perlu dipecahkan segera.

Gambar 15. Panorama Danau Toba Dilihat dari Huta Ginjang, Muara.

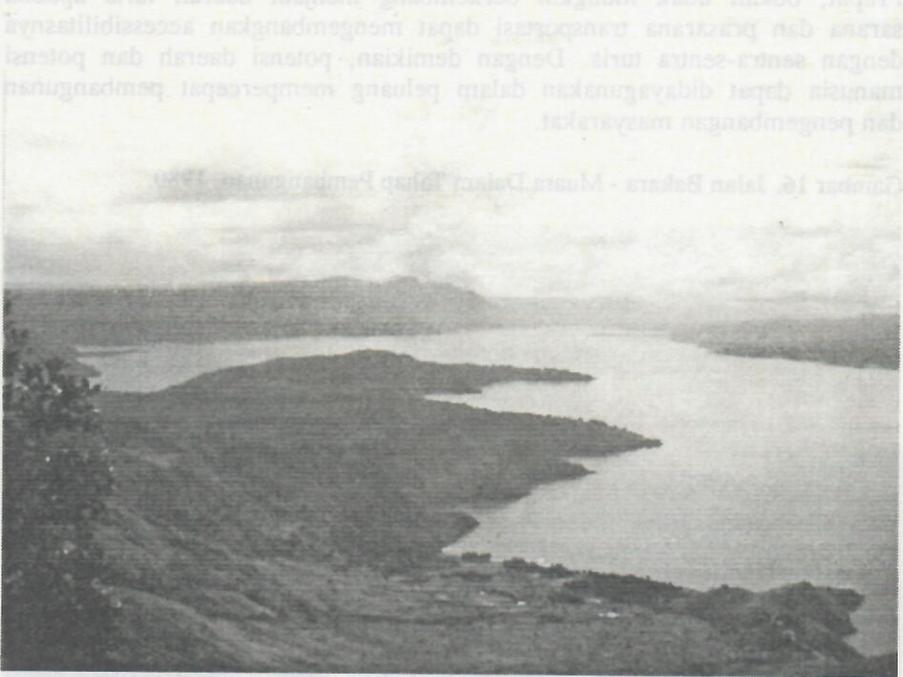


Foto : Elvis F. Purba (1989).

Keterjangkauan suatu daerah dengan obyek wisata merupakan salah satu faktor yang turut memberi peluang pengembangannya menjadi daerah wisata. Daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat lalu lintas dan sulit dilalui transportasi memperkecil kemungkinan menjadi daerah kunjungan wisatawan. Prapat berkembang menjadi daerah kunjungan wisatawan bukan karena

panoramanya yang lebih indah dari daerah-daerah lain di sekitar Danau Toba. Faktor-faktor seperti dekat dengan Medan dan daerah lalu lintas utama membuatnya lebih berpeluang ramai dikunjungi wisatawan. Perkembangan Prapat menjadi kota wisata mempengaruhi keadaan di Tomok dan Tuktuk Siadong serta Hutabolon Simanindo. Ketiga daerah yang terletak di pulau Samosir ini menjadi kantong-kantong wisata dan mempengaruhi keadaan sekaligus mendorong Pangururan menjadi daerah wisata pula. Namun demikian, Tomok dan Tuktuk Siadong lebih cepat berkembang dibanding dengan Hutabolon dan Pangururan. Faktor jarak yang lebih dekat dengan Prapat agaknya cukup berperan dalam pembangunan tersebut. Sebaliknya Balige, Muara atau Bakara yang tidak kalah strategisnya dengan Prapat, bukan tidak mungkin berkembang menjadi daerah turis apabila sarana dan prasarana transportasi dapat mengembangkan aksesibilitasnya dengan sentra-sentra turis. Dengan demikian, potensi daerah dan potensi manusia dapat didayagunakan dalam peluang mempercepat pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Gambar 16. Jalan Bakara - Muara Dalam Tahap Pembangunan, 1980.



Foto : Elvis F. Purba (1980).

Mengembangkan industri pariwisata membutuhkan waktu dan biaya yang relatif kecil dibandingkan dengan membangun daerah Tapanuli Utara menjadi daerah industri lainnya. Pemandangan alamiah, keadaan cuaca yang baik, kebudayaan setempat yang beraneka ragam sudah tersedia. Yang perlu dibenahi diantaranya perhubungan dan berbagai fasilitas termasuk estetika dan etiket masyarakatnya. Apabila hal-hal tersebut telah dibenahi bukan tidak mungkin dalam waktu yang relatif singkat, kantong-kantong kunjungan wisata makin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Kalau itu terjadi pada gilirannya kemudian akan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat dan menambah lapangan kerja bagi penduduknya. Pengembangannya akan membawa pengaruh yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya pada masyarakat yang tinggal di sekitar obyek-obyek wisata tetapi juga daerah sekitarnya.

Kantong-kantong wisata yang sudah ada di beberapa lokasi mampu mendorong pengembangan industri kerajinan rakyat. Berbagai seni ukir yang terbuat dari kayu, barang-barang yang terbuat dari rotan dan ulos dengan berbagai macamnya merupakan barang-barang kerajinan rakyat yang mengisi toko-toko souvenir di daerah-daerah wisata tersebut. Pagelaran budaya, ternyata perkembangannya agak lamban bahkan terbatas di daerah tertentu saja. Demikian pula prasarana jalan sering tidak memberi kenyamanan bagi kendaraan wisata dalam perjalanan pergi dan pulang dari daerah-daerah tersebut. Kesiapan aparat pemerintah dan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan adanya keputusan politik pemerintah untuk menggalakkan pariwisata harus dapat menyadarkan setiap warga negara demi kelangsungan pembangunan yang sedang berjalan saat ini.

Dari antara sekian banyak potensi alam lainnya, Danau Toba telah memberi manfaat lain sebagai pensuplai listrik melalui proyek Asahan. Kehadiran proyek ini membawa manfaat berupa penambahan pendapatan daerah walaupun mungkin tidak terasa bagi masyarakat karena bunga air yang diterima masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Masalah yang kurang menggembirakan ialah bahwa masyarakat belum dirangsang oleh kesempatan yang terbuka, prasarana jalan, listrik yang tersedia untuk meningkatkan produksinya, baik di bidang pertanian maupun kerajinan. Sebagai sumber energi dan penerangan sudah saatnya listrik yang ada dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, pabrik, industri, kerajinan dan lain-lain, disamping untuk penerangan. Potensi-potensi yang lain yaitu potensi aliran sungai yang ada di daerah-daerah dapat didayagunakan dan diharapkan dapat mengilhami penduduk setempat mengembangkan dirinya.

Potensi alam lainnya yang belum didayagunakan sepenuhnya adalah lahan. Banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan sepenuhnya karena adanya predikat lahan adat serta banyak lahan yang sudah tandus. Tanah-tanah adat, bukan tidak mungkin akan memberi peluang kepada pemiliknya

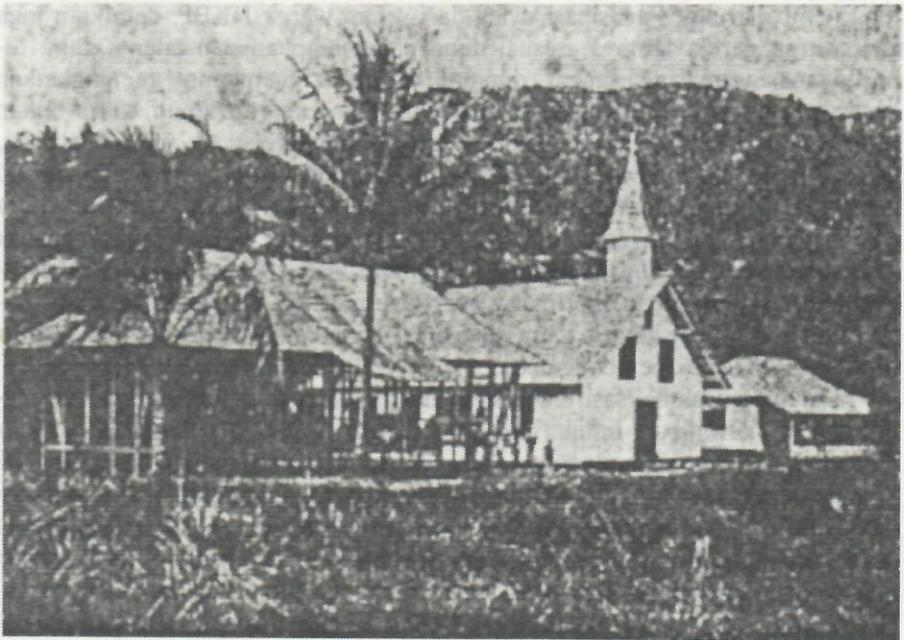
dan kepada siapa yang dapat dan mampu menggunakannya. Dalam skala besar, perkebunan sistem PIR merupakan alternatif pengembangan pertanian dan agro industri di daerah ini. Penyelesaian tanah adat dan komoditi yang paling sesuai bagi usaha PIR merupakan pertimbangan penting lain bagi realisasi PIR tersebut. Hal ini memberi kemungkinan yang lebih besar dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk mengolah lahannya, terutama dengan diperkenalkannya teknologi baru dan manajemen pertanian sehingga kesuburan tanah tetap dapat dipertahankan, dan perusakan tanah dapat dicegah. Sebaliknya kawasan-kawasan yang telah tandus akibat pengundulan hutan dapat ditanami kembali dengan tanaman tahunan atau tanaman keras sehingga pada gilirannya bukan hanya dapat mempertahankan persediaan sumber air tetapi sekaligus dapat mempertahankan kesuburan tanah atau bahkan dapat memberi hasil yang berlipat ganda dibanding dengan keadaan yang sekarang.

"Tanah adalah lambang identitas sebagai bukti keaslian dan kebenaran ke-Batak-an seseorang" (Bangun, 1988 : 74). Dapat diduga bahwa inilah salah satu penyebab mengapa orang di Tapanuli (Utara) enggan melepaskan tanahnya kepada orang lain. Apalagi tanah adat yang bukan milik orang perorangan, sering menjadi penghambat bagi mereka yang ingin menanamkan investasinya di sana. Yang sering menjadi persoalan ialah jika lahan tersebut dinyatakan dalam jual beli. Tanah adat tidak pernah dan tidak boleh diperjualbelikan, tanah tidak dinilai dengan uang tetapi dinilai dengan adat. Oleh karena itu, peranan kepala desa, pengetua dan kelompok marga dalam hal pelepasan tanah adat secara adat menjadi penting dewasa ini. Keputusan yang diambil secara musyawarah dengan menghadirkan pemuka adat, kepala marga dan orang-orang yang terlibat pelepasan tanah memungkinkan mereka bekerja sebagai kekuatan yang akan mengubah ekonomi dalam masyarakat mereka nanti. Memang tanah sering juga menjadi indikator status sosial di kalangan masyarakat, sehingga orang-orang yang sudah berada di luar Tapanuli pun sering merindukannya, malah ikut mempertahankannya. Akibatnya, sebagian besar tanah penggembalaan, belukar dan hutan desa tidak didayagunakan oleh orang perorangan. Peningkatan kehidupan warga masyarakat memang bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial, politik dan kebudayaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan untuk membangkitkan partisipasi warga masyarakat yang menganggap dirinya sebagai pemilik lahan adat agar lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan guna memberikan nilai bagi mereka dan masyarakat umumnya. Barangkali sistem Kibbutz Israel dapat dijadikan contoh untuk dipelajari dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan lahan adat.

### 3. Gereja Sebagai Asset Pembangunan Tapanuli

Jauh sebelum lahir sebutan "*Peta Kemiskinan*" untuk Tapanuli, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah dilakukan gereja, terutama HKBP. Peran sertanya, antara lain dapat disaksikan melalui pengadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pertukangan, pertanian yang masih nampak hingga dewasa ini. HKBP lahir, tumbuh dan dibesarkan di Tapanuli dan akhirnya berkembang di berbagai pelosok tanah air. Dari HKBP muncul HKI, GKPI, yang jemaatnya kebanyakan orang-orang Batak Toba, dan juga telah turut menjawab dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Gambar 17. Gereja di Aek Sarulla, Lembah Pangaloan, 1890.



Sumber : Repro dari *Waspada*. (Medan) 30.12.1973.

Pembangunan suatu bangsa yang didalamnya tercakup pembangunan daerah bukan hanya tergantung kepada pemerintah belaka, tetapi juga peran serta warganya. Suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan dibutuhkan dari setiap warga, setiap daerah, dalam pembangunan nasional. Membangun Tapanuli di dalam kerangka pembangunan Indonesia merupakan tanggungjawab masyarakat dan kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat dan pemerintah. Di dalam upaya pemahaman tersebut, masyarakat dan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya adalah subyek pembangunan. Dalam hal ini, satu segi yang eksplisit ialah upaya pembangunan yang partisipatif, yang memerlukan partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan.

HKBP sebagai salah satu organisasi gereja Batak yang terbesar di Indonesia, selain dapat menjadi motivator juga dapat mendorong partisipasi warganya dalam pembangunan bahkan mampu memelopori kantong-kantong pembaharuan. Partisipasi nyata dari setiap warga HKBP, demikian juga dari warga gereja lainnya, sesuai dengan kemampuan dan talenta yang dimiliki masing-masing sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warga Tapanuli. Memang pembangunan Tapanuli Utara bukan semata-mata tanggungjawab gereja, tetapi tanggungjawab seluruh warga, apakah ia warga HKBP, HKI, GKPI, singkatnya warga gereja dan mesjid yang ada di sana. Namun mengingat sebagian besar rakyat Tapanuli Utara adalah jemaat HKBP, adalah beralasan bila program HKBP juga termasuk asset untuk pembangunan Tapanuli umumnya dan Tapanuli Utara khususnya. Gereja bersama pemerintah dapat bekerjasama untuk melepaskan masyarakat dari kemiskinan, yaitu dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam semua aspek pembangunan.

Dalam era globalisasi dan sistem informasi dewasa ini, gereja terpenggil dan berkewajiban untuk ikut membangun bangsa dan negara karena pembangunan semakin menuntut kerja keras dan ketrampilan kerja. Disini gereja dapat mengambil peranan, yaitu ikut mengembangkan motivasi pemudanya untuk menghargai pekerjaan dan mau bekerja keras. Sebagai suatu lembaga yang mempunyai wibawa moral yang besar di lingkungan masyarakat Batak umumnya dan yang menganut agama Kristen khususnya, HKBP yang berpusat di Tapanuli Utara harus mampu memberikan sumbangan, pikiran, dorongan maupun penyuluhan pada umatnya dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat. Demikian pula halnya dengan perlunya membina sikap untuk memasyarakatkan diri secara luas serta luwes dan menghindarkan diri dari upaya-upaya yang bersifat eksklusif, mementingkan diri dan golongan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah haruslah dilihat sebagai mitra kerja untuk menciptakan misi pembangunan bersama untuk membangun Tapanuli Utara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

HKBP telah berbuat banyak untuk membangun dirinya, jemaat dan daerah, bangsa dan negaranya. Untuk mewujudkan peran sertanya yang lebih besar lagi dalam pembangunan telah dibentuk suatu departemen yang dikenal dengan Departemen Pengembangan Masyarakat sejak akhir tahun 80-an. Departemen inilah yang memprakarsai warga HKBP khususnya untuk membuka dan mengembangkan proyek-proyek skala kecil yang berguna, bukan hanya bagi warga HKBP tetapi masyarakat umumnya. Peluang-peluang ke arah usaha mandiri dan partisipatif dari warga masyarakat jelas akan membantu pemerintah dalam memperbaiki kondisi dan tingkat kehidupan masyarakat di Tapanuli khususnya dan dimana ada warga HKBP umumnya.

Peran serta HKBP dalam pengadaan dana bagi pembangunan Tapanuli Utara khususnya dapat dilakukan melalui adanya suatu bentuk 'iuran' dari setiap warga HKBP kepada kas pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai dana pembangunan daerah. Dana tersebut dapat dikumpul dari warganya melalui gereja-gereja, yakni dengan pengadaan *pelean* khusus sekali dalam 1 tahun, misalnya. Mungkin hal itu tidak memberatkan bagi setiap warga yang mengikuti kebaktian, sehingga dengan demikian warga HKBP yang telah tinggal di luar daerah turut berpartisipasi membangun *bona pasogit*. Walaupun mungkin jumlah dana yang terkumpul tidak besar, namun betapapun kecilnya dana tersebut, modal dari satu rupiah sampai milyar rupiah sangat dibutuhkan untuk melepaskan rakyat dari derita kemiskinan. Dengan demikian HKBP dapat memainkan peranan ganda dalam pembangunan Tapanuli Utara. Mereka dapat berperan secara aktif dan terjun ke lapangan untuk membantu usaha-usaha pembangunan dan berperan sebagai sumber dana pembangunan daerah. Kini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah daerah dan HKBP menciptakan misi pembangunan bersama dan bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan hal yang sama dengan gereja-gereja Batak yang berpusat di luar Tapanuli Utara, yang jemaatnya dominan orang Batak Toba, perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan yang 'terlibat' di dalamnya.

Dalam perkembangannya, gereja telah memberikan andil yang besar untuk pengadaan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai lanjutan. Demikian juga pemerintah, tidak ketinggalan bahkan lebih maju lagi. Pengadaan SD Inpres sampai desa-desa terpencil beberapa dasawarsa belakangan ini bahkan telah jauh melampaui jumlah SD yang disediakan oleh gereja. Perluasan pendidikan formal telah mengubah aspirasi-aspirasi pelajar kepada persiapan untuk menjadi pegawai daripada menciptakan lapangan kerja yang langsung. Hal sedemikian lebih banyak merupakan hambatan daripada perangsang bagi pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya. Gereja yang telah lama bergerak dibidang pendidikan dasar dan menengah dapat memainkan peranan untuk mencipta-

kan suasana yang berorientasi untuk mempersiapkan tenaga-tenaga muda melakukan pekerjaan produktif, yang tidak berorientasi pada pemilikan ijazah sekolah. Ada dua hal yang saling melengkapi yang dapat ditempuh oleh gereja. Pertama ialah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengelola seluruh pendidikan dasar, yaitu SD sampai sekolah menengah dan kedua, gereja membangun sekolah-sekolah kejuruan atau politeknik sebagai substitusinya yang mempunyai ciri tersendiri dibanding pendidikan yang dibangun oleh pemerintah. Sudah saatnya hal ini dipikirkan oleh gereja untuk mengurangi problema tentang sistem-sistem pendidikan yang tidak efisien dan lamban.

#### 4. Mengikutsertakan Tokoh-tokoh Informal bagi Pembangunan

Dahulu di dalam masyarakat desa, tokoh informal memegang peranan penting baik dalam hal pengambilan keputusan, sebagai "goal getter" terhadap informasi, nilai-nilai baru dan lain-lain. Tokoh-tokoh agama, pengetua adat, tokoh senior merupakan tokoh informal yang menjadi pola anutan masyarakat, penegak dalam konflik, pengajar dalam kemajuan dan juga sebagai sumber-sumber moral dan kebenaran. Belakangan ini peranan mereka semakin berkurang bahkan tidak tampil lagi, khususnya senioritas, dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh pengetua adat pada umumnya hanya berperan dalam urusan adat, tokoh agama lebih terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan religius tanpa dimensi sosial yang lebih luas dan bervariasi. Keadaan ini jelas kurang mendorong dinamika masyarakat dalam praktek pembangunan.

Perkembangan birokrasi di Indonesia yang menjangkau pedesaan membawa tindak lanjut pada upaya menjadikan kepala desa menjadi pemimpin formal diantara pemimpin-pemimpin informal. Tokoh-tokoh informal secara struktural berada di luar birokrasi dan pelaksanaan program pembangunan berada di bawah kepala desa. Sejalan dengan itu, peranan mereka pun semakin terbatas karena pemerintah telah memegang peranan sentral dalam proses perubahan. Di dalam keadaan seperti itu, birokrasi yang diharapkan dapat menunjang praktek pembangunan akan diwarnai kendala-kendala. Potensi perilaku orang Batak yang cenderung mempertahankan hak, menghargai desentralisasi bahkan upaya mempertahankan kemandirian boleh jadi membawa dampak negatif dalam praktek pembangunan. Untuk meminimumkan dampak negatif tersebut, tokoh informal layak diperhitungkan bukan hanya untuk menjembatani ke arah perwujudan tetapi juga penyaluran dampak positif dari potensi tersebut. Di tingkat desa, tokoh-tokoh informal ini dapat menjadi mitra kerja kepala desa dan perangkatnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakatnya karena mereka lebih mengetahui kondisi-

si desa berdasarkan pengalaman dan perannya pada masa lalu. Hal-hal ini merupakan potensi yang tidak kecil artinya untuk menghidupkan peranan LMD dan LKMD sekaligus mewujudkan **bottom up planning** dalam pembangunan.

Sistem perwilayahan yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah beberapa Pelita yang lalu pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pencapaian hasil-hasilnya. Tapanuli Utara yang terdiri dari 27 kecamatan itu dibagi menjadi 5 Wilayah Pengembangan (WP). Wilayah Pengembangan I terdiri dari Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Adian Koting, Pahae Jae dan Pahae Julu. WP II terdiri dari Kecamatan Siborongborong, Parmonangan, Sipahutar, Pangaribuan dan Garoga. Kemudian WP III meliputi Kecamatan Doloksanggul, Lintong Nihuta, Muara, Onan Ganjang, Parlilitan dan Pakkat. WP IV terdiri dari Kecamatan Balige, Laguboti, Silaen, Porsea, Lumban Julu dan Habinsaran, sedangkan WP V meliputi Kecamatan Pangururan, Simanindo, Onan Runggu, Palipi, dan Harian. Dalam rangka mengefektifkan **bottom up planning** maka pembantu bupati di masing-masing WP layak mengikutsertakan tokoh-tokoh informal tadi, guna membicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan pembangunan di masing-masing WP. *Partungkoan* dalam bentuk yang lebih modern sebagai basis dalam forum komunikasi dan forum demokrasi dapat memobilisasi masyarakat melalui perangkat birokrasi untuk membangun suatu bangunan administrasi sekaligus untuk memobilisasi pembangunan.

## 5. Martabe Sebagai Upaya Membangun Desa dan Daerah

Gerakan Pembangunan Desa Terpadu *Marsipature Hutana Be* (Martabe) untuk daerah Sumatera Utara dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar sejak 1 November 1989. Secara harafiah, *Marsipature Hutana Be* berarti membangun kampung (desa) masing-masing. Maksud dan tujuannya ialah mengajak orang-orang yang berhasil di luar daerah untuk turut memikirkan pembangunan kampung asalnya dengan cara memberi bantuan daya atau dana untuk pembangunan. *Martabe* bertujuan bukan untuk melegalisasi maksud-maksud tertentu yang sifatnya sepihak, tetapi untuk menciptakan pemerataan pembangunan antar daerah di Sumatera Utara. Untuk daerah Tapanuli Utara, dana *Martabe* yang masuk hingga Juli 1994 sebesar Rp. 16.478.406.500 (Sinaga, 1994 : 4) yang telah dan akan dialokasikan pada berbagai bidang yang menunjang peningkatan aspek spritual dan material.

Dilihat dari besarnya dana *Martabe* tersebut, dukungan putra daerah yang telah berhasil di *parserakan* turut menentukan percepatan pembangunan. Betapa tidak, pembangunan yang selama ini kebanyakan dalam bentuk

investasi mati, dengan *martabe* diharapkan investasi akan beralih atau lebih besar dalam bentuk investasi hidup. Program *martabe* diharapkan mampu menggugah mereka untuk berlomba-lomba turut membangun daerahnya. Bagaimana mengupayakan bantuan yang mengalir ke daerah dan bagaimana memanfaatkannya serta untuk apa digunakan, perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan dana, kerjasama dengan aparat pemerintah perlu dipertimbangkan, sehingga tidak menghasilkan program yang tumpang tindih, tetapi saling melengkapi. Dana-dana dari *martabe* yang bersumber dari orang perorangan dapat menjadi pelengkap dana pembangunan daerah yang bersumber dari APBN atau APBD. Dana itu juga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang menurut pertimbangan yang cukup matang, akan menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk berkembang. Apakah setiap satu kemungkinan yang dapat digali dengan dana *martabe* membuka peluang ke arah kemungkinan lain, layak dipertanyakan. Apabila hal seperti itu terjadi maka sukses pada satu upaya pembangunan sektor tertentu dapat menjadi awal dari sukses praktek pembangunan sektor lainnya. Dengan segala manifestasinya dana *martabe* dapat membuka peluang ke arah kemungkinan lain dalam ruang lingkup pembangunan desa atau daerah.

*Martabe* dalam satu sisi ialah upaya untuk mengumpulkan dana dari orang-orang yang tinggal di luar kampung halamannya untuk membangun desa asalnya. Secara hakiki dana dimaksud diharapkan dari 'orang-orang besar' yang nota bene dapat memberi dalam jumlah besar. Bila demikian halnya berarti hanya terbatas bagi orang-orang tertentu padahal dukungan mereka semua sangat menentukan. Dengan tidak mengecilkan arti sumbangan 'orang-orang besar' dimaksud, orang banyak lain pun diperlukan partisipasinya dalam bentuk *martabe* yang lain. Orang-orang Batak Toba yang berasal dari Tapanuli Utara, apakah ia seorang pejabat pemerintah, pengusaha, petani dan lain-lain dapat diajak ikut serta membangun Tapanuli Utara. Gereja-gereja Batak misalnya HKBP, HKI dan GKPI demikian juga mesjid dapat diikutsertakan untuk mewujudkan peranserta warga Batak Toba membangun yaitu melalui sumbangan yang tidak dipaksakan, dalam bentuk kolekte. Dengan demikian berapa besar pun sumbangan orang yang berasal dari strata sosial yang beraneka itu menjadi satu dalam bentuk *silua*. *Silua* ini dapat dikumpulkan dalam satu kas, yang nantinya menyalurkan bantuan tersebut ke tiap-tiap desa atau kecamatan atau wilayah pengembangan yang minus sumberdaya alamnya. Upaya sedemikian dapat dimasyarakatkan, mungkin sekali atau dua kali setahun, suatu hal yang belum pernah dilakukan di dalam praktek pembangunan Tapanuli Utara.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alatas, Secha (1987), *Migran Wanita di DKI Jakarta dan Peranannya Dalam Ketenagakerjaan (Studi Hasil Sensus Penduduk)*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Almanak Gereja Kristen Protestan Indonesia 1993*. Pematang Siantar.
- Almanak Huria Kristen Batak Protestan 1994*. Pearaja Tarutung.
- Almanak Huria Kristen Indonesia 1992*. Pematang Siantar.
- Ananta, Aris dan Arifin, Evi Nurvidya (1990), "Sensus Penduduk 1990: Bukan Kejutan". *Warta Demografi*, Thn. ke XX/No.12 (Desember). Jakarta.
- Aritonang, Jan S. (1988), *Sejarah Pendidikan di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Aldeman, Irma; Morris, Cynthia Taft (1973), *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Stanford : Stanford University Press.
- Bangun, Payung (1978), "Hubungan Antar Suku Bangsa di Kotamadya Medan". *Berita Antropologi*, Th.X. No. 34 (Maret) : 19-27.
- , (1985), "Pembahasan Makalah Prof. Dr. Amudi Pasaribu : Kemiskinan di Daerah 500 meter di atas Permukaan Laut Sumatera Utara" dalam Samosir M.F. dkk (ed), Seminar Pengembangan Wilayah Berelevasi 500 Meter atau Lebih di Atas Permukaan Laut Sumatera Utara, 10-11 Januari 1985. Medan : Universitas HKBP Nommensen : 71-76.
- Bosch, Peter (1990), *Hubungan Antar Migrasi dan Kualitas Tanah di Desa Simatupang, Tapanuli Utara*. Makalah Sesewaktu No.6. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- BUC Daerah Propinsi Sumatera Utara (1978), *Laporan Proyek Survey dan Penelitian Tanah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah*. Medan : Balai Penelitian Perkebunan Medan/Sub Direktorat Tata Guna Tanah Agraria.
- Bupati KDH Tk.II Tapanuli Utara (1984), *Potensi Daerah Tapanuli Utara Kaitannya dengan Rencana Pembangunan dari Atas*. Jakarta : Diskusi Tata Guna Tanah Berencana dan Pembangunan.
- , (1985), *Beberapa Informasi mengenai Daerah Tk. II Tapanuli Utara*. Bandung.
- Bruner, Edward M. (1961) "Urbanization and Ethnic identity in North Sumatra". *American Anthropologist*, Vol. 63, No. 3 (June) : 508-521

- , (1963), "Medan: The Role of Kinship in an Indonesian City" dalam Spoehr, A. (ed), *Pacific Towns and Cities*. Honolulu : 1-12.
- , (1972), "Batak Ethnic Associations in Three Indonesian Cities", *Southwestern Journal of Anthropology*, Vol.28, No.3: 207-229.
- , (1987), "Megaliths, Migration and The Segmented Self", dalam Carle, Rainer (ed), *Cultures Societies of North Sumatra*, Berlin: Dietrich Reimer Verlag : 133-150.
- Burton and Ward (1827), "Report of a Journey in to The Batak Country in the Interior of Sumatra in the year 1824". *Transaction of The Royal Asiatic Society of Great Brintain and Ireland*, Vol. 1, London : 485-513.
- Castles, Lance (1972), *The Political Life of Sumatran Recydecy: Tapanuli 1915-1942*. A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduationn School of Yale University in Candidacy for the Degree of Doctor in Philosophy.
- Cunningham, Clark E. (1958), *The Postwar Migration of The Toba-Bataks to East Sumatra*. Cultural Report Series No. 5. Yale University.
- Davis. J. Merle (1938), *The Batak Church : An Account of The Organization, Policies and Growth of the Christian Community of the Bataks of Northern Sumatra*. New York : Department of Social and Industrial Research of the International Missionarry Council.
- Departmen van Landbouw Nijverheid enn Handel (1935), *Volkstelling 1930*. Band IV. Batavia.
- Eijkemans, Chris (1988), *Kemiskinan di daerah-daerah Inti dalam Wilayah Toba*. Makalah Sesewaktu Edisi (1), Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- , (1990), "Alang-alang Grasslands in Indonesia: Curse or Blessing for Agriculture ?", *VISI*, Vol. 1, No. 2, Medan : Universitas HKBP Nommensen : 201-219.
- Eijkemans, Chris dan Rooij, Joost van (1990), *Evaluasi Tanah dan Keadaan Pertanian Pada Sembilan Kecamatan di Tapanuli Utara*. Makalah Sesewaktu Edisi (3), Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- , (1990), "Kaitan antara Lingkungan Fisik dan Pilihan Jenis Tanaman Pertanian : Tapanuli Utara Sebagai Contoh". *VISI*, Vol. 1, No. 1, Medan : Universitas HKBP Nommensen : 49-68.
- Galbraith, John (1979), *The Nature of Mass Poverty*. Cambridge : Harvard University Press.
- Geertz, H. (1963), "Indonesian Cultures and Communities", dalam Rùth McVey (ed)., *Indonesia, Southeast Asia Studies*. Yale University, New Haven.

- Haenan, W.K., Hagens M.de. Ruijter, R. Wolfs (1987), *Agriculture, Tourism and Circular Migration at Samosir*. Draft Final Report. The Netherlands : Department of Geography, Catholic University of Nijmegen.
- Hagens, Kees ; Naerssen, Ton Van (1990), *Aspects of Incorporation and Survival at the Island of Samosir*. Makalah Sesewaktu No. 5. Medan : Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.
- Harahap, E.St. (1960), *Perihal Bangsa Batak*. Jakarta : Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan Dep. P.P dan K.
- Harian Waspada* (Medan), 27.2.1952; 12.4.1952; 27.3.1953; 25-29.5.1953; 8.8.1953; 14.11.1955; 21.3.1956; 23.4.1956; 2.5.1956; 28.5.1956; 24.8.1959; 17.7.1961; 7.9.1961; 10.4.1962; 4.1.1963; 8.7.1963; 14.1.1964; 18.6.1975.
- Hasibuan, Posman Wesley Henrius (1988), *Masalah Perpindahan Penduduk Suku Batak Toba ke Daerah Asahan, Kasus : Desa Cinta Damai*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen (Skripsi Sarjana).
- Hobas tu Nasa Ulaon na Denggan : 50 taon Sikola Bibelvrouw HKBP 1934-1984, 30 Taon Departemen Ina HKBP 1954-1984*. Pearaja Tarutung.
- Hutagalung, W.M. (1926), *Poestaha Taringot toe Tarombo ni Bangso Batak*. Laguboti: Zendings Drukkerij.
- Hutagalung W. (1961), *Tarombo-Marga ni Suku Batak: Hadirion ni Siraja Batak na Margoar Suku Batak dohot Hinangkamna Parmargaon, Ruhut-ruhut dohot Ulaonna*. Seri A. Medan: Fa. Sihardo.
- Hutasoit, Marnixius (1986), *Percikan Revolusi di Sumatera*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hutauruk, J.R.(1992), *Kemandirian Gereja: Penelitian Historis-Sistematis tentang Kemandirian Gereja di Sumatera Utara dalam Kancah Pergolakan Kolonialisme dan Gerakan Kebangsaan di Indonesia, 1899-1942*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Joustra, M. (1926), *Batakspiegel*. Leiden : S.C. van Doesburgh.
- Junghuhn, Franz (1847), *Die Battaländer Auf Sumatra*. Berlin : Druck and Verlag von G. Reiner.
- Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Utara (1979), *Tapanuli Utara Dalam Angka 1978*. Tarutung.
- 1985, *Tapanuli Utara Dalam Angka 1984*. Tarutung.
- 1993, *Tapanuli Utara Dalam Angka 1992*. Tarutung.
- Keuning, J. (1958), *The Toba Batak, Formerly and Now*. Translated by Claire Holt, Ithaca: Cornell University Press.

- Liddle, R. William (1970), *Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian Case Study*. New Haven, Yale University Press.
- Lid ni HKBP (1819), "Aha do Dibahen ho toe HKB?". *Immanuel* (Lagoeboti), 7.4.: 55
- Link, W. (1958), *Auszug aus den im Arctiv vorhandenen Jahresberichten Und Briedfen der Missionare die in den Jahren 1908 bis 1938 in Sidikalang-Dairi gearbeitet haben, zusammengesetzt zu einem Bericht anlässlich der 50 jährigen Jubiläums der Dairi-landen am 27 April 1958*. Arsip VEM F/a 41 11. Wuppertal (mimeo).
- Lumbantobing, A. (1957), *Das Amt in der Batak Kirche*. Bonn: Univeritas Friedrich Wilhelm.
- Lumbantobing, Ph.J. (1918), "Ingkon dia do Sibahenon asa boi Maju Bangsonta?". *Immanuel* (Lagoeboti), 13.10.1918 : 161-162.
- Manalu, Ismail (1985), *Mengenal Batak*. Medan : CV Kiara.
- Manullang, M.H. (1917), "Na Tama Botoon dohot Patupaon toe Adopan ni sude Hahaanggi na di Tapanuli dohot di Pangarantoan". *Immanuel* (Lagoeboti), 4.11 : 179.
- Marbun, Lumban Gaol, H. (1990), *Barita Djudjur Taon-Laporan Tahunan (1946-1960) (Doloksanggul Humbang, Bandar, Asahan, D. Serdang, Medan-Atjeh dan Medan Timur)*. Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.
- Marbun, Sehat (1988), *Dampak Migrasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Kasus di Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen (Skripsi Sarjana).
- Marsden, William (1811), *The History of Sumatra*. London : J. McCreery.
- Middendorp, W. (1913), *Memorie van Overgrave van de Onderafdeeling Samosir, Afdeeling Bataklanden*.
- Mijl, Jan Piet van der (1988), *Atlas Sosial-Ekonomi Tapanuli Utara: Hasil Baseline Survey Dalam Tema dan Peta*. Makalah Sesewaktu No.2, Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Naim, Mochtar (1976), "Migration Magnitude of the Minangkabau". *Berita Antropologi*. Tahun VIII No.27 Agustus : 18-45.
- Napitupulu, C.O. (1989), "Meningkatkan Kualitas Manusia di Tapanuli Utara", *Waspada* (Medan) : 11-12.9.
- N.N. (1949), "Samosir Dewasa ini". *Waspada* (Medan), 29.9.
- (1953), "Traktor Distop di KM 2,5 Tandjung Morawa : Kaum Tani Siang Malam Ramai-ramai Berjada". *Waspada* (Medan), 16.3.
- (1953), "Kaum Tani Hanya Mau Tanah, Bukan Peluru". *Waspada* (Medan), 27.3 : 1-2.
- (1953), "Kelaparan di Samosir". *Waspada* (Medan), 27.3.

- (1955), "Kegetiran Hidup Rakyat Samosir di Dalam Masa Pembaharuan Dendam Alam". *Waspada* (Medan), 14.11
- (1958), "Masalah Pengungsian Merupakan Masalah Sosial yang Besar di Sumatera Utara". *Waspada* (Medan), 24.8.
- (1975), "Mutu Pendidikan di Taput Jauh Merosot". *Waspada* (Medan), 18.6.
- Notulen ni Conferentie H.K.B.P. Djawa dan Madoera di Malang di Geredja Batak*. Jl. Welirang No.1 16.10.1946-19.10.1946. (mimeo).
- Nyhus, Edward O.V. (1987), *An Indonesia Church in the Midst of Social Change the Batak Protestant Christian Church 1942-1957*. A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History), at the University of Wisconsin, Madison.
- Oldeman, L.R. et.al. (1979), *An Agroclimatic Tuap of Sumatra*. Bogor : Central Research Institute for Agriculture, Bogor.
- Panitia Jubileum HKBP Siantar Sawah 1982), *Sejarah 75 taon HKBP Siantar Sawah*. Pematang Siantar.
- Panitia Jubileum HKBP Sidikalang (1983), *Buku Parningotan 75 taon HKBP Sidikalang, 27 April 1908-27 April 1983*. Sidikalang.
- Parkin, Harry (1978), *Batak Fruit of Hindu Thought*. Madras : Christian Literature Society.
- Pedersen, Paul Bodholdt (1970), *Batak Blood and Protestant Soul : The Development of National Batak Churches in North Sumatra*. Michigan : William B. Bertsman Publishing Company.
- Pelly, Usman (1983), *Urban and Migration Adaptation in Indonesia: A Case Study of Minangkabau and Mandailing Batak Migration in Medan North Sumatra*. Thesis Submitted in partial fulfillment of the Degree of Doctor of Philosophy in Anthropologi in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana Campaign)
- Pelzer, Karl J., (1978), *Planters and Peasant, colonial policy and the agrarian Struggle in East Sumatra 1863-1947*. 'S-Gravenhage-Martinus Nijhoff.
- , (1982), *Planters Against Peasant: The Agrarian Struggle in East Sumatra 1947-1958*. 'S-Gravenhage Martinus Nijhoff.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (1981), *Kabupaten Tapanuli Utara : Fakta dan Penjelasan*. Publikasi A No. 162. Tarutung.
- , (1986), *Data Pokok Pembangunan Daerah*. Publikasi No. 431. Tarutung.

- , (1993), *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara*. Rencana 1993/1994. Tarutung.
- Penny, David Harry (1964), *The Transition From Subsistence to Commercial Family Farming in North Sumatra*. A Thesis presented to The Faculty of the Graduate School of Cornell University for the Degree of Doctor Philosophy.
- Politiek Verslag van de Residentie Tapanoeli Over Het Jaar 1985*. Sibolga 30 April 1859 (mimeo).
- Reid, Anthony (1987), *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Rodenburg, Janet (1989), *Akibat-akibat Migrasi Terhadap Keluarga di Desa di Tapanuli Utara (Kasus Muara dan Simanindo)*. Medan: Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak Universitas HKBP Nommensen.
- Sahalak Parholong Roha di Bangso Batak (1918), "Universitet di Tano Batak". *Immanuel* (Lagoeboti), 17.3 : 43-44.
- Sarumpaet, J.P. (1994), *Kamus Batak Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Scholz, Ulrich (1983), *The Natural Regions of Sumatra and Their Agricultural Production Pattern : A Regional Analysis*. Vol. 1. Padang : CRIEF.
- Schreiner, Lothar (1978), *Telah Kudengar dari Ayahku : Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Sensus Penduduk 1961 : Penduduk Desa Sumatera*. Seri Laporan No. 22. Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada & Biro Pusat Statistik, 1980.
- Sensus Penduduk 1971 : Penduduk Sumatra Utara*. Seri E No. 02. Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1974.
- Sherman, George D. (1982), *Social Organization of Samosir Batak Livelihood in Relation to their System of Beliefs and Values*. A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University in Partial Fulfillment for the Degree of Doctor of Philosophy.
- Siahaan, Amanihut N./Pardede H., *Sejarah Perkembangan Marga-marga Batak*. Cetakan Kedua, Balige: Indra.
- Siahaan, N. (1964), *Sejarah Kebudayaan Batak: Suatu Studi Tentang Suku Batak (Toba-Angkola-Mandailing-Simalungun-Pakpak Dairi-Karo)*. Cetakan Pertama, Medan: CV. Napitupulu & Sons.
- Sihombing, J. (1961), *Saratus Taon Huria Kristen Batak Protestan*. Medan: Philemon & Liberty.

- Tampubolon, Jongkers; Mijl, Jan Piet van der (1991), "Identifikasi Kemiskinan di Desa Hutanamora Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara". *VISI*. Vol. 2 No. 3, Medan : Universitas HKBP Nommensen : 293-309.
- Tideman, J. (1922), *Simaloengoen: Het Land der Timoer-Bataks in Zijn Vroegere en Zijn Ontwikkeling tot een Deed van het Cultuurgebied van de Oostkust van Sumatra*. Leiden: Van Doesburgh
- (1932), *De Bataklanden 1917-1931*. Leiden.
- Tinjauan Tahunan (Statistik) Keuskupan Agung Medan, Keadaan 31.12.1992*. Medan (Stensilan).
- Tobing, K. (1953), *Sumatera Utara dengan Soal-soal Perkebunan, Pembagian Tanah, Buruh & Tani, Pendidikan, Usaha dan Ekonomi*. Jakarta : Lintasan Masa.
- Vergouwen, J.C. (1964), *The Social Organization and Customary Law of The Toba Batak of Northern Sumatra*. The Hague.
- Warneck, J. (1911), *50 Jahre Batakmission in Sumatra*. Berlin.
- Ypes, W.K. H. (1932), *Bijdrage tot de Kennis van de Stamverwanthschap, de Inhemmsche rechtsgemeenschappen en het grondenrecht der Toba en Dairibataks*. Leiden.
- Simon G. (1904), *Tals Vorwurt Guterstor*.
- Siegar, M.L. (1917), "Suda Angka Doli-doli". *Immanuel (Laogod)*, 8.1. Statistik Gereja Methodist Indonesia tahun 1917. Medan (Stensilan).
- Tampubolon, I. (1932), *Ada Mendirikan Horta (Kampoen)*. Tjip Druk-kertji Philimon Siegar.
- Sinaga, T.M.H. (1994), *Ujara dan Kejabatanaan yang Ditempuh dalam Rangka Mewujudkan Kesteratan dan Keseimbangan Antara Lingkungan Hidup dan Keperduhukan di Tapanuli Utara*. Makalah pada Seminar 6 Oktober 1994 di Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Sinaga, A.B. (1987), "Mangalap Tua" Merjama Keturunan Pada Suku Batak Toba. Medan: PDPKB Universitas HKBP Nommensen.
- Homan M. (1979), "Percakapan Agama dan Budaya Orang Batak Toba : Kasus HKBP". *Prima No. 2*. Jakarta : 18-28.
- M. (1986), "Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air di Sumatera Utara", dalam *Simbolon, H. et al (ed), Pembangunan Wilayah Daratan Tinggi Toba (Datto)*. Bogor : Panitia Jubileum 125 tahun HKBP Huta-Bogor : 74-100.
- H. et al (ed), *Pembangunan Wilayah Daratan Tinggi Toba (Datto)*. Bogor : Panitia Jubileum 125 tahun HKBP Huta-Bogor : 134-140.

## DAFTAR KATA-KATA BAHASA BATAK

Bola pinang	:	bagi hasil
Bona pasogit	:	daerah asal
Bondar	:	parit, saluran irigasi sederhana
Bungkas	:	pindah tempat atau pindah rumah ke daerah lain
Dondon	:	jual gadai
Dongan sabutuha	:	satu marga
Elek	:	merendah untuk meminta sesuatu
Golat	:	sebidang tanah warisan dari kakek atau ayah
Pargolat	:	pemilik tanah
Hagabeon (gabe)	:	keinginan orang Batak mempunyai banyak keturunan
Haha	:	kakak
Haha anggi	:	saudara kandung
Hamajuon (maju)	:	kemajuan
Hamoraon (mamora)	:	kekayaan
Harajaon (raja)	:	kedudukan sebagai raja, kerajaan
Hasangapon (sangap)	:	kedudukan terhormat
Hau ma	:	sawah
Hula-hula	:	Bapak mertua atau marga yang memberi pengantin perempuan
Huria	:	jemaat atau gereja (sebagai lembaga)
Huta	:	kampung, desa
Huta sabungan	:	kampung induk, ibu kota
Jelok	:	labu
Lobu	:	bekas tapak desa
Lumban	:	kampung, bagian dari desa
Manat mardongan tubu	:	waspada (hati-hati) terhadap kerabat satu marga
Mangalului jampalan na lomak (masiampapaga na lomak)	:	pergi ke daerah lain untuk meningkatkan kesejahteraan
Mangaranto (ranto)	:	pergi ke rantau (daerah lain)
Mangombo	:	pergi ke daerah lain untuk bekerja sebagai pekerja musiman (biasanya ke daerah pertanian)
Manombang	:	pergi ke daerah lain membuka lahan atau pemukiman baru
Marga	:	marga, keluarga besar

Marga tanah	:	keturunan satu jalur pendiri kampung
Marjalang	:	mengembara, berkelana
Marrengge-rengge	:	berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan
Marserak	:	menyebarkan
Martutur	:	menentukan kedudukan dalam hubungan kekerabatan (silsilah)
O m p u	:	kakek, nenek
Saompu	:	satu kakek
P a g o	:	tiang yang dipancang sebagai tanda bahwa sesuatu sudah diresmikan
Pago-pago	:	'uang adat' atas mempersaksikan pago
Panjaean	:	barang atau harta yang dibawa untuk berumah tangga sendiri (dari orang tua pengantin laki-laki)
Panolopi (tolop)	:	pemberi persetujuan
Parboruon (boru)	:	pihak keluarga dan kelompok marga yang menerima pengantin perempuan
Paribotoan (iboto)	:	saudara perempuan
Parjuguk (juguk)	:	kedudukan
Parripe	:	kelompok marga pendatang dalam masyarakat kampung
Partungkoan	:	Tempat permufakatan / musyawarah
Pauseang	:	harta atau berupa sebidang tanah yang diberikan orangtua kepada putrinya yang baru berkeluarga
Raja huta	:	kedudukan sebagai raja di kampung tersebut
S a b a	:	s a w a h
Sabutuha	:	satu marga
Sahala	:	kesaktian, wibawa
Siampudan	:	anak yang lahir terakhir, anak bungsu
Sidapot solup do na ro	:	(ungkapan) orang pendatang seharusnya menyesuaikan diri dengan kebiasaan, adat-istiadat daerah yang didatangi
Sihahaan	:	anak pertama, anak sulung
Silitonga	:	anak tengah
S o m b a	:	sembah, rasa hormat
Tano parserakan	:	luar bona pasogit, luar Tapanuli Utara
Tarulang	:	tidak diusahai (tentang ladang atau sawah lingkungan kampung), bera
T o l e	:	ayo, maju, teruskan

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Daswati I	Daerah Swatantra Tingkat I
Dati II	Daerah Tingkat II
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRDS	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
FAO	Food and Agriculture Organization (Organisasi Pangan Sedunia)
GAIB	Gouvernements Ambtenaar voor Inlandsch Bestuur Pejabat pemerintah untuk orang-orang Bumiputera
GBHN	Gari-garis Besar Haluan Negara
GKPI	Gereja Kristen Protestan Indonesia
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
HKI	Huria Kristen Indonesia
LKMD	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LMD	Lembaga Musyawarah Desa
MULO	Middelbaar Uitgebreid Lager Onderwijs Sekolah Lanjutan 3 tahun setelah HIS
PIR	Perkebunan Inti Rakyat
PNI	Partai Nasional Indonesia



## INDEKS NAMA ORANG

- Ali Har, H.M. 76  
 Babiati 15  
 Barus 79  
 Bedjo (Mayor) 79  
 Bemmelan, S.T. van 38  
 Brinkschmidt 75  
 Bruner, E.M. 4,5,6,118  
 Burton, R. 2,48,54,82,137  
 Cunningham, C.E. 4,5,113,131  
 Deventer, van 123  
 Dharma, Anwar 81  
 Engbanua 15  
 Eteng, Abdullah 86  
 Fuchs, N. 75  
 Guru Tantan Debata 15  
 Guru Tatea Bulan 15,16  
 Haibach, W. 42  
 Hasan, Fuad 112  
 Herder, Elfrieda 66  
 Jarlsberg - Wedel, Thora van 66  
 Junghuhn, Franz 2,54  
 Koppen 47  
 Limbongmulana 15  
 Lumbantobing, Raja Patuan  
     Natigor 71  
 Malau, Liberty 79  
 Malauraja 15  
 Manullang, M.H. 123  
 Marsden, William 2  
 Middendorp, W. 40,42  
 Mulajadi Nabolon 15  
 Nasution, A.H. 79  
 Nieman, Lisette 66  
 Nommensen, I.L. 3,59,82,83,137  
 Panggabean, J.K. 112  
 Pardede, T.D. 112  
 Pasaribu, S.B. 43  
 Pelly, Usman 5  
 Pelzer, J.K. 14  
 Raja Bonangbonang 15  
 Raja Isumbaon 15  
 Raja Miokmiok 15  
 Sagalaraja 15  
 Si Asi 15  
 Si Jau 15  
 Siahaan, Baginda Pemimpin 111  
 Siboru Anting Sabungan 15  
 Siboru Biding Laut 15  
 Siboru Ihatmanisia 15  
 Siboru Pareme 15,16  
 Simanjuntak, S.M. 43  
 Simatupang, T.B. 119  
 Sinaga, Gustav 73,150  
 Sinaga, S.M.S. 72  
 Siraja Batak 15,16  
 Siraja Biakbiak 15  
 Siraja Borbor 15  
 Siraja Ihatmanisia 15  
 Siraja Lontung 15,16  
 Siregar, M.L. 149  
 Siregar, Melanthon 71  
 Sisingamangaraja 2  
 Sisingamangaraja I 152  
 Sisingamangaraja XI 3  
 Sukarno (Presiden) 43  
 Tambunan, A.M. 44  
 Tichelman, G.L. 60  
 Tuan Sariburaja 15  
 Tuan Sorba Dibanua 15  
 Tuan Sorba Dijae 15  
 Tuan Sorba Dijulu 15  
 Tuan Sorimangaraja 15  
 Tuuk, H.N. van der 2,152  
 Vergouwen, J.C. 16  
 Verwiebe, E. 70  
 Wahab, Abdoel 69  
 Ward, N. 2,48,54,82,137  
 Zahari 69

## INDEKS NAMA TEMPAT

- Aceh 47,81,92,120,126  
 Aceh Selatan 121  
 Aceh Tengah 121  
 Aceh Tenggara 147  
 Adian Koting 161  
 Angkola 2,75,91  
 Asahan 10,11,13,58,59,75,79,81,  
 87,97,120,121,126  
 Bakara 3,29,105,152,154  
 Balige 36,43,111,112,119,154,161  
 Bandung 5,79,93,151  
 Bangka 70  
 Barus 2,3,47,48,58,75,91  
 Batang Kuis 120  
 Batangtoru 91  
 Belawan 93  
 Beringin 120  
 Bila 2  
 Binjai 93  
 Brastagi 91  
 Bukit Barisan 37,39,47  
 Dairi 3,16,55-58,75,91,93,  
 120,146,147  
 Dataran Tinggi Batak 38  
 Dataran Tinggi Karo 38  
 Dataran Tinggi Toba 6,7,9,29,38,  
 39,47,99,121  
 Deli Serdang 10,11,13,59,79,81,  
 87,97,121,126  
 Doloksanggul 10,12,62,91,93,  
 110,161  
 Galang 120  
 Habinsaran 36,161  
 Halmahera 77  
 Harian 128,161  
 Hessa 97  
 Humbang 10,31,34,35,40,41,47,  
 56,57,83  
 Hurlang 2,40  
 Huta Ginjang 116,152  
 Huta Gurgur 114  
 Huta Namora 104,105,114  
 Hutabolon 152,154  
 Irian Jaya 93  
 Jakarta 5,73,79,93,99,100,  
 104,112,122,151  
 Jangga Dolok 119  
 Jawa 70,79,93,132  
 Jawa Tengah 79  
 Kabanjahe 91  
 Kalimantan 70,93,99  
 Kampung Galungan 45  
 Karo (Tanah Karo) 16,126  
 Kisaran 93,97  
 Kualuh 2  
 Kutacane 91  
 Labuhan Batu 43,79,81,120  
 Laguboti 62,161  
 Langkat 81,126  
 Lintongnihuta 10,12,47,62,99,110  
 London 2  
 Lubuk Pakam 93,120  
 Lumban Baringin 3  
 Lumban Julu 47  
 Lumban Julu 107,127,161  
 Lumban Purba 29  
 Lumban Suhi-suhi 43  
 Lumut 91  
 Makasar 79  
 Mandailing 2,75,91  
 Medan 5,10,12,13,73,81,87,88,91,  
 93-101,111,112,122,124,126,  
 147,151,154  
 Merauke 141  
 Minangkabau 5  
 Mojokerto 77  
 Morotai 77  
 Muara 105,128,154,161

- Natal 75  
 Negeri Toba 125  
 Onan Ganjang 161  
 Padang 2,75,79,151  
 Padang Lawas 2  
 Padang Sidempuan 72,91  
 Pagar Alam 77  
 Pahae Jae 161  
 Pahae Julu 161  
 Pakanbaru 77  
 Pakkat 161  
 Palembang 79  
 Palipi 127,128,161  
 Pangakalan Berandan 93  
 Pangaribuan 2  
 Pangurusan 43,62,91,128,154,161  
 Pansurnapitu 3  
 Panti 120  
 Parlilitan 99,161  
 Pematang Siantar 70,73,111,112,  
 122,124,147,151  
 Percut Sei Tuan 120  
 Pinto 114  
 Porsea 36,107,127  
 Prapat 152-154  
 Rantau Prapat 93  
 Rao 120  
 Rianiate 43  
 Riau 99  
 Rundeng 77  
 Sabang 141  
 Samosir (Pulau Samosir) 10,40-47,  
 49,56,57,62,83,91,99,101, 127  
 Sarulla 108  
 Serbangan 97  
 Serdang 120  
 Sianjur Mula-mula 1  
 Siantar Sawah 121  
 Sibaringbing 113  
 Sibolga (Teluk Sibolga) 2,3,72,75,  
 91,93,126  
 Siborong-borong 29,73,91,93  
 Sidikalang 75,77,91,93,121  
 Sigotom 2  
 Sihusapi Uruk 114  
 Sijamapolang 113  
 Silaen 62,161  
 Silando 116  
 Silindung (Rura Silindung) 2,3,35,  
 46,53,54,56,57,82,83,137  
 Simalungun 3,55,57,58,75,81,91,  
 93,97,120,147  
 Simanindo 10,12,62,99,110,  
 127,128,161  
 Simarmata 45  
 Simatupang 105,107  
 Singapura 70,77  
 Singkil 75,76  
 Sipahutar 2  
 Sipirok 2  
 Sipoholon 3,46,127,161  
 Siriaria 116  
 Sulawesi 70  
 Sumatera 79,93,132  
 Sumatera Barat 147  
 Sumatera Timur 43,65,66,69,76,86,  
 113,120,125,126,141,147  
 Sumatera Utara 75,76,79,92,103,  
 110,111,121,126-128,145,146  
 Sungai Kepayang 43  
 Sungai Lama 97  
 Sungai Lebah 43  
 Surabaya 77,79,93  
 Tanah Alas 3,56-58,75,76,81,  
 97,120,126  
 Tanjung Morawa 80  
 Tanjung Pura 93  
 Tarutung 72,91,150,161  
 Tebing Tinggi 93  
 Tele 91  
 Toba Holbung 36,47,53,56,57,  
 62,82,83  
 Tomok - 152,154  
 Tuktuk Siadong - 152,154

## INDEKS POKOK-POKOK

- Adat (istiadat) 1,2,3,27,29,59,156  
 Agama suku (Batak) 1  
 Bagi hasil (bola pinang) 19,104  
 Batak Angkola 16,125  
 Batak Karo 16,125  
 Batak Mandailing 16,125  
 Batak Pakpak Dairi 16,125  
 Batak Simalungun 16,125  
 Batak Toba 3-9,11,15,16,18,19,  
 27,29,47,55,57,58,70,75,77-79,  
 83,88,91,93,95,97,109,112,  
 124-126,131,134,137,139,159  
 Batalyon Barus 79  
 Batalyon Bedjo 79  
 Batalyon Malau 79  
 Bona Pasogit 9,12,13,18,77,  
 78,95,98,116-119,125,142,143,145  
 Bottom up planning 147,161  
 Bungkas 113  
 Carrying capacity 47  
 Daerah tak Peduli 86  
 Dalihan Na Tolu 18  
 Dinamika Sosial 149  
 Dondon 19  
 Faktor Ekonomi 82,85,87,88,  
 90,141  
 Faktor Fisik Geografis 29,139  
 Faktor Penarik 7,80,88,144  
 Faktor Pendidikan 65,85,140  
 Faktor Pendorong 7,52,81,144  
 Faktor Politik 75  
 Faktor Sosial Demografi 52,139  
 Gabe (hagabeon) 7,21,27,52,82,83,  
 139,143  
 GAIB 78  
 GBHN 27  
 Gemeinschaft 29  
 Golat (tano golat, pargolat) 18,20,  
 52,53,60,118  
 Gyugun 77,78,141  
 Hadiah Revolusi 79  
 Harajaon 20,52  
 Heiho 77,78,141  
 HIK 69,78  
 HIS 121,151  
 HKB 85,123  
 Huta sabungan 21  
 Identitas 122,124  
 Ikatan spritual 102  
 Inang pengasuh 124  
 Intensifikasi 87  
 Irigasi sederhana 76  
 Kantong-kantong kemiskinan 146  
 Kantong-kantong pembaharuan 146,  
 158  
 Kaum tani (petani, para petani,  
 rumah tangga petani) 37,58-61,  
 76,81,86,97,98,102,104,110,113,  
 115,120,140,142,147-149  
 Kaum terdidik 55,58,65,72,81,  
 102,109,113,138,143,148,149  
 Kebutuhan subsisten 41  
 Ketinggalan di bidang industri 111  
 Kemiskinan kultural 119  
 Kemiskinan manusiawi 146  
 Kemiskinan material 146,148  
 Kepala rodi 76  
 Laskar Rakyat 78  
 LKMD 161  
 LMD 161  
 Lobu 114  
 Lulu anak lulu tano 27,52,83,90,  
 103,139  
 Lumban 21,22  
 Maju (hamajuon) 66,70,75,84,123  
 Mangalului jampalan nalomak 22,  
 24,74

- Mangombo 22,24  
 Manjae 17,19,21,140  
 Manombang (panombang) 22, 23,120  
 Mardua huta 113,120  
 Marjajo (parjajo) 24,99,101  
 Marjalang 22,23  
 Marlompong 22,23  
 Marpuri-puri mago 99  
 Marrengge-rengge 24  
 Marserak 6,21,22,25  
 Martabe (Marsipature Hutana Be) 161,162  
 Masa kolonial 6,31,34,76, 85,93,111  
 Masiampapaga nalomak 22,24,74, 74,103  
 Masyarakat agraris 27  
 Mengungsi 81  
 Miskin (kemiskinan, pemiskinan) 5, 59,65,71,82,84,85,98,104, 105,109,115,123,140,146,149,158  
 Missi Budaya 5  
 Mobilitas sosial 65,95,149  
 Mora (mamora, hamoraon) 7, 21,22,71,82,83,85,90,118,122, 137,141,143,148  
 Motip (motip-motip) 11,16,24  
 MULO 69,121,151  
 Nandang marimbar tano hamatean 118  
 Negara Sumatera Timur 79  
 Opsusdu Maduma 146  
 Pago-pago 116  
 Paisolat 103,104,116,142  
 Pandudukan Jepang 46,77,120,126  
 Panjaean 19,59,140  
 Parripe 20,60  
 Parserakan (tano parserakan) 9-12,74,98,109,115-117,143,146, 151,161  
 Partungkoan 161  
 Pauseang 19,59,140  
 Pelarian tenaga kerja terdidik 109,140  
 Pelarian tenaga potensial 71,149  
 Pembebasan tanah 108  
 Pembukaan jalan 91,92  
 Pemusnahan hutan (penggundulan hutan) 47,156  
 Pendidikan asli pribumi 65  
 Pendidikan Barat 65,140  
 Penghulu 76  
 Pergeseran hak milik 106  
 Pergeseran penduduk 81,103  
 Perladangan berpindah 48  
 Perpecahan lahan pertanian 59,63  
 Perpencaran lahan pertanian 59,63  
 Perpindahan dari desa ke desa 89  
 Perpindahan menetap (perpindahan permanen) 23-25,113  
 Perpindahan musiman 25  
 Perpindahan penduduk 4,6, 7,24,35,36,52,56,83,91,93,95,96, 102,103, 107,112,126,128,133, 135,141-143,147  
 Perpindahan sirkuler 25  
 Pertambahan penduduk 3,36,52, 56,82,83,137,147  
 Pertumbuhan alamiah 36  
 Peta kemiskinan 110,145,146,157  
 Petani gurem (petani kecil) 61, 62,80  
 PGHB 123  
 Pionir (pemukim pionir) 7,76,120  
 Politik (faktor politik, peristiwa politik) 75-77,81  
 PRRI 81  
 Raja huta 20-22,77,85,121,137  
 Raja Ihutan 76  
 Ranto (mangaranto, pangaranto) 22,23  
 Revolusi Kemerdekaan 78, 85,127,141

RMG 3,66,69,138,149  
 Rodi 91  
 Sahala (hasahalaon) 7,21,52,65,  
 66,140,144  
 Sahala harajaon 21,70  
 Sahala hasangapon 21,70  
 Sangap (hasangapon) 7,21,27,  
 71,72,77,82,83,85,90,122,137,  
 143,148  
 Sebelum kolonial 46  
 Sebelum Perang Dunia Kedua 40,  
 46,110,120,151  
 Sektor informal 90,99,101,102  
 Sidapot solup na ro 29  
 Silua (pelean) 159,162  
 Sosor 21,22  
 Talian (partalian) 19  
 Tanah Adat 108,140,155,156  
 Tanah Batak (Tano Batak, Negeri  
 Batak) 1,6,49,53,65,85,152  
 Tarulang (bera) 52,53,66,106,  
 114,116  
 Tekanan Ekonomi 85  
 TNI 78,79  
 Tokoh informal 160,161  
 Top down planning 147  
 Tugu (pembangunan tugu) 116,118,  
 119,142  
 Uang Adat (uang pindah) 77  
 Urbanisasi 104,114  
 Yong Batak 124  
 3 H 7,27,139,144  
 4 H 7,139,144  
 Revolusi Kemerdekaan 78,  
 82,127,141

Purungkuon 161  
 121,161  
 9-12,74,98,109,112-117,143,146,  
 22,23  
 Paretahan (ano paretakan)  
 Partipe 20,60  
 Pajanan 19,59,140  
 Parobukan Jelang 46,77,120,126  
 Pansol 103,104,116,142  
 Pago-pago 116  
 Opusda Madura 146  
 Negara Sumatera Timur 79  
 118  
 Nibang marimbar tano hamatan  
 MULO 60,121,131  
 Moip (moip-moip) 11,16,24  
 137,141,143,148  
 21,22,71,82,83,85,90,118,122,  
 102,109,112,123,140,146,149,128  
 Misi Budyas 2  
 Miska (kemiskinan, pemiskinan) 2,  
 39,63,71,82,84,85,98,104,  
 105,107,112,113,140,146,149,128  
 Masyarakat agraris 27  
 74,103  
 Matakmpayars nalomak 22,24,74,  
 82,93,111  
 Masa kolonial 4,78  
 161,162  
 Marab (Marabatur Hutana Bo)  
 Mararak 6,21,22,23  
 Marangg-terugg 24  
 Marbut-puri margo 99  
 Marhomong 22,23  
 Marjang 22,23  
 Marjo (parjo) 24,99,101  
 Marub hut 113,120  
 23,120  
 Mandang (panomangan) 22  
 Manja 17,19,21,140  
 Mangando 22,24